



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2010-2015**



PULAU PUNJUNG, 2010

BUPATI DHARMASRAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2010 – 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010, Nomor : 0199/M PPN/04/2010, Nomor: PMK/95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
-

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 26);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 27);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 29);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2010 – 2015**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Dharmasraya dan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja serta Kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
17. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
18. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
20. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010- 2015.
- (2) RPJMD Tahun 2010-2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. Penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan mempertimbangkan RPJPD Dharmasraya;
 - b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Maksud RPJMD Tahun 2010-2015 adalah untuk memayungi serta memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat .

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan RPJMD Tahun 2010-2015 adalah sebagai pedoman dalam:

- a. menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan lima tahunan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah; dan
- b. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan RKPD;

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup RPJMD Tahun 2010-2015 meliputi Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan serta Prioritas dan Program Strategis Bupati disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD Tahun 2010-2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur bagi penilaian kinerja Bupati pada akhir masa jabatan.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Pasal 6

- (1) Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menjabarkan RPJMD ini ke dalam Renstra SKPD tahun 2010 – 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun dijabarkan dalam bentuk Renja Tahunan SKPD.

Pasal 7

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap tahun dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dengan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD setiap tahun.

Pasal 8

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III	: Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB IV	: Analisis Isu-isu Strategis
BAB V	: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
BAB VI	: Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VII	: Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
BAB VIII	: Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
BAB IX	: Penetapan Indikator Kinerja Daerah
BAB X	: Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

- (2) Rincian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan RPJMD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan perencanaan pembangunan daerah, Bupati yang sedang menjabat, pada tahun terakhir masa jabatannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal

BUPATI DHARMASRAYA,

H. ADI GUNAWAN

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

H. BUSRA, S.H.

Pembina Utama Madya

NIP. 19540204 198003 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN

NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2010 – 2015

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Perencanaan Pembangunan Daerah perlu adanya kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bhakti Kepala Daerah terpilih, yang disusun berdasarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan memperhatikan kemampuan / kapasitas keuangan Daerah.

RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, kondisi perekonomian daerah, dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Kurun waktu RPJMD adalah 5 (lima) tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, namun untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah pada tahun terakhir periode 2010-2015, maka Bupati terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD melalui mekanisme perubahan APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam upaya mendapatkan RPJMD yang dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun, maka penyusunannya dilakukan secara komprehensif dan lintas pemangku kepentingan pembangunan. Yang tahapannya sebagai berikut :

Pertama, Penyiapan rancangan awal RPJMD yang memuat gambaran awal dari jabaran visi, misi, dan program Bupati terpilih.

Kedua, Penyiapan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) bertujuan untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, agar selaras dengan program prioritas Bupati terpilih.

Ketiga, Penyusunan Rancangan RPJMD merupakan upaya mengintegrasikan rancangan awal RPJMD dengan Renstra-SKPD yang menghasilkan rancangan RPJMD.

Keempat, Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) jangka menengah daerah, guna memperoleh berbagai masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan atas rancangan RPJMD.

Kelima, Penyusunan Rancangan akhir RPJMD dimana seluruh masukan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah menjadi masukan utama penyempurnaan Rancangan RPJMD menjadi Rancangan Akhir RPJMD.

Keenam, Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud RKPD dan APBD tahun pertama adalah RKPD dan APBD tahun 2016, Bupati terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBD.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahunCukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 32



KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran visi dan misi Bupati Dharmasraya terpilih dimana dokumen perencanaan ini akan menjadi acuan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan yang dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman rencana strategis Satuan kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Sesuai dengan Visi Kabupaten Dharmasraya, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Dharmasraya yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya, adil, dan sejahtera pada tahun 2015”, memuat 3 (tiga) misi utama dan 6 (enam) agenda pembangunan daerah dengan tujuan, sasaran, serta prioritas pembangunan yang jelas.

Terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyusun dokumen RPJMD, dan Pemerintah Daerah berharap seluruh masyarakat Dharmasraya dapat membantu dalam implementasi dan pengawasannya.

BUPATI DHARMASRAYA,

Ir. H. ADI GUNAWAN, MM



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-6
1.5 Maksud dan Tujuan	I-7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-27
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-48
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-2
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-6
3.3 Kerangka Pendanaan	III-9
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.2 Isu Strategis	IV-22
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	V-1
5.1 Visi	V-1
5.2 Misi	V-2
5.3 Tujuan Pembangunan Daerah	V-3
5.4 Sasaran Pembangunan Daerah	V-4
5.5 Agenda Pembangunan Daerah	V-4
5.6 Prioritas Pembangunan Daerah	V-6
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI-1
6.1 Strategi Pembangunan Daerah	VI-1
6.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dharmasraya.....	VI-3
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII-1
7.1 Bidang Ekonomi	VII-1
7.2 Pembangunan Sosial dan Sumberdaya	VII-8
7.3 Pembangunan Hukum dan Tata Pemerintahan	VII-13
7.4 Pembangunan Agama dan Budaya	VII-17
7.5 Pembangunan Sarana dan Prasarana	VII-18
7.6 Kebijakan dan Program Pembangunan Tata Ruang	VII-19



BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	VIII-1
BAB VIII	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX-1
BAB IX	PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN	X-1
	10.1 Kaidah Pelaksanaan	X-1
	10.2 Perencanaan Program Transisi	X-2



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik, selanjutnya Pemerintah Daerah sudah harus menetapkan RPJMD melalui Peraturan Kepala Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik, Pemerintah Daerah sudah harus menetapkan RPJMD, melalui Peraturan Daerah. RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015, disusun dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang tersebut.

Ketentuan tentang perencanaan pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 150 ayat (3) huruf e, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Berdasarkan RPJM Daerah tersebut kepala daerah menyusun RKPD untuk jangka waktu satu tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat. Setelah RPJM Daerah ditetapkan, satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana strategis (Renstra SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, bersifat indikatif, baik yang akan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015. RPJMD ini akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan segenap pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan.



1.2. DASAR HUKUM

Landasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010, Nomor : 0199/M PPN/04/2010, Nomor: PMK/95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 26);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 27);



24. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 29);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 30).

1.3. HUBUNGAN RPJM DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

RPJM Daerah merupakan bagian dari atau satu sub sistem dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, RPJMD Kabupaten Dharmasraya disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJM Nasional serta berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Barat, RPJP Nasional, RTRW Daerah, RTRW Provinsi Sumatera Barat dan RTRWN. Selanjutnya RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPД tahunan dan Restra SKPD.

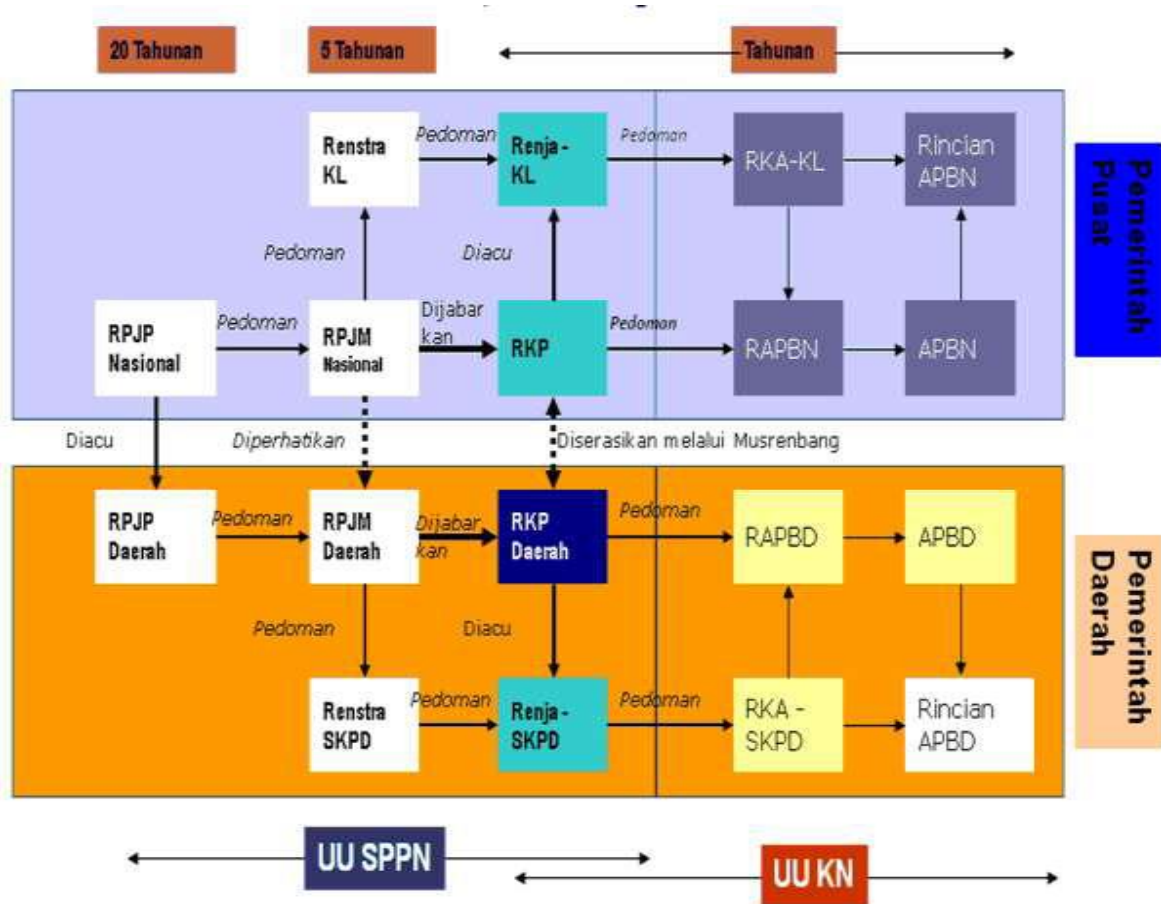
Secara teknis hubungan RPJM Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dijelaskan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berdasarkan ketentuan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tersebut, Penyusunan RPJM Daerah harus memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2015 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah secara langsung 30 Juni 2010. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya juga harus memperhatikan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2029 dan RTRW Kabupaten Dharmasraya (masih dalam proses penyusunan), sehingga diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010–2015 tidak bertentangan dengan pemanfaatan ruang. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya secara teknis menurut Permendagri No. 54 Tahun 2010 dapat disajikan dalam gambar 1.1.



RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010–2015 akan menjadi acuan penyusunan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta, serta Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Gambar 1.1
Hubungan RPJMD Kabupaten Dharmasraya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015 ini disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan RPJMD dengan Dokumen lainnya, Sistematika Penulisan serta Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat tentang aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat tentang kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini memuat tentang permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis Kabupaten Dharmasraya.

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya lima tahun kedepan.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dharmasraya lima tahun ke depan.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

Berisi tentang indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan tiap tahun.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Berisi tentang Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Dharmasraya 2010-2015.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KENDALA PELAKSANAAN

Berisi tentang gambaran kedudukan dan peran RPJMD dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan syarat keberhasilan pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Dharmasraya serta pedoman program-program transisi tahun 2011 .



1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, agar kegiatan pembangunan daerah Tahun 2010 - 2015 dapat menjawab kebutuhan daerah serta dapat meminimalkan permasalahan yang ada dalam mewujudkan *Masyarakat Dharmasraya yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya, Adil dan Sejahtera pada tahun 2015*.

RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015 bertujuan antara lain :

1. Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan Daerah Tahun 2010-2015 dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati;
2. Adanya konsistensi perencanaan dan prioritas program/kegiatan tahunan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2010-2015
3. Untuk menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan selama lima tahun, agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah Dharmasraya;
4. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan prioritas program/kegiatan tahunan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2010-2015;
5. Menjamin kesinambungan perencanaan dan prioritas program Tahun 2010-2015 dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah;
6. RPJMD adalah sebagai dasar evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan pada periode lima tahun tersebut.

Dengan tersusunnya RPJMD Kabupaten Dharmasraya, akan memberikan gambaran mengenai kemana Kabupaten Dharmasraya akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

2.1.1. Luas dan Batas Geografis Wilayah

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi 00°48'25,367"- 1°41'40,269" LS dan 101°8'32,52"-101°53'30,166"BT. Kabupaten Dharmasraya terletak pada wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau yang dilewati jalur Jalan Lintas Tengah Sumatera.

Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Perda No 4 Tahun 2009 yaitu 2.961,13 Km² (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil digitasi citra spot 5 Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 302.599 Ha . Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan, jumlah kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dimekarkan dari 4 kecamatan menjadi 11 Kecamatan. Dengan dihapusnya sistem pemerintahan desa, pemerintah yang berada setingkat dibawah kecamatan adalah nagari, dan selanjutnya dibawah nagari adalah jorong. Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari terdapat sebanyak 48 nagari. Pada Tahun 2009 dikeluarkan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari. Dalam Perda tersebut terdapat beberapa nagari yang dimekarkan, dari 48 nagari menjadi 52 nagari dan dengan 260 jorong.

2.1.2. Batas Wilayah Administratif

Secara administratif, wilayah Kabupaten Dharmasraya berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi,
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi,
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Wilayah administrasi Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 2.1** dan **Gambar 2.1**.



Tabel 2.1
Luas Wilayah, Banyaknya Nagari dan Jorong Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 – 2010

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Nagari		Jorong	
			2005 - 2008	2009 - 2011	2005 - 2008	2009 - 2010
1	Sungai Rumbai	5106	6	4	26	24
2	Asam Jujuhan*	48541	-	5	-	22
3	Koto Besar*	56057	-	7	-	32
4	Koto Baru	22120	7	4	38	26
5	Koto Salak**	12145	-	5	-	27
6	Padang Laweh**	6062	-	4	-	17
7	Tiumang**	13443	-	4	-	17
8	Sitiung	12457	3	4	20	22
9	Timpeh***	32301	-	5	-	21
10	Pulau Punjung	44316	5	6	25	31
11	IX Koto****	50050	-	4	-	21
Kab. Dharmasraya		302599	21	52	109	260

Sumber : Perda Kabupaten Dharmasraya No.4 Tahun 2009

Ket :
* : Pemekaran dari Kecamatan Sungai Rumbai
** : Pemekaran dari Kecamatan Koto Baru
*** : Pemekaran dari Kecamatan Sitiung
**** : Pemekaran dari Kecamatan Pulau Punjung

2.1.3. Kondisi Fisik Dasar

2.1.3.1. Topografi dan Kelerengan

Wilayah Kabupaten Dharmasraya berada pada kawasan perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada ketinggian 100-1500 meter diatas permukaan laut (dpl). Ketinggian dari permukaan laut mulai dari 100 meter dpl pada bagian kawasan yang mengarah ke sebelah timur, hingga 1.500 meter dpl pada bagian kawasan yang menjadi bagian dari gugusan Bukit Barisan di sebelah barat. Kelerengan lahan bervariasi dari datar, landai sampai sangat curam. Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis terhadap Peta Digitasi Citra Spot 5 Provinsi Sumbar (2007), diperoleh data kelerengan lahan sebagai berikut :

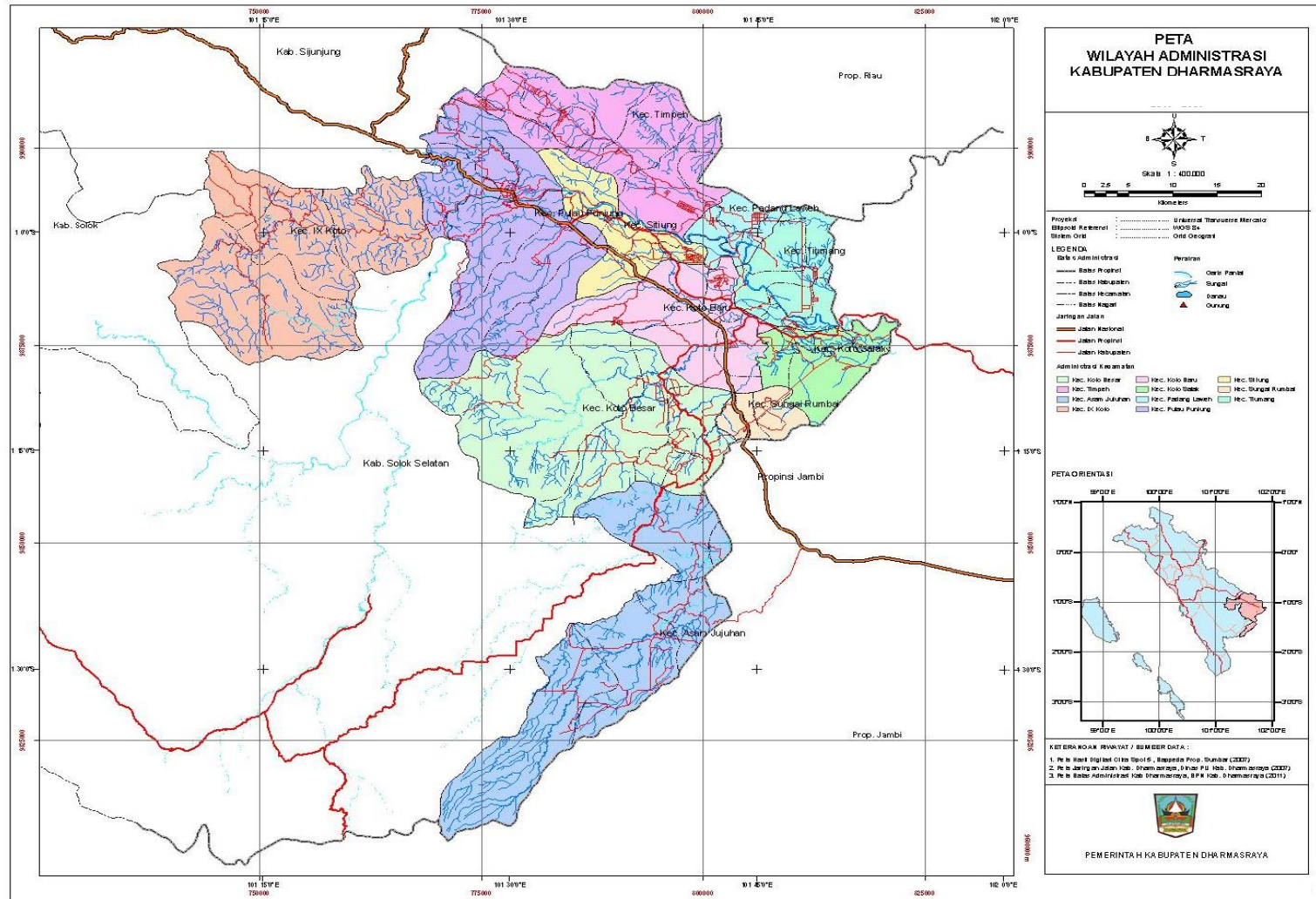
Tabel 2.2
Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya

Klasifikasi Kelerengan Lahan	Lereng (%)	Luas	
		(Ha)	(%)
Datar	0-3	23155	7,65
Agak Landai	3-8	68786	22,73
Landai	8-15	72339	23,91
Agak Curam	15-25	74730	24,70
Curam	25-40	29023	9,59
Sangat Curam	40-60	34567	11,42
Jumlah	Luas	302599	100,00

Sumber : Peta Digitasi Citra Spot 5 Provinsi Sumbar Tahun 2007



Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Dharmasraya





2.1.3.2. Geomorfologi

Terdapat 5 sistem morfologi di wilayah Kabupaten Dharmasraya yaitu:

1. Sistem aluvial
Jalur Aliran Sungai dengan topografi datar; daerah cekungan dengan topografi datar; dataran antar perbukitan dengan topografi agak landai.
2. Sistem dataran
 - a. Teras sungai (teras sungai bawah dengan topografi datar; teras sungai tengah dengan topografi landai; teras sungai atas dengan topografi agak curam)
 - b. Dataran (dataran berombak bergelombang, dataran bergelombang dan dataran perbukitan)
3. Sistem perbukitan
 - a. Perbukitan terpisah;
 - b. perbukitan bergelombang;
 - c. perbukitan agak tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang;
 - d. perbukitan tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang;
 - e. perbukitan tertoreh dengan lereng bergelombang sampai curam;
 - f. perbukitan sangat tertoreh dengan lereng bergelombang sampai curam;
 - g. Perbukitan karst paralel tertoreh
4. Sistem Pergunungan
Pergunungan sangat tertoreh
5. Sistem vulkan
 - a. Lereng atas vulkan dengan topografi sangat curam
 - b. Lereng tengah vulkan dengan topografi curam
 - c. Lereng bawah vulkan dengan topografi agak curam
 - d. Dataran vulkan bergelombang dengan topografi landai

2.1.3.3. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Batanghari Hulu dan tengah yang merupakan bagian dari DAS Batanghari. Wilayah Kabupaten Dharmasraya dialiri oleh banyak sungai/batang, dan salah satu sungai yang menjadi bagian dari sistem hidrologi Sumatera Barat dan Jambi adalah Sungai Batanghari. Saat ini Sungai Batanghari masih menjadi tempat berlangsungnya kegiatan pasar hasil bumi dari wilayah Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan, yang selanjutnya dijual oleh para pedagang di Kota Jambi dan Kuala Tungkal. Selain Sungai di Kabupaten Dharmasraya juga terdapat beberapa embung yang dijadikan sumber air.

2.1.3.4. Klimatologi

Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1951) wilayah Kabupaten Dharmasraya termasuk ini tergolong pada tipe iklim A (sangat basah). Sementara menurut zona agroklimat L.R. Oldeman termasuk pada zona iklim B1 dengan bulan basah 7-9 bulan dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan.



Curah hujan sebagian wilayah Kabupaten Dharmasraya tergolong tinggi yaitu lebih dari 200 mm/bulan.

Suhu udara berkisar antara 21°C hingga 33°C, dengan tingkat kelembaban antara 70 hingga 80%. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2006-2010 dapat dilihat curah hujan yang paling tinggi terdapat pada tahun 2007 dengan curah hujan sebesar 14.684 mm/tahun dengan banyak hari hujan 361, dari kurun waktu 5 tahun terakhir curah hujan rendah terdapat pada tahun 2009 mengalami penurunan curah hujan yaitu 6412,2 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 398 hari.

2.1.3.5. Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Dharmasraya ini terdiri atas 8 jenis tanah yaitu Aluvial, Kambisol, Gleisol, Nitosol, Latosol, Podsolik, Andosol, dan Litosol. Kesetaraan kedelepan jenis tanah tersebut dirinci atas satuan peta tanah (SPT) berdasarkan karakteristik: kelerengan, satuan fisiografi/bentuk wilayah, dan bahan induk tanah.

2.1.3.6. Geologi

Berdasarkan data informasi tematik yang terkumpul dari penafsiran citra landsat dan pengamatan lapangan serta Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2001, maka diperoleh data-data yang dapat diungkapkan untuk gambaran tentang sebaran litologi (formasi batuan dan struktur geologi). Formasi batuan di wilayah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari :

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Aluvium | 7. Batuan Gunung Api |
| 2. Batuan Intrusi | 8. Batuan Metamorf |
| 3. Formasi Barisan | 9. Formasi Kasai |
| 4. Formasi Kuantan | 10. Formasi Palepat |
| 5. Formasi Rantauikil | 11. Formasi Sangkarewang |
| 6. Formasi Telisa | |

2.1.4. Penggunaan Lahan

Berdasarkan peta citra satelit SPOT 5, di Kabupaten Dharmasraya terdapat lahan pertanian yang teridentifikasi jelas, hutan dengan vegetasi primer, hutan yang bercampur dengan kebun rakyat, dan hutan tanaman.

1. Lahan Pertanian

Luas lahan pertanian di Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan seluas 99.314 Ha (33,52% dari luas wilayah). Lahan pertanian yang dominan di Kabupaten Dharmasraya yaitu perkebunan (sawit dan karet) seluas 89.647 Ha (30,9%). Lahan pertanian tanaman pangan lahan basah/persawahan seluas 9.652 Ha (1,89%) yang terdiri atas lahan sawah beririgasi teknis dan lahan sawah tadah hujan. Lahan pertanian tanaman pangan lahan kering seluas 3.973 Ha (1,34%).



2. Hutan

Luas tutupan lahan hutan di Kabupaten Dharmasraya 172.707 Ha (58,29% dari luas wilayah). Tutupan hutan dengan vegetasi primer di Kabupaten Dharmasraya seluas 7290 Ha dan hutan dengan vegetasi sekunder (yang umumnya bercampur dengan kebun rakyat) seluas 157.836 Ha, dan hutan tanaman seluas 6115 Ha.

3. Permukiman

Luas kawasan permukiman 5.07 Ha (1,71% dari luas wilayah). Kawasan permukiman dominan berkembang di arah timur dan tenggara wilayah yang meliputi Kecamatan Koto Salak, Koto Besar, Tiumang, Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh, dan Timpeh. Sebagian perkembangan permukiman didorong oleh perkembangan permukiman transmigrasi yang sudah dimulai sejak tahun 1970-an.

Selain itu berdasarkan peta citra spot 5 Provinsi Sumatera Barat tahun 1997 terdapat tutupan lahan lain yaitu semak belukar dan perairan seluas 20.805 Ha (7,02%).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 2.2**.

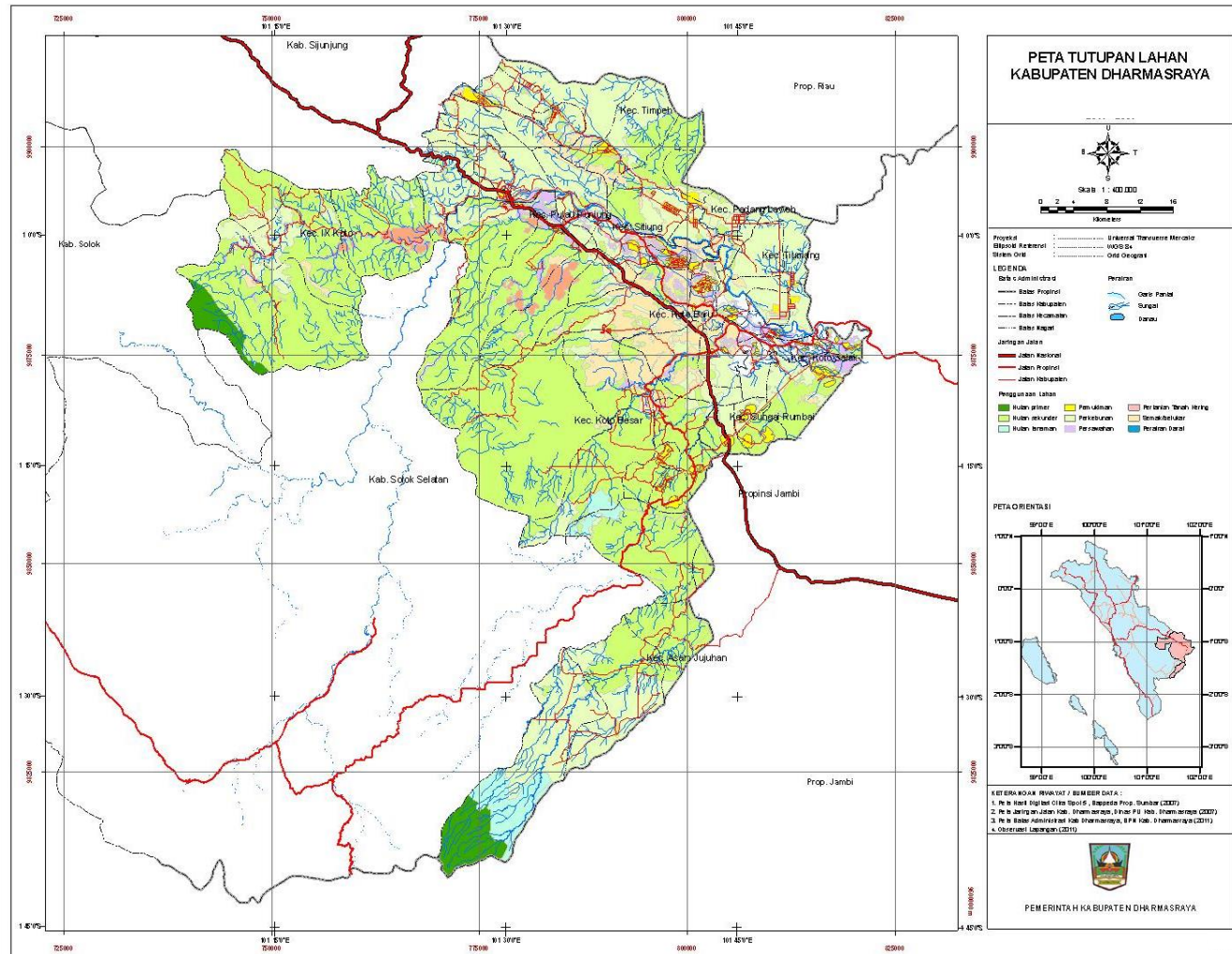
Tabel 2.2
Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya

No	Pemanfaatan Lahan	Luas Eksisting	
		(Ha)	(%)
1	Hutan		
	Hutan vegetasi primer	7.290	2,41
	Hutan vegetasi sekunder	157.839	52,16
	Hutan Tanaman	6.115	2,02
2	Permukiman	7.552	2,50
3	Perkebunan	89.647	29,63
4	Persawahan	9.652	3,19
5	Pertanian Lahan Kering	3.968	1,31
6	Semak/belukar	18.950	6,26
7	Perairan Darat	1.586	0,52
	Luas Total	302.599	100,00

Sumber : Peta Digitasi Citra Spot 5 Provinsi Sumbar Tahun 2007



Gambar 2.2.
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya





2.1.5. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi pengembangan sumberdaya alam yang besar di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini ditunjukkan dengan luas kawasan budidayanya yang terbesar didaratkan Provinsi Sumatera Barat dan proporsi luas kawasan lindung dengan budidaya terkecil diantara Kabupaten di Sumatera Barat. Posisi geografis wilayah yaitu termasuk kedalam kawasan hulu sampai tengah DAS Batang Hari dengan dibatasi bukit barisan yang membentang pada arah barat menyebabkan besarnya peluang pengembangan sumberdaya alam Kabupaten Dharmasraya. Selain potensi pertanian perkebunan juga terdapat peluang pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah, budidaya perikanan darat, hortikultura buah-buahan dan hasil hutan serta pertambangan.

Komoditi-komoditi khas yang menjadi unggulan di Kabupaten Dharmasraya diantaranya dari sektor perkebunan, dan pertambangan industri. Potensi pengembangan Pertumbuhan ekonomi suatu daerah selama periode tertentu tidak terlepas dari perkembangan semua sektor yang ada. Perkembangan nilai tambah dari masing-masing sektor serta subsektor selama periode tertentu memberikan kontribusi dalam membentuk nilai tambah perekonomian daerah tersebut secara keseluruhan.

1. Pertanian Tanaman Pangan

Sektor pertanian tanaman pangan yang dominan di Kabupaten Dharmasraya adalah tanaman padi. Produksi padi tahun 2010 yaitu 50.544.72 ton yang terdiri dari padi sawah 49.206,72 ton dan padi ladang 1.338 ton dengan total luas sawah 9.165 ha dan luas panen 10.660 ha. Produksi padi terbesar terdapat di Kecamatan Sitiung yaitu 12.008,76 ha dengan produktivitas 4.58 ton/ha. Dilihat berdasarkan perkembangan produksi padi dari tahun 2006 – 2010 menunjukkan pertambahan yang sangat berarti yaitu sebesar 67,81%. Begitu juga dengan produktivitas padi di Kabupaten Dharmasraya pada 5 tahun terakhir (2006 – 2010) mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 produktivitas padi sebesar 5.52 ton/ha, sedangkan pada tahun 2006 hanya 3,83 ton/ha. Sementara luas sawah yang ada di Kabupaten Dharmasraya tahun 2010 yaitu 9.165 ha, sedangkan luas sawah tahun 2006 hanya 7.869 ha.

Tabel 2.3
Perkembangan Produksi Komoditi Padi

No	Tahun	Luas Sawah (Ha)	Produksi Padi (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	2006	7869	30120	3.83
2	2007	8559	34051	3.98
3	2008	9015	43401	4.81
4	2009	9165	48221	5.26
5	2010	9165	50545	5.52
% Peningkatan		16.47%	67.81%	30.55%

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Dharmasraya Tahun 2010

Tabel 2.4
Perkembangan Luas Sawah Berdasarkan Jenis Pengairan
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 - 2010

Jenis Pengairan	Luas Sawah (Ha)					% Pertambahan Dari 2006 - 2010
	2006	2007	2008	2009	2010	
Irigasi Teknis	3753	4247	5626	5776	5706	52.04%
1/2 Teknis	610	814	814	814	884	44.92%
Sederhana	253	308	469	469	469	85.38%
Desa/Non PU	485	542	1300	1300	1300	168.04%
Tadah Hujan	2768	2648	806	806	806	-70.88%
Total (Ha)	7869	8559	9015	9165	9165	16.47%

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2010

2. Tanaman Palawija

Jenis palawija yang banyak ditanam adalah jagung dan ubi kayu. Produksi jagung terbesar terdapat di Kecamatan Koto Salak sebanyak 1.872 ton, dan tanaman ubi kayu sebanyak 1.953 ton. Sedangkan tanaman palawija yang belum dioptimalkan dalam pengusahaanya adalah tanaman kacang hijau, kacang panjang, kedelai, kacang tanah dan ubi jalar. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data tahun 2010, produksi dari tanaman palawijaya ini masih rendah.

3. Tanaman Holtikultura

Tanaman hortikultura yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari tanaman sayuran dan tanaman buah-buahan. Tanaman sayuran yang diusahakan di Kabupaten Dharmasraya antara lain cabe, terung dan ketimun. Diantara tanaman sayuran yang ada, cabe merupakan tanaman yang diusahakan hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya kecuali di Kecamatan Timpeh dan Kecamatan IX Koto. Berdasarkan data tahun 2010, produksi cabe di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 179,4 ton. Produksi cabe terbesar terdapat di Kecamatan Sitiung yaitu 54,6 ton. Sementara untuk terung terdapat di Kecamatan Sungai Rumbai, Koto Besar, Asam Jujuhan, Tiumang, dan Sitiung dengan produksi 96,2 ton, ketimun hanya terdapat di Kecamatan Koto Besar dan Tiumang. Dilihat berdasarkan data tahun 2006 - 2010 produksi masing-masing sayuran ini tidak tetap, ada yang mengalami penurunan dan ada juga yang mengalami peningkatan.

Buah-buahan yang diusahakan di Kabupaten Dharmasraya yaitu mangga, durian, jeruk, pisang, pepaya, duku, rambutan dan salak. Produksi buah-buahan yang terbesar tahun 2010 adalah durian yaitu 7.890,00 ton dan jeruk sebanyak 1.531,35 ton. Berdasarkan data tahun 2010, produksi mangga terbesar terdapat di Kecamatan Pulau Punjung. Durian, pisang, pepaya, duku terbanyak terdapat di Kecamatan Tiumang, dan rambutan terbanyak di Kecamatan Tiumang, jeruk di Kecamatan Sitiung, serta salak terbanyak di Kecamatan Sungai Rumbai.



4. Perkebunan

Terdapat 3 komoditi utama perkebunan yang menjadi unggulan di Kabupaten Dharmasraya, yaitu kelapa sawit, karet, dan kakao. Selain itu juga terdapat perkebunan rakyat berupa kelapa, kopi, pinang dan lada. Perkebunan kelapa sawit dikelola oleh perusahaan besar (inti) dan perkebunan rakyat pola PIR, serta swadaya murni masyarakat. Perkebunan karet dikelola oleh masyarakat yang dibangun melalui P3RSB dan TCSDP, sedangkan kakao banyak diusahakan oleh masyarakat dengan pola pekarangan. Salah satu potensi yang belum tergali dari sektor perkebunan adalah pembentukan pertanian multi-kultur yang dapat menopang ekonomi masyarakat apabila komoditi utamanya mengalami penurunan harga.

Produksi komoditi perkebunan setiap tahunnya cenderung meningkat terutama kelapa sawit, karet, coklat dan pinang. Keadaan ini didorong oleh investasi swasta dan semakin tingginya minat masyarakat terhadap pengembangan komoditas ini. Untuk perkebunan sawit dan karet terdiri dari perkebunan swasta nasional dan perkebunan rakyat. Komoditi perkebunan umumnya merupakan komoditi ekspor, sehingga peningkatan produksi mengakibatkan peningkatan ekspor. Untuk lebih jelasnya produksi komoditi perkebunan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 2.5** **Tabel 2.6** dan **Tabel 2.7**.

Tabel 2.5
Luas dan Produksi Tanaman Kelapa Sawit Perkebunan Besar
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 – 2010

No	Jenis Pengusahaan	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
1	Swasta Murni		152.460,00
	- Tanaman Menghasilkan	7.000,00	
2	Realisasi Kebun Inti		692.614,86
	- Tanaman Belum Menghasilkan	1.000,00	
	- Tanaman Menghasilkan	31.800,54	
3	Ralisasi Plasma		
	- Tanaman Menghasilkan	20.574,90	347.682,17
	2010	60.375,44	845.074,86
	2009	68.340,04	1.230.772,72
	2008	56.832,00	1.130.828,70
	2007	56.832,00	1.173.266,50
	2006	56.752,36	997.079,26

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011



Tabel 2.6
Perkembangan Komoditi Perkebunan Rakyat di Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2006 – 2010

No	Kecamatan	Kelapa Sawit					Karet					
		Luas Produktif (Ha)	Luas Belum Produktif (Ha)	Total Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Luas Produktif (Ha)	Luas Belum Produktif (Ha)	Luas Tidak Produktif (Ha)	Total Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Sungai Rumbai	5.067,50	1.268,40	6.335,90	82.204,49	16,22	6.478,00	2.253,00	1.258,50	9.989,50	6.789,83	1,05
2	Koto Besar											
3	Asam Jujuhan	2.705,50	662,20	3.367,70	45.563,65	16,84	3.434,00	1.278,00	654,50	5.366,50	2.747,20	0,80
4	Koto Baru	1.274,00	526,12	1.800,12	19.428,50	15,25	5.300,00	1.465,00	19,50	6.784,50	5.641,06	1,06
5	Koto Salak											
6	Tiumang	3.800,00	43,00	3.843,00	60.420,00	15,90	1.769,00	477,00	19,00	2.265,00	1.717,70	0,97
7	Padang Laweh											
8	Sitiung	8.614,00	1.294,14	9.908,14	133.999,39	15,56	3.350,00	338,00		3.688,00	3.457,72	1,03
9	Timpeh											
10	Pulau Punjung	3.691,00	364,50	4.055,50	66.438,00	18,00	8.213,00	1.882,00	82,00	10.177,00	7.884,47	0,96
11	IX Koto											
	2010	25.152,00	4.158,36	29.310,36	408.054,03	13,92	28.544,00	7.693,00	2.033,50	38.270,50	28.237,98	0,99
	2009	28.453,00	7.468,00	7.468,00	434.952,00	15,29	28.453,00	7.468,00	2.181,00	38.102,00	33.055,00	1,16
	2008	28.403,00	7.411,00	7.411,00	404.252,00	14,23	28.403,00	7.411,00	2.265,00	38.079,00	30.530,00	1,07
	2007	27.403,00	7.986,00	7.986,00	420.634,00	15,35	27.403,00	7.986,00	2.265,00	37.654,00	29.383,00	1,07
	2006	25.848,00	8.633,00	8.633,00	327.115,00	12,66	25.848,00	8.633,00	2.983,00	37.464,00	37.464,00	1,45

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

Lanjutan Tabel 2.7
Perkembangan Komoditi Perkebunan Rakyat di Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2006 – 2010

No	Kecamatan	Kakou				
		Luas Produktif (Ha)	Luas Belum Produktif (Ha)	Total Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Sungai Rumbai	178,65	170,48	349,13	151,89	0,85
2	Koto Besar					
3	Asam Jujuhan	31,75	8,00	39,75	30,54	0,96
4	Koto Baru	101,00	185,78	286,78	97,57	0,97
5	Koto Salak					
6	Tiumang	82,10	18,55	100,65	78,65	0,96
7	Padang Laweh					
8	Sitiung	197,40	200,97	398,37	186,14	0,94
9	Timpeh					
10	Pulau Punjung	61,37	457,23	518,60	58,87	0,96
11	IX Koto					
	2010	652,27	1.041,01	1.693,28	603,65	0,93
	2009	619,27	776,08	1.395,35	2.124,00	3,43
	2008	366,00	836,00	1.202,00	329,00	0,90
	2007	366,00	480,75	846,75	329,00	0,90
	2006	49,00	254,00	303,00	303,00	6,18

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

5. Peternakan

Berdasarkan data perkembangan tahun 2006 – 2010 populasi ternak selain unggas di Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan. Jenis ternak besar yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya tahun 2010, yang banyak populasinya adalah sapi yaitu 36.293 ekor, sedangkan populasi kerbau hanya 7.143 ekor, dan kambing sebanyak 11.804 ekor. Jika dilihat dari data per kecamatan, populasi sapi paling banyak terdapat di Kecamatan Sitiung yaitu 7.945 ekor dan Kecamatan Koto Besar sebanyak 7.331 ekor, sedangkan populasi kerbau terbesar terdapat di Kecamatan Pulau Punjung sebanyak 1.559 ekor dan Sitiung sebanyak 1.245 ekor. Untuk kambing populasi terbesar terdapat di Kecamatan Pulau Punjung yaitu 2.375 ekor.

Untuk lebih jelasnya produksi ternak di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 2.8** dan **Tabel 2.9**.



Tabel 2.8
Populasi, Pemotongan dan Produksi Daging Ternak Besar dan Ternak Kecil
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

NO	Kecamatan	Sapi			Kerbau			Kambing		
		Populasi (Ekor)	Pemotongan (Ekor)	Produksi Daging (Kg)	Populasi (Ekor)	Pemotongan (Ekor)	Produksi Daging (Kg)	Populasi (Ekor)	Pemotongan (Ekor)	Produksi Daging (Kg)
1	Sungai Rumbai	940	549	1.000.141	14			692	455	228
2	Koto Besar	7.331	178	35.646	687	4	868	948	451	22.550
3	Asam Jujuhan	893	47	8.562	626	9	1.952	603	15	750
4	Koto Baru	1.764	517	94.184	922	42	9.111	1.051	167	8.350
5	Koto Salak	3.150	218	39.714	626	43	9.328	748	138	6.900
6	Tiumang	3.661	36	6.558	391	1	217	1.011	27	1.350
7	Padang Laweh	1.197	63	11.477	73	7	1.518	749	68	3.400
8	Sitiung	7.945	270	49.187	1.245	9	1.597	1.189	21	16.538
9	Timpeh	4.133	123	23.683	223	5	1.085	1.578	2	100
10	Pulau Punjung	4.142	523	95.278	1.559	15	3.254	2.375	8	400
11	IX Koto	1.137	18	3.279	777			860	23	325
2010		36.293	2.542	1.367.709	7.143	135	28.930	11.804	1.375	60.891
2009		32.552	1.577	315.400	6.257	28	8.400	11.247	172	232.800
2008		27.874	604	120.800	8.547	279	69.750	8.730	547	190.550
2007		27.682	1.438	287.600	8.449	352	88.000	12.930	950	375.600
2006		26.577	1.199	232.326	8.201	645	64.444	11.713	490	296.770

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011

Tabel 2.9
Populasi dan Produksi Unggas di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

No	Kecamatan	Ayam Kampung		Ayam Petelur		Ayam Pedaging	Itik	
		Populasi (Ekor)	Produksi Telor (Kg)	Populasi (Ekor)	Produksi Telor (Kg)	Populasi (Ekor)	Populasi (Ekor)	Produksi Telor (Kg)
1	Sungai Rumbai	4.783	2.009			26.000	471	2.204
2	Koto Besar	7.598	3.191	3.500	22.680	48.900	1.215	5.686
3	Asam Jujuhan	3.261	1.370				163	763
4	Koto Baru	3.042	1.278			39.000	1.929	9.028
5	Koto Salak	6.090	2.558			6.240	4.620	21.622
6	Tiumang	7.448	3.128			600	3.137	14.681
7	Padang Laweh	4.710	1.978			16.500	733	3.430
8	Sitiung	8.114	3.408	21.000	136.080	169.000	870	4.072
9	Timpeh	15.444	6.486			8.400	1.714	8.022
10	Pulau Punjung	2.980	1.252			135.000	1.487	6.959
11	IX Koto	4.167	1.750			28.000	424	1.984
2010		67.637	28.408	24.500	158.760	477.640	16.763	78.451
2009		91.719	-	342.200	26.999		14.602	4.275
2008		93.293	-	96.200	-		13.293	-
2007		119.567	-	94.211	-		12.818	-
2006		147.294	92.813	140.819	90.883		10.485	61.262

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010



6. Perikanan

Perikanan yang banyak diusahakan masyarakat Kabupaten Dharmasraya adalah perikanan budidaya melalui budidaya kolam, budidaya sawah dan budidaya keramba. Dilihat dari produksi, produksi ikan terbesar di Kabupaten Dharmasraya adalah ikan budidaya kolam. Dilihat dari produksi ikan budidaya kolam dari tahun 2006 – 2010 mengalami peningkatan, begitu juga produksi ikan budidaya sawah dan budidaya keramba/sungai.

Kegiatan budidaya ikan terdiri dari kolam air tenang, kolam air deras, keramba, mina padi, jaring tancap dan keramba jaring apung. Budidaya ikan yang paling banyak diusahakan penduduk yaitu kolam air tenang dan keramba. Usaha perikanan kolam air tenang terdapat diseluruh kecamatan, dan usaha ikan keramba banyak terdapat di Kecamatan IX Koto. Usaha budidaya ikan keramba jaring apung banyak dikembangkan di Kecamatan Pulau Punjung. Kegiatan perikanan jaring tancap tangkap di Kabupaten Dharmasraya banyak terdapat di Kecamatan Sitiung.

Tabel 2.10
Produksi Benih Ikan
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

No	Kecamatan	Produksi (Ekor)		
		Nila	Mas	Lele
1	Sungai Rumbai			
2	Koto Besar	300.000		
3	Asam Jujuhan			
4	Koto Baru	1.000.000	900.000	30.000
5	Koto Salak			
6	Tiumang			
7	Padang Laweh			
8	Sitiung	200.000		
9	Timpeh			
10	Pulau Punjung	360.000		30.000
11	IX Koto		30.000	
Total		1.860.000	930.000	60.000

Sumber : Dinas Perternakan dan Perikanan Kab. Dharmasraya Tahun 2011

Tabel 2.11
Jenis Ikan dan Produksi Perikanan Budidaya
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

No	Kecamatan	Jenis Ikan (Ton)							Total (Ton)
		Nila	Mas	Lele	Gurame	Patin	Bawal	Lain-lain	
1	Sungai Rumbai	151,00	25,00	5,90	2,30	18,70	0,10	-	203,00
2	Koto Besar	405,00	53,16	7,00	3,10	16,30	1,10	-	485,66
3	Asam Jujuhan	6,00	1,00	-	-	1,00	-	-	8,00
4	Koto Baru	104,00	15,00	3,10	-	2,60	-	-	124,70
5	Koto Salak	56,00	15,00	1,50	-	1,50	-	-	74,00
6	Tiumang	53,00	6,00	-	-	2,00	-	-	61,00
7	Padang Laweh	6,00	3,00	-	-	-	-	-	9,00
8	Sitiung	294,62	15,00	2,00	2,50	3,00	1,30	0,50	318,92
9	Timpeh	43,00	8,00	-	0,25	1,60	-	-	52,85
10	Pulau Punjung	95,00	15,00	8,09	3,60	36,40	-	0,40	158,49
11	IX Koto	25,00	3,00	-	-	-	-	-	28,00
Jumah		1.238,62	159,16	27,59	11,75	83,10	2,50	0,90	1.523,62

Sumber : Dinas Perternakan dan Perikanan Kab. Dharmasraya Tahun 2010



7. Sektor Pertambangan dan Galian

Selain sektor perkebunan dan pertanian tanaman pangan potensi lain yang ada di Kabupaten Dharmasraya adalah pertambangan. Bahan galian yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari batu bara, bitumen padat, emas sekunder, bijih besi, perak, batu gamping, pasir kuarsa, batu gunung, tanah urug, tanah liat, sirtukil, mangan, dan suseki. Sedangkan potensi tambang yang potensial dikembangkan dan sudah mulai dieksploitasi dalam jumlah besar adalah :

- Batu Bara yang sudah dieksploitasi di Kecamatan Asam Jujuhan (PT. TBN, PT. SLN, KUD Sinamar Sakato dan PT CBI) dengan Produksi Tahun 2009 : 449.780,25 MT
- Batu Bara yang sudah dieksploitasi di Kecamatan Padang Laweh oleh PT PBA
- Batu Bara dalam tahap eksplorasi yaitu di Kecamatan Asam Jujuhan oleh CV. X Dareh, PT BSA dan PT IMR, di Kecamatan Padang Laweh yaitu PT PBM dan PT IMR dan di Kecamatan Timpeh oleh PT DAA
- Bijih Besi yang sudah dieksploitasi di Kecamatan Asam Jujuhan oleh PT TSS
- Mangan, masih dalam Proses Perijinan (Kec. Timpeh)
- Bitumen padat, masih dalam Proses Perijinan (Kec. Pd. Laweh)

8. Sektor Industri

Objek wisata alam di Kabupaten Dharmasraya yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu: Bendungan Batang Siat di Kec. Koto Besar, Air Terjun Sungai Suyiu di Kec. Asam Jujuhan, Telaga Baranang Siang Tarantang di Kec. Koto Baru, Pulau Cinta Pulau Mainan di Kec. Koto Baru, Pantai Guli-gulu Koto Baringin di Kec. Tiumang, Bumi Perkemahan Siguntur di Kec. Sitiung, Puncak Gunung Medan di Kec. Sitiung, Gua Gadang Bunga Tika Timpeh di Kec. Timpeh, Air Terjun Tujuh Tingkat Tabek di Kec. Timpeh, Puncak Timpeh di Kec. Timpeh, Air Terjun Timbulun Indah di Kec. Pulau Punjung, Bendungan Btg Mimpi Sei Dareh di Kec. Pulau Punjung, Bendungan Batu Bakawik di Kec. Pulau Punjung, Air Panas Sungai Belit di Kec. Pulau Punjung, Gua Cigak Kampung Surau di Kec. Pulau Punjung, Air Terjun Koto Silago di Kec. IX Koto Selaju Sampan Pulai di Kec. Sitiung, Air Terjun Sei Pinang di Kec. Timpeh, dan Danau Cinta di Kec. Koto Baru.

Objek situs cagar budaya Kerajaan Lama Dharmasraya yaitu:

- a). Kawasan Siguntur di Kec. Sitiung dengan objek situs: Candi Padang Roco, Situs Candi Pulau Sawah dan Situs Candi Bukik Awang Maombiak, Masjid Tua Siguntur, Rumah Gadang Kerajaan Siguntur, Makam Raja Siguntur, Situs Candi Rambahan, dan Pasengrahan. Untuk mendukung pengembangan kawasan, dibutuhkan pengembangan akses menuju kawasan dari arah barat kawasan perkotaan Pulau Punjung dan dari arah timur Sitiung dengan mengembangkan jalan dari Pulau Punjung menghubungkan sepanjang sisi Sungai Batanghari menuju kawasan cagar budaya terhubung dengan jalan lingkaran utara serta pembukaan akses jembatan wisata yang menghubungkan Sikabau dengan kawasan cagar budaya.



- b). Kawasan Koto Besar di Kec. Koto Besar dengan objek situs: Rumah Kerajaan Koto Besar, Makam Raja Koto Besar, Makam Syech Abdul Rahman Alif Ba, Makam Rajo Kuek Kuaso
- c). Kawasan Padang Laweh di Kec. Padang Laweh dengan objek situs: Rumah Kerajaan Padang Laweh, Rumah Kerajaan Tiang Panjang, dan Rumah Gadang Puti Bulian
- d). Situs budaya di Kec. Pulau Punjung: Rumah Gadang Rajo Pulau Punjung dan Makam Datuak Gadang Sikabau

9. Perdagangan

Sarana perdagangan pasar di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 4 unit merupakan pasar klas I yaitu Pasar Pulau Punjung, Pasar Sikabau, pasar Koto Baru dan Pasar Sungai Rumbai. Sarana komersial berupa pasar dan pertokoan mempunyai kecenderungan untuk berkembang di Kabupaten Dharmasraya (Pasar Sungai Rumbai, Pasar Pulau Punjung, Pasar Koto Baru, Pasar Blok B Sitiung). Sarana perbelanjaan modern, perbankan, perbengkelan dan onderdil membutuhkan lahan untuk pengembangan karena permintaan yang semakin tinggi akibat peningkatan pendapatan masyarakat.

Tabel 2.12
Pasar Menurut Lokasi dan Jumlah di Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2010

No	Kecamatan	Jumlah	Nama Pasar	Kelas	Nagari	Status
1	Sungai Rumbai	2	Pasar Sungai Rumbai	I	Sungai Rumbai	Nagari
			Pasar Kurnia Koto Salak	II	Kurnia Solok	Nagari
2	Koto Besar	3	Pasar Abai Siat	III	Abai Siat	Nagari
			Pasar Mayang Taurai	III	Koto Gadang	Nagari
			Pasar Lubuk Karya Sit . 4	III	Koto Tinggi	Nagari
3	Asam Jujuhan	3	Pasar Sei Limau	III	Sungai Limau	Nagari
			Pasar Batu Kangkung	III		Nagari
			Pasar Bulit Sembilan	III	Alahan Nan tigo	Nagari
4	Koto Baru	3	Pasar Koto Baru	I	Koto Baru	Nagari
			Pasar Sialang Gaung	II	Sialang Gaung	Nagari
			Pasar Ampang Kuranji	III	Ampang Kuranji	Nagari
5	Koto Salak	1	Pasar Ampalu	III	Ampalu	Nagari
6	Tiumang	1	Pasar Lagan Jaya	III	Sungai Langkok	Nagari
7	Padang Laweh	1	Pasar Sopan Jaya	III	Sopan Jaya	Nagari
8	Sitiung	2	Pasar Sitiung	II	Sitiung	Nagari
			Pasar Koto Agung	II	Sitiung	Nagari
9	Timpeh	4	Pasar Minang Makmur	III	Tabek	Nagari
			Pasar Marga Makmur	III	Taratak Tinggi	Nagari
			Pasar Trimulya	III	Penyeberangan	Nagari
			Pasar Beringin Sakti	III	Taratak Tinggi	Nagari
10	Pulau Punjung	2	Pasar Pulau Punjung	I	Pulau Punjung	Nagari
			Pasar Sikabau	I	Sikabau	Serikat



No	Kecamatan	Jumlah	Nama Pasar	Kelas	Nagari	Status
11	IX Koto	6	Pasar Silago	III	Silago	Nagari
			Pasar Lubuk Labu	III		Nagari
			Pasar Banai	III	Banai	Nagari
			Pasar Ampang Kuranji	III	Silago	Nagari
			Pasar Durian Simpai	III	Koto IV di Bauo (bawah)	Nagari
			Pasar Koto Baru Silago	III	Koto IV Bauo	Nagari

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

Sementara itu untuk menunjang kegiatan pasar diperlukan terminal. Sarana terminal pada Kabupaten Dharmasraya saat ini masih kurang. Dengan meningkatnya aktivitas pelayanan armada yang ada di Kabupaten Dharmasraya terutama pada kota-kota yang berada di sepanjang Jalan Lintas Sumatera, dimana aktivitas pelayanan sudah relatif lebih intensif dan padat, sehingga keberadaan terminal di Kabupaten Dharmasraya yang representatif sangat dibutuhkan.

10. Industri

Dari data PDRB 2007-2011, kontribusi sektor industri mengalami penurunan dari 5,88% menjadi 5,52% dalam PDRB Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2011, jumlah unit usaha mikro 2.068 unit, usaha kecil 274 unit dengan menyerap tenaga kerja 1.076 orang, dan usaha menengah 286 unit dengan menyerap tenaga kerja 1.160 orang.

2.1.6. Kerawanan Bencana Alam Dan Pencemaran Lingkungan

2.1.6.1. Kerawanan Terhadap Bencana

Salah satu klasifikasikan kawasan rawan bencana alam yang teridentifikasi di Kabupaten Dharmasraya adalah bencana tanah longsor yang dapat dilihat berdasarkan potensi gerakan tanah dan bencana banjir seperti uraian berikut:

a. Bencana Gerakan Tanah/longsor

Gerakan tanah merupakan perpindahan tanah yang disebabkan karena gempa bumi, kelerengan terjal maupun adanya kontak antar batuan yang mempunyai densitas berbeda. Gerakan tanah/longsor yang terjadi Kabupaten Dharmasraya umumnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kondisi geologi, morfologi, dan curah hujan. Daerah lokasi potensi tinggi longsor : Kecamatan Silago, Sialang Kecamatan Pulau Punjung, dan Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung.

b. Bencana Banjir

Kawasan yang sangat potensi bencana banjir di Kabupaten Dharmasraya adalah dataran banjir yang morfologi dataran disepanjang aliran sungai Batanghari, Batang Timpeh, Sungai Batang Abai dan Sungai Bonjol, yang ketika aliran sungai pada kondisi normal tidak meluap namun pada saat musim hujan aliran sungai melampaui batas normal terjadi limpasan air sungai yang menyebabkan banjir.

Bahaya banjir sering terjadi di lokasi potensi banjir : Kampung Surau, Pelayangan, Nagari Gunung Selasih di Kecamatan Pulau Punjung. Banjir



Bandang sekitar Batang Timpeh di Kecamatan Timpeh, Pasar Abai, Sungai Batang Abai, Sungai Bonjol di Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Padang Laweh. Berikut data Bencana banjir pada Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 2.13
Bencana Banjir, Korban, dan Kerugian
Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

No	Kecamatan	Total Area Terendam (Ha)	Korban	
			Mengungsi (KK)	Meninggal
1	Sungai Rumbai	-	-	-
2	Koto Besar	86	-	-
3	Asam Jujuhan	-	-	-
4	Koto Baru	62	175	-
5	Koto Salak	71	-	-
6	Tiumang	-	-	-
7	Padang Laweh	44	-	-
8	Sitiung	55	-	-
9	Timpeh	64	-	-
10	Pulau Punjung	-	-	-
11	IX Koto	-	-	-
Total		382	175	

Sumber : Dinas Sosnakertrans Kabupaten Dharmasraya

c. Kerawanan Longsor

Lokasi rawan longsor di Kabupaten Dharmasraya yaitu: Kecamatan IX Koto, Nagari Sialang Kecamatan Pulau Punjung, dan Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung.

2.1.6.2. Kerawanan Pencemaran Lingkungan

Baku mutu air raksa telah dilewati terutama oleh Sungai Muaro Pangian dan Sungai Batanghari bagian hulu, dan pada jumlah yang tidak terlalu signifikan pada Sungai Batang Abai Siat, Batang Betung, Batang Siat Hilir, Batang Timpeh, dan Muaro Batang Momongan.

2.1.7. Aspek Demografis

2.1.7.1. Perkembangan Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya yaitu 191.422 jiwa, yang tersebar pada 11 (sebelas) kecamatan. Jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Pulau Punjung yaitu 35.861 jiwa, kemudian Kecamatan Koto Baru sebanyak 28.796 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling rendah terdapat di Kecamatan Padang Laweh yaitu 2.316 jiwa.

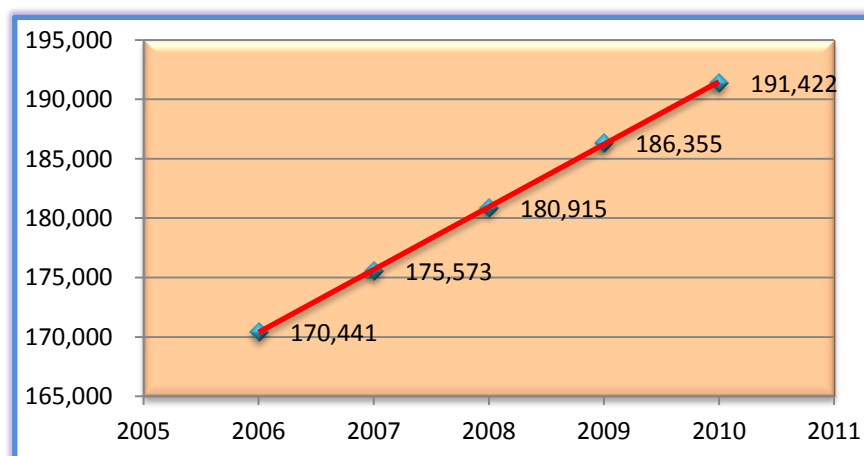
Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya tahun 2006 – 2010 mengalami peningkatan dengan laju 2,94%. Pada tahun 2006 jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya sebanyak 170.441 jiwa dan tahun 2010 meningkat menjadi 191.422 jiwa atau mengalami peningkatan sebanyak 20.981 jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah dan perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 2.14** dan **Gambar 2.4**.

Tabel 2.14.
Perkembangan Jumlah Penduduk
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2000 – 2010

Tahun	Jumlah (Jiwa)
2000	142.171
2001	144.043
2002	146.872
2003	163.056
2004	169.871
2005	165.194
2006	170.441
2007	175.573
2008	180.915
2009	186.355
2010	191.422

Sumber : BPS Kab. Dharmasraya dan Hasil Analisis
Tahun 2010

Gambar 2.4.
Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 – 2010





Tabel 2.15.
Jumlah, Persebaran dan Perkembangan Jumlah Penduduk
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 - 2010

No	Kecamatan	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2006	2007	2008	2009	2010	
1	Sungai Rumbai	16.067	16.551	17.054	17.567	17.989	2,87
2	Koto Besar	20.365	20.979	21.617	22.267	22.876	2,95
3	Asam Jujuhan	9.393	9.676	9.970	10.270	10.539	2,92
4	Koto Baru	25.563	26.333	27.134	27.950	28.796	3,02
5	Koto Salak	13.413	13.817	14.238	14.666	15.076	2,97
6	Tiumang	9.885	10.182	10.492	10.807	11.094	2,93
7	Padang Laweh	4.783	4.927	5.077	5.230	5.368	2,93
8	Sitiung	20.576	21.195	21.840	22.497	23.019	2,85
9	Timpeh	11.990	12.351	12.727	13.110	13.460	2,93
10	Pulau Punjung	31.872	32.831	33.830	34.847	35.861	2,99
11	IX Koto	6.534	6.731	6.936	7.144	7.344	2,96
Total		170.441	175.573	180.915	186.355	191.422	2,94

Sumber : Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, BPS Kab. Dharmasraya Tahun 2011

Jika berpatokan dari data Sensus (2000 - 2010) maka, selama 10 tahun penduduk Kabupaten Dharmasraya tumbuh sebesar 35% artinya pertumbuhan sebesar 3,04% per tahun. Dasar inilah yang akan digunakan untuk memproyeksi penduduk Kabupaten Dharmasraya 20 tahun kedepan. Tetapi dengan terjadinya kecenderungan pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin menurun, maka trend pertumbuhan penduduk Kabupaten Dharmasraya diperkirakan juga akan menurun.

2.1.7.2. Distribusi Dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Pulau Punjung dengan persebaran 18,70% atau 35.861 jiwa, kemudian Kecamatan Koto Baru sebanyak 28.796 jiwa dengan persebaran 15% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan jumlah penduduk yang paling rendah terdapat di Kecamatan Padang Laweh yaitu sebesar 2,81% atau 2.316 jiwa.

Kepadatan penduduk Kabupaten Dharmasraya dilihat berdasarkan kepadatan kotor (bruto) kepadatan berdasarkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah) saat ini yaitu 63 jiwa/km². Dilihat berdasarkan data perkecamatan, kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Rumbai yaitu 352 jiwa/ km² dan di Kecamatan Sitiung yaitu 185 jiwa/ km². Sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat pada Kecamatan IX Koto yaitu hanya 15 jiwa/ km². Jika dilihat kepadatan penduduk per nagari maka nagari yang rapat penduduknya terdapat di Nagari-nagari Sungai Rumbai, Kurnia Koto Salak, Sungai Rumbai Timur, Kurnia Selatan, Koto Baru, Pulau Mainan, Sitiung, Sungai Duo, Koto Baru, dan Koto Padang.

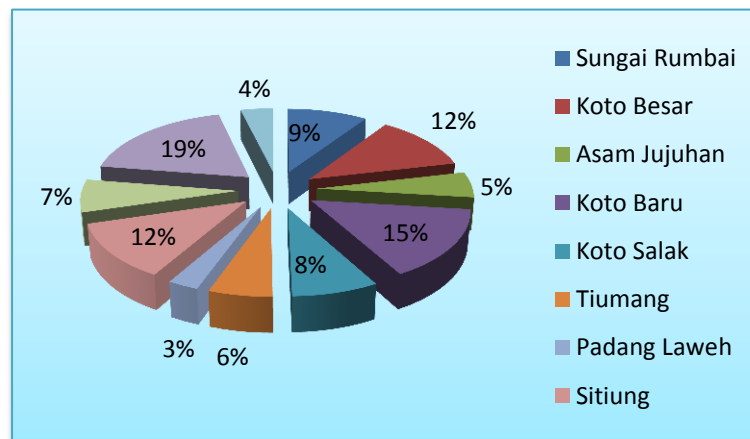
Untuk lebih jelasnya kepadatan penduduk di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 2.16** dan **Gambar 2.5**.

Tabel 2.16
Distribusi dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

No	Kecamatan	Jumlah (Jiwa)	Distribusi (%)	Luas (Ha)	Kepadatan Bruto (Jiwa/Km ²)
1	Sungai Rumbai	17.989	9.40	5106	352
2	Koto Besar	22.876	11.95	56057.3	41
3	Asam Jujuhan	10.539	5.51	48541.3	22
4	Koto Baru	28.796	15.04	22120	130
5	Koto Salak	15.076	7.88	12145.1	124
6	Tiumang	11.094	5.80	13443	83
7	Padang Laweh	5.368	2.80	6062.22	89
8	Sitiung	23.019	12.03	12456.9	185
9	Timpeh	13.460	7.03	32300.7	42
10	Pulau Punjung	35.861	18.73	44316.5	81
11	IX Koto	7.344	3.84	50050	15
Total		191.422	100.00	302599	63

Sumber : BPS Kab. Dharmasraya, Tahun 2010

Gambar 2.5.
Grafik Presentase Distribusi Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010



2.1.7.3. Struktur Penduduk

1. Struktur Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Struktur penduduk menurut kelompok umur dikelompokkan menjadi 14 kelompok dan terdiri dari 4 kelompok usia seperti yang terlihat pada **Tabel 2.16**. Berdasarkan **Tabel 2.17**, jumlah penduduk terbesar jika dilihat berdasarkan kelompok umur yaitu terdapat pada kelompok umur 0 - 4 tahun atau usia balita



sebanyak 17.377 jiwa atau 11,78%. Sedangkan dilihat berdasarkan kelompok usia pada umumnya penduduk Kabupaten Dharmasraya adalah merupakan usia sekolah yang merupakan kelompok umur 5 – 24 tahun sebanyak 79.846 jiwa atau 41,71% dan usia kerja yang berada pada kelompok umur 25 – 59 tahun sebanyak 78.666 jiwa atau 41,10%. Sedangkan usia non produktif (usia balita dan usia lanjut) hanya sekitar 5,42% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 2.16.
Perkembangan Struktur Penduduk menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 - 2010

Kelompok Umur	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk				
		2006	2007	2008	2009	2010
0 - 4	Usia Balita	20.063	20.667	21.299	21.943	22.540
5 - 9	Usia Sekolah	18.496	19.053	19.634	20.226	20.777
10 - 14	Usia Sekolah	18.168	18.716	19.286	19.867	20.409
15 - 19	Usia Sekolah	17.640	18.171	18.723	19.285	19.809
20 - 24	Usia Sekolah	16.834	17.290	17.816	18.352	18.851
25 - 29	Usia Kerja	16.307	16.798	17.308	17.826	18.310
30 - 34	Usia Kerja	13.311	13.763	14.182	14.608	15.004
35 - 39	Usia Kerja	12.606	12.986	13.380	13.780	14.154
40 - 44	Usia Kerja	10.188	10.495	10.816	11.144	11.448
45 - 49	Usia Kerja	7.916	8.154	8.401	8.652	8.887
50 - 54	Usia Kerja	5.590	5.758	5.933	6.111	6.277
55 - 59	Usia Kerja	4.085	4.208	4.335	4.465	4.586
60 - 64	Usia Lanjut	4.019	4.140	4.265	4.393	4.511
65 +	Usia Lanjut	5.217	5.374	5.537	5.704	5.859
Jumlah		170.440	175.573	180.915	186.356	191.422

Sumber : Kab. Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2010

Dari data **Tabel 2.16.** diatas terlihat adanya kelompok produktif yaitu umur 15-64 tahun cenderung meningkat. Kondisi ini sering disebut sebagai *demographic dividend* yang mampu memberikan kesempatan untuk pertumbuhan ekonomi secara optimal.

Data perbandingan laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Seluruh kecamatan memiliki sex ratio lebih dari 100. Berlawanan dengan fenomena yang terjadi di Sumatera Barat dimana sebagian besar wilayah-wilayah kecamatan yang ada memiliki sex ratio yang kecil dari 100 karena kaum lelaki banyak yang pergi merantau. Fenomena Kabupaten Dharmasraya yang berbeda dari kondisi yang umum dari Provinsi Sumatera Barat menunjukkan adanya lapangan pekerjaan yang menjanjikan bagi masyarakat (terutama laki-laki) sehingga kaum laki-laki tidak perlu pergi merantau.



Fenomena ini juga terjadi pada daerah di Sumatera Barat yang sektor perkebunan dan pertambangannya berkembang pesat.

Tabel 2.17.
Struktur Penduduk menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan		
1	Sungai Rumbai	9.404	8.585	17.989	109,54
2	Koto Besar	11.821	11.055	22.876	106,93
3	Asam Jujuhan	5.707	4.832	10.539	118,11
4	Koto Baru	14.727	14.069	28.796	104,68
5	Koto Salak	7.646	7.430	15.076	102,91
6	Tiumang	5.729	5.365	11.094	106,78
7	Padang Laweh	2.835	2.533	5.368	111,92
8	Sitiung	11.817	11.202	23.019	105,49
9	Timpeh	6.928	6.532	13.460	106,06
10	Pulau Punjung	18.570	17.291	35.861	107,40
11	IX Koto	3.708	3.636	7.344	101,98
Total		98.892	92.530	191.422	106,88

Sumber : BPS Kab. Dharmasraya, Tahun 2010

3. Struktur Penduduk menurut Angkatan Kerja dan Lapangan Usaha

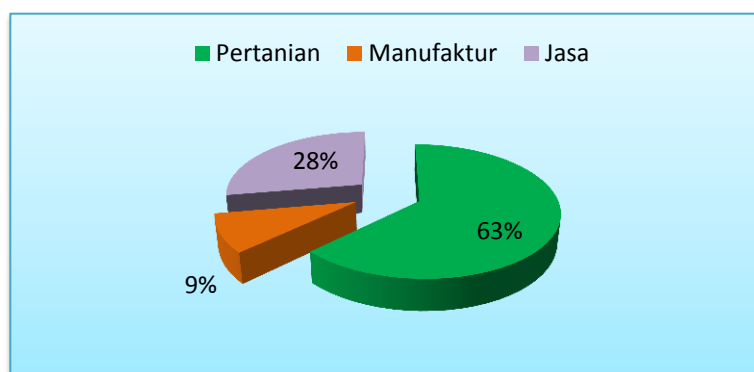
Berdasarkan data jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja di Kabupaten Dharmasraya, pada tahun 2010 penduduk yang bekerja sebanyak 87.419 jiwa atau 45,67% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Dilihat dari lapangan pekerjaan utama, secara umum penduduk Kabupaten Dharmasraya bekerja di sektor pertanian yaitu 55.013 jiwa atau 62,93% dari total penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Penduduk yang bekerja di sektor jasa sebanyak 24.218 jiwa atau 27,70% dari total penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Sedangkan penduduk yang pekerjaan utamanya dibidang manufaktur hanya 8.188 jiwa atau 9,37% dari total penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut angkatan kerja di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Tabel 2.18.**

Tabel 2.18.
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Kegiatan Terbanyak
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total (Jiwa)	Persentase (%)
1	Pertanian	38.439	16.574	55.013	62,93
2	Manufaktur	7.692	496	8.188	9,37
3	Jasa	11.967	12.251	24.218	27,70
Jumlah		58.098	29.321	87.419	100
Total Penduduk		98.892	92.530	191.424	45,67

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010

Gambar 2.6
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010



4. Struktur Penduduk menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Gambaran mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Apabila dilihat pendidikan secara keseluruhan, pada periode 2007-2009, Sekitar lebih dari 25 persen penduduk Kabupaten Dharmasraya hanya tamat SD, dan lebih dari 20 persen tamat SMP umum/kejuruan/MTs. Sementara sisanya adalah tamat SMA keatas. Untuk lebih jelasnya persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas menurut Ijazah
Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2007-2009

Tingkat Pendidikan	2007		2008		2009	
	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)
Tidak Sekolah/ Belum Tamat SD	25,59	32,43	26,12	33,47	23,2	29,4
SD	32,32	27,79	26,25	24,19	27,1	25,4
SMP	23,26	23,08	23,21	19,56	24,16	21,2
SMA	15,12	12,78	19,45	17,17	20,5	17,21
Diploma	1,54	1,95	2,6	3,45	2,63	3,58
DIV/S1-S3	2,17	1,97	2,37	2,16	2,41	3,21
Jumlah	100	100	100	100	100	100

Sumber: Susenas 2007-2009

5. Struktur Penduduk menurut Agama

Agama yang dianut penduduk Kabupaten Dharmasraya meliputi Agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha, dan Hindu. Sebagaimana halnya karakteristik penduduk di Sumatera Barat, mayoritas penduduk di Kabupaten Dharmasraya memeluk agama Islam. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya menurut agama yang dianut dapat dilihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27
Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 – 2010

No	Agama	Tahun / Jiwa				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Islam	169.965	175.096	180.272	186.051	189.867
2	Katolik	175	174	321	77	1.283
3	Protestan	299	301	320	209	255
4	Hindu	2	2	2	4	4
5	Budha				4	10
6	Lainnya				9	3
Jumlah		170.441	175.573	180.915	186.354	191.422

Sumber : BPS Kab. Dharmasraya Tahun 2011

6. Struktur Penduduk menurut Etnis

Sejarah telah menggambarkan bahwa wilayah Dharmasraya sejak dahulu merupakan daerah yang terbuka. Hal ini dapat terlihat dari penduduk yang ada di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari berbagai etnis. Dengan kondisi tersebut, sangat logis sampai saat ini masyarakat Kabupaten Dharmasraya berasal dari berbagai suku, diluar Suku Minang. Berdasarkan data, penduduk Kabupaten Dharmasraya secara umum merupakan masyarakat agraris karena kegiatan utama masyarakat adalah bergerak di bidang pertanian dan perkebunan, dan dalam kehidupan sehari-hari mereka masih mempertahankan tradisi-tradisi lama (Tradisi Minangkabau) atau masih berpegang pada agama dan adat istiadat/masyarakat tradisional (Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah), meskipun penduduk Kabupaten Dharmasraya terdiri dari berbagai suku. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya menurut suku dapat dilihat pada **Tabel 2.28**.

Tabel 2.28
Jumlah Penduduk menurut Suku di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 – 2010

No	Suku	Jumlah				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Minang	107.232	110.489	113.832	117.254	120.500
2	Jawa	56.166	57.872	59.620	61.412	60.987
3	Sunda	2.545	2.622	2.701	2.782	3.407
4	Batak	1.499	1.544	1.591	1.639	1.953
5	Melayu Jambi	704	724	746	768	804
6	Melayu	543	549	566	583	1.359
7	Lainnya	1.751	1.805	1.860	1.916	2.412
Jumlah		170.440	175.573	180.916	186.354	191.422

Sumber : BPS Kab. Dharmasraya Tahun 2010

7. Penduduk Transmigran

Pada tahun 60-an, Kabupaten Dharmasraya menerima kedatangan transmigran dari Pulau Jawa, dan keberhasilan transmigran diberbagai permukiman transmigrasi di Kabupaten Dharmasraya (dahulunya menjadi bagian dari



Sijunjung) merupakan salah satu potret keberhasilan pelaksanaan program transmigrasi di Indonesia. Jumlah kepala keluarga transmigran yang datang ke Kabupaten Dharmasraya yaitu 12.779 KK. Pengiriman penduduk transmigran terakhir yaitu pada tahun 2009. Dilihat dari wilayah asal, secara umum transmigran di Kabupaten Dharmasraya berasal dari Pulau Jawa. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk transmigrasi dan daerah asal transmigrasi dapat dilihat pada **Tabel 2.29**.

Tabel 2.29.
Jumlah Penduduk Transmigrasi
di Kabupaten Dharmasraya sampai Tahun 2009

No	Tahun	Jumlah		Keterangan
		KK	Jiwa	
1	1965 - 2006	12.714	55.847	Diserahkan ke Pemda Tahun 1972 - 2007
2	2009	65	232	Diserahkan ke Pemda Tahun 2009
Jumlah		12.779	56.079	

Sumber : Dinas Sosnakertrans Kab. Dharmasraya, Tahun 2010

2.2. TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan indikator makro ekonomi daerah, kemudian dilanjutkan dengan indikator sosial ekonomi seperti ketimpangan pendapatan, tingkat kesejahteraan sosial.

a. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi terbentuk dari perubahan yang terjadi pada berbagai sektor ekonomi dalam suatu daerah yang tersaji dalam data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dari tahun ketahun PDRB Kabupaten Dharmasraya terus memperlihatkan perkembangan yang cukup baik. Pertumbuhan PDRB tahun 2008 sebesar 6,54 persen meningkat menjadi 6,64 persen tahun 2009 dan kembali turun menjadi 6,51 persen pada tahun 2010, namun demikian secara rata-rata pertumbuhan PDRB dari tahun 2007-2010 masih sebesar 6.54 persen lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Sumatera Barat yang hanya 5.93 % pada periode tahun tersebut. Baiknya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya tentu tidak terlepas dari peran para pelaku ekonomi, dunia usaha, masyarakat dan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonominya yang produktif. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Pada periode tahun 2007-2008, pertumbuhan ekonomi kabupaten Dharmasraya masih dibawah pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Tetapi pada periode tahun setelah itu, perekonomian Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan yang sangat pesat dan berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Apabila diperhatikan tabel dibawah ini, ada beberapa lapangan usaha yang mempunyai laju pertumbuhan rata-rata sektoral diatas laju pertumbuhan rata-rata keseluruhan yaitu lapangan usaha pertambangan dan penggalian, lapangan usaha bangunan dan lapangan usaha perdagangan, lapangan usaha keuangan, persewaan dan jasa keuangan dan lapangan usaha jasa Hal ini mengindikasikan bahwa kelima lapangan usaha ini merupakan lapangan usaha yang mempunyai potensi pengembangan cukup besar dan diharapkan menjadi lapangan usaha andalan bagi perekonomian Kabupaten Dharmasraya. Disamping itu kondisi kabupaten Dharmasraya sebagai Kabupaten hasil pemekaran yang pasti baru memulai proses pembangunan sehingga menyebabkan beberapa lapangan usaha melaju dengan cepat seiring dengan dimulainya proses pembangunan.

Tabel 2.30
PDRB Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) 2007 - 2010

No	LAPANGAN USAHA	2007	2008	2009	2010	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1.	Pertanian	376.206,15	380.541,52	407.396,17	429.804,26	4.98
2.	Pertambangan dan Penggalian	37.788,56	59.953,21	63.444,49	70.557,79	20.64
3.	Industri pengolahan	65.484,92	69.374,72	72.302,46	75.907,11	5.24
4.	Listrik dan air	10.084,37	10.286,38	10.343,05	10.705,71	3.94
5.	Bangunan	105.051,62	114.201,62	122.502,72	131.842,72	7.68
6.	Perdagangan, hotel dan Restoran	110.260,13	116.304,39	124.619,02	133.205,25	6.52
7.	Angkutan dan komunikasi	61.544,70	65.009,48	68.861,33	72.734,36	6.05
8.	Keu, persewaan & Jasa Perusahaan	38.402,16	41.696,64	45.106,33	49.642,99	8.90
9.	Jasa-jasa	152.679,86	162.711,56	173.200,42	184.157,33	6.29
Total PDRB		957.502,47	1.020.079,52	1.087.775,99	1.158.557,51	6,54

Sumber: BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

Kondisi pembangunan ekonomi sektoral berdasarkan potensi dan daya saing dapat diketahui dengan menggunakan analisis indeks Location Quotient (LQ). Analisis ini mengkategorikan sektor perekonomian menjadi sektor basis dan non-basis. Sektor produksi basis yaitu sektor yang memiliki nilai $LQ > 1$ berarti sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhannya sendiri bahkan mengekspor ke daerah lainnya. Dengan kata lain, sektor basis memiliki daya saing dan keunggulan komparatif. Sebaliknya, nilai $LQ < 1$ menunjukkan bahwa produksi suatu sektor tergantung kepada impor atau pemenuhan dari daerah lain. Potensi ekonomi sektoral Kabupaten Dharmasraya secara lengkap disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.31
Basis Ekonomi Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Indeks Location Quotient (LQ)

No	Lapangan Usaha	Indeks LQ	
		2008	2010
1.	Pertanian	1,55	1,61
	Tanaman Pangan & Hortikultura	0,36	0,53
	Tanaman Perkebunan	2,68	3,92
	Peternakan	0,99	1,66
	Kehutanan	1,28	2,30



No	Lapangan Usaha	Indeks LQ	
		2008	2010
	Perikanan	0,47	0,88
2.	Pertambangan dan penggalian	1,90	2,03
3.	Industri pengolahan	0,53	0,53
4.	Listrik dan air	0,87	0,83
5.	Bangunan	2,25	2,06
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	0,62	0,64
7.	Angkutan dan komunikasi	0,45	0,41
8.	Keuangan persewaan & jasa perusahaan	0,79	0,85
9.	Jasa-jasa	0,99	0,95

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, data diolah

Keterangan : Potensi Pengembangan ekonomi merupakan hasil perhitungan LQ pada Tahun 2008 dan 2010.

Berdasarkan metode LQ pada tahun 2008 ditemukan hasil bahwa sektor-sektor basis Kabupaten Dharmasraya secara berturut-turut dari yang tertinggi yaitu sektor bangunan (2.25), pertambangan (1.9) dan pertanian (1.55). Enam sektor lainnya merupakan sektor non-basis. Sementara pada tahun 2011, sektor-sektor basis Kabupaten Dharmasraya secara berturut-turut dari yang tertinggi yaitu sub sektor tanaman perkebunan (3.92), sub sektor kehutanan (2.3), sektor bangunan (2.06), sektor pertambangan dan galian (2.03), dan sektor pertanian (1.61). Sementara sektor lainnya merupakan sektor non basis. Hanya subsektor peternakan yang mengalami transformasi positif dari tidak memiliki keunggulan lokasional pada tahun 2008 menjadi mempunyai keunggulan lokasional pada tahun 2011. Terjadinya perubahan potensi ekonomi yang ditunjukkan dengan perubahan nilai indeks lokasional dan munculnya sektor/sub sektor baru yang mempunyai keunggulan komparatif dibanding daerah lainnya menunjukkan terjadinya peningkatan potensi dan daya saing sektoral di Kabupaten Dharmasraya.

b. Kontribusi Sektoral Pendapatan Regional

Secara sektoral perekonomian Kabupaten Dharmasraya untuk tahun 2009 masih didominasi 4 sektor utama sebagai penghasil nilai tambah terbesar terhadap PDRB, yaitu (1) sektor pertanian, (2) sektor bangunan, dan (3) sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta (4) sektor jasa-jasa. Sementara itu pada tahun 2010 dari total PDRB Kabupaten Dharmasraya sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 37.1%, dilanjutkan dengan sektor bangunan (11.38%), sektor perdagangan hotel dan restoran (11.5%), serta sektor jasa-jasa (15.9%).

Meskipun demikian apabila dilihat dari tren pertumbuhan kontribusi sektoral, sektor pertanian yang mendominasi perekonomian mempunyai kecenderungan yang menurun dari periode waktu 2007-2010. Hal yang sebaliknya ditunjukkan oleh sektor-sektor yang memberikan sedikit kontribusi tetapi menunjukkan tren yang meningkat seperti sektor pertambangan yang hanya berkontribusi sebesar 6.09 % pada tahun 2010 dan meningkat lagi pada tahun 2011 menjadi 6.16% kontribusinya. Begitu pula dengan sektor lainnya seperti sektor keuangan meskipun hanya berkontribusi sebesar yang kecil yaitu hanya 4.28 % pada tahun 2010 tetapi



meningkat pada tahun 2011 menjadi 4.33% dan secara trend menunjukkan peningkatan yang positif dari tahun ke tahun.

Tabel 2.32
Kontribusi Sektor-Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2007-2010

No	Lapangan Usaha	2007	2008	2009	2010
1.	Pertanian	39,29	37,31	37,45	37,10
2.	Pertambangan dan galian	3,95	5,88	5,83	6,09
3.	Industri Pengolahan	6,84	6,80	6,65	6,55
4.	Listrik dan air	1,05	1,01	0,95	0,92
5.	Bangunan	10,97	11,20	11,26	11,38
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	11,52	11,40	11,46	11,50
7.	Angkutan dan Komunikasi	6,43	6,37	6,33	6,28
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	4,01	4,09	4,15	4,28
9.	Jasa-jasa	15,95	15,95	15,92	15,90

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama di Wilayah Kabupaten Dharmasraya, yang selalu mendapat prioritas utama dalam kegiatan pembangunan ekonomi saat ini, dimana kontribusi sektor pertanian paling besar terhadap PDRB Kabupaten Dharmasraya. Pada grafik dibawah ini dapat terlihat bahwa pada tahun 2010, kontribusi sektor pertanian sebesar 37,10 % dibandingkan kontribusi sektor-sektor lainnya, dimana besarnya kontribusi ini disumbangkan oleh sub sektor yang terdapat dalam sektor pertanian yaitu tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Tetapi kecenderungan kontribusi sektor pertanian dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang menurun .

Secara sub sektoral, sebagai pemberi kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Dharmasraya, maka sub sektor pertanian yang memberi kontribusi terbesar terhadap sektor pertanian adalah subsektor tanaman perkebunan yaitu sebesar 60%. Hal ini sesuai dengan kondisi real yang menunjukkan bahwa sebagian besar lahan pertanian yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya didominasi oleh subsektor tanaman perkebunan. Besarnya kontribusi masing-masing subsektor dalam sektor pertanian terlihat dalam gambar dibawah ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Bank Indonesia Padang terhadap komoditi-komoditi Unggulan di masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat termasuk didalamnya yaitu Kabupaten Dharmasraya, menunjukkan bahwa komoditi unggulan untuk Kabupaten Dharmasraya seperti yang diperlihatkan tabel dibawah ini, dimana dari lima komoditi unggulan Kabupaten Dharmasrayatiga komoditi berasal dari sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman perkebunan yaitu komoditi Karet, Kelapa Sawit dan Coklat. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Dharmasraya sebagai Kabupaten yang mempunyai potensi besar di sektor pertanian dan perekonomiannya lebih didominasi oleh sektor pertanian.

c. Laju Inflasi dan Uang Beredar

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%—30% setahun; berat antara 30%—100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Apabila diperhatikan tabel dibawah ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat inflasi di Kabupaten Dharmasraya secara rata-rata dari tahun 2007 sampai tahun 2010 tergolong pada inflasi ringan atau dibawah 10%. Tetapi pada tahun 2007 dan 2008 terjadi inflasi kategori sedang dimana tingkat inflasi diatas 10 %. Hal ini terjadi dikarenakan pada periode tersebut perekonomian Indonesia secara keseluruhan sedang dilanda krisis yang menyebabkan terjadi peningkatan harga secara umum tidak saja di Kabupaten Dharmasraya tetapi juga di hampir seluruh daerah di Indonesia.

Apabila dibandingkan dengan tingkat inflasi di Sumatera Barat, maka pada beberapa tahun tertentu yaitu tahun 2007 dan 2009 tingkat inflasi di Kabupaten Dharmasraya lebih tinggi daripada tingkat inflasi Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan pada tahun-tahun tersebut terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap harga hasil produk-produk pertanian seperti kelapa sawit dan karet. Sebagaimana diketahui komoditi pertanian merupakan produk unggulan dan penyumbang terbesar terhadap perekonomian daerah. Kenaikan harga produk pertanian menyebabkan pendapatan masyarakat meningkat dan meningkatkan daya beli yang sudah tentu akan berpengaruh besar terhadap kenaikan harga secara umum di daerah ini.

Tabel 2.33
Tingkat Inflasi

Tahun	Dharmasraya	Sumatera Barat
2007	11,31	6,9
2008	10,70	12,68
2009	4,35	2,05
2010	6,94	7,84

Sumber: BPS Sumatera Barat, data diolah

Penciptaan uang/besarnya uang beredar dalam masyarakat dapat digambarkan sebagai proses pasar. Jumlah Uang Beredar juga mempunyai keterkaitan dengan suku bunga deposito. Semakin banyak jumlah uang yang beredar dimasyarakat, investasi menjadi lebih menarik bila dibandingkan dengan menyimpan dalam bentuk tabungan. Jumlah uang beredar dalam arti luas merupakan penjumlahan uang kartal dan uang quasi. Dimana uang quasi dapat diprosikan sebagai dana simpanan pihak ketiga yang tersimpan pada bank umum.



Menurut data yang ada seperti diperlihatkan tabel dibawah ini, jumlah simpanan dana pihak ketiga di Kabupaten Dharmasraya dari tahun-ketahun berfluktuasi. Peningkatan yang sangat besar terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 765.65%. Pada tahun 2008 sampai tahun 2009 masih terjadi peningkatan yang sangat besar terhadap uang beredar di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh peningkatan yang sangat besar terhadap harga produk-produk pertanian khususnya tanaman perkebunan. Tetapi pada tahun 2010 dimana pada tahun ini harga produk perkebunan mengalami penurunan maka secara langsung juga menurunkan jumlah uang beredar sebesar 70,85%. Tetapi pada tahun 2011 terjadi lonjakan yang sangat besar pada jumlah uang yang beredar di kabupaten Dharmasraya.

Tabel 2.34
Banyaknya Uang Beredar

Tahun	Uang Beredar (juta Rp)	Pertumbuhan (%)
2007	953.780	
2008	1.266.389	32,78
2009	1.339.014	5,73
2010	390.272	-70,85

Sumber: 8 Bank Di Kabupaten Dharmasraya

Tingginya jumlah uang yang beredar berpengaruh kepada tingkat bunga dan investasi. Dimana diharapkan investasi akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah uang yang beredar. Tetapi apabila kita perhatikan tabel dibawah ini, dari tahun 2007 sampai tahun 2010 terlihat bahwa terdapat selisih negatif aliran uang di Kabupaten Dharmasraya, Dimana aliran uang masuk lebih sedikit dibandingkan dengan aliran uang keluar. Sangat disayangkan apabila hal ini terjadi setiap saat karena mengindikasikan terjadinya aliran modal keluar dari Kabupaten Dharmasraya. Seharusnya terjadi adalah uang beredar di Kabupaten Dharmasraya dapat digunakan untuk berinvestasi dan mengembangkan perekonomian daerah.

Tabel 2.35
Transfer Dana Masuk dan Keluar Melalui Jasa Bank

Tahun	Masuk (Juta)	Keluar (Juta)	Selisih
2007	10.892.896	12.372.707	-1.479.812
2008	297.410	4.462.001	- 4.164.591
2009	978.988	1.382.080	- 403.093
2010	137.228	412.641	- 275.414

Sumber: Delapan Bank di Kabupaten Dharmasraya

d. Pendapatan Perkapita dan Ketimpangan Pendapatan

Dampak kebijakan pembangunan suatu daerah terlihat dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Tingginya PDRB suatu daerah belum tentu mencerminkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, karena juga sangat tergantung kepada perkembangan jumlah penduduk. Salah satu indikator yang sering digunakan adalah PDRB perkapita dan pendapatan regional perkapita, yang menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama setahun. Angka-



angka perkapita akan menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah. Untuk melihat gambaran secara riil keadaan tersebut digunakan PDRB atas dasar harga berlaku.

Tahun 2010 kenaikan pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Dharmasraya tercatat sebesar Rp. 13.988.935,49 per orang per tahun sedangkan tahun 2009 hanya sebesar Rp. 12.417.559,87 per orang per tahun. Begitu juga dengan Pendapatan Regional Perkapita yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sekitar 13,39 %. Peningkatan nilai PDRB Perkapita maupun Pendapatan Regional Perkapita pada tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya mencerminkan semakin meningkatnya kesejahteraan penduduk Kabupaten Dharmasraya.

Apabila dibandingkan dengan perkembangan pendapatan perkapita penduduk Sumatera Barat, maka pendapatan perkapita masyarakat Dharmasraya masih berada dibawah pendapatan perkapita Sumatera Barat secara keseluruhan atau tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dharmasraya masih dibawah tingkat kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat seperti yang diperlihatkan tabel dibawah ini. Tetapi dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya yang lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat maka bisa dipastikan suatu saat tingkat pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Dharmasraya akan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pendapatan perkapita masyarakat di Sumatera Barat umumnya.

Tabel 2.37
Perbandingan Pendapatan Perkapita Kabupaten Dharmasraya
dengan Propinsi Sumatera Barat

Tahun	Kabupaten Dharmasraya		Sumatera Barat	
	PDRB/kapita	Pendapatan Regional/kapita	PDRB/kapita	Pendapatan Regional/kapita
2007	10.180.286,52	9.678.778,66	12.808.637,46	11.762.362,70
2008	11.314.964,39	10.766.881,98	15.003.730,16	13.769.096,99
2009	12.417.559,87	11.811.441,54	16.023.751,76	14.688.468,49
2010	13.988.935,49	13.330.464,79	17.960.699,96	16.499.092,87
Rata-rata	11,975,436.57	11,396,891.74	15,449,204.84	14,179,755.26

Sumber: BPS Sumatera Barat, Tahun 2010

Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah juga bisa dilihat dengan sebesar besar penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah beras, gula pasir, telur, mie instan, tahu dan tempe. Untuk komoditi bukan makanan adalah biaya perumahan, biaya listrik, angkutan dan minyak tanah. Disamping itu unsur Inflasi juga sangat berpengaruh dengan jumlah penduduk miskin.



Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin meningkat karena harga barang-barang kebutuhan pokok naik. Akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin.

Dari tahun ke tahun garis kemiskinan semakin meningkat seiring meningkatnya inflasi. Sedangkan persentase penduduk miskin Kabupaten Dharmasraya semakin menurun. Perkembangan jumlah penduduk miskin dari tahun 2006 sampai tahun 2010, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 4,37 %, artinya terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun atau bisa juga diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat dari tahun ketahun seiring dengan penurunan jumlah penduduk miskin.

Tabel 2.38
Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin
Tahun 2006 - 2010

Tahun	Garis Kemiskinan Rp/Kap/Bln	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Penduduk Miskin (%)	Perubahan per tahun (%)
2006	169.588	170.440	25.400	14,93	
2007	175.577	175.573	23.800	14,42	-6,30
2008	184.683	180.915	21.400	12,53	-10,08
2009	229.181	186.354	19.900	11,40	-7,01
2010	358.859	191.422	20.300	10,56	2,01

Sumber: BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2010

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif, dapat menggunakan dua ukuran untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu Koefisien Gini (Gini Ratio) dan Ukuran Bank Dunia. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya), koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna dan 0 yang berarti merata sempurna.

Pada tabel dibawah dijelaskan besaran koefisien Gini untuk semua daerah Kabupaten yang ada di Sumatera Barat, dimana pada tahun 2011 secara rata-rata semua daerah kabupaten di Sumatera Barat mempunyai distribusi pendapatan relatif merata karena memiliki angka Koefisien Gini 0.329. Beberapa daerah memiliki Gini rasio dibawah rata-rata Sumatera Barat salah satunya adalah daerah Kabupaten 50 Kota dengan Gini rasio sebesar 0.255 yang berarti pendapatan masyarakat di kabupaten ini relatif merata.

Kabupaten Dharmasraya sendiri memiliki Gini rasio kedua terbesar yaitu 0.369, artinya pendapatan masyarakat Kabupaten Dharmasraya relatif timpang dibandingkan masyarakat Sumatera Barat pada umumnya. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pendapatan masyarakat Kabupaten Dharmasraya dominan berasal dari

sektor pertanian, yang mana sangat tergantung dengan fluktuasi harga produk pertanian yang cenderung fluktuatif beberapa tahun belakang.

Tabel 2.39
Gini Rasio Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

No	Kabupaten/ Kota	Gini Rasio
1	Kep. Mentawai	0,326
2	Pesisir Selatan	0,264
3	Solok	0,285
4	Sijunjung	0,299
5	Tanah Datar	0,345
6	Padang Pariaman	0,314
7	Agam	0,277
8	Lima Puluh Kota	0,255
9	Pasaman	0,291
10	Solok Selatan	0,292
11	Dharmasraya	0,369
12	Pasaman Barat	0,269
13	Padang	0,304
14	Payakumbuh	0,320
15	Bukittinggi	0,329
16	Sawahlunto	0,336
17	Solok	0,345
18	Pariaman	0,349
19	Padang Panjang	0,399
	Rata-rata	0,329

Sumber: Gini Rasio Kabupaten Dharmasraya

e. Kesejahteraan Sosial

Kondisi kesejahteraan sosial berkaitan dengan kualitas kehidupan manusia yang terlihat dari berbagai indikator kualitas hidup manusia dan pemenuhan kebutuhan hidup yang mendasar untuk mendukung kehidupan yang berkualitas terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan.

1) Kondisi Kualitas Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia

Kondisi kualitas pembangunan manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai IPM Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2010 sebesar 69,13 berada pada peringkat ke 17 di Provinsi Sumbar diatas Solok Selatan dan Mentawai. Pencapaian per indikator yaitu: rata-rata lama sekolah 7,77 tahun (rata-rata Sumbar 8,48 tahun); pengeluaran perkapita Rp. 608.000 terendah setelah Mentawai (rata-rata Sumbar Rp. 635,29); angka melek huruf 96,38% urutan ke 7 dari 12 kabupaten(rata-rata Sumbar 97,09%); dan angka harapan hidup rata-rata 66 tahun terendah di Sumbar (rata-rata Sumbar 69,50 tahun).

Pencapaian pada tahun 2010 tersebut merupakan peningkatan karena sampai tahun 2007 peringkat IPM Kabupaten Dharmasraya terendah di Provinsi Sumbar. Dilihat dalam peringkat nasional antar daerah dalam rentang tahun 2004 -2010 terdapat kenaikan cukup signifikan yaitu naik 21 peringkat dari urutan 379 menjadi 358.

2) Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang strategis yang perlu mendapat perhatian serius dalam pemenuhannya. Mengingat pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Untuk itu, perencanaan yang cepat dan terarah dalam pembangunan pendidikan mutlak diperlukan.

a) Angka Partisipasi Sekolah

Pendidikan bukan sekadar upaya atau sarana orang mencari pekerjaan, melainkan sebuah proses pendewasaan diri untuk bisa hidup bermartabat. Karena merupakan proses pendewasaan diri, maka pendidikan tidak akan pernah berakhir, sekalipun yang bersangkutan telah mapan secara material dalam hidupnya (*education is life long*). Dengan demikian, pendidikan bukan alat (*means*) melainkan tujuan (*ends*). Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar.

Tabel 2.40
Distribusi Jumlah dan Proporsi Penduduk Dharmasraya
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010

No	Tingkat Pendidikan Penduduk	Penduduk	
		Jumlah	%
1	Tidak/belum pernah sekolah	27.845	14,55
2	Tidak/belum tamat SD	37.290	19,48
3	Tamat SD	50.842	26,56
4	Tamat SMP	34.952	18,26
5	Tamat SMA	21.958	11,47
6	Tamat SMK	9.438	4,93
7	Tamat Diploma I/II	2.765	1,44
8	Tamat Diploma III/Sarmud	2.391	1,25
9	Tamat Sarjana	3.941	2,06
	Jumlah	191.422	100,00

Sumber : Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010

Data tabel 2.40 memperlihatkan bahwa proporsi terbesar (26,56 persen) penduduk Dharmasraya tahun 2010 adalah tamat SD, kemudian tidak/belum tamat SD, tamat SMP, tidak/belum pernah sekolah. Berdasarkan sebaran data tabel 3 terdapat kecenderungan makin tinggi jenjang pendidikan makin sedikit penduduk yang berpartisipasi di dalamnya.

b) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah



murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu.

Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan. Dari indikator APK Kabupaten Dharmasraya tahun 2007-2010 terlihat bahwa APK SD di Kabupaten Dharmasraya lebih dari 100,52 yang berarti terdapat kemungkinan adanya pelajar dari daerah lain atau murid yang berusia diluar usia resmi SD. APK SMP dalam rentang tahun 2007-2010 menurun dari 70,34% menjadi 69,58 % dan APK SMA meningkat dari 38,77% menjadi 85,85%.

Tabel 2.41
Indikator Angka Partisipasi Kasar Tahun 2005-2010

No.	Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK)	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1	APK SD	105,06	123,26	121,93	100,52
2	APK SMP	70,34	72,47	75,80	69,58
3	APK SMA	38,77	87,49	73,91	85,85

Sumber : Dinas Pendidikan kabupten Dharmasraya Tahun 2010

c) Angka Partisipasi Murni (APM)

Pendidikan merupakan kunci strategi dalam mempersiapkan terwujudnya anak bangsa yang demokratis, berketrampilan, cerdas, kreatif, memperteguh akhlaq serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka menghadapi persaingan global yang tanpa batas. Selain tingkat pendidikan, keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan juga dapat dilihat dari perkembangan indikator Angka Partisipasi Murni (APM). APM mencerminkan perbandingan jumlah siswa yang bersekolah di jenjang tertentu dengan usia tertentu dibanding dengan jumlah penduduk usia sekolah (usia tertentu untuk jenjang tertentu).

Tabel 2.42
Perkembangan APM Tahun 2007-2010

Usia	2007	2008	2009	2010
7 - 12	98,76	99,12	97,32	97,77
13 - 15	85,85	85,85	88,19	80,30
16 - 18	60,85	60,13	55,51	56,41

Sumber : Dinas Pendidikan kabupten Dharmasraya Tahun 2010

Perkembangan Angka Partisipasi Murni, untuk semua kelompok usia sekolah baik SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/MA/SMK periode 2007-2011 setiap tahun mengalami fluktuatif. Akan tetapi pola APM dari ketiga kelompok usia



sekolah tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa, makin tinggi jenjang pendidikan makin rendah tingkat partisipasi penduduk di dalamnya. Dengan kata lain, tingkat partisipasi murni pada jenjang pendidikan SD lebih tinggi dibanding jenjang pendidikan di atasnya, SMP dan SMA. Hal ini bisa jadi disebabkan masih banyaknya lulusan SD dan SMP melanjutkan pendidikan keluar kabupaten Dharmasraya yang tidak terdata. Atau bisa jadi sebaliknya masih banyaknya penduduk tamat SMP/MTs yang tidak melanjutkan sekolah tetapi kurang terdata dengan baik.

Jika dibandingkan dengan 12 kota/kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Barat, untuk angka partisipasi sekolah kabupaten Dharmasraya berada pada peringkat ke 6 untuk tingkat SD, peringkat 12 untuk tingkat SLTP, dan peringkat 9 untuk tingkat SLTA. Sedangkan untuk perbandingan APM antar kabupaten, kabupaten Dharmasraya untuk tingkat SD berada pada peringkat ke tiga tertinggi, peringkat ke lima untuk tingkat SMP dan peringkat ke dua untuk tingkat SMA.

d) Angka Partisipasi Murni perkecamatan

Bila dilihat APM menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 nilai APM untuk SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B dan SMA/SMK/MA/Paket C masih rendah dengan angka partisipasi dibawah 100 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Perbandingan APM Menurut Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007 - 2010

Angka Partisipasi Murni (APM)	2007	2008	2009	2010
SD/MI/Paket A	109.98	100.82	88.72	94,62
SMP/MTs/Paket B	57.74	60.18	55.54	59.66
SMA/SMK/MA/Paket C	67.25	59.73	59.32	47,47

Sumber : Pengolahan data sekunder tahun 2010

e) Angka Melek Huruf

Indikator lain terkait dengan pendidikan penduduk dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat adalah angka melek huruf penduduk usia 15-44. Kelompok penduduk usia ini merupakan penduduk usia produktif, sebagai sumber daya pembangunan yang seharusnya memiliki pendidikan yang memadai dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, dianggap penting untuk melihat perkembangan kemajuan indikator ini.

Tabel 2.44
Penduduk Usia 15-44 Tahun yang Melek Huruf Tahun 2010

No.	Kecamatan	Penduduk 15-44 tahun	Penduduk Buta	Penduduk Bisa Baca	Angka
-----	-----------	----------------------	---------------	--------------------	-------



		Huruf 15 - 44 Th			15-44 Th			Melek Huruf			
		L	P	L+P	L	P	L+P				
1	Sungai Rumbai	4.742	4.386	9.128	180	87	267	4.562	4.299	8.861	97,07
2	Koto Baru	7.353	6.958	14.311	167	143	310	7.186	6.815	14.001	97,83
3	Sitiung	5.748	5.418	11.166	109	8	117	5.639	5.410	11.049	98,95
4	Pulau Punjung	9.505	8.727	18.232	367	110	477	9.138	8.617	17.755	97,38
5	IX Koto	1.682	1.650	3.332	0	0	0	1.682	1.650	3.332	100,00
6	Timpeh	3.250	3.164	6.414	0	0	0	3.250	3.164	6.414	100,00
7	Koto Salak	3.721	3.589	7.310	0	0	0	3.721	3.589	7.310	100,00
8	Tiumang	2.799	2.652	5.451	0	0	0	2.799	2.652	5.451	100,00
9	Padang Laweh	1.488	1.313	2.801	0	0	0	1.488	1.313	2.801	100,00
10	Asam Juhan	3.198	2.671	5.869	0	0	0	3.198	2.671	5.869	100,00
11	Koto Besar	5.874	5.396	11.270	0	0	0	5.874	5.396	11.270	100,00
Dharmasraya		49.360	45.924	95.284	823	348	1.171	48.537	45.576	94.113	98,77

Sumber : Pengolahan data sekunder tahun 2010

Berdasarkan data Tabel 2.44 dapat dilihat bahwa hampir semua penduduk usia 15-44 tahun di daerah Dharmasraya sudah melek huruf, kecuali di empat kecamatan yaitu Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung dan Sitiung masih ditemukan penduduk yang buta huruf meskipun dalam jumlah yang relatif sedikit (kurang dari lima persen).

f) Rasio Murid Per Guru

Rasio murid per guru didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio murid per guru dapat digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah guru yang dapat melayani murid di suatu sekolah atau daerah tertentu. Jika rasio tinggi, berarti satu orang tenaga pengajar harus melayani banyak murid. Banyaknya murid yang diajarkan akan mengurangi daya tangkap murid pada pelajaran yang diberikan atau mengurangi efektivitas pengajaran. Sebagaimana dinyatakan dalam indikator rasio murid per guru dapat ditunjukkan keefektifan seorang guru dibanding dengan jumlah siswa yang dilayani.

Sesuai dengan angka pada tabel 21 ditunjukkan berbagai indikasi pada setiap kecamatan sebagai berikut: (a) untuk tingkat SD dua rasio tertinggi adalah di Sungai Rumbai (18) dan Koto Besar (17). Sementara rasio terendah berada IX Koto (9), (b) untuk tingkat SMP rasio guru tertinggi berada di Sungai Rumbai (14) dan terendah di Tiumang (5), dan (c) untuk tingkat SMA/MA rasio guru tertinggi juga terdapat di Sungai Rumbai (10), dan untuk SMA terdapat kecamatan dengan rasio guru nol. Artinya pada daerah tersebut belum tersedia sekolah SMA dan sejenisnya.

Tabel 2.45

Rasio Murid Per Guru di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

No	Kecamatan	Siswa Per Guru
----	-----------	----------------



		SD+MI	SMP+MTs	SM+MA
1	Sungai Rumbai	18	14	10
2	Koto Baru	14	10	9
3	Sitiung	14	8	8
4	Pulau Punjung	13	11	9
5	IX Koto	9	8	#####
6	Timpeh	14	7	9
7	Koto Salak	12	10	##---###
8	Tiumang	11	5	###-##
9	Padang Laweh	13	8	#####
10	Asam Jujuhan	14	11	#####
11	Koto Besar	17	11	7
Dharmasraya		14	9	9

Sumber : Pengolahan data sekunder tahun 2010

Dari penjelasan rasio guru per kecamatan di atas terlihat bahwa kecukupan guru untuk pendidikan dasar dan menengah secara relatif sudah memadai, walau ada indikasi bahwa di wilayah tertentu seorang guru hanya melayani sedikit siswa atau rata-rata kurang dari 10 orang. Angka ini menggambarkan kurang efisiennya praktek pembelajaran, karena guru “lebih banyak” dibanding dengan siswa yang harus dilayani. Hal ini dapat terjadi karena kebijakan makro di satu sisi membangun sekolah dasar yang dilakukan tanpa memperhatikan potensi siswa dan prediksi ke depan. Prediksi ini khususnya berkaitan dengan angka pertumbuhan penduduk yang cenderung terkendali akibatnya jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan semakin berkurang. Sementara itu, ada beberapa daerah kecamatan di Dharmasraya dengan rasio tidak dapat dihitung, karena pada daerah tersebut belum tersedia sekolah untuk jenjang SMA/MA yaitu: IX Koto, Koto Salak, Tiumang, Padang Laweh dan Asam Jujuhan.

g) Rasio Kelas Per-Guru

Rasio Kelas per Guru didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah kelas dengan jumlah guru pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Kegunaannya adalah untuk mengetahui kekurangan/kelebihan guru yang mengajar di kelas pada suatu daerah tertentu. Makin tinggi nilai rasio, berarti makin banyak pula jumlah kelas yang harus diisi pelajaran oleh guru dan ini berarti juga konsentrasi mengajar guru makin terpecah.

Tabel 2.46
Rasio Kelas Per Guru di Kabupaten Dharmasraya

No.	Kecamatan	Rasio Kelas Per Guru		
		SD	SLTP	SLTA



1	Sungai Rumbai	0,71	0,44	0,35
2	Koto Baru	0,57	0,35	0,32
3	Sitiung	0,60	0,32	0,29
4	Pulau Punjung	0,58	0,37	0,30
5	IX Koto	0,62	0,36	0,00
6	Timpeh	0,66	0,30	0,34
7	Koto Salak	0,60	0,41	0,00
8	Tiumang	0,58	0,26	0,00
9	Padang Laweh	0,62	0,38	0,00
10	Asam Jujuhan	0,69	0,50	0,00
11	Koto Besar	0,67	0,42	0,27
Dharmasraya		61,91	0,62	0,36

Sumber : Pengolahan data sekunder

h) Rasio Guru per Sekolah

Rasio Tenaga pengajar per Sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah tenaga pengajar dibandingkan dengan jumlah sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui kekurangan/kelebihan tenaga pengajar yang mengajar di sekolah pada suatu daerah tertentu. Makin rendah nilai rasio, berarti makin terbatas juga jumlah tenaga pengajar yang mengajar di suatu sekolah tertentu.

Tabel 2.47
Rasio Guru Per Sekolah di Kabupaten Dharmasraya

No.	Kecamatan	Rasio Guru Per Sekolah		
		SD	SLTP	SLTA
1	Sungai Rumbai	16,67	21,33	39,50
2	Koto Baru	14,65	26,88	37,00
3	Sitiung	11,80	21,29	25,00
4	Pulau Punjung	15,54	19,90	33,00
5	IX Koto	10,54	11,00	0,00
6	Timpeh	12,17	17,20	20,50
7	Koto Salak	12,38	24,50	0,00
8	Tiumang	11,31	17,50	0,00
9	Padang Laweh	13,75	13,00	0,00
10	Asam Jujuhan	12,25	10,00	0,00
11	Koto Besar	12,76	17,75	22,00
Dharmasraya		13,07	13,13	20,09

Sumber : Pengolahan data sekunder tahun 2010

Dari gambaran tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, di kabupaten Dharmasraya untuk tingkat SD, rata-rata rasio guru per sekolah adalah 13,07 dengan rasio terendah ada di Kecamatan IX Koto. Rata-rata dalam satu sekolah hanya terdapat 10 orang guru. Sedangkan rasio tertinggi terdapat pada kecamatan Sungai Rumbai, dimana dalam satu sekolah rata-rata terdapat hampir 17 orang guru. Namun keadaan di atas tidak jauh berbeda dengan keadaan di SMP dimana rata-rata dalam satu sekolah terdapat 13

orang guru. Berbeda dengan keadaan di SMA, rata-rata dalam satu dekolah di kabupaten Dharmasraya terdapat 20 orang guru.

Berdasarkan sebaran data di atas dapat disimpulkan bahwa, pencapaian indikator sosial terkait dengan potensi pendidikan secara umum sudah termasuk tinggi, dan potensi tersebut perlu dipertahankan dengan selalu meningkat pembangunan dalam bidang pendidikan seperti memperhatikan pemerataan jumlah guru berdasarkan bidang studi yang ada, memberikan bantuan beasiswa bagi pelajar/mahasiswa pada kelas ekonomi rendah, beasiswa pengembangan bakat minat. Prioritas pembangunan pendidikan juga perlu diprioritas pada daerah-daerah dengan capaian potensi pendidikan agak tertinggal dibanding daerah kecamatan lainnya di Dharmasraya, yaitu kecamatan IX Koto, Koto Salak, Tiumbang, Padang Laweh dan Asam Jujuhan. Selain itu, agar orientasi pembangunan berjalan dengan baik perlu dilakukan pendataan indikator pendidikan termasuk enrollment ratio secara lebih baik dan terpercaya.

3) Kesehatan

Cita-cita semua bangsa yaitu dapat mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang sehat jasmani dan rohani. Upaya peningkatan derajat kesehatan penduduk sangat penting dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, agar seluruh penduduk dapat menikmati hidup sehat. Peningkatan derajat kesehatan harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Derajat kesehatan yang lebih baik merupakan investasi modal manusia dalam meningkatkan produktivitas.

Selain itu, pembangunan di bidang kesehatan juga menekankan pentingnya peningkatan perilaku hidup sehat dan peran aktif masyarakat dalam memelihara dan melindungi kesehatan diri dan lingkungannya. Upaya kesehatan sedapat mungkin dilakukan sejak dini bahkan sejak masih dalam kandungan, karena masalah kesehatan dapat berpengaruh terhadap keturunan berikutnya. Berikut ini dipaparkan tentang berbagai indikator kesehatan yang terdapat di kabupaten Dharmasraya, baik terkait dengan sarana prasarana, maupun kualitas kesehatan masyarakat.

a) **Angka Kematian Bayi**

Angka kematian bayi di Indonesia menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari 68 pada tahun 1991 menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007, sehingga target sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 diperkirakan dapat tercapai. Demikian pula dengan target kematian anak diperkirakan akan dapat tercapai. Namun demikian, masih terjadi disparitas regional pencapaian target, yang mencerminkan adanya perbedaan akses atas pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah miskin dan terpencil. Prioritas kedepan adalah memperkuat system kesehatan dan meningkatkan akses pada pelayanan kesehatan terutama



bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015.

Tabel 2.48
Angka Kematian Bayi Kabupaten Dharmasraya Per 1000 KH

Tahun	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Target MDGs 2015
AKB	19	25	25	23	16	17	23 per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan suatu masyarakat, disamping AKI dan angka harapan hidup. Berdasarkan data AKB tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat bahwa jumlah kematian bayi di daerah Dharmasraya mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2006 dan 2007 berada diatas angka target MDGs. Namun untuk tahun 2008 AKB Dharmasraya persis sama dengan target MDGs. Sedangkan pada tahun 2005, 2009, dan 2010 menunjukkan angka yang lebih rendah.

Tabel 2.49
Angka Kematian Bayi Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten/Kota		Kematian Bayi	Lahir Hidup	AKB	Peringkat Kab & Kota	Peringkat Kabupaten
Kota						
1	Padang	65	15.444	4,21	6	
2	Solok	8	659	12,14	17	
3	Sawahlunto	12	1.073	11,18	16	
4	Padang Panjang	17	3.634	4,68	8	
5	Bukittinggi	0	1.973	0,00	1	
6	Payakumbuh	0	1.985	0,00	1	
7	Pariaman	6	1.122	5,35	11	
Kabupaten						
1	Kep.Mentawai	3	2.127	1,41	4	2
2	Pesisir Selatan	81	666	121,62	19	12
3	Solok	25	2.284	10,95	15	10
4	Sijunjung	34	3.539	9,61	14	9
5	Tanah Datar	25	5.290	4,73	9	5
6	Padang Pariaman	3	6.746	0,44	3	1
7	Agam	22	7.662	2,87	5	3
8	50 Kota	19	4.193	4,53	7	4
9	Pasaman	26	4.899	5,31	10	6
10	Solok Selatan	11	1.445	7,61	12	7
11	Dharmasraya	11	1.173	9,38	13	8
12	Pasaman Barat	47	3.693	12,73	18	11

Sumber : Sumbar Dalam Angka

b) Angka Kematian Ibu

Dari semua target MDGs, kinerja penurunan angka kematian ibu secara global masih rendah. Di Indonesia, angka kematian ibu melahirkan (MMR/Maternal Mortality Rate) menurun dari 390 pada tahun 1991 menjadi



228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Target pencapaian MDG pada tahun 2015 adalah sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga diperlukan kerja keras untuk mencapai target tersebut. Walaupun pelayanan antenatal dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan telah cukup tinggi, beberapa faktor seperti risiko tinggi pada saat kehamilan dan aborsi perlu mendapat perhatian. Upaya menurunkan angka kematian ibu didukung pula dengan meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi dan menurunkan *unmeet need* yang dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Ke depan, upaya peningkatan kesehatan ibu diprioritaskan pada perluasan pelayanan kesehatan berkualitas, pelayanan obstetrik yang komprehensif, peningkatan pelayanan keluarga berencana dan penyebaran komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Tabel 2.50
Angka Kematian Ibu Kabupaten Dharmasraya Per 100.000 KH

Tahun	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Target MDGs 2015
AKI	311	292	292	257	249	174	102 per 1000 LH

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

Angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan suatu masyarakat, disamping AKB dan angka harapan hidup. Berdasarkan data AKI tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat bahwa jumlah kematian ibu di daerah Dharmasraya terus menunjukkan penurunan yang cukup signifikan pada setiap tahun, namun angka terakhir (2010) masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka target MDGs 2015.

Angka kematian ibu tahun 2005 hingga 2010 masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan target MDGs 2015 yaitu pada level 102 per 100.000 kelahiran hidup. Masih tingginya angka kematian bayi bisa terjadi karena jumlah anak yang besar, jarak kelahiran yang pendek maupun terkait dengan kurangnya pemahaman dan pengetahuan ibu tentang peningkatan gizi keluarga. Atau bisa terkait dengan masih rendahnya pendapatan masyarakat yang dapat mendukung upaya peningkatan gizi keluarga, terutama gizi ibu hamil.

Dengan demikian, sebagaimana disebutkan di atas program kebijakan penduduk perlu bertumpu pada upaya menurunkan angka fertilitas misalnya dengan meningkatkan KIE, memperkenalkan Buku Saku Perkawinan bagi pasangan yang mau menikah terkait dengan pola fertilitas serta berbagai resiko fertilitas yang tinggi. Program pengenalan Buku Saku Perkawinan perlu dikembangkan melalui koordinasi antara BKKBN, Depag, dan Dinas Kesehatan. Upaya menurunkan angka kematian ibu didukung pula dengan meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi dan menurunkan *unmeet need* yang dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Ke depan, upaya peningkatan kesehatan ibu diprioritaskan pada perluasan pelayanan kesehatan berkualitas, pelayanan



obstetrik yang komprehensif, peningkatan pelayanan keluarga berencana dan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.

c) Angka Kematian Bayi dan Balita serta Gizi Buruk per Puskesmas

Angka kematian balita pada tahun 2011 per puskesmas tercatat 30 dari 3.611 kelahiran. Jumlah penderita gizi buruk tercatat perpuskesmas sebanyak 717 orang dan gizi kurang sebanyak 1.877 orang dari 15.469 yang ditimbang. Peserta KB aktif di Kabupaten Dharmasraya 4.480 orang dari 15.469 orang pasangan usia subur (14,5%).

Tabel 2.51
Angka Kelahiran Kabupaten Dharmasraya per Puskesmas

No	Kecamatan	Nama Puskesmas	Jumlah Kelahiran								
			Laki-Laki			Perempuan			Laki-Laki + Perempuan		
			Hidup	Mati	Total	Hidup	Mati	Total	Hidup	Mati	Total
1	IX Koto	Silago	59	0	59	53	0	53	112	0	112
2	Pulau Punjung	Sialang	105	1	106	109	0	109	214	1	215
		Sungai Dareh	261	3	264	197	2	199	458	5	463
3	Sitiung	Gunung Medan	98	0	98	95	0	95	193	0	193
		Sitiung I	120	2	122	94	0	94	214	2	216
4	Timpeh	Timpeh	108	2	110	106	2	108	214	4	218
5	Padang Laweh	Padang Laweh	70	1	71	29	1	30	99	2	101
6	Koto Baru	Koto Baru	337	3	340	330	3	333	667	6	673
7	Koto Salak	Koto Salak	105	0	105	132	2	134	237	2	239
8	Koto Besar	Koto Besar	261	2	263	220	0	220	481	2	483
9	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	305	3	308	177	3	180	482	6	488
10	Asam Jujuhan	Sungai Limau	100	0	100	110	0	110	210	0	210
Jumlah			1.929	17	1.946	1.652	13	1.665	3.581	30	3.611

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

Tabel 2.52
Angka Kematian di Kabupaten Dharmasraya per Puskesmas

No	Kecamatan	Nama Puskesmas	Jumlah Kematian								
			Laki-Laki			Perempuan			Total		
			Bayi	Anak Balita	Balita	Bayi	Anak Balita	Balita	Bayi	Anak Balita	Balita
1	IX Koto	Silago			0	0	0	0	0	0	0
2	Pulau Punjung	Sialang			0	0	0	0	0	0	0
		Sungai Dareh	2	1	3	1	1	2	3	2	5
3	Sitiung	Gunung Medan	1		1	1	0	1	2	0	2
		Sitiung I	1	1	2	0	0	0	1	1	2
4	Timpeh	Timpeh		3	3	0	0	0	0	3	3
5	Padang Laweh	Padang Laweh			0	0	0	0	0	0	0
6	Koto Baru	Koto Baru	4	1	5	3	1	4	7	2	9



No	Kecamatan	Nama Puskesmas	Jumlah Kematian								
			Laki-Laki			Perempuan			Total		
			Bayi	Anak Balita	Balita	Bayi	Anak Balita	Balita	Bayi	Anak Balita	Balita
7	Koto Salak	Koto Salak			0	1	0	1	1	0	1
8	Koto Besar	Koto Besar	4	1	5	1	1	2	5	2	7
9	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	1	1	2	0	0	0	1	1	2
10	Asam Jujuhan	Sungai Limau			0	1	0	1	1	0	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

Tabel 2.53
Jumlah Penderita Gizi Buruk per Puskesmas Tahun 2011

No	Kecamatan	Nama Puskesmas	Gizi Buruk	
			Jumlah	%
1	IX Koto	Silago	53	6,13
2	Pulau Punjung	Sialang	42	5,72
		Sungai Dareh	108	6,14
3	Sitiung	Gunung Medan	41	4,66
		Sitiung I	23	2,07
4	Timpeh	Timpeh	33	3,25
5	Padang Laweh	Padang Laweh	13	2,75
6	Koto Baru	Koto Baru	182	5,69
7	Koto Salak	Koto Salak	47	5,77
8	Koto Besar	Koto Besar	95	5,44
9	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	42	2,49
10	Asam Jujuhan	Sungai Limau	38	3,19
Jumlah			717	4,64

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

Tabel 2.54
Status Gizi Balita Menurut Jenis kelamin, Kecamatan, dan Puskesmas Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Puskesmas	Balita				
			Balita Ditimbang	Gizi Lebih	Gizi Baik	Gizi Kurang	Gizi Buruk
1	IX Koto	Silagi	864	16	0	228	53
2	Pulau Punjung	Sialang	734	10	0	147	42
		Sungai Dareh	1.758	62	0	352	108
3	Sitiung	Gunung Medan	880	22	0	158	41
		Sitiung I	1.110	13	0	235	23
4	Timpeh	Timpeh	1.016	18	0	212	33
5	Padang Laweh	Padang Laweh	472	9	0	110	13
6	Koto Baru	Koto Baru	3.200	47	0	659	182
7	Koto Salak	Sitiung II	814	17	0	134	47
8	Koto Besar	Koto Besar	1.747	47	0	312	95
9	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	1.684	55	0	207	42
10	Asam Jujuhan	Sungai Limau	1.190	25	0	123	38
Jumlah			15.469	341	0	1.877	717

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

Tabel 2.55
Jumlah Peserta KB Baru dan KB Aktif Menurut Kecamatan dan Puskesmas Kabupaten Dharmasraya



No.	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Pus*	Peserta KB Baru		Peserta KB Aktif	
				Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pulau Punjung	Sungai Dareh	3.951	263	6,7	676	17,1
		Sialang	1.807	389	21,5	389	21,5
2	IX Koto	Silago	1.180	676	57,3	263	22,3
3	Timpeh	Timpeh	2.166	364	16,8	498	23,0
4	Sitiung	Sitiung I	2.060	48	2,3	48	2,3
		Gunung Medan	1.657	498	30,1	364	22,0
5	koto baru	Koto Baru	6.404	292	4,6	928	14,5
6	Padang laweh	Padang Laweh	864	928	107,4	292	33,8
7	Koto Salak	Sitiung II	2.423	46	1,9	46	1,9
8	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	2.903	126	4,3	749	25,8
9	Asam jujuhan	Sungai Limau	1.697	749	44,1	101	6,0
10	Koto besar	Koto Besar	3.679	101	2,7	126	3,4
Jumlah			30.791	4.480	14,5	4.480	14,5

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

Catatan: * PUS (Pasangan Usia Subur)

Tabel 2.56
Capaian Program Dinas Kesehatan Tahun 2005-2010

No	Indikator	Tahun 2005		Tahun 2006		Tahun 2007		Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010	
		Capaian	%	Capaian	%	Capaian	%	Capaian	%	Capaian	%	Capaian	%
1	Jumlah Kematian Bayi (per seribu kelahiran hidup)	50	17	46	14	87	26	79	23	59	17,9	56	13,6
2	Jumlah Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	11	366	4	120	10	296	9	257	9	273,8	6	145
3	Jumlah Balita Gizi Buruk	44	17	53	22	55	22	88	42	186	102,2	156	81,5

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

d) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) yang menunjukkan usia rata-rata harapan hidup di Kabupaten Dharmasraya antara tahun 2007 - 2010 meningkat dari 65,3 tahun menjadi 66,0 tahun. Meskipun terdapat sedikit kenaikan tetapi masih dibawah AHH Sumbar pada tahun 2007 - 2010 yaitu tercatat 68,81 tahun dan 69,5 tahun

c. Fokus Seni Budaya

Kabupaten Dharmasraya memiliki jejak kekayaan budaya sejak abad ke 14. Dalam masa sekarang berkembang keragaman budaya terutama Minangkabau



dan Jawa. Peninggalan budaya berupa bangunan seperti beberapa candi pada situs kawasan perkembangan kerajaan Dharmasraya dan empat rumah gadang kerajaan. Seni budaya yang menonjol yang telah berkembang seperti batik tanah liat. Selain itu masih hidup berbagai kesenian tradisional yang masih dipentaskan pada hari perayaan tertentu.

d. Fokus Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan berkaitan dengan berbagai kegiatan yang bisa memenuhi kebutuhan pemuda seperti kegiatan organisasi kepemudaan dalam hal kepemimpinan, kewirausahaan, dan ketrampilan. Selain itu terkait juga dengan berbagai upaya untuk mengatasi dampak negatif dari perilaku. Berbagai hal telah dilakukan untuk pengembangan kegiatan kepemudaan. Tetapi masih dibutuhkan berbagai kegiatan yang mendorong kemandirian dan ketrampilan usaha bagi pemuda. Belum terdapat sarana olah raga tingkat kabupaten yang minimal memenuhi standar untuk melangsungkan kegiatan olahraga yang populer seperti sepak bola, basket atau voli sehingga bisa menampung event kejuaraan di Kabupaten Dharmasraya. Perkembangan prestasi olahraga anak-anak, remaja dan pemuda Dharmasraya terkendala dengan kurangnya sarana ini.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Fokus Layanan Dasar Urusan Wajib

1. Pendidikan

Berdasarkan data saat ini jumlah SMP/MTS adalah 46 unit dan SMU/MA sebanyak 18 Unit. Kecamatan-kecamatan yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan SMA/MA adalah Asam Jujuhan, Tiumbang, Padang Laweh, dan IX Koto. Kecamatan-kecamatan ini perlu mendapatkan prioritas pelayanan. Sarana pendidikan dasar (SD) sampai sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) perlu direncanakan untuk dapat menjangkau seluruh penduduk Kabupaten Dharmasraya. Kendala yang dihadapi adalah tersebarnya penduduk pada area yang luas sehingga jarak menjadi kendala utama pelayanan. Untuk itu minimal pada setiap kota kecamatan telah tersedia sarana pendidikan dari SD sampai SLTA. Akses dari kawasan permukiman menuju pusat pelayanan kecamatan tersebut perlu untuk ditingkatkan.

Tabel 2.57
Jumlah Sarana Pendidikan Pelayanan Skala Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	SLTP/Sederajat					Jumlah
		SLTP	MTs	Jumlah	SLTA	MA	
1	Sungai Rumbai	2	1	3	1		1
2	Koto Besar	3	1	4	1		1
3	Asam Jujuhan	1		1			
4	Koto Baru	4	4	8		3	3
5	Koto Salak	2		2	2		2



No	Kecamatan	SLTP/Sederajat					
		SLTP	MTs	Jumlah	SLTA	MA	Jumlah
6	Tiumang	1	1	2			
7	Padang Laweh	1		1			
8	Sitiung	3	4	7	1	4	5
9	Timpeh	4	1	5	1	1	2
10	Pulau Punjung	7	3	10	2	2	4
11	IX Koto	3		3			
Jumlah		31	15	46	12	10	22

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Dharmasraya

2. Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada meliputi RSU, Puskesmas, Puskesmas Keliling, dan Puskesmas Pembantu. Saat ini terdapat 2 unit rumah sakit yaitu RSUD Sungai Dareh dan Rumah Sakit Rujukan yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. Jumlah puskesmas yang tersedia adalah sebanyak 12 unit, setiap kecamatan rata-rata memiliki 1 puskesmas kecuali untuk kecamatan Pulau Punjung dan Sitiung masing-masing terdapat dua puskesmas. Sementara di kecamatan Tiumang tidak terdapat puskesmas yang dapat melayani penduduk.

Tabel 2.58
Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

No	Kecamatan	Sarana Kesehatan (unit)					
		RSU	Puskesmas	Puskesmas Keliling	Puskesmas Pembantu	Balai Pengobatan	Rumah Bersalin
1	Sungai Rumbai	-	1	1	7	1	3
2	Koto Besar	-	1	-	2		
3	Asam Jujuhan	-	1	1	-		
4	Koto Baru	-	1	1	5	1	
5	Koto Salak	-	1	1	5		
6	Tiumang	-	-	-	7		
7	Padang Laweh	-	1	1	2		
8	Sitiung	-	2	2	6	1	
9	Timpeh	-	1	1	4	1	
10	Pulau Punjung	2	2	1	4	3	1
11	IX Koto	-	1	1	3		
Jumlah		2	12	10	45	7	4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2010

Jumlah dokter spesialis di kabupaten Dharmasraya sebanyak 6 orang.. Angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan standar rasio dokter spesialis per penduduk berdasarkan peraturan menteri kesehatan 2010 yaitu 3 dokter per 100.000 penduduk. Selain itu untuk jumlah dokter umum ada sebanyak 64 orang dengan rasio 31,9 dokter per 100.000. Sedangkan standar yang ditetapkan pemerintah adalah 40 dokter per 100.000. Untuk itu, dengan jumlah penduduk Dharmasraya 191.000 jiwa, masih perlu ditambahkan 18 dokter umum agar kebutuhan dokter dapat tercukupi. Selanjutnya jumlah dokter gigi di Dharmasraya ada 21 orang dengan rasio sebesar 10,1 per 100.000 penduduk. Angka ini tidak jauh berbeda dengan angka standar yang ditetapkan pemerintah yaitu 11 orang per 100.000.



Tabel 2.59
Distribusi Tenaga Medis, Keperawatan dan Bidan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

No	Wilayah	Unit Kerja	Dokter			Perawat	Bidan
			Spesialis	Umum	Gigi		
1	Kab.Dharmasraya	Rumah Sakit	6	11	2	70	21
2	Kab.Dharmasraya	Dinas Kesehatan	0	1	1	14	5
3	Kec.IX Koto	Puskesmas Silago	0	5	1	14	26
4	Kec.Pulau Punjung	Puskesmas Sialang	0	2	1	12	21
		Puskesmas S. Dareh	0	3	2	9	12
5	Kec.Sitiung	Puskesmas Gunung Medan	0	5	2	12	27
		Puskesmas Sitiung I	0	6	1	22	23
6	Kec.Timpeh	Puskesmas Timpeh	0	4	1	13	18
7	Kec.Padang Laweh	Puskesmas Padang Laweh	0	9	3	41	42
8	Kec.Koto Baru	Puskesmas Koto Baru	0	2	1	5	19
9	Kec.Koto Salak	Puskesmas Koto Salak	0	3	1	12	21
10	Kec.Koto Besar	Puskesmas Koto Besar	0	8	2	22	23
11	Kec.Sungai Rumbai	Puskesmas S.Rumbai	0	2	2	7	9
12	Kec.Asam Jujuhan	Puskesmas S. Limau	0	3	1	8	18
Total			6	64	21	300	278

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2010

Selanjutnya untuk tenaga keperawatan, rasio tenaga perawat yang tersedia sebanyak 131 per 100.000 penduduk, dimana standar kecukupan yang harus dicapai hanya 117,5 orang per 100.000. Dengan demikian, tidak perlu ada penambahan jumlah perawat. Demikian juga tenaga bidan, di Dharmasraya terdapat 142 bidan per 100.000 penduduk. Angka ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan angka kebutuhan bidan, yaitu 100 orang per 100.000 penduduk. Artinya jumlah bidan di Dharmasraya sudah lebih banyak dibanding dengan kebutuhan yang ada.

3. Pekerjaan Umum

a. Prasarana Air Minum

Proporsi pelayanan air BPAM hanya 0,67% paling sedikit di Sumbar jauh dibawah rata-rata pelayanan 15,95%. Sumber air minum kemasan isi ulang dilevel kabupaten tertinggi bersama Sijunjung dan Pasaman Barat. Terlihat bahwa pada sentra perkebunan kebutuhan air minum menjadi masalah daerah. Dari indikator lain, sumber air minum dengan pompa tertinggi di Sumbar (18,96%) sementara Sijunjung dan Pasaman Barat hanya 1,78% dan 1,83%.



Berdasarkan data 2010, 53,52% RT telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan : 49,18% RT memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perkotaan dan 55,75% RT memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perdesaan.

BPAM (Badan Pengelolaan Air Minum) baru mampu melayani sebagian kecil masyarakat di Kabupaten Dharmasraya yaitu sebanyak 132 pelanggan. Saat ini Kabupaten Dharmasraya memiliki instalasi pengolahan air (WTP) sebanyak 5 Unit. Beberapa sumber air baku yang berpotensi untuk pengembangan sistem penyediaan air minum, yaitu Sungai Batang Siat dengan debit minimum dan maksimum mencapai 4 - 6 liter/detik; Sungai Batang Momong 35 - 40 liter/detik; Sungai Batang Pauh 3 - 10 liter/detik.; Sungai Batang Siraho 8 - 30 liter/detik; Sungai Betung 10 - 18 liter/detik; dan Sungai Batang Timpeh debit 6 liter/detik.

b. Sanitasi Lingkungan

Berdasarkan Sensus Penduduk 2010 mayoritas rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya menggunakan WC sendiri sebagai fasilitas buang air besar/kecil yaitu sebesar 68%, sedangkan 10% RT memakai jamban bersama dan 2% RT yang menggunakan jamban umum, sementara 20% sisanya masih belum memiliki jamban sendiri. bahwa hanya 57,42% rumah tangga yang memiliki septic tank (SPAL), sedangkan sisanya memanfaatkan sungai ataupun tempat lain sebagai saluran akhir pembuangan air limbahnya. 42,58% rumah tangga (19.769 Rumah Tangga) belum memiliki sistem pembuangan air limbah yang layak.

Status capaian kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan indikator target 7C pada tahun 2010 berdasarkan jumlah Rumah Tangga (RT) adalah sebagai berikut:

1. 53,52% RT telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan :
 - a. 49,18% RT memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perkotaan;
 - b. 55,75% RT memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perdesaan.
2. 44,21% RT memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan:
 - a. 21,76% RT memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan;
 - b. 57,31% RT memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perdesaan.

Meskipun SPAL tinja mencapai 57,42% (tertinggi kedua di kabupaten setelah Agam) tetapi proporsi pembuangan lubang tanah 20,27% tertinggi di Sumbar (Susenas, 2010). Sementara Sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) belum tersedia.



Meskipun Kabupaten Dharmasraya sudah memiliki TPA, tetapi dalam belum bisa dioperasikan secara maksimal, karena keterbatasan dan masih kurangnya sarana dan prasarana pengolahan sampah di TPA seperti : Belum memadainya jumlah tempat pembuangan sementara (TPS) kontainer, gerobak, kendaraan pengangkut sampah, dump truck dan Belum tersedianya alat-alat berat yang dibutuhkan (seperti Buldozer, loader), dan jembatan timbang

c. Prasarana Transportasi

Sejak pemekaran tahun 2004 sampai tahun 2011 telah terjadi pembangunan akses yang cukup berarti. Panjang jalan aspal kabupaten tahun 2011 yaitu 432,75 km atau telah bertambah 133,70 km (43,26%) sejak 2004. Akan tetapi masih perlu pembangunan dan peningkatan jaringan jalan dimasa depan.

Untuk mengantisipasi perkembangan wilayah dimasa depan beberapa akses utama yang telah direncanakan dikembangkan yaitu (RTRW Kabupaten Dharmasraya 2011-2031):

- Pengembangan ruas jalan lingkar utara dengan tiga titik keluar menuju kawasan timur Pulau Sumatera. Ruas jalan yang dikembangkan sebagai akses regional menuju koridor timur Pulau Sumatera tersebut yaitu ruas jalan yang menghubungkan Sungai Rumbai – Ampalu – Sungai Langkok - Padang Laweh – Timpeh - Kamang Baru.
- Pengembangan ruas jalan lingkar selatan dengan fungsi lokal primer yang menghubungkan: Sungai Rumbai – Koto Besar - Bukit Gadiang – Aur Jaya - Bukit Mindawa) – Sungai Dareh.
- Pengembangan ruas jalan lingkar Sungai Batanghari dengan membangun jalan sisi Sungai Batanghari sebagai akses menuju rencana kawasan strategis kawasan agroindustri terpadu dan kawasan bersejarah Siguntur sekaligus meningkatkan akses menuju kawasan perkotaan Pulau Punjung menghubungkan: Kampung Surau – Lubuk Bulang - Siluluak- Sungai Langsek –Pulau Tengah Sitiung - Pulai- Bukit Tujuh.
- Pengembangan ruas jalan dengan kabupaten berbatasan yang menghubungkan Kabupaten Dharmasraya dengan kabupaten berbatasan diarah barat yaitu dengan Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Kerinci serta pengembangan akses diarah utara dengan Kabupaten Sijunjung.
- Pengembangan ruas jalan menuju pusat-pusat kegiatan kabupaten untuk memudahkan akses menuju pusat kegiatan pelayanan kabupaten, pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan.

Sarana terminal yang dibangun berdasarkan standar fungsi terminal belum tersedia di Kabupaten Dharmasraya.

d. Prasarana Sumberdaya Air



Sumberdaya air untuk keperluan pengairan lahan sawah di Kabupaten Dharmasraya cukup besar. Kapasitas irigasi Batanghari mencapai luas pengairan 18.936 Ha dengan debit 25 m³/dt dan termanfaatkan lebih kurang 11 m³. Selain itu terdapat DI yang dikelola kabupaten pada lahan lebih kurang 3.500 Ha yang memerlukan peningkatan pengairan. Irigasi teknis di Kabupaten Dharmasraya seluas 5.155 Ha (55,56%), setengah teknis 1.421 Ha (15,32%), sementara irigasi sederhana, non PU, dan tadah hujan seluas 2.702 Ha (29,13%).

Luas sawah berdasarkan tipe pengairan seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.60
Tipe pengairan di Kabupaten Dharmasraya

No	Tipe Pengairan	Total Luas	
		Ha	%
1	Teknis	5.155	55,56%
2	Setengah teknis	1.421	15,32%
3	Sederhana	333	3,59%
4	Irigasi non PU	612	6,60%
5	Tadah hujan	1.757	18,94%
	Luas Total	9.278	100,00%

Sumber : Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2010

Pengembangan sawah irigasi dalam D.I. Batanghari telah direncanakan dalam jangka menengah seluas 1.715 Ha dan masih terdapat potensi ekstensifikasi lahan selanjutnya dalam jangka panjang seluas 3.276 Ha.

e. Prasarana Kawasan Permukiman dan Perumahan

Kantong-kantong kawasan kumuh atau tidak layak huni yaitu kawasan permukiman dan perumahan yang tidak dilengkapi dengan infrastruktur lingkungan memadai terdapat pada kawasan permukiman padat yang dihuni penduduk berpenghasilan rendah terutama di Sungai Rumbai, Koto Baru dan Pulau Punjung.

4. Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan upaya merencanakan, memanfaatkan dan pengendalian tata ruang. Aspek pengendalian tata ruang yang terdiri atas perijinan, pengawasan dan sanksi merupakan aspek penting dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya. Kecenderungan alih fungsi lahan sawah dan kawasan hutan serta pengendalian kegiatan pertambangan liar terjadi di Kabupaten Dharmasraya.

5. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan dilakukan bertahap mulai dari Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, penyusunan RKPD dan



terakhir berupa penganggaran kegiatan dalam APBD. Perencanaan pembangunan seringkali memiliki kendala dalam menyaring dan menentukan prioritas kegiatan pembangunan sesuai dana yang tersedia sehingga transparansi kegiatan yang dianggarkan dari semua usulan sulit dilakukan. Kendala penentuan prioritas kegiatan juga disebabkan format usulan kurang menggambarkan urgensi dan dampak dari usulan kegiatan. Hal ini disebabkan kurang tersedianya data dan informasi yang terstruktur, lengkap dan akurat ditingkat nagari sebagai dasar perencanaan.

6. Lingkungan Hidup

Perkembangan kegiatan pertambangan menjadi penyebab utama pencemaran air sungai. Baku mutu air raksa terdeteksi telah dilewati terutama oleh sungai Muaro Pangian dan Sungai Batanghari bagian hulu, dan pada jumlah yang tidak terlalu signifikan pada sungai Batang Abai Siat, Batang Betung, Batang Siat Hilir, Batang Timpeh, dan Muaro Batang Momongan.

7. Pertanahan

Berdasarkan status lahan, kepemilikan atau penguasaan lahan di Kabupaten Dharmasraya beragam dan menyangkut area yang luas. Di Kabupaten Dharmasraya terdapat kawasan pertambangan, kawasan perkebunan besar, kawasan hutan, kawasan transmigrasi, dan lahan yang dimiliki pemerintah untuk pengembangan fasilitas. Aspek pertanahan dalam pengertian luas terkait dengan informasi status lahan oleh berbagai instansi yang berwenang mengeluarkan perijinan. Untuk itu dibutuhkan administrasi pertanahan yang andal dengan sistem informasi pertanahan yang mampu mengkoordinasikan data pertanahan lintas instansi yang mengurus aspek status lahan. Dengan sistem informasi yang baik dapat dicegah tumpang tindih status lahan dan konflik pertanahan dapat diidentifikasi dari awal. Sertifikasi lahan sebagai program nasional yang menjamin kepastian terhadap lahan masih perlu ditingkatkan pencapaiannya.

8. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera, Sosial

Angka fertilitas perempuan usia subur di Kabupaten Dharmasraya tinggi. Sementara ketimpangan gender terlihat dari indikator berikut:

- Angka partisipasi sekolah penduduk laki-laki lebih besar dibanding penduduk perempuan.
- sementara angka mengulang dan angka putus sekolah tingkat SD dan SMP anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Untuk tingkat SMA angka tersebut relatif sama.

9. Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang paling menentukan dalam proses pembangunan di suatu wilayah. Semakin besar jumlah tenaga kerja, lebih-lebih apabila disertai dengan keahlian yang cukup memadai, akan semakin pesat pula perkembangan pembangunan di wilayah tersebut.

Perekonomian di Kabupaten Dharmasraya masih didominasi oleh sektor pertanian, maka penyerapan tenaga kerja terbesar juga berada di sektor ini. Tabel dibawah ini menjelaskan perkembangan penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Dharmasraya. Dari Tahun 2009 sampai tahun 2011, angka daya serap tenaga kerja di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan angka yang sangat bagus artinya tingkat pengangguran di Kabupaten Dharmasraya sangat rendah. Pada tahun 2011 rasio penyerapan angkatan kerja sebesar 93,35% artinya hanya 6,62% angkatan kerja di Kabupaten Dharmasraya yang menganggur, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rasio penyerapan tenaga kerja Sumatera Barat yang hanya 66,19%.

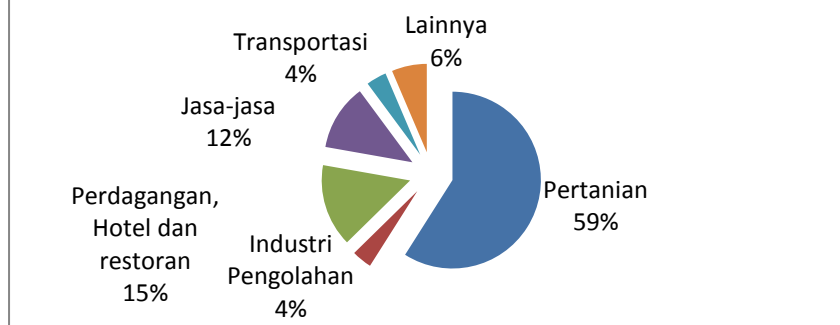
Tabel 2.61
Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Dharmasraya

Lapangan Usaha	Jumlah Angkatan Kerja Yang Bekerja		
	2009	2010	
Pertanian		55,013	
Industri Pengolahan		3,745	
Perdagangan, Hotel dan restoran		12,796	
Jasa-jasa		8,611	
Transportasi		1,864	
Lainnya		5,390	
Total		87,419	
Jumlah Angkatan Kerja		90,963	
Daya Serap Tenaga Kerja (%)	93.38	96.10	
Daya Serap Tenaga Kerja Sumatera Barat (%)	64.19	60.36	

Sumber: Sumbar Dalam Angka dan DDA berbagai tahun edisi

Apabila diperhatikan gambar dibawah ini, maka pada tahun 2011 sebagian besar tenaga kerja yang ada di Kabupaten Dharmasraya masih bekerja di lapangan usaha pertanian yaitu sebanyak 59%. Hal ini terkait dengan realita yang ada di Kabupaten Dharmasraya bahwa memang sector pertanian khususnya tanaman perkebunan mendominasi perekonomian.

Gambar 2.7 : Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011



10. Penanaman Modal

Kecenderungan investasi yang terjadi dilakukan oleh institusi rumah tangga dan BUMD/N Swasta dengan proporsi yang berimbang 44% dan 44%. Sisanya dilakukan oleh pemerintah. Tetapi dengan penguasaan yang besar terhadap sektor hilir (pabrik pengolahan) sehingga berpotensi menimbulkan konflik harga dan pemasaran dan pada akhirnya nilai tambah dari investasi yang ditanamkan tidak dinikmati masyarakat secara penuh. Koefisien ICOR tinggi, nilai tambah dari investasi masih rendah dan kurangnya komunikasi/koordinasi antara perusahaan besar dengan pemerintah daerah

Pengembangan investasi perlu difokuskan pada investasi yang memberikan nilai tambah besar dengan nilai koefisien ICOR terkecil seperti pertambangan, pertanian dan jasa, Pembuatan pabrik pengolahan yang dikelola oleh pemerintah atau kemitraan masyarakat, pemerintah dan swasta.

Selain itu perlu merangsang tumbuh kembangnya usaha ekonomi rakyat berskala kecil terkait dengan peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian seperti karet.

11. Kebudayaan

Upaya dibidang kebudayaan terkait dengan pelestarian dan pengembangan kawasan cagar budaya pada situs bekas kerajaan Dharmasraya dan site empat bangunan rumah gadang kerajaan yang tersebar di Kabupaten Dharmasraya. Selain itu upaya pengembangan atraksi seni budaya yang menonjol dan pengembangan produk unggulan seperti batik tanah liat yang menjadi ciri khas daerah yang selama ini telah dilakukan menjadi fokus pengembangan dimasa depan.

12. Kepemudaan Dan Olah Raga

Berbagai kegiatan yang mendorong kemandirian pemuda perlu terus ditingkatkan berupa kegiatan kewirausahaan dan ketrampilan. Meskipun tingkat pengangguran di Kabupaten Dharmasraya rendah tetapi upaya pengembangan berbagai usaha



ekonomi selain disektor perkebunan bagi mengembangkan berbagai lapangan kerja bagi pemuda diluar sektor perkebunan perlu terus ditingkatkan. Demikian juga kegiatan pengembangan organisasi kepemudaan sebagai wadah pengembangan kreatifitas pemuda akan berdampak untuk menumbuhkan sikap dan perilaku positif bagi pemuda.

sarana olah raga dan rekreasi adalah sarana pelayanan masyarakat yang penting untuk disediakan. Saat ini di Kabupaten Dharmasraya sedang dibangun stadion olah raga (sport center) berskala Kabupaten yang berfungsi untuk menampung kegiatan olah raga maupun kegiatan publik lainnya. Dalam pengembangan keolahragaan selain sarana juga dibutuhkan pengembangan berbagai kegiatan dan pembinaan olahraga berprestasi untuk pelajar, remaja, dan pemuda.

13. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Nagari sebagai unit terendah dalam pengelolaan pembangunan telah memiliki kelengkapan organisasi sebagai unit pengelolaan masyarakat. Selain wal nagari terdapat LPM, BAMUS, PAN, dan KAN. Nagari sebagai unit pemerintahan dan sosial ekonomi terendah dalam tahun belakangan ini telah mendapatkan berbagai bantuan program seperti PNPM, kredit mikro nagari, kredit usaha agro pertanian, kredit usaha ekonomi, unit simpan pinjam dan lainnya. Pada tahun belakangan ini terdapat kecenderungan peningkatan peran nagari dari unit administratif menjadi unit sosial ekonomi untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Luas lahan sawah eksisting di Kabupaten Dharmasraya yaitu 9.278 Ha yang terdapat di D.I. Batanghari seluas 5.782 Ha dan D.I. yang dikelola kabupaten seluas 3.496 Ha. Kapasitas irigasi Batanghari mencapai luas pengairan 18.936 Ha dengan debit 25 m³/dt. Pengembangan sawah irigasi dalam D.I. Batanghari telah direncanakan dalam jangka menengah seluas 1.715 Ha dan masih terdapat potensi ekstensifikasi lahan selanjutnya dalam jangka panjang seluas 3.276 Ha. Dimasa depan masih dimungkinkan ekstensifikasi lahan pertanian tanaman pangan lahan basah di Kabupaten Dharmasraya seluas 4.991 Ha.

Tanaman pangan lain seperti jagung, ubi kayu, kacang-kacangan. Budidaya pertanian tanaman pangan lahan kering berkembang di Kec. IX Koto, Kec. Pulau Punjung, Kec. Koto Besar, Kec. Sitiung, Koto Baru, dan Koto Salak.

Pertanian hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran) di Kabupaten Dharmasraya merupakan kegiatan yang belum memiliki peran besar dalam pertanian seperti perkebunan. Tetapi terdapat komoditi lokal seperti manggis, duku atau durian, yang berpeluang untuk dikembangkan.

2. Perkebunan



Kabupaten Dharmasraya tercatat sebagai daerah potensi terbesar di Sumbar untuk tanaman karet yaitu 31,23% dari luas lahan budidaya di Sumbar dan kelapa sawit kedua terbesar yaitu 18,83% dari luas lahan budidaya di Sumbar (Sumber: BKPMP tahun 2011).

Luas lahan kelapa sawit perkebunan besar 60.374 Ha. Luas kebun kelapa sawit rakyat 29.708 Ha yang terdiri dari kebun produktif 26.381 Ha dan belum produktif 3.327 Ha.

Di Kabupaten Dharmasraya terdapat enam industri CPO yang menampung TBS inti dan plasma serta swakarya, yakni PT. Tidar Kerinci Agung (TKA), PT. Sumber Andalas Kencana (SAK), PT. Incasi Raya, PT. Bina Pratama dan PT Silago Makmur Platation, PT. Dharmasraya Lestarindo dengan total kapasitas produksi 290 ton TBS/jam.

Luas lahan karet perkebunan rakyat 38.359 Ha yang terdiri dari kebun produktif 29.501 Ha; belum produktif 6.871 Ha; dan tidak produktif 2.180 Ha. Produksi utama perkebunan lainnya di Kabupaten Dharmasraya yaitu kopi dengan luas lahan 461 Ha dan kakao seluas 1.395 Ha.

3. Perikanan

Perkembangan sektor perikanan sampai saat ini cukup besar dalam segi produksi maupun penyerapan tenaga kerja. Produksi perikanan budidaya tercatat 1.555 ton pada lahan budidaya seluas 1.028 Ha yang terdiri atas kolam air tenang dan deras 389 Ha; keramba, keramba jaring apung dan jaring tancap 641 Ha; dan mina padi 24,2 Ha. Sementara produksi ikan perairan umum rawa 1.269 ton; sungai 645 ton; dan telaga 11,74 ton (data 2009). Tenaga kerja yang terlibat: jumlah petani budidaya 2.017 orang; pengolahan 63 orang dan pemasaran 104 orang.

Perkembangan sektor perikanan di Kabupaten Dharmasraya didukung oleh infrastruktur: 2 unit Balai Benih Ikan (BBI) yang terdapat di Pulau Punjung dan Koto Baru; 11 unit pembenihan rakyat; 5 unit depo; dan 10 unit kolam percontohan. Produksi BBI Kabupaten Dharmasraya ketiga terbesar di Sumbar setelah Pasaman dan Tanah Datar yaitu 16,71%.

Kontribusi perikanan darat budidaya Kabupaten Dharmasraya di Sumbar hanya 1,23%. Besar produksi perikanan urutan kedelapan dari kabupaten di Sumbar diatas Solok Selatan, Solok, Pesisir Selatan dan Mentawai. Produksi terbesar di Sumbar bagian selatan yaitu Kabupaten Sijunjung sebesar 3.912 ton (Sumbar Dalam Angka 2010).

4. Peternakan

Populasi hewan ternak di Kabupaten Dharmasraya tercatat pada tahun 2011 yaitu: sapi 25.773 ekor; kambing 12.683 ekor; kerbau 4.402 ekor; ayam ras 579



ekor; dan itik 32.033 ekor. Populasi hewan ternak selama 10 tahun terakhir tidak mengalami perubahan signifikan. Khusus sapi potong, jumlah sapi di Kabupaten Dharmasraya 7,88% dari populasi Sumbar. Dengan rumah tangga pemelihara sapi 7.969 maka rata-rata kepemilikan sapi adalah 3,2 ekor per rumah tangga. Penjualan sapi potong hampir seluruhnya didalam kabupaten sendiri (sumber: PSPK Tahun 2011).

5. Kehutanan

Kawasan hutan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan SK MenHut 304 Tahun 2011 seluas 87.174 Ha (28,91% dari luas kabupaten). Dari seluruh kawasan hutan tersebut, kawasan hutan berfungsi lindung yaitu hutan lindung dan hutan suaka alam/pelestarian alam seluas 17.368 Ha (5,74% dari luas kabupaten).

Sementara itu dilihat dari tutupan vegetasi, luas tutupan hutan dengan vegetasi primer di Kabupaten Dharmasraya tercatat tinggal seluas 7.290 Ha. Tetapi dari data ekritisasi lahan di Kabupaten Dharmasraya tidak terlalu besar. Lahan dengan kondisi kritis dan sangat kritis di Kabupaten Dharmasraya seluas 5.961 Ha (atau 1,98% dari luas wilayah). Lokasi lahan kritis pada kawasan perbukitan terdapat di Kecamatan Pulau Punjung, Silago, dan Koto Besar

Tabel 2.62
Luas Lahan Kritis di Kabupaten Dharmasraya

No	Lahan Kritis	Luas	
		(Ha)	(%)
1	Tidak Kritis	226401	74,82
2	Potensial Kritis	51129	16,90
3	Agak Kritis	17301	5,72
4	Kritis	4062	1,34
5	Sangat Kritis	1897	0,63
6	Tubuh Air	1809	0,60
Luas Total		302599	100,00

Sumber : Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTK-RHL)
SWP DAS Batanghari (BPDAS Batanghari Jambi , 2009)

6. Energi Dan Sumberdaya Mineral

Bahan galian yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari batu bara, bitumen padat, emas sekunder, bijih besi, perak, batu gamping, pasir kuarsa, batu gunung, tanah urug, tanah liat, sirtukil, mangan, dan suseki. Sumberdaya tambang yang akan atau sudah mulai dieksploitasi dalam jumlah besar adalah:

- Batu Bara yang sudah dieksploitasi di Kecamatan Asam Jujuhan (PT. TBN, PT. SLN, KUD Sinamar Sakato dan PT CBI) dengan produksi pertahun lebih kurang sebesar 449.780,25 MT.
- Batu Bara yang sudah dieksploitasi di Kecamatan Padang Laweh oleh PT PBA.



- Batu Bara dalam tahap eksplorasi yaitu di Kecamatan Asam Jujuhan oleh CV. X Dareh, PT BSA dan PT IMR, di Kecamatan Padang Laweh yaitu PT PBM dan PT IMR, dan di Kecamatan Timpeh oleh PT DAA.
- Bijih Besi yang sudah dieksploitasi di Kecamatan Asam Jujuhan oleh PT TSS.
- Mangan, masih dalam Proses Perijinan (Kec. Timpeh)
- Bitumen padat, masih dalam Proses Perijinan (Kec. Padang Laweh)

Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dikeluarkan di Kabupaten Dharmasraya seluas 19.975 Ha yang terdiri atas IUP operasi produksi seluas 2.388 Ha dan IUP eksplorasi seluas 17.587 Ha. Selain itu masih terdapat potensi lahan tambang terukur lainnya diluar WIUP yang telah dikeluarkan seluas 3.330 Ha. Total kawasan sumber daya pertambangan yang teridentifikasi di Kabupaten Dharmasraya yaitu 23.305 Ha.

Luas peruntukan pertambangan dalam pola ruang Kabupaten Dharmasraya selain yang telah definitif seluas 2.388 Ha masih bisa bertambah didalam kawasan IUP eksplorasi dan lahan potensi pertambangan lainnya diluar WIUP dalam kawasan seluas 20.917 Ha.

Saat ini terdapat sebanyak 12 perusahaan yang memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara Dan Mineral Logam, 10 perusahaan tambang yang aktif dan 2 perusahaan yang tidak aktif (PT. TBN Muaro dan PT. Centra Bara Indonesia). Selain perusahaan tambang batu bara juga terdapat IUP batuan sebanyak 9 perusahaan.

Kawasan IUP terdapat di Kec. Asam Jujuhan, Padang Laweh, Kec. Koto Besar, Kec. Tiumbang, Kec. Timpeh, IX Koto, Kec. Pulau Punjung, Kec. Sitiung, dan Kec. Koto Salak dengan potensi tambang dominan yaitu batu bara dan biji besi. Kawasan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Dharmasraya seperti terlihat dalam tabel.

Tabel 2.63
Kawasan Alokasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Sumberdaya Pertambangan Lainnya diluar Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) di Kabupaten Dharmasraya Per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)
IUP Batubara dan mineral logam		
1	Asam Jujuhan	11.990
2	Padang Laweh	499
3	Tiumbang	3.176
4	Timpeh	4.290
	Luas Total	19.955
IUP Batuan		
1	IX Koto	2
2	Pulau Punjung	3,96
3	Sitiung	10,41
4	Koto Salak	4,53
	Luas Total	20,90



No	Kecamatan	Luas (Ha)
Sumberdaya Pertambangan Terukur Lainnya diluar WIUP		
1	Asam Jujuhan	500
2	Padang Laweh	450
3	Timpeh	500
4	IX Koto	125
5	Koto Besar	200
6	Sitiung	310
7	Pulau Punjung	495
8	Koto Baru	250
9	Tiumang	500
Luas Total		3.330

Sumber : Dinas Energi, Sumberdaya Mineral Kab. Dharmasraya Tahun 2011

Selain itu terdapat potensi pertambangan rakyat untuk bahan tambang seperti mangan, lempung, batu gamping. Eksploitasi pertambangan rakyat harus terkendali dalam kawasan yang ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat.

7. Pariwisata.

Objek wisata alam di Kabupaten Dharmasraya yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu: Bendungan Batang Siat di Kec. Koto Besar, Air Terjun Sungai Suyu di Kec. Asam Jujuhan, Telaga Baranang Siang Tarantang di Kec. Koto Baru, Pulau Cinta Pulau Mainan di Kec. Koto Baru, Pantai Guli-gulu Koto Baringin di Kec. Tiumang, Bumi Perkemahan Siguntur di Kec. Sitiung, Puncak Gunung Medan di Kec. Sitiung, Gua Gadang Bunga Tika Timpeh di Kec. Timpeh, Air Terjun Tujuh Tingkat Tabek di Kec. Timpeh, Puncak Timpeh di Kec. Timpeh, Air Terjun Timbulun Indah di Kec. Pulau Punjung, Bendungan Btg Mimpi Sei Dareh di Kec. Pulau Punjung, Bendungan Batu Bakawik di Kec. Pulau Punjung, Air Panas Sungai Belit di Kec. Pulau Punjung, Gua Cigak Kampung Surau di Kec. Pulau Punjung, Air Terjun Koto Silago di Kec. IX Koto Selaju Sampan Pulai di Kec. Sitiung, Air Terjun Sei Pinang di Kec. Timpeh, dan Danau Cinta di Kec. Koto Baru.

Objek situs cagar budaya Kerajaan Lama Dharmasraya yaitu:

- Kawasan Siguntur di Kec. Sitiung dengan objek situs: Candi Padang Roco, Situs Candi Pulau Sawah dan Situs Candi Bukik Awang Maombiak, Masjid Tua Siguntur, Rumah Gadang Kerajaan Siguntur, Makam Raja Siguntur, Situs Candi Rambahan, dan Pasengrahan. Untuk mendukung pengembangan kawasan, dibutuhkan pengembangan akses menuju kawasan dari arah barat kawasan perkotaan Pulau Punjung dan dari arah timur Sitiung dengan mengembangkan jalan dari Pulau Punjung menghubungkan sepanjang sisi Sungai Batanghari menuju kawasan cagar budaya terhubung dengan jalan lingkaran utara serta pembukaan akses jembatan wisata yang menghubungkan Sikabau dengan kawasan cagar budaya.
- Kawasan Koto Besar di Kec. Koto Besar dengan objek situs: Rumah Kerajaan Koto Besar, Makam Raja Koto Besar, Makam Syech Abdul Rahman Alif Ba, Makam Rajo Kuek Kuaso



- Kawasan Padang Laweh di Kec. Padang Laweh dengan objek situs: Rumah Kerajaan Padang Laweh, Rumah Kerajaan Tiang Panjang, dan Rumah Gadang Puti Bulian
- Situs budaya di Kec. Pulau Punjung: Rumah Gadang Rajo Pulau Punjung dan Makam Datuak Gadang Sikabau.

8. Perdagangan

Sarana perdagangan pasar di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 4 unit merupakan pasar kelas I yaitu Pasar Pulau Punjung, Pasar Sikabau, pasar Koto Baru dan Pasar Sungai Rumbai. Sarana komersial berupa pasar dan pertokoan mempunyai kecenderungan untuk berkembang di Kabupaten Dharmasraya (Pasar Sungai Rumbai, Pasar Pulau Punjung, Pasar Koto Baru, Pasar Blok B Sitiung). Sarana perbelanjaan modern, perbankan, perbengkelan dan onderdil membutuhkan lahan untuk pengembangan karena permintaan yang semakin tinggi akibat peningkatan pendapatan masyarakat.

Tabel 2.64
Pasar Menurut Lokasi dan Jumlah di Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2010

No	Kecamatan	Jumlah	Nama Pasar	Kelas	Nagari	Status
1	Sungai Rumbai	2	Pasar Sungai Rumbai	I	Sungai Rumbai	Nagari
			Pasar Kurnia Koto Salak	II	Kurnia Solok	Nagari
2	Koto Besar	3	Pasar Abai Siat	III	Abai Siat	Nagari
			Pasar Mayang Taurai	III	Koto Gadang	Nagari
			Pasar Lubuk Karya Sit . 4	III	Koto Tinggi	Nagari
3	Asam Jujuhan	3	Pasar Sei Limau	III	Sungai Limau	Nagari
			Pasar Batu Kangkung	III		Nagari
			Pasar Bilit Sembilan	III	Alahan Nantigo	Nagari
4	Koto Baru	3	Pasar Koto Baru	I	Koto Baru	Nagari
			Pasar Sialang Gaung	II	Sialang Gaung	Nagari
			Pasar Ampang Kuranji	III	Ampang Kuranji	Nagari
5	Koto Salak	1	Pasar Ampalu	III	Ampalu	Nagari
6	Tiumang	1	Pasar Lagan Jaya	III	Sungai Langkok	Nagari
7	Padang Laweh	1	Pasar Sopan Jaya	III	Sopan Jaya	Nagari
8	Sitiung	2	Pasar Sitiung	II	Sitiung	Nagari
			Pasar Koto Agung	II	Sitiung	Nagari
9	Timpeh	4	Pasar Minang Makmur	III	Tabek	Nagari
			Pasar Marga Makmur	III	Taratak Tinggi	Nagari
			Pasar Trimulya	III	Penyeberangan	Nagari
			Pasar Beringin Sakti	III	Taratak Tinggi	Nagari
10	Pulau Punjung	2	Pasar Pulau Punjung	I	Pulau Punjung	Nagari
			Pasar Sikabau	I	Sikabau	Serikat
11	IX Koto	6	Pasar Silago	III	Silago	Nagari



No	Kecamatan	Jumlah	Nama Pasar	Kelas	Nagari	Status
			Pasar Lubuk Labu	III		Nagari
			Pasar Banai	III	Banai	Nagari
			Pasar Ampang Kuranji	III	Silago	Nagari
			Pasar Durian Simpai	III	Koto IV di Bauo (bawah)	Nagari
			Pasar Koto Baru Silago	III	Koto IV Bauo	Nagari

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

Sementara itu untuk menunjang kegiatan pasar diperlukan terminal. Sarana terminal pada Kabupaten Dharmasraya saat ini masih kurang. Dengan meningkatnya aktivitas pelayanan armada yang ada di Kabupaten Dharmasraya terutama pada kota-kota yang berada di sepanjang Jalan Lintas Sumatera, dimana aktivitas pelayanan sudah relatif lebih intensif dan padat, sehingga keberadaan terminal di Kabupaten Dharmasraya yang representatif sangat dibutuhkan.

9. Industri

Dari data PDRB 2007-2010, kontribusi sektor industri mengalami penurunan dari 5,88% menjadi 5,52% dalam PDRB Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2010, jumlah unit usaha mikro 2.068 unit, usaha kecil 274 unit dengan menyerap tenaga kerja 1.076 orang, dan usaha menengah 286 unit dengan menyerap tenaga kerja 1.160 orang.

10. Ketrasmigrasian

Program transmigrasi di Kabupaten Dharmasraya telah dimulai sejak tahun 1965 dan telah dimukimkan sebanyak 12.779 Kepala Keluarga atau 56.079 jiwa. Lahan yang masih dicadangkan untuk kawasan transmigrasi yaitu di Kecamatan IX Koto. Dalam masa yang panjang tersebut telah terjalin integrasi sosial antara pendatang dan penduduk asli dalam kesatuan daerah Dharmasraya.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Perubahan mendasar dalam sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah menuntut dilakukannya sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahan-perubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan konsep *money follow functions* yaitu pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja.

Konsep ini mengandung tiga elemen yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publiknya, yaitu: (i) secara ekonomis dapat meminimalisir input *resources* yang digunakan; (ii) efisiensi mencapai hasil yang optimal dengan biaya yang minimal (*output/input*); dan (iii) efektivitas mencapai target yang ditetapkan (*outcome/output*). Konstruksi kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010-2015 diarahkan untuk memenuhi beberapa norma dan prinsip anggaran berikut ini yang kemudian menjadi pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya, yaitu:

- a. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah** : merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau yang dianggarkan;
- b. **Disiplin Anggaran** : program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggung jawabkan;
- c. **Keadilan Anggaran** : pendapatan pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa dikriminasi dalam pemberian pelayanan;
- d. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran** : dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas Anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundangundangan (*money follow function*).

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

Bagian ini menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah. Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten, yang terdiri dari Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan urusan yang penanganannya oleh bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Sumber pendapatan daerah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Jumlah anggaran pendapatan daerah Kabupaten Dharmasraya selama Tahun 2007-2010 menunjukkan angka kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2007 jumlah pendapatan sebesar Rp.317,2 milyar dan tahun 2010 sebesar Rp.501,4 milyar. Jika dilihat proporsi masing-masing sumber pendapatan Kabupaten Dharmasraya dari tahun-ketahun lebih di dominasi oleh dana perimbangan. Dilihat berdasarkan data tahun 2010 sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan yaitu 68,90%, sementara pendapatan asli daerah hanya 10,90% dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 20,74%.

Rata-rata pertumbuhan pendapatan Kabupaten Dharmasraya tahun 2007 - 2010 yaitu 11,04% pertahun. Rata-rata pertumbuhan paling besar yaitu lain-lain pendapatan yang sah yaitu 48,44% pertahun dan rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 13,59% pertahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan dana perimbangan hanya 6,65% pertahun.



1. Pendapatan Asli Daerah

Melihat kondisi dan tren proporsi pendapatan asli daerah yang cenderung menurun terhadap pendanaan pembangunan, maka akan ditetapkan Arah kebijakan Peningkatan PAD, yaitu:

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kecamatan, POLRI dan Stakeholders lainnya;
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
5. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
- 2) Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kabupaten dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

2. Dana Perimbangan

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen Dana Perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, karena dana perimbangan merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kabupaten. Untuk besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. DAU suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. DAU suatu daerah otonom baru dialokasikan setelah undang-undang pembentukan disahkan.

Dalam kenyataannya, Dana Perimbangan dalam APBD secara umum berasal dari: Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi. Bagi Hasil Pajak meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),



Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29. Sedang Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari: Provisi Sumber Daya Hutan, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi, Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Minyak Bumi. Khusus Bagi Hasil Pajak yang mencakup PBB dan BPHTB, dengan munculnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Proporsi Dana Perimbangan terhadap APBD masih relatif besar, hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Dharmasraya dalam pendanaan daerah masih sangat tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan APBD selama kurun waktu lima tahun terakhir (2007-2010) rata-rata berkisar 62 persen dari total Pendapatan Daerah

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya masih relatif kecil, akan tetapi keberadaannya sangat menunjang / mendukung kemampuan pendanaan bagi Kabupaten Dharmasraya. Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi penyelarasan program dan kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung seperti pemberian bantuan keuangan provinsi dan alokasi dana penyesuaian/kontijensi serta penerimaan lain-lain daerah yang sah dalam bentuk bagi hasil pajak, retribusi dan sumbangan pihak ketiga dari provinsi yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas daerah tanpa diarahkan dan ditetapkan pengukurannya oleh provinsi. Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap pendapatan APBD di Kabupaten Dharmasraya selama kurun waktu tahun 2007 - 2010 terus mengalami Fluktuasi, dimana pada tahun 2010 proporsi lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai 20,74%..



Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2007 s/d Tahun 2010 Kabupaten Dharmasraya

No.	Uraian	Tahun				Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2007 (Rp)	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	
1	PENDAPATAN					
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	17.404.345.346,00	22.092.475.689,00	24.907.435.355,00	25.155.334.665,00	13,59
1.1.1.	Pajak daerah	2.815.680.574,00	4.372.143.508,00	4.400.867.085,00	4.050.667.256,00	15,99
1.1.2.	Retribusi daerah	2.526.286.970,00	3.476.703.766,00	6.906.584.090,00	10.241.339.009,00	61,52
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	37.751.614,00	260.214.157,00	2.736.034.709,00	3.068.043.895,00	517,62
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	12.024.626.188,00	13.983.414.258,00	10.863.949.471,00	7.795.284.505,00	-11,37
1.2.	Dana Perimbangan	275.882.665.770,00	314.377.526.035,00	318.986.888.420,00	333.450.451.531,00	6,65
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	18.333.398.890,00	25.810.507.035,00	22.212.454.420,00	29.789.530.331,00	20,32
1.2.2.	Dana alokasi umum	219.740.236.596,00	247.801.019.000,00	256.120.434.000,00	266.175.621.200,00	6,68
1.2.3.	Dana alokasi khusus	37.809.030.284,00	40.766.000.000,00	40.654.000.000,00	37.485.300.000,00	-0,08
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	23.926.135.207,00	44.445.530.512,00	65.462.908.176,00	73.496.291.362,00	48,44
1.3.1.	Hibah		-		0	0,00
1.3.2.	Dana darurat	3.998.272.470,00	10.000.000.000,00		0	16,70
1.3.3.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	9.940.317.062,00	11.314.704.013,00	13.960.254.090,00	16.162.451.460,00	6,22
1.3.4.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus*****)	5.000.000.000,00	19.575.800.000,00	49.293.523.000,00	57.245.639.902,00	153,15
1.3.5.	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	4.987.545.675,00	3.555.026.499,00	2.209.131.086,00	88.200.000,00	-33,33
1.3.6.	Dana Penanganan Pasca Bencana			-		
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		317.213.146.323,00	380.915.532.236,00	409.357.231.951,00	432.102.077.558,00	10,01

Sumber : DPPKD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010

Berdasarkan tabel di atas gambaran pendapatan daerah dari tahun 2007-2010 menunjukkan masih lemahnya derajat kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, yang dapat dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, dimana di tahun 2007 sebesar 5,84%, 2008 sebesar 5,69%, 2009 sebesar 5,69% dan di tahun 2010 sebesar 5,55%. Ini menunjukkan bahwa kemampuan PAD dalam mencukupi belanja daerah hanyalah sebesar rasio yang disebutkan di atas, dan menggambarkan kenyataan masih tingginya ketergantungan Kabupaten Dharmasraya terhadap anggaran yang berasal dari dana perimbangan terutama dari pemerintah pusat.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Belanja daerah yang bisa dialokasikan untuk biaya program pembangunan, bantuan keuangan dan sosial, belanja bagi hasil serta belanja tidak tersangka sangat tergantung pada besarnya penerimaan daerah setelah dikurangi belanja untuk membiayai beban wajib dalam bentuk gaji upah dan tunjangan PNS. Sisa belanja setelah dikurangi belanja beban wajib itulah yang harus dikelola secara efisien dan efektif untuk membiayai program-program baik dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun untuk mendorong percepatan laju pembangunan daerah.

Dalam empat tahun terakhir 2007-2010, proporsi anggaran belanja untuk beban wajib (Gaji dan tunjangan PNS) dalam APBD mengalami peningkatan. Namun karena jumlah APBD juga mengalami peningkatan, jumlah dana yang bisa diatur pengalokasiannya berdasarkan prakarsa dan kebijakan daerah sendiri mengalami peningkatan pula.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran di Kabupaten Dharmasraya (belanja daerah) dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu belanja tidak langsung (BTL) dan belanja langsung (BL). Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan, antara lain gaji dan tunjangan pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa serta belanja tidak terduga. Sementara belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Berpedoman pada regulasi yang ada, belanja daerah bisa dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi daerah, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Sedangkan belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Gambaran perkembangan Belanja Daerah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007-2010, selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.



Tabel 3.2
Struktur Belanja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007-2010

No.	Tahun	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Belanja APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) + (4))
01.	2007	122.911.367.656	174.916.228.669	297.827.596.325
02.	2008	161.064.326.094	227.389.016.464	388.453.342.558
03.	2009	204.260.102.477	236.970.589.450	441.230.691.927
04.	2010	173.013.812.961	280.260.743.488	453.274.556.449

Sumber: DPPKD Kabupaten Dharmasraya

Proporsi penggunaan anggaran yang dimaksud dalam sub bagian ini adalah proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja pendidikan. Belanja aparatur Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007-2010 menunjukkan trend yang meningkat seiring dengan trend pertumbuhan pendapatan daerah. Gambarnya dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Proporsi belanja aparatur yang masih mendominasi struktur bekanja daerah tahun 2007-2010 disebabkan karena alokasi pendapatan daerah diprioritaskan untuk belanja pegawai dan selanjutnya baru didistribusikan kepada belanja-belanja lainnya, dalam hal ini belanja tidak langsung dan belanja langsung lainnya. Secara khusus Pemerintah Kabupaten Dharmasraya selama tahun 2007-2010 mengarahkan belanja publik (non aparatur) kepada upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, mengembangkan jaminan sosial, serta pemberian layanan pemerintahan lainnya.

Tabel 3.3
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Dharmasraya

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	TA 2007	120.905.293.400	307.827.596.325	39,28
2	TA 2008	135.203.642.094	388.538.430.881	34,80
3	TA 2009	175.194.567.437	441.230.691.927	39,71
4	TA 2010	234.461.787.175	453.274.556.449	51,73

Sumber : DPPKD Kabupaten Dharmasraya



3.2.2. Analisis Pembiayaan

Bagi perekonomian daerah, peranan anggaran pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagai motor penggerak ekonomi daerah menuntut adanya kebijakan yang ekspansif, tetapi tetap harus memperhatikan aspek stabilisasi anggaran. Mengingat tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terhadap Pemerintah Pusat dari sisi anggaran masih cukup tinggi, maka peranan pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk mencari sumber anggaran guna menunjang percepatan pembangunan sangat dibutuhkan. Upaya terobosan yang perlu dilaksanakan disamping melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, mendorong investasi, dapat juga dilakukan pola kemitraan investasi dengan pihak badan usaha baik swasta maupun pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kajian yang komprehensif serta selektif dalam perwujudannya.

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur pada penjelasan pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jumlah kumulatif defisit anggaran tidak boleh melebihi 3% dari Produk Domestik Regional Bruto tahun bersangkutan, namun selama tahun 2007-2010 kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kabupaten Dharmasraya didasarkan pada struktur APBD yang berimbang. Gambaran deficit riil di Kabupaten Dharmasraya tahun 2007-2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007-2010

NO	Uraian	2007 (Rp)	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	317.213.146.323	380.915.532.236	409.569.855.030	432.102.077.558
	<i>Dikurangi realisasi:</i>				
2	Belanja Daerah	297.827.596.325	388.453.342.558	441.230.691.927	453.274.556.449
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.000.000.000	85.088.323	0	0
A	Defisit riil	9.385.549.998	(7.622.898.645)	(31.660.836.897)	(21.172.478.891)
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:				
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	72.329.933.761	81.715.483.759	74.093.341.114	42.610.246.896
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	72.329.933.761	81.715.483.759	74.093.341.114	42.610.246.896
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	81.715.483.759	74.093.341.114	42.610.246.896	21.910.155.643

Sumber : DPPKD Kabupaten Dharmasraya



Tabel 3.5
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007-2010

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil			
		2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	72.329.933.761	81.715.483.759	74.093.341.114	42.610.246.896
2	Pencairan Dana Cadangan			-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan			-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah			-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah			-	-
7	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	81.715.483.759	74.093.341.114	42.610.246.896	21.910.155.643

Sumber : DPPKD Kabupaten Dharmasraya

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Kuangan daerah terdiri dari pendapatan dan belanja daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin dari proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Oleh sebab itu sebelum menentukan arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan kebijakan umum anggaran lima tahun yang akan datang, maka perkembangan struktur pendapatan dan belanja perlu dianalisis secara seksama.

3.3.1. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta belanja sejenis lainnya.



Tabel 3.6
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Dharmasraya

N o	Uraian	2007 (Rp)	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	84.499.686.064	106.961.637.716	128.479.069.186	86.937.295.129	21.69
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	76.978.790.064	99.043.562.716	118.863.794.186	86.937.295.129	21.46
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	850.000.000	1.560.000.000	1.719.600.000	86.937.295.129	31.01
3	Belanja bagi hasil	6.670.896.000	6.358.075.000	7.895.675.000	86.937.295.129	27.47
B	Belanja Langsung	2.437.609.065	2.960.343.378	3.022.144.232	86.937.295.129	13.81
1	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	2.187.609.065	2.710.343.378	2.772.144.232	86.937.295.129	15.53
2	Belanja sewa gedung kantor(yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	250.000.000	250.000.000	250.000.000	86.937.295.129	(3.33)
TOTAL (A+B)		86.937.295.129	109.921.981.094	131.501.213.418	155.661.866.892	21.48

Sumber : DPPKD Kabupaten Dharmasraya

3.3.2. Proyeksi Data

Arah pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 - 2010 lebih diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui penggalan sumber-sumber pendapatan daerah dan penerimaan lainnya berdasarkan potensi yang dimiliki tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Selanjutnya pemanfaatan pendapatan daerah diarahkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja pemerintah untuk mendorong percepatan dan pertumbuhan pembangunan daerah dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Dharmasraya.

Arah pengelolaan belanja daerah Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2005-2010 ditekankan pada peningkatan proporsi belanja publik yang dapat dirasakan secara langsung untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat dan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung keberlangsungan operasional penyelenggaraan pemerintahan. Upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, mengembangkan jaminan sosial, serta pemberian layanan pemerintahan lainnya.



Untuk mewujudkan peningkatan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2011-2015, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan dilakukan

dengan cara mengoptimalkan penerimaan PAD. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan cara:

- mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah;
- membenahi manajemen data penerimaan PAD;
- meningkatkan penerimaan pendapatan non konvensional;
- mengevaluasi dan merevisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah secara berkala;
- menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan;
- mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.

Untuk menyikapi kondisi pendapatan daerah di Kabupaten Dharmasraya selama kurun waktu 2011-2015, maka kebijakan yang akan diimplementasikan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Mendukung dan mendorong pencapaian target pendapatan daerah di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan atas perhitungan dan perencanaan yang rasional.
2. Mendukung upaya-upaya peningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Dharmasraya antara lain dengan :
 - a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dharmasraya dengan target kenaikan rata-rata 5 persen (atau lebih) setiap tahunnya. Hal ini mengandung makna bahwa secara bertahap kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara proporsional akan terus ditingkatkan.
 - b. Mengoptimalkan PAD sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya ini antara lain akan ditempuh dengan cara:
 - (i) Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menerbitkan Peraturan Daerah terkait Pajak dan Retribusi di Kabupaten Dharmasraya yaitu : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP), Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 18 Tahun 2011 tentang Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 - (ii) Mulai tahun 2011 Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sudah masuk menjadi Pajak Daerah dalam PAD.
 - (iii) Mulai tahun 2013 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah masuk menjadi Pajak Daerah dalam PAD, setelah secara bertahap dilakukan alih ketrampilan dan teknologi dalam pengelolaan PBB.



- (iv) Pada tahun 2013 secara bertahap akan dilakukan transfer ketrampilan dan teknologi dalam pengelolaan PBB agar dapat berjalan secara *online* dengan Bank Operasi (BO).
3. Mengoptimalkan sumber-sumber/potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang disesuaikan dengan peraturan perundangan terbaru, khususnya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan jalan melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi pendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Mengadakan pendataan ulang terhadap berbagai obyek dan jenis-jenis pendapatan yang baru, khususnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan-peraturan daerah pendukungnya.
 - c. Penyesuaian besaran tarif dengan melakukan revisi terhadap berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai, baik terkait dengan kondisi saat ini maupun kebutuhan penyesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - d. Membina hubungan yang baik dengan Wajib Pajak.
 - e. Meningkatkan peran aktif SKPD yang terkait, dalam rangka penegakan hukum dan peningkatan pendapatan daerah.
 - f. Mendukung implementasi teknologi informasi secara terpadu / terintegrasi guna mengintensifkan pajak dan retribusi guna meningkatkan sistem pemungutan pajak agar lebih optimal.
 4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut tidak akan memberatkan masyarakat dan akan diusahakan bisa mendorong perkembangan investasi daerah di Kabupaten Dharmasraya.
 5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain dengan melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta manajemen pengelolaan guna memberikan kemudahan akses Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR).
 6. Menegakkan hukum / *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD).
 7. Melakukan peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya yang terjangkau.
 8. Mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan akan meningkat besarnya (sejalan dengan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil) agar lebih efektif dan efisien pemanfaatannya bagi pembangunan di Kabupaten Dharmasraya.
 9. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diasumsikan akan tetap besarnya karena bersifat *given* (pengeluaran/ kegiatannya sudah ditentukan). Demikian juga dengan Dana Bantuan keuangan dari Propinsi Sumatera Barat yang diasumsikan tetap karena bersifat *given* juga.



10. Mengoptimalkan Pengelolaan dan pemanfaatan Dana bagi hasil dari propinsi diharapkan akan meningkat rata-rata 5% per tahun atau lebih.
11. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, termasuk di dalamnya memberikan *reward* secara proporsional terhadap kinerja aparatur daerah dalam mengelola pendapatan daerah.
12. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pemanfaatan pengelolaan asset daerah sebagai salah satu sumber potensial PAD yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, antara lain dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian Kabupaten Dharmasraya, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban mulai dari tingkat terkecil di lingkungan nagari dan kecamatan.

Dari berbagai pertimbangan di atas, prediksi Pendapatan Daerah di Kabupaten Dharmasraya selama kurun waktu 2011-2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.7
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1.1	Pendapatan Asli Daerah	42.939.048.860	45.198.998.800	47.458.948.740	49.831.896.177	52.323.490.986
1.1.1	Hasil Pajak daerah	9.164.012.417	9.646.328.860	10.128.645.303	10.635.077.568	11.166.831.447
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.293.960.450	12.941.011.000	13.588.061.550	14.267.464.628	14.980.837.859
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	4.865.760.350	5.121.853.000	5.377.945.650	5.646.842.933	5.929.185.079
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	16.615.315.643	17.489.805.940	18.364.296.237	19.282.511.049	20.246.636.601
1.2	Dana Perimbangan	399.318.387.108	420.335.144.324	441.351.901.540	463.419.496.617	486.590.471.448
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	30.859.864.908	32.484.068.324	34.108.271.740	35.813.685.327	37.604.369.593
1.2.2	DAU	333.730.835.200	351.295.616.000	368.860.396.800	387.303.416.640	406.668.587.472
1.2.3	DAK	34.727.687.000	36.555.460.000	38.383.233.000	40.302.394.650	42.317.514.383
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	41.730.307.252	43.926.639.213	46.122.971.174	48.429.119.733	50.850.575.719
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	21.979.516.780	23.136.333.453	24.293.150.126	25.507.807.632	26.783.198.014
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	19.368.206.472	20.387.585.760	21.406.965.048	22.477.313.300	23.601.178.965
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	382.584.000	402.720.000	422.856.000	443.998.800	466.198.740
	PENDAPATAN DAERAH	483.987.743.220	509.460.782.337	534.933.821.454	561.680.512.526	589.764.538.153

Sumber : Hasil Analisis



Proyeksi yang ditampilkan melalui tabel di atas didasarkan kepada strategi dan prioritas pengelolaan pendapatan daerah melalui peningkatan PAD dengan tidak mengurangi tingkat ketergantungan pada Pemerintah, intensifikasi pajak daerah, serta intensifikasi dan ekstensifikasi penerima retribusi dan lain-lain PAD dengan tetap memperhatikan kewenangan dan potensi keuangan daerah. Peningkatan pendapatan didasarkan pada peningkatan pendapatan asli daerah, yang diharapkan dapat diperoleh melalui peningkatan basis pajak potensial.

Pertumbuhan pendapatan daerah yang ditampilkan pada table proyeksi pendapatan daerah didasarkan pada asumsi trend pertumbuhan realisasi penerimaan daerah, baik dari pendapatan dan dana perimbangan, namun juga dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta dari potensi pajak dan retribusi daerah yang dimungkinkan dalam UU Pajak dan Retribusi yang baru. Selanjutnya, kebijakan pengelolaan belanja Kabupaten Dharmasraya 2011- 2015 daerah didasarkan pada prinsip-prinsip Pengelolaan Belanja Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Kebijakan ini diimplementasikan melalui:

- menetapkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- menerapkan prinsip efisiensi dalam penyusunan dan penetapan prioritas anggaran;
- menerapkan *money follow function* dalam menyusun anggaran;
- menggunakan publik untuk menilai kinerja anggaran.

Proyeksi belanja daerah kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3.8
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2015

No	Uraian	Data Tahun Dasar (Rp) 2010	Tingkat pertum- buhan (%)	Proyeksi				
				Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Belanja TidakLangsung	152.098.567.653	15,14	179.236.643.326	206.374.718.999	237.621.748.832	273.599.866.262	315.025.401.448
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	137.528.241.653	14,3	160.480.491.326	184.778.713.145	212.755.909.142	244.969.109.830	282.059.685.266
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1.707.100.000	-9,43	1.560.000.000	1.796.198.342	2.068.159.285	2.381.297.616	2.741.847.968
3	Belanja bagi hasil	12.863.226.000	25,2	17.196.152.000	19.799.807.512	22.797.680.405	26.249.458.817	30.223.868.215
B	Belanja Langsung	3.563.299.239	12,37	4.066.298.060	4.681.972.971	5.390.866.724	6.207.093.509	7.146.904.534
1	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	3.338.299.239	13,09	3.841.298.060	4.422.905.903	5.092.574.520	5.863.637.122	6.751.445.692
2	Belanja sewa gedung kantor(yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	225.000.000	-	225.000.000	259.067.069	298.292.205	343.456.387	395.458.842
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	155.661.866.892		183.302.941.386	211.056.691.970	243.012.615.556	279.806.959.771	322.172.305.982

Sumber : Hasil Analisis



Proyeksi belanja daerah ini didasarkan pada asumsi: (1) terjadinya kenaikan rata-rata sebesar 10% di Belanja langsung dari tahun-tahun sebelumnya, (2) Penganggaran akres gaji sebesar 2,5%, (3) Belanja sosial yang ada diarahkan untuk menampung pengeluaran Belanja Jamkesda dan sharing pendanaan urusan bersama, dan (4) Kondisi belanja modal yang diperkirakan tetap karena kemampuan pembiayaan daerah yang masih relatif sama dibanding periode tahun-tahun sebelumnya.

Arah pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Dharmasraya selama kurun waktu 2011-2015 akan diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.** Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. **Prioritas.** Penggunaan anggaran tahun 2010-2015 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, keterse-diaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung per-tumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya dan diarahkan untuk penanggul-angan kemiskinan serta penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.
3. **Tolok Ukur dan Target Kinerja.** Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) SKPD.
4. **Optimalisasi Belanja Langsung.** Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.
5. **Transparan dan Akuntabel.** Setiap pengeluaran belanja dipublikasi-kan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Adapun kebijakan belanja daerah tahun 2015 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
2. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah tahun 2012 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama, APK, APM dan angka pendidikan yang ditamatkan



3. Meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan, menjadi 10% sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat.
4. Mengalokasikan kebutuhan belanja *daerah* secara terukur dan terarah, yaitu: Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor, Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan; serta Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD, program/kegiatan yang telah menjadi janji-janji politik.
5. Meningkatkan alokasi dana transfer nagari demi mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
6. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kab/Kabupaten, belanja bantuan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan sebelumnya.
7. Dan lain-lain

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah serta belanja sejenis lainnya.

Selanjutnya, untuk menentukan kapasitas riil keuangan daerah, dihitung dengan mengisi tabel, sebagai berikut :



Tabel 3.9
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya 2011-2015

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	483.987.743.220	509.460.782.337	534.933.821.454	561.680.512.527	589.764.538.153
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-	-	0	0	0
	Total penerimaan	483.987.743.220	509.460.782.337	534.933.821.454	561.680.512.527	589.764.538.153
	Dikurangi:					
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	478.352.253.109	543.974.686.850			
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	98.697.951.350	4.598.520.150	-	-	-

Sumber : Hasil Analisis

Berdasarkan tersebut, diperoleh rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan menggunakan tabel berikut:

Tabel 3.10
Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Kabupaten Dharmasraya

No.	Uraian	2007	2008	2009	2010
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo kas neraca daerah	81.715.483.760	74.110.602.249	42.839.627.474	21.955.215.419
	Dikurangi:				
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	85.088.323	17.261.135	229.380.578	45.059.776
3	Kegiatan lanjutan				
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	81.630.395.437	74.093.341.114	42.610.246.896	21.910.155.643

Sumber : DPPKD Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan tabel diatas, silpa riil pembiayaan anggaran tahun 2007 – 2010 terlihat terjadi penurunan. Hal ini disebabkan semakin banyaknya kegiatan yang terlaksana dan efektifitas pelaksanaan anggaran.



Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

- Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
- Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
- Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
- Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
- Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya (uraian gambaran umum kondisi daerah dan pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendaannya). Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan, dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Rumusan isu strategis diperoleh dengan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi pembangunan selama kurang lebih lima tahun yang lalu sehingga didapat permasalahan-permasalahan pembangunan tiap urusan pemerintah daerah serta analisis terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal.

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi serta identifikasinya dapat diuraikan menurut urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Setelah mencermati evaluasi kinerja pembangunan daerah pada tahun-tahun sebelumnya baik pada bidang ekonomi, sosial budaya, infrastruktur dan kapasitas aparatur, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan utama yang dihadapi yang dirinci berdasarkan bidang dan urusan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya, antara lain :

4.1.1. Permasalahan Terkait Urusan Wajib

1. Pendidikan

Pelaksanaan pembangunan pendidikan secara umum dapat dilihat dari perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Ditemukan berbagai masalah dan hambatan dalam pembangunan pendidikan.

Berdasarkan uraian dari kondisi umum diatas maka dapat dirangkumkan permasalahan yang ada dalam bidang pendidikan, yaitu antara lain :



- Nilai IPM Kabupaten Dharmasraya berdasarkan indikator lama sekolah, pengeluaran perkapita, angka melek huruf dan harapan hidup termasuk yang terendah di Sumbar. Tahun 2010 berada pada urutan ke 17 di Sumbar diatas Solok Selatan dan Mentawai. Rendahnya nilai IPM menunjukkan bahwa perlu upaya yang keras untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pada setiap indikator.
- Rata-rata lama sekolah 7,77 tahun (rata-rata Sumbar 8,48);
- Angka melek huruf 96,38% urutan ke 7 dari 12 kabupaten; dan harapan hidup 66 tahun merupakan yang terendah di Sumbar.
- Belum satupun SMP dan SMA yang berstandar nasional karena kekurangan sarana prasarana seperti labor dan perpustakaan
- Perlunya peningkatan intensitas kegiatan sekolah pada berbagai jenjang pendidikan
- Perlunya perguruan tinggi penunjang pengembangan potensi daerah
- Pelayanan pendidikan yang tertinggal dibanding daerah kecamatan lainnya yaitu: kecamatan IX Koto, Koto Salak, Tiumang, Padang Laweh dan Asam Jujuhan.

Dari permasalahan diatas, maka permasalahan utama pendidikan menunjukkan bahwa :

- Belum idealnya struktur jumlah sekolah SD, SLTP, dan SLTA
- Belum idealnya rasio siswa antar tingkat pendidikan.
- Belum meratanya akses pendidikan
- Masih rendahnya kualitas pendidikan
- Masih rendahnya Relevansi Pendidikan
- Masih rendahnya Pengawasan dan Manajemen Pendidikan.

2. Kesehatan

Berdasarkan uraian dari kondisi umum maka dapat dirangkumkan permasalahan yang ada dalam bidang kesehatan, yaitu antara lain :

- Masih rendahnya angka harapan hidup dan tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan.
- Masih rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- Masih rendahnya ketersediaan tenaga medis dan paramedis di seluruh kecamatan yang ada di Dharmasraya.
- Masih ditemukan gizi kurang pada anak balita.
- Masih kurangnya Perilaku Hidup Sehat (PHBS) di masyarakat.
- Dibandingkan dengan standar MDGs 2015, pencapaian indikator kesehatan Kabupaten Dharmasraya yang masih perlu ditingkatkan yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih diatas target MDGs 2015. Sementara Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka kematian Neonatal (AKN) meskipun sedikit dibawah target MDGs tetapi masih perlu ditingkatkan. Demikian juga balita dengan gizi kurang dan buruk yang masih ditemukan 16,76% pada tahun 2011 perlu menjadi perhatian karena target standar MDGs prevalensi balita kekurangan gizi MDGs kurang dari 15,5%.



- Dilihat pada posisi Kabupaten Dharmasraya diperbatasan tenggara Sumbar dan jauhnya akses menuju pusat kesehatan regional di Kota Padang maka kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit dari segi tenaga medis perlu ditingkatkan agar tingkat kelengkapan dalam pelayanan semakin tinggi dan mampu menjadi orientasi pelayanan daerah perbatasan sekitar.

3. Pekerjaan Umum

a. Jalan

- Masih adanya daerah terpencil di Kabupaten Dharmasraya, salah satunya akibat kurangnya akses jalan dan jembatan
- Masih kurangnya kemampuan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Kabupaten.

b. Prasarana Air Minum

Pelayanan dari sumber air minum Kabupaten Dharmasraya masih tertinggal dari daerah lain. Penyediaan air minum dengan perpipaan menjadi masalah yang perlu menjadi perhatian dimasa depan.

Berdasarkan perkembangan kegiatan kawasan perkotaan maka kawasan yang perlu dilayani oleh jaringan air minum yaitu kawasan Gunung Medan dan Sungai Duo, kawasan Koto Baru, Sitiung Blok B, kawasan Padang Laweh, dan kawasan Sungai Rumbai. Selain itu Pengembangan SPAM pedesaan pada pusat pelayanan lingkungan yang belum terlayani yaitu di: Kec. Timpeh, Kec. Tiumang, Kec. Koto Salak, Kec. Koto Besar, Kec. Asam Jujuhan, Kec. IX Koto.

c. Sanitasi Lingkungan

Meskipun jumlah SPAL tinja tertinggi kedua di kabupaten setelah Agam tetapi proporsi pembuangan lubang tanah masih tertinggi di Sumatera Barat Hal ini menandakan masih adanya ketimpangan dalam ketersediaan sarana sanitasi.

Sementara sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) belum tersedia. Dimasa depan, dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kepadatan permukiman yang akan ditimbulkannya maka penyediaan prasarana ini perlu diantisipasi.

Pelayanan persampahan pada pusat kegiatan (Pulau Punjung, Koto Baru, Sungai Rumbai) seiring dimasa depan akan semakin berkembangnya kawasan perlu ditingkatkan demikian juga optimalisasi TPA yang telah ada sekarang.

4. Perumahan Rakyat

Kawasan permukiman dan perumahan yang tidak layak huni terutama di Sungai Rumbai, Koto Baru dan Pulau Punjung secara bertahap perlu diprioritaskan



penyediaan prasarana lingkungannya terutama pada kawasan yang memiliki kasus penyakit yang diakibatkan buruknya sanitasi lingkungan.

5. Penataan Ruang

Untuk bidang penataan ruang, permasalahan yang ada saat ini yaitu masih terbatasnya rencana tata ruang yang dapat dijadikan pedoman dalam pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Dharmasraya. Hal ini dapat dilihat pengendalian alih fungsi lahan sawah dan kawasan hutan serta pengendalian kegiatan pertambangan liar menjadi isu penting dalam bidang penataan ruang. Untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang dibutuhkan peraturan yang lengkap menyangkut ketentuan perijinan dan sanksi. Selain itu, berbagai bentuk insentif dan disinsentif dibutuhkan untuk mengendalikan secara tidak langsung kecenderungan pemanfaatan ruang. Dalam mengendalikan pembangunan secara lebih efektif dalam wilayah yang luas seperti Kabupaten Dharmasraya, delegasi perijinan pada tingkat kecamatan dan nagari dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan tata ruang perlu menjadi pertimbangan.

6. Perencanaan Pembangunan

Masalah ketika pembangunan tidak dinamis, cepat dan sinkron, antara lain :

- 1) Realisasi pembangunan jalan dan jembatan antara daerah produksi dengan pasar yang terlambat menyebabkan wilayah tetap terpelosok. Pada gilirannya terjadi ketimpangan dinamika kehidupan masyarakat dan sumberdaya tidak terkelola baik, terarah dan tepat sasaran.
- 2) Belum adanya legalitas formal RPJPD dan RTRW daerah Kabupaten Dharmasraya.

7. Perhubungan

Rangkuman permasalahan sarana dan prasarana Perhubungan di Dharmasraya, adalah sebagai berikut:

- Tingginya beban lalu lintas jalan sebagai kontribusi dari tingginya penggunaan kendaraan;
- Kurangnya konsistensi dan ketegasan dalam pengaturan dan penataan penggunaan ruang lalu lintas untuk kegiatan di luar kegiatan lalu lintas
- Tingginya tingkat kerusakan jalan yang salah satunya diakibatkan operasional kendaraan yang kelebihan muatan sebagai dampak belum optimalnya pengawasan/ kontrol pada jembatan timbang;
- Disamping itu kurangnya kerangka peraturan untuk mendorong keterlibatan sektor swasta di dalam investasi dan peningkatan pelayanan transportasi.



8. Lingkungan Hidup

a. Kelestarian Kawasan Hutan

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam kebijakan pembangunan adalah masih terdapat penduduk yang tinggal didalam kawasan hutan lindung di Di Kabupaten Dharmasraya yaitu di Kecamatan IX Koto. Kebijakan yang tepat perlu diambil untuk tidak menghambat usaha mensejahterakan mereka. Permukiman masyarakat di dalam kawasan hutan seperti terjadi di IX Koto menjadi problematik dalam pembangunan. Kawasan hutan lindung dalam aturannya tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya sementara kenyataannya terdapat permukiman yang telah lama ada didalamnya.

Kebutuhan pembangunan disektor kehutanan yaitu: pelestarian dan reboisasi hutan terutama pada kawasan hutan lindung dan hutan suaka alam/pelestarian alam; pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu sebagai pendapatan penduduk disekitar hutan secara lestari; pengembangan industri kehutanan; serta penguatan dan pemantapan peraturan daerah dan kebijakan pembangunan terkait dengan pelestarian dan pemanfaatan hutan dalam rangka menjaga kelestarian sekaligus pemanfaatan bagi kesejahteraan penduduk sekitar.

b. Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup

Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi bencana alam longsor dan banjir. Kerawanan longsor sedang dan tinggi terdapat pada kawasan berbukit dengan topografi curam. Kawasan yang berpotensi banjir di Kabupaten Dharmasraya terdapat pada morfologi dataran disepanjang aliran sungai Batanghari, Batang Timpeh, Sungai Batang Abai dan Sungai Bonjol. Bahaya banjir sering terjadi di Kampung Surau, Pelayangan, Nagari Gunung Selasih di Kecamatan Pulau Punjung. Banjir Bandang sekitar Batang Timpeh di Kecamatan Timpeh, Pasar Abai, Sungai Batang Abai, Sungai Bonjol di Kecamatan Koto Besar, dan di Kecamatan Koto Salak.

Masalah lain yang dihadapi yaitu ambang baku mutu air raksa yang telah dilewati pada sungai Muaro Pangian dan Sungai Batanghari bagian hulu, dan dalam jumlah yang tidak terlalu signifikan juga terdapat pada sungai Batang Abai Siat, Batang Betung, Batang Siat Hilir, Batang Timpeh, dan Muaro Batang Momongan. Hal ini akibat penambangan emas ilegal yang membuang limbah kesungai.

Pemanfaatan lahan untuk budidaya pertanian pada kawasan bergelombang dan berbukit yang terdapat pada bagian barat dan sebagian timur kabupaten rawan terhadap erosi, longsor dan gerakan tanah kalau ditanami vegetasi yang tidak sesuai. Budidaya tanaman kelapa sawit pada bentang alam seperti ini perlu dihambat.

Eksplorasi tambang yang berpotensi mencemari sungai perlu diantisipasi dengan penguatan peraturan dan pengawasan yang melibatkan tidak hanya



instansi perijinan dan pengendalian pembangunan pemerintah daerah tetapi perlu melibatkan unit pemerintahan yang lebih rendah seperti kecamatan dan nagari dan bisa juga melibatkan lembaga masyarakat agar tercapai efektifitas pengendalian.

Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya yaitu:

- Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian dan pertambangan perlu dikendalikan sesuai dengan karakteristik lahan agar tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup. Untuk itu dibutuhkan perangkat peraturan dan kelembagaan pelaksanaan yang lebih baik dan efektif dengan melibatkan masyarakat secara luas.
- Pengendalian lingkungan hidup tidak bisa berdiri sendiri dilakukan oleh Kabupaten Dharmasraya karena terkait dengan wilayah lain di Kabupaten Solok Selatan yang berada pada daerah hulu Batanghari. Oleh karena itu perlu dijalin kerjasama pengendalian lingkungan dalam kerangka Sub DAS Batangharu Hulu dan DAS Batanghari secara keseluruhan.

Gambaran pencapaian dalam aspek lingkungan hidup yang diharapkan yaitu: (1) terjaganya kelestarian kawasan hutan berfungsi lindung di Kabupaten Dharmasraya, (2) berkembangnya kegiatan usaha pemanfaatan nilai ekonomi hutan secara lestari bagi penduduk sekitar, (3) terjaganya kualitas, debit, dan fluktuasi sungai Batanghari, (4) minimalnya kerawanan gerakan tanah/longsor.

Permasalahan pokok dalam rangka pengelolaan bidang Lingkungan Hidup di Dharmasraya adalah sebagai berikut :

- Semakin meningkatnya pencemaran lingkungan (air, lahan dan ekosistem) akibat aktifitas pertanian, kehutanan dan pertambangan
- Lemahnya kebijakan dan pengawasan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- Lemahnya peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup

9. Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan dibidang kependudukan dan catatan sipil dan kependudukan adalah :

- Pertumbuhan penduduk Kabupaten Dharmasraya tertinggi diantara daerah kabupaten dan kota di Sumbar yaitu 3,09% sementara rata-rata Sumbar hanya 1,34%. Dari piramida penduduk terlihat kecenderungan tingginya pertumbuhan penduduk alamiah dan migrasi masuk. Hal lain yang terlihat dari sex ratio yaitu indeks perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Dharmasraya yaitu 106,9 tertinggi setelah Mentawai, sementara rata-rata Sumbar 98,4 (lebih banyak perempuan daripada laki-laki). Pengeluaran perkapita 608.000 terendah setelah Mentawai (rata-rata Sumbar 635,29);



- Masih banyaknya penduduk yang melangsungkan perkawinan pada usia remaja,
- Masih tingginya Angka Kelahiran Total,
- Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan reproduksi remaja
- Rendahnya jumlah peserta KB, dan persentase pasangan usia subur yang terlayani oleh program KB, serta yang ber KB secara mandiri,
- Rendahnya cakupan, mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang diselenggarakan oleh masyarakat/ lembaga kesehatan.

10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jika dibandingkan dengan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2010 maka terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan oleh SKPD terkait, diantaranya :

- Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Perlindungan pada Perempuan
- Masih rendahnya tingkat Kesejahteraan dan Perlindungan pada Anak
- Lemahnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- Adanya kecenderungan masyarakat untuk mengawinkan anak perempuan segera setelah berumur 12 tahun

11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Jika dibandingkan dengan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2010 maka terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan oleh SKPD terkait, diantaranya;

- Belum maksimalnya akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil.
- Masih rendahnya pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi,
- Masih rendahnya ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak.

12. Sosial

Beberapa permasalahan yang terkait dengan aspek sosial di antaranya adalah:

- Beragamnya etnik yang berpotensi terjadinya konflik horizontal
- Peningkatan ekonomi masyarakat tidak diimbangi oleh penerapan nilai-nilai moral yang mengawal perilaku masyarakat, sehingga berpotensi lunturnya nilai-nilai bersama seperti rasa kepedulian masyarakat terhadap berbagai persoalan bersama
- Masalah pemberdayaan dan bantuan sosial kepada para penyandang masalah sosial
- Masalah peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial



13. Ketenagakerjaan

Permasalahan ketenagakerjaan di Dharmasraya saat ini sampai beberapa tahun ke depan adalah terbatasnya kesempatan kerja, hal ini disebabkan karena penambahan jumlah angkatan kerja baru tidak diiringi dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Akibatnya adalah lapangan pekerjaan yang terbatas harus diperebutkan oleh warga Dharmasraya dengan warga daerah sekitarnya.

14. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Walaupun disadari memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, namun ditemukan permasalahan dalam pengembangan UKM dan koperasi di Dharmasraya saat ini, yaitu :

1. Terbatasnya daerah pemasaran.
Kebanyakan usaha kecil dan koperasi menghadapi masalah pemasaran karena tidak mampu menjaga kualitas, kuantitas dan kontinuitas dalam pemasaran sehingga akhirnya tidak mampu melakukan pengembangan pasar ke luar wilayah tradisionalnya.
2. Rendahnya pemanfaatan teknologi.
Pemanfaatan teknologi dalam produksi dan pemasaran masih sangat terbatas sehingga efisiensi rendah dan upaya peningkatan kualitas sulit dilakukan yang berakibat pada rendahnya daya saing.
3. Kesulitan modal.
Sebagian besar usaha kecil mengalami kesulitan modal untuk mengembangkan usahanya sementara akses terhadap lembaga pembiayaan terutama perbankan juga sangat terbatas. Karena mengandalkan akumulasi keuntungan sebagai sumber dana, maka pertumbuhan usaha menjadi lambat sekali.
4. Lemahnya manajemen usaha.
Usaha kecil yang dibangun dengan spirit wirausaha yang kuat biasanya tidak didukung oleh perencanaan yang baik dan pengusahanya tidak dibekali dengan keterampilan manajemen yang baik sehingga mengalami berbagai kesulitan dalam pengembangan usahanya seperti pengendalian mutu, pengelolaan personil, pengembangan pasar, dan lain-lain.
5. Lingkungan usaha yang kurang kondusif.
Dalam pemasaran, seringkali usaha kecil dan koperasi menghadapi persaingan yang tidak seimbang dengan usaha skala lebih besar yang sudah memanfaatkan teknologi dengan baik.

15. Penanaman Modal

Pemasalahan umum bidang penanaman modal di Kabupaten Dharmasraya tidak akan jauh berbeda dengan permasalahan investasi di Sumatera Barat. LMFE Universitas Andalas (2006) telah menginventarisir permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan investasi adalah (a) belum optimalnya pelaksanaan harmonisasi, sinkronisasi, dan simplifikasi berbagai kebijakan, baik antar institusi di pusat dan antara pusat dengan daerah; (b) kualitas infrastruktur yang kurang



memadai; (c) masih panjangnya proses perizinan investasi sehingga masih tingginya biaya perizinan investasi; (d) belum tercukupinya pasokan energi yang dibutuhkan untuk kegiatan industri; dan (e) belum optimalnya pelaksanaan alih teknologi.

16. Kebudayaan

Sejarah Dharmasraya dapat ditelusuri mulai dari Kerajaan Swarnabhumi yang berpusat di Dharmasraya dari tahun 1347 hingga 1375 Masehi dengan raja Adityawarman. Peninggalan fisik berupa situs atau artefaknya terdapat tersebar pada beberapa lokasi di Kabupaten Dharmasraya. Situs-situs tersebut perlu dilestarikan dan juga dimanfaatkan sebagai objek dan daya tarik wisata budaya. Pelestarian dan pemanfaatan situs sebagai objek wisata perlu dilakukan dengan pendekatan kawasan. Dalam pendekatan ini yang dilestarikan bukan hanya objek situs tetapi termasuk lingkungannya. Peruntukan kawasan cagar budaya masih memerlukan penelitian lebih lanjut menyangkut zonasi kawasan.

Peran Adat Dalam Perkembangan Sosial

Komunitas adat Minangkabau pada awalnya berkembang pada daerah dengan basis ekonomi tanaman pangan padi sawah. Rumah gadang beserta lahan sawah dengan tradisi matrilinealnya merupakan satu kesatuan penyangga kehidupan beradat. Tradisi merantau ikut menjaga adat matrilineal Minangkabau.

Dengan perkembangan jaman, pada kawasan perkebunan nilai ekonomi padi sawah dikalahkan oleh komoditi perkebunan. Selain itu pada saat sekarang kecenderungan merantau mulai berkurang, laki-laki mulai banyak menggarap lahan milik kaum. Sementara tanaman perkebunan memiliki karakteristik berumur panjang kira-kira sama dengan umur satu generasi manusia dan berbeda dengan tanaman padi sawah yang berumur semusim. Sementara itu lahan sawah mulai banyak terlantar.

Kalau dibayangkan satu generasi kedepan, gejala perkembangan yang terjadi ini perlu diantisipasi. Pengaturan pewarisan dan pengelolaan lahan perkebunan beserta tanaman di atasnya yang berumur panjang perlu dipikirkan karena dalam berpotensi menimbulkan konflik dan berkurangnya peran rumah gadang. Apalagi ditambah dengan semakin tingginya tekanan pertambahan penduduk dan budidaya perkebunan oleh penduduk.

Perkebunan merupakan basis ekonomi Kabupaten Dharmasraya. Meskipun memiliki masyarakat yang heterogen tetapi dengan kecenderungan yang diuraikan di atas maka berbagai kebijakan perlu dipikirkan oleh lembaga adat beserta pemerintah agar peran adat dapat tetap vital sebagai norma pengorganisasian kehidupan sehari-hari.

Gambaran pencapaian pemeliharaan, pemupukan dan pengembangan modal budaya yang diharapkan yaitu: (1) terpeliharanya situs budaya dan



pemanfaatannya sebagai objek wisata, dan (2) tetap vitalnya adat sebagai modal budaya pengaturan kehidupan keluarga dan bermasyarakat.

Permasalahan :

- Belum tertatanya profil obyek peninggalan sejarah yang ada di Dharmasraya.
- Belum baiknya pengeloaan peninggalan sejarah.
- Masih banyaknya masyarakat Dharmasraya yang tidak tahu tentang sejarah Dharmasraya dan peninggalan sejarahnya selama ini.

17. Kepemudaan dan Olah Raga

Berbagai permasalahan di bidang kepemudaan, yaitu: tidak terlaksananya program penting seperti program pengembangan partisipasi dan potensi pemuda, yang didalamnya ada kegiatan peningkatan advokasi dan penyelamatan pemuda dari bahaya NAPZA dan HIV AIDS, peningkatan kreativitas dan inovasi pemuda sebagai wadah penyaluran minat dan bakat untuk mewujudkan kemandirian. Sedangkan bidang pengembangan manajemen keolahragaan juga terdapat persoalan karena tidak terlaksananya program pembangunan olahraga yang di dalamnya terdiri dari berbagai kegiatan seperti 1) Pengembangan olahraga masal bagi generasi muda dan masyarakat. 2) Peningkatan profesionalisme pelatih, manajer dan tenaga keolahragaan. 3) Pengembangan sistem penghargaan dan kesejahteraan bagi atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan dan 4) Pembinaan kemitraan dan kewirausahaan pengembangan olahraga.

18. Kesatuan Bangsa dan Politik Luar Negeri

Permasalahan umum yang dihadapi antara lain :

- Komitmen penegakan hukum yang berlangsung pada satu sisi, kesadaran masyarakat menjalankan hukum, dilain pihak, bersaing ketat dengan kepentingan pragmatis yang mementingkan capaian jangka pendek.
- Keterbatasan fasilitas penunjang dan tingkat kesejahteraan aparatur penegak hukum yang belum memadai berakibat pada tidak maksimalnya pencapaian dari tujuan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- Masih rendahnya kapasitas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya daerah di Kabupaten Dharmasraya.
- Belum siapnya sumberdaya manusia aparat pemerintah menghadapi penyelenggaraan Otonomi Daerah.

20. Ketahanan Pangan

Meski telah dicapai beberapa kemajuan dalam pembangunan ketahanan pangan namun masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu tidak berjalannya pengembangan kelembagaan ketahanan pangan daerah dan nagari yang



mempunyai fungsi penyediaan dan pengelolaan cadangan, penanganan kondisi rawan pangan, dan perdagangan bahan pangan.

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari

Nagari merupakan unit sosial terkecil sekaligus unit terbawah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena peran aktif nagari sangat penting dalam keberhasilan pembangunan sebagai ujung tombak pembangunan daerah. Secara lengkap, nagari dapat dilihat dalam empat fungsi yaitu sebagai: (1) unit administratif; (2) unit adat dan sosial budaya; (3) unit keamanan; dan (4) unit sosial-ekonomi.

Berbagai program pembangunan daerah terkait peningkatan ekonomi dan penyediaan infrastruktur pendukung telah melibatkan peran pengelolaan nagari seperti PNPM, kredit mikro nagari, unit simpan pinjam dan lainnya. Mengingat besarnya modal sumberdaya alam dan penduduk didukung dengan modal sosial, peran sosial-ekonomi yang lebih besar berpeluang dikembangkan dimasa depan dalam pengelolaan usaha ekonomi seperti pengelolaan koperasi pertanian atau pengembangan lembaga bank mikro nagari.

Selain itu disisi lain data dan informasi sebagai landasan keputusan pembangunan mestinya menggambarkan berbagai kondisi fisik, sosial, ekonomi secara rinci dan akurat berbagai kondisi daerah. Data dan informasi yang akurat bisa dimulai dari unit terkecil nagari. Data dan informasi kondisi, potensi dan masalah nagari secara lengkap dan akurat dapat dikumpulkan dari unit nagari untuk kemudian seterusnya dikompilasi menjadi data dan informasi pembangunan daerah kecamatan dan kabupaten.

Selain itu permasalahan pokok dalam pemberdayaan masyarakat nagari di Kabupaten Dharmasraya yaitu :

- Masih perlunya peningkatan SDM pemerintahan nagari
- Perlunya penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
- Masih perlunya Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya

22. Statistik

Kelemahan dan permasalahan penyediaan informasi statistik daerah yaitu;

- Terbatasnya sumberdaya manusia yang berperan untuk mengembangkan informasi statistik daerah.
- Terbatasnya koordinasi dan kerjasama institusi pemerintah dan swasta dalam mendukung penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan.



23. Kearsipan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka memelihara kelestarian arsip-arsip dan pustaka daerah antara lain:

- Terbatasnya sarana dan prasarana sebagai media penyelamatan dan pelestarian arsip daerah Kabuapten Dharmasraya.
- Terbatasnya mutu pelayanan system informasi kearsipan dilingkungan pemerintah maupun swasta/masyarakat.
- Kurangnya koordinasi antar instansi/dinas terkait dalam pengelolaan dan penyelamatan arsip daerah.
- Kurangnya minat baca lantaran minimnya sarana dan prasarana keputakaan daerah

24. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pada komunikasi dan informasi, adalah sebagai berikut :

- Belum efisiennya infrastruktur ICT. Terjadi duplikasi jaringan, tower, galian. Ada potensi sharing infrastruktur tower, galian, namun network tidak berjalan dengan baik.
- Belum optimalnya inventarisasi potensi infrastruktur dan jalur distribusi yang dapat ditumpangkan kabel serat optik.
- Lemahnya koordinasi antar sektor.

25. Perpustakaan

Masalah perpustakaan Dharmasraya ada beberapa hal, seperti;

- Kurangnya minat baca generasi muda dan anak sekolah.
- Terbatasnya fasilitas pendukung seperti ruang baca, mobilitas dan sumberdaya manusia.
- Lambatnya koordinasi antar lembaga untuk mendorong kemajuan masyarakat dalam informasi.

4.1.2. Permasalahan Terkait Urusan Pilihan

1. Pertanian

Walaupun telah dicapai beberapa kemajuan dalam pembangunan pertanian tetapi masih banyak permasalahan yang dihadapi, diantaranya adalah :

- Tidak optimalnya kegiatan Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil untuk menurunkan kehilangan hasil (*looses*)
- Tidak berjalannya revitalisasi sistem penyuluhan berkaitan dengan produksi pangan, perkebunan, dan peternakan, termasuk peningkatan kapasitas petani, penyuluh dan aparat pembina
- Belum terlaksananya dengan baik Pengembangan sistem transfer teknologi (penyuluhan pertanian) yang bersifat demand-driven dan kompetitif untuk



mendukung upaya perluasan basis produksi pertanian segar dan bahan baku agroindustri.

- Lemahnya kelembagaan pertanian ditingkat nagari/jorong untuk meningkatkan posisi tawar petani
- Kurangnya investasi dan pengembangan industri pendukung (industri penghasil bahan packing, peralatan, mesin, dll) pertanian rakyat
- Tidak adanya pengembangan lembaga keuangan dan sumberdaya produktif yang dapat memberikan dukungan permodalan bagi pelaku usaha agroindustri pedesaan
- Tidak adanya produk hukum yang akan menjadi dasar pelaksanaan model kemitraan dalam optimalisasi pemanfaatan potensi pertumbuhan di sektor pertanian
- Belum berjalannya pengembangan kerjasama/kemitraan yang saling menguntungkan antara pelaku UMK pertanian dan swasta, pengembangan usaha pertanian ramah lingkungan untuk menghasilkan produk pertanian organik.

Permasalahan dan potensi pengembangan produksi tanaman pangan di Kabupaten Dharmasraya dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan yaitu :

- Pengendalian alih fungsi lahan sawah yang ada dengan regulasi dan memberikan insentif bagi petani. Kebijakan didukung dengan penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada area beririgasi teknis.
- Peningkatan luas lahan sawah DI Batanghari seluas 1.715 Ha sehingga mencapai luas lebih kurang 7.500 Ha.
- Peningkatan pengairan D.I. kabupaten yang tersebar pada kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dan revitalisasi sawah pada area mencapai luas 3.500 Ha.

Sementara untuk pertanian hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran) belum menjadi komoditi yang berperan besar dalam ekonomi daerah. Akan tetapi dengan potensi lahan dan keunggulan komparatif jenis hasil budidaya seperti manggis, duku, durian dan salak terdapat peluang pengembangan kalau dilakukan usaha budidaya, pemasaran dan pengolahan lebih lanjut dengan pola agribisnis.

Potensi pengembangan agribisnis hortikultura buah-buahan bernilai ekonomis dan produksi khas daerah seperti: manggis, duku, durian dan salak dengan pola klaster pada beberapa kecamatan yang potensial (seperti Kec. IX Koto, Pulau Punjung, Koto Besar, Koto Baru).

Berdasarkan potensi lahan dan peluang pasar , dengan perkiraan optimis dalam jangka panjang melalui berbagai kebijakan yang mendukung terbuka peluang untuk berkembangnya sentra agribisnis hortikultura buah-buahan di Kabupaten Dharmasraya.



Kabupaten Dharmasraya merupakan daerah yang memiliki potensi terbesar untuk tanaman karet dan kedua terbesar untuk kelapa sawit di Sumatera Barat. Permasalahan dan potensi pengembangan dimasa depan dari kedua komoditi terkait dengan aspek budidaya dan pengolahan hasil.

Pengembangan Kelapa Sawit

Masalah utama yang perlu diatasi dalam perkebunan sawit yaitu pengolahan hasil kelapa sawit perkebunan rakyat, pemasaran, dan transportasi.

Pengembangan Karet

Sebagai sentra karet terbesar di Sumbar, Kabupaten Dharmasraya perlu meningkatkan kualitas dan produktifitas bahan olahan karet (bokar). Badan penelitian dan pengembangan pertanian Departemen Pertanian pada tahun 2005 telah menargetkan bahwa bagian yang diterima petani karet minimal 80% FOB (fee on board/harga ekspor) pada tahun 2025. Dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, oleh karena itu perlu pengembangan pengolahan karet dalam bentuk slab dan sheet ditingkat petani dan peningkatan jalan akses pertanian pada kawasan produksi. Hal ini dapat dilakukan dengan introduksi teknologi tepat guna seperti alat penggiling slab manual.

Pengembangan Komoditi Perkebunan Potensial Lainnya

- Pengembangan kemandirian daerah dalam pengembangan perkebunan dengan pengembangan pengolahan ditingkat petani untuk menstabilkan harga dan meningkatkan nilai tambah, meningkatkan bantuan permodalan bagi petani, dan pembangunan pabrik pengolahan dengan modal daerah atau pola pelibatan kepemilikan saham petani dalam usaha industri.
- Meningkatkan produksi dan produktifitas produk unggulan karet, kelapa sawit dan komoditi lainnya seperti kopi dan kakao melalui menjamin input bibit unggul, pupuk, dan peremajaan.
- Meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan dengan pengembangan pengolahan hasil perkebunan ditingkat petani.
- Pengembangan pabrik pengolahan sawit dan industri hilir lanjutan pengolahan produk makanan.
- Pengembangan prasarana pemasaran hasil perkebunan dengan mengembangkan pasar agropolitan perkebunan yang berfungsi memperpendek mata rantai pemasaran dan menjaga tingkat harga komoditi serta mengembangkan jalur akses yang menghubungkan kawasan budidaya perkebunan dengan jalur transportasi regional.

2. Kehutanan

Dalam rangka pengelolaan bidang kehutanan, permasalahan pokok di Dharmasraya adalah:

- Terdapatnya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan non pertanian dan alih fungsi hutan produksi tetap dan areal hutan lainnya untuk kegiatan non kehutanan



- Terjadinya degradasi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat kegiatan eksploitasi hasil hutan
- Lemahnya kebijakan dan pengawasan atas kegiatan illegal logging dan penambangan liar dikawasan hutan
- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan fungsi hutan serta desakan ekonomi masyarakat sekitar hutan, sehingga memicu tingginya tekanan terhadap kawasan hutan

3. Energi dan Sumberdaya Mineral

Batubara dan biji besi yang menjadi produk tambang yang dominan sampai saat ini di Kabupaten Dharmasraya merupakan sumberdaya yang tidak terbaharui sehingga dalam jangka panjang (15-20 tahun kedepan) bisa habis dieksploitasi. Eksploitasi batu bara dan biji besi oleh perusahaan swasta pada lahan seluas 2.388 Ha dalam 10 tahun kedepan diperkirakan akan jauh berkurang produksinya.

Sementara itu potensi pertambangan rakyat yang dimaksudkan untuk memberi dampak kesejahteraan langsung kepada penduduk perlu melibatkan peran aktif pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan bantuan permodalan. Kelembagaan dalam usaha pertambangan rakyat perlu dibina agar memberi dampak sebesarnya bagi kesejahteraan penduduk dan sekaligus dilakukan tanpa berakibat merusak lingkungan.

Perhatian perlu diberikan kepada kecenderungan untuk mengeksploitasi kawasan sekitar sungai. Pengendalian eksploitasi tambang di kawasan sungai merupakan isu lingkungan yang perlu menjadi perhatian dalam perijinan dan pengendalian penataan ruang.

Permasalahan pokok dalam rangka pengelolaan energi dan sumberdaya mineral di Dharmasraya adalah sebagai berikut:

- Lemahnya penataan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan tambang yang berwawasan lingkungan
- Masih kurangnya pendataan tentang hasil produksi kegiatan pertambangan
- Kurang kondusifnya iklim investasi dibidang pertambangan dan energy
- Terdapatnya lokasi bahan tambang yang berada di daerah kawasan hutan lindung
- Belum adanya pemetaan dan pemerataan pembangunan jaringan Listrik di jorong/nagari

4. Pariwisata

Sejauh ini pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pariwisata belum mampu memberi inovasi yang berefek lompatan besar terhadap pengembangan pariwisata Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masih masuk



dalam kategori hanya melaksanakan Tupoksi. Sektor kepariwisataan memiliki *multiplier effect* yang cukup tinggi apabila dikelola dan dikembangkan dengan konsep perencanaan yang matang terhadap pengembangan potensi wisata yang ada, khususnya di wilayah Kabupaten Dharmasraya. Potensi wisata di Kabupaten Dharmasraya memiliki nilai yang khusus apalagi jika dikelola dengan baik, yang meliputi potensi wisata alam dan wisata sejarah/budaya.

Secara spesifik masalah pariwisata di Dharmasraya adalah:

- Masih belum terkelolanya objek-objek wisata yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya,
- Objek wisata belum dilengkapi sarana dan prasarana penunjang,
- Belum terintegrasinya pengembangan objek wisata kab. Dharmasraya dengan objek wisata yang ada di Sumatera Barat,
- Keterbatasan sistem maupun sumberdaya aparatur kepariwisataan, pengelolaan objek wisata yang belum dilakukan secara professional.

5. Peternakan dan Perikanan

Kebijakan pembangunan disektor peternakan nasional yaitu program swasembada daging sapi pada tahun 2014 (PSDS /Program Swasembada Daging Sapi-2014) yang menjadi salah satu program utama Departemen Pertanian. Sumatera Barat merupakan salah satu dari 18 provinsi yang ditetapkan sebagai sentra sapi potong. Salah satu strategi pengembangan yaitu integrasi tanaman – ternak yang untuk kasus Kabupaten Dharmasraya berupa integrasi kelapa sawit – sapi.

Dimasa depan terbuka peluang untuk mengintegrasikan perkebunan sawit dengan peternakan sapi. Pada lahan sawit dengan luas 1 Ha dapat menyediakan pakan bagi 3.2 ekor sapi yang berasal dari pelepah sawit, solid, dan bungkil inti sawit. Dengan demikian pada lahan kelapa sawit perkebunan rakyat seluas hampir mencapai 30.000 Ha dan kebun plasma 20.000 Ha dapat diintegrasikan kegiatan pertanian – peternakan sapi sampai mencapai 150.000 ekor. Kalau perkiraan jumlah ternak sapi yang dapat dibudidayakan dalam 1 Ha lahan kebun kelapa sawit rata-rata 2 ekor/hektar maka sapi potong di Kabupaten Dharmasraya dengan pola integrasi sawit -sapi sebanyak 100.000 ekor

Dengan jumlah sapi tahun 2010 sebanyak 25.773 telah menjadikan Kabupaten Dharmasraya swasembada sapi (dengan rata-rata konsumsi daging sapi 2,1 kg/kapita/tahun dan jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya 197.600 jiwa maka kebutuhan daging sekitar 401.000 kg/tahun atau setara 2.450 ekor sapi). Populasi sapi untuk potensial stok ini yaitu 15.840 ekor.

Dimasa depan, dalam kerangka swasembada daging sapi pada konsumsi yang ideal yaitu 4,6 kg/kapita/tahun maka jumlah populasi sapi perlu ditingkatkan 2 kali lipat dari jumlah sekarang.



Dengan peningkatan produksi ternak sapi potong dengan pola integrasi kebun dengan kepemilikan bisa mencapai 1-3 ekor sapi perhektar menjadi cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani perkebunan. Potensi pengembangan masa depan yaitu peningkatan produksi sapi potong dengan strategi pengembangan integrasi kelapa sawit - sapi potong.

Gambaran keberhasilan sektor perternakan yang diharapkan yaitu meningkatnya jumlah sapi potong 2 kali lipat dari jumlah sapi sekarang.

Kabupaten Dharmasraya meskipun memiliki infrastruktur pendukung budidaya perikanan yang cukup lengkap tetapi memiliki produksi perikanan budidaya yang masih rendah. Peluang pengembangan sektor perikanan dimasa depan yaitu pengembangan budidaya perikanan dengan pendekatan kawasan minapolitan dengan telah ditetapkannya Kabupaten Dharmasraya dalam program nasional sebagai salah satu daerah pengembangan minapolitan.

Permasalahan pokok dalam rangka pengelolaan Perikanan adalah sebagai berikut:

- Potensi budidaya perikanan belum terkelola dengan baik.
- Potensi ini sangat baik untuk dikembangkan guna memacu kebutuhan produksi ikan , sehingga ketergantungan akan produksi dari perikanan daerah lain dapat dikurangi
- Kualitas / mutu produk perikanan masih rendah, sehingga nilai jual juga rendah.
- Sumberdaya manusia yang mengelola sumberdaya perikanan masih relatif rendah, dicirikan oleh rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan dan pengalaman. Demikian juga kondisi aparat pengelola perikanan. Akibatnya produktivitas dan kualitas produk perikanan yang dihasilkan menjadi juga sangat rendah

Gambaran masa depan yang diharapkan yaitu:

- Berkembangnya kawasan minapolitan di Kabupaten Dharmasraya
- Meningkatnya produksi perikanan mencapai minimal 300% di Kabupaten Dharmasraya sehingga memiliki kontribusi besar pada produksi Sumbar bagian selatan (yang meliputi Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung dan Dharmasraya

6. Perdagangan

Berdasarkan kondisi terkini dari sektor perdagangan, hotel dan restoran yang secara umum telah memperlihatkan pertumbuhan yang cukup baik setelah terjadinya pemekaran dan telah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam pembentukan nilai PDRB kabupaten Dharmasraya selama ini. Meskipun demikian, pembangunan sector ini masih mengandung sejumlah persoalan mendasar, terutama masih rentannya sector perdagangan, hotel dan restoran, terutama tentunya sub sector perdagangan besar dan eceran oleh krisis financial yang disebabkan oleh goncangan yang bersumber dari luar wilayah sendiri. Selain itu,



adalah masih belum optimalnya kinerja sector perdagangan hotel dan restoran ini, karena pertumbuhan yang berarti baru di sector perdagangan besar dan eceran dan restoran, sedangkan pada sub sector hotel justru belum memperlihatkan adanya kemajuan yang berarti selama RPJM I lalu.

Indikasi lain masih belum optimalnya peran sector perdagangan dalam memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Dharmasraya adalah masih rendahnya serapan tenaga kerja dari sub sector ini. Jumlah angkatan kerja yang berkerja di sector perdagangan, hotel dan restoran ini pada tahun 2005 berjumlah hanya sebanyak 7.809 orang atau hanya sebesar 8,31% dari total angkatan kerja yang bekerja yakni mencapai 93.997 orang, dan mengalami penurunan menjadi 6.277 orang tahun 2008 (lihat BPS, Dharmasraya, 2010) atau hanya sebanyak 8,31% dari total angkatan kerja yang berkerja yakni hanya 75.551 orang. Artinya, serapan tenaga kerja di sector perdagangan ini belum memberikan kemajuan yang berarti sama sekali. Ada kelanggengan pelaku usaha perdagangan besar dan eceran, masih sulitnya tumbuh enterprenuer-enterprenuer baru di sector perdagangan ini. Hal ini tentu saja perlu didobrak dengan membuat program pembangunan yang mampu meningkatkan serapan tenaga kerja di sector perdagangan, hotel dan restoran ini pada periode RPJMD 2010-2015 ke depan ini.

7. Perindustrian

Pembangunan sektor industri pengolahan di kabupaten Dharmasraya telah memperlihatkan dinamika kearah yang lebih baik. Kemajuan dalam peningkatan perannya dalam pembentukan nilai PDRB pada satu sisi cukup mengagumkan apabila dibandingkan antara keadaan sebelum pemekaran wilayah dengan sesudah pemekaran wilayah, yang tumbuh sebesar 23,65%, jauh melampaui pertumbuhan pada sebelum pemekaran wilayah yang hanya sebesar 9,24%.

Meskipun demikian, kemajuan yang dicapai ini belumlah lengkap, takkala dilihat dari jumlah serapan tenaga atau kesempatan kerja yang terbuka pada sektor ini. Indikasi penurunan pertumbuhan serapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan yang berkontraksi sebesar -,55% tentunya perlu disikapi dengan baik. Rendahnya serapan tenaga kerja ini, memperlihatkan bahwa sektor industri pengolahan lebih berorientasi kepada usaha ekonomi berskala besar, diduga penurunan serapan tenaga kerja disebabkan oleh terjadinya pemutusan hubungan kerja dan ditutupnya beberapa industri pengolahan yang tidak mampu bertahan dalam menghadapi krisis financial global yang melanda dunia industri dan perdagangan Sumatera Barat umumnya pada waktu-waktu sebelumnya, termasuk juga wilayah Dharmasraya sebagai wilayah andalan penghasil eksport Sumatera Barat di bidang produks perkebunan.

Memperhatikan gejala yang ada, maka persoalan mendasar dalam pengembangan sektor industri pengolahan kabupaten Dharmasraya adalah bahwa jenis usaha industri pengolahan ini masih dilakukan oleh pelaku usaha besar, belum pada pelaku usaha ekonomi rumahtangga atau kelompok tani. Diyakini



selama ini usaha ekonomi rumahtangga atau ekonomi usaha kecil dan menengah lebih rentan terhadap goncangan krisis, namun sangat terbatas pada sumber permodalan dan teknologi tepat guna.

Industri skala mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Dharmasraya tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan kalau dilihat proporsinya dalam struktur perekonomian. Akan tetapi sektor industri meskipun menyerap tenaga kerja yang cukup besar yaitu mencapai lebih dari 4.000 orang (jumlah unit usaha mikro 2.068 unit, usaha kecil menyerap tenaga kerja 1.076 orang, dan usaha menengah menyerap tenaga kerja 1.160 orang), tetapi mempunyai keterbatasan pengembangan karena tergantung dari permintaan pasar lokal.

4.1.3. Permasalahan

a. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan

- Masih kurangnya infrastruktur dasar masyarakat (air bersih, sanitasi permukiman, sarana perhubungan, listrik, pendidikan dan kesehatan)
- Tidak disiplinnya pengelola dan masyarakat yang berakibat rusaknya SDA dan lingkungan, Penambangan Tanpa Ijin (PETI) yang merusak dan merajalela.
- Semakin berkurangnya lahan produktif karena meningkatnya alih fungsi lahan.
- Adanya inkonsistensi implementasi peraturan pemerintah tentang pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan oleh investor
- Adanya penambangan galian C yang merusak alam dan membawa pencemaran lingkungan
- Adanya ancaman pemanasan global (global warming)
- Adanya kebakaran hutan dari daerah tetangga

b. Bidang Sosial dan Budaya

- Rentannya terjadi konflik horizontal dalam masyarakat
- Masih rendahnya kelayakan dan belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- Kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah yang masih rendah dan belum berkembang
- Terbatasnya pemahaman dan penghayatan masyarakat, khususnya generasi muda terhadap filosofi ABS SBK (*Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*)
- Belum optimalnya peran pemuka agama dan adat dalam kehidupan bermasyarakat
- Semakin intensifnya infiltrasi budaya luar melalui akses komunikasi media televisi dan internet.

c. Bidang Ekonomi

- Masih terbatas peran lembaga keuangan ekonomi mikro yang mampu mendukung secara penuh keberadaan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat Dharmasraya.
- Problema tanah ulayat dan hutan lindung terhadap pergerakan ekonomi



- Belum meratanya pengelolaan potensi sumber daya antar kecamatan
- Masih lemahnya penanganan pasca panen dan tidak berkembangnya industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian.
- Adanya perdagangan bebas China-Asia (China-Asean Free Trade Area/CAFTA) yang mengancam produk lokal
- Belum banyaknya regulasi provinsi dan kabupaten yang dapat mengantisipasi globalisasi ekonomi
- Perlakuan standarisasi internasional pada produk barang dan jasa
- Isu lingkungan terhadap berbagai produk ekspor
- Iklim usaha kurang kondusif
- Persaingan produk Dharmasraya dengan daerah tetangga di tingkat lokal maupun regional

d. Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan

- Masih lemahnya penegakan hukum dan adanya konflik sosial
- Kurangnya kepastian hukum menyangkut tanah ulayat
- Belum optimalnya pengembangan kapasitas kelembagaan politik.
- Masih terbatasnya peran nagari sebagai struktur terbawah pengelolaan pemerintahan daerah.
- Belum ditetapkannya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten
- Belum efektif dan efisiennya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan *good governance* dan *clean government*
- Belum terintegrasinya program pembangunan secara lintas bidang
- Inkonsistensi peraturan nasional dan penerapannya untuk upaya penegakan hukum dan politik
- Terjadinya ancaman konflik dan disharmonisasi

4.2 PERMASALAHAN MAKRO

Permasalahan pada Bidang Ekonomi, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerataan ekonomi relatif belum tercapai, hal ini diindikasikan oleh pertumbuhan ekonomi tinggi namun pendapatan per kapita masyarakat relatif rendah;
- 2) Pertumbuhan investasi masih relatif rendah. Beberapa kendala dalam upaya peningkatan investasi di Kabupaten Dharmasraya, antara lain: belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha serta jaminan keamanan berusaha dalam bidang penanaman modal, dan masih rendahnya infrastruktur pendukung serta relatif sulitnya permasalahan tanah ulayat;
- 3) Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah dan kompetensi pengusaha lokal dalam meningkatkan daya saing daerah. Ini diindikasikan dengan potensi sektor pertanian dan sektor lainnya yang begitu besar namun masih memproduksi bahan mentah (*raw material*);



- 4) Masih lemahnya penanganan pasca panen dan tidak berkembangnya industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian;
- 5) Belum ditetapkannya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta RPJP Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- 6) Belum terlaksana sepenuhnya *good governance* dan *clean government*;
- 7) Masih tingginya jumlah RTM
- 8) Pengelolaan Potensi pertambangan belum optimal;
- 9) Potensi budaya dan keindahan alam di Dharmasraya belum digali dan dikembangkan secara optimal sebagai potensi wisata unggulan.

Permasalahan pada Bidang Sosial Budaya, Kehidupan Beragama dan Pemerintahan, adalah sebagai berikut:

- 1) Di bidang pendidikan, antara lain beberapa permasalahan mendasar yang memerlukan penanganan segera mencakup: (a) meski angka melek huruf 99,80%, namun tingkat pendidikan rata-rata masyarakat Dharmasraya masih relatif rendah, yaitu 7,2 tahun atau baru mencapai kelas 1 SLTP; (b) APK dan APM tingkat SMP dan SMA masih relatif rendah, dimana APK sebesar 71,54% dan 79,71% dan APM sebesar 59,59% dan 61,19%; (c) Angka putus sekolah untuk semua jenjang terutama SMA masih relatif tinggi; dan (d) kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing.
- 2) Di bidang kesehatan, antara lain: (a) belum meratanya akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah; (b) belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang kesehatan dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi bidang kesehatan; (d) Kasus penderita gizi buruk dan gizi kurang balita yang ditimbang masih tinggi; dan (5) masih tingginya penyakit ISPA
- 3) Di bidang tenaga kerja adalah meskipun angka pengangguran berdasarkan data relatif rendah sekitar 4,01%, namun kompetensi tenaga kerja masih relatif rendah. Akibatnya, angkatan kerja yang bekerja hanya bekerja di sektor-sektor informal dan hanya sebagian kecil yang terserap secara optimal oleh sektor-sektor formal.
- 4) Di bidang keolahragaan adalah pembinaan olahraga yang belum tertata secara sistematis antara olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga rekreasi di lingkungan masyarakat, dan olahraga prestasi untuk kelompok elit atlet yang menjadi tulang punggung Kabupaten Dharmasraya dalam pentas kompetisi olahraga daerah maupun nasional. Sedangkan permasalahan dibidang kepemudaan masih terbatasnya sarana dan prasana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri.
- 5) Di bidang kebudayaan adalah masih rendahnya ketahanan budaya masyarakat akibat imbas perubahan global dan modernisasi serta makin terkikisnya moral dan kesenian daerah.
- 6) Penguasaan IPTEK daerah yang masih rendah



- 7) Rentannya terjadi konflik horizontal dalam masyarakat serta konflik kepentingan menyangkut pemanfaatan tanah ulayat dan hutan lindung

Permasalahan di bidang Fisik dan Prasarana adalah belum meratanya infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat, sebagai berikut:

- 1) Infrastruktur dasar masyarakat seperti sarana pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan baik kualitas maupun pemerataan.
- 2) Infrastruktur transportasi kabupaten Dharmasraya hingga akhir tahun 2010 masih belum memadai yang ditunjukkan, sebagai berikut: masih rendahnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan, rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur jaringan jalan, kurangnya ketersediaan dan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas, dan belum optimalnya terminal sebagai tempat pertukaran moda transportasi;
- 3) Pengelolaan potensi irigasi dan sumber daya air masih relatif rendah dalam mendukung kegiatan pertanian maupun kegiatan ekonomi lainnya; Jaringan listrik masyarakat sampai dengan tahun 2009 baru mencapai 58,74%, serta masih rendahnya infrastruktur persampahan dan limbah;
- 4) Pada aspek telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah;
- 5) Pengelolaan lingkungan masih relatif rendah, yang diindikasikan masih relatif tingginya penambangan liar (PETI) oleh masyarakat;

4.3. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah/masyarakat) dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu strategis pada bagian ini berdasarkan analisis lingkungan eksternal. Selain berdasarkan pengamatan lingkungan internal, Pemerintah Daerah perlu menyelaraskan isu-isu pembangunan daerah dengan isu eksternal dalam wilayah lebih luas. Rumusan isu strategis yang dihasilkan adalah keterpaduan/sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan wilayah sekitar dan wilayah yang lebih luas (dengan arah kebijakan rencana jangka panjang nasional, kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi, atau kecenderungan lain berskala nasional, global lainnya dimasa depan).



Analisis isu-isu strategis pada penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2010-2015 mengacu pada Arahana Pembangunan Nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sumatera Barat (2005-2025) serta mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Popinsis Sumatera Barat (2011-2015), dengan memuat persandingan prioritas pembangunan nasional, propinsi dan kabupten Dharmasraya atau merupakan analisis lingkungan eksternal.

Jika dikaitkan dengan kebijakan makro, maka isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan Kabupaten Dharmasraya 5 (lima) tahun kedepan antara lain :

1. Berdasarkan Kebijakan “Millenium Development Goals” (MDG’s Tahun 2015

Berbagai tujuan dan arget pencapaian MDGs yang relevan untuk rujukan perumusan isu strategis pembangunan di Kabupaten Dharmasraya yaitu:

- menanggulangi kemiskinan dan kelaparan dengan target: menurunkan proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1,00 (ppp) per hari; dan menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda; dan menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan
- mencapai pendidikan dasar untuk semua dengan target: menjamin semua anak laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar
- mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan target: menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan
- menurunkan angka kematian anak dengan target: menurunkan angka kematian balita, bayi, neonatal.
- meningkatkan kesehatan ibu dengan target: menurunkan angka kematian ibu dan mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua
- memastikan kelestarian lingkungan hidup dengan target: memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang; mengurangi laju kehilangan keanekaragaman hayati, dan mencapai pengurangan laju kehilangan yang signifikan; menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan layak serta sanitasi dasar; dan mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020.

2. Berdasarkan RPJPN Tahun 2005-2025

Visi pembangunan nasional tahun seperti tertera dalam RPJP Nasional 2005–2025 adalah: “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur”. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing. Mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan



penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

3. Berdasarkan Isu Strategis Sektor/Kementerian

- a) Arah kebijakan pangan dalam RPJP Nasional yaitu menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Salah satu program utama pemerintah yaitu mewujudkan swasembada beras. Sebagai pendukung telah ada Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2009 Tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
- b) Program Swasembada Daging Sapi 2014 (PSDS-2014). Sumatera Barat ditetapkan sebagai salah satu dari 18 sentra sapi potong. Salah satu program yang prospektif yaitu sistem integrasi Tanaman –Ternak seperti integrasi kelapa sawit-sapi.
- c) Dalam Rencana Jangka Menengah Nasional, salah satu pendekatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan konsep Minapolitan. Kabupaten Dharmasraya menjadi salahsatu daerah pengembangan minapolitan.
- d) Beberapa agenda penting dalam pembangunan sektor perkebunan bagi perbaikan rantai nilai kelapa sawit dan karet dalam MP3EI yang perlu dilihat sebagai acuan pembangunan komoditi yang sama di Kabupaten Dharmasraya yaitu:
 - Peningkatan produksi kelapa sawit akan lebih difokuskan kepada peningkatan produktifitas CPO per hektar, yang saat ini baru mencapai 3,8 Ton/Ha, mengejar ketertinggalan dari Malaysia yang telah mampu mencapai 4,6 Ton/Ha.
 - Perbaikan infrastruktur jalan (akses jalan) dari lahan ke PKS, dan penyediaan tangki timbun yang memadai. Hasil penggilingan secara terstruktur harus mampu ditingkatkan, yakni dari rata-rata produksi CPO sekitar 21% menjadi diantara 24 – 25%.
 - Hilirisasi produk kelapa sawit untuk memperkuat posisi strategis Indonesia.



- Perbaiki mutu bibit karet (wajib bersertifikat), perbaiki teknik budi daya (jarak tanam) dan perawatan tanaman karet yang baik. Sebanyak mungkin diimbau untuk menggunakan kultivar karet bibit unggul (siap panen umur 3,5 tahun);
 - Melakukan budidaya tumpang sari pada dua tahun pertama budidaya karet dengan tanaman pangan, seperti kacang tanah, jagung, ubi jalar dll, sehingga menambah penghasilan petani karet, dan secara tidak langsung ikut membangun ketahanan pangan setempat;
 - Mengeliminasi kecurangan pencampuran lateks dengan bahan-bahan pengotor karet oleh para petani karet, serta meminimalkan jumlah pedagang perantara karet, agar penghasilan yang diterima petani menjadi lebih besar;
 - Penataan kelembagaan dan eksistensi para pengolah karet rakyat yang tidak efisien, perbaiki teknik pengolahan karet rakyat (bokar) dan karet lembaran (sheet);
 - Menumbuhkembangkan industri produk hilir karet di dalam negeri, terutama untuk ban, sarung tangan, busa kasur dan bantal, kondom, sol sepatu, vulkanisir ban dan lain sebagainya.
- e) Program nasional Kementerian Perdagangan untuk merevitalisasi pasar tradisional di seluruh tanah air (yang berjumlah 12.000-13.000 unit pasar) untuk menjadi pasar rakyat yang handal dan berdaya saing.
- f) Undang-undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, menyatakan bahwa informasi geospasial merupakan dasar perencanaan penataan ruang, penanggulangan bencana, pengelolaan sumber daya alam, dan lain sebagainya. Sistem informasi geospasial perlu dibuat terintegrasi secara nasional seperti disosialisasikan oleh Bakosurtanal.
- g) Kecenderungan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat yang aspiratif dan partisipatif seperti skema PNPM dan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- h) Kecenderungan untuk terus melakukan pengelolaan data berbasis teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- i) Tata ruang sebagai aspek penting pemandu investasi dan pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Berdasarkan RPJP dan RPJM Provinsi Sumatera Barat

Visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025 yaitu: Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025. Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 adalah: Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat. Salah satu agenda penting dalam rencana pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut yaitu memberdayakan nagari sebagai basis pembangunan. Sasaran pembangunannya yaitu pemantapan pemerintahan nagari, sistem pengelolaan keuangan nagari, peningkatan SDM penyelenggaraan pemerintahan nagari, dan partisipasi masyarakat (perantau dalam pembangunan nagari).



Berdasarkan permasalahan dan isu makro wilayah, maka isu-isu strategis yang dapat di rumuskan untuk Kabupaten Dharmasraya 5 (lima) tahun kedepan antara lain :

- Masih rendahnya penerapan ajaran agama serta budaya daerah dalam kehidupan bernagari.
- Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat
- Masih terbatasnya kualitas dan pemerataan pendidikan serta menguasai IPTEK
- Masih rendahnya pelaksanaan penegakan hokum yang berkeadilan serta peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban
- Masih belum meratanya pembangunan infrastruktur guna menunjang perekonomian masyarakat
- Belum terlaksana sepenuhnya *good governance* dan *clean goverment*
- Belum ditetapkannya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta RPJP Daerah Kabupaten Dharmasraya
- Belum adanya keterpaduan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Hal ini diakibatkan belum adanya rencana tata ruang wilayah yang dapat mengendalikan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Dharmasraya.
- Masih terbatas peran lembaga keuangan ekonomi mikro dan peran nagari sebagai struktur terbawah pengelolaan pemerintahan daerah
- Masih tingginya angka kemiskinan penduduk di Kabupaten Dharmasraya
- Masih lemahnya penanganan pasca panen dan tidak berkembangnya industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian
- Penguasaan IPTEK daerah yang masih rendah
- Terbatasnya industri pengolahan dan jasa dengan dorongan IPTEK dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 VISI

Merujuk kepada ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, visi dan misi pembangunan jangka menengah adalah visi dan misi kepala daerah terpilih. Selain itu dibuat telah mengacu kepada visi dan misi RPJPD dan RPJMN, visi dan misi ini menjadi dasar utama penyusunan kebijakan umum pembangunan. Selanjutnya, visi dan misi sudah mendapat legitimasi mayoritas masyarakat Dharmasraya sesuai hasil pemilukada tanggal 30 Juni 2010. Hal ini menunjukkan pula bahwa kebijakan umum pembangunan daerah sesuai dengan potensi, realita, keinginan dan aspirasi masyarakat. Jadi, visi dan misi merupakan suatu kondisi harapan yang akan tercapai di Dharmasraya tahun 2015, yaitu;

***“Terwujudnya Masyarakat Dharmasraya yang Beriman,
Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya, Adil dan Sejahtera pada
Tahun 2015”***

Beriman yang dimaksudkan disini bahwa Dharmasraya adalah bagian yang tidak terlepas dari budaya Minangkabau yang berfilosofi ‘Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah’. Maka, pembangunan daerah harus melandaskannya pada pondasi agama dan moral yang kokoh. Sehingga, tujuan pembangunan ialah pembangunan seutuhnya yang menyeimbangkan antara jasmani dan rohani. Disini, kehidupan masyarakat bersinergi mewujudkan daerah yang aman, berbudaya, adil dan sejahtera. Beriman juga dimaksudkan mendorong anggota masyarakat berperilaku secara pribadi, kelompok dan sosial menjadi masyarakat madani.

Sehat dimaksudkan mengacu pada target pencapaian MDGs (*Millenium Development Goals*) tahun 2015. Maka, pembangunan bidang kesehatan menjadi prioritas yang harus diwujudkan di Dharmasraya. Targetnya adalah terwujudnya kondisi masyarakat sehat, mudah mengakses dan mendapatkan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau oleh daya dan kemampuan masyarakat.

Cerdas yang dimaksudkan ialah kondisi peningkatan kualitas pendidikan Dharmasraya yang senantiasa lebih baik dari tahun ke tahun. Ukuran keberhasilannya antara lain adalah peningkatan; (a) jumlah peserta didik, (b) prestasi lulusan, (c) jumlah mahasiswa Dharmasraya, (d) kualitas sekolah dan sarana pendidikan, (e) kualitas tenaga pendidik, dan (f) kesejahteraan tenaga pendidik.



Aman dimaksudkan ialah kondisi wilayah dan masyarakat Dharmasraya yang bebas dari tindakan kriminal dan terjaganya stabilitas politik. Sehingga terbina suasana yang kondusif untuk menjalankan usaha dan penanaman investasi.

Berbudaya dimaksudkan bahwa Dharmasraya sebagai daerah multikultural dan memiliki rekam jejak sejarah beragam, memiliki budaya yang beraneka pula. Semuanya harus dilestarikan dan ditumbuhkembangkan dengan tidak melupakan budaya timur yang berlandaskan norma dan agama.

Adil dimaksudkan adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya keseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu, kelompok dan golongan serta dikawal oleh prinsip penegakan hukum yang konsisten dan konsekuen.

Sejahtera dimaksudkan adalah kemakmuran yang dirasakan oleh seluruh warga dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan sosial, ekonomi, politik serta rohani dalam berbagai aspek kehidupan baik sebagai individu maupun anggota masyarakat.

5.2 MISI

Untuk **mewujudkan visi diatas, ditetapkan misi pembangunan** jangka menengah kabupaten Dharmasraya 2010-2015 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan satu Identitas bersama sebagai “warga Dharmasraya”.
2. Mewujudkan Masyarakat Dharmasraya yang sehat, berilmu pengetahuan dan paham teknologi
3. Mewujudkan rasa aman, keadilan dan kesejahteraan masyarakat Dharmasraya dengan hukum sebagai panglima dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Misi membangun masyarakat yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan satu identitas bersama sebagai “warga Dharmasraya” yang berperan penting dalam membangun tatanan kehidupan masyarakat kedepan. Keragaman masyarakat Dharmasraya di satu sisi menjadi kekuatan yang bisa dimanfaatkan secara optimal, namun juga berpeluang menjadi ancaman konflik horizontal. Kesamaan identitas, pelayanan dan akses dalam bentuk hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Dharmasraya adalah bagian dari upaya perwujudan misi ini. Walaupun kita berbeda etnis dan agama tetapi memiliki identitas yang satu sebagai warga Dharmasraya dalam bingkai NKRI.

Misi Mewujudkan Masyarakat Dharmasraya yang sehat, berilmu pengetahuan dan paham teknologi adalah bagian dari upaya membentuk sumber daya yang unggul dan memiliki daya saing tinggi dibanding SDM daerah lain. Munculnya SDM unggul harus didukung oleh upaya peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang prima serta infrastruktur yang memadai bagi seluruh masyarakat Dharmasraya.



Misi mewujudkan rasa aman, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Dharmasraya dengan hukum sebagai panglima dalam tatanan kehidupan masyarakat dan meletakkan penegakan hukum sebagai bagian paling krusial dalam pemenuhan rasa aman dan keadilan. Pada sisi lain, kesejahteraan masyarakat telah lama dilindungi oleh hukum (adat, agama dan negara), sehingga akses terhadap hak-hak dasar masyarakat harus dipenuhi dengan menjalankan hukum yang telah ditetapkan bersama Pemerintah.

5.3 TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tiga misi yang menjabarkan visi Kabupaten Dharmasraya seperti tercantum pada RPJMD tahun 2010-2015, mempunyai sejumlah tujuan. *Misi pertama memiliki satu tujuan, yaitu;*

“Meletakkan pondasi pembangunan Dharmasraya berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”

Sedangkan *misi kedua, mempunyai dua tujuan* untuk;

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan memperbaiki mutu pelayanan kesehatan.
2. Meletakkan landasan awal untuk mewujudkan Kabupaten Dharmasraya sebagai barometer pendidikan regional.

Misi ketiga mempunyai tujuh tujuan karena mencakup banyak aspek, seperti; penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, lingkungan hidup, ekonomi kerakyatan dan membina suasana kondusif buat pengembangan usaha berbasis pertanian dan input teknologi.

1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum melalui penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan.
2. Memperkuat kapasitas lembaga politik, ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan di masyarakat.
3. Memeratakan Pembangunan di Seluruh Wilayah Dharmasraya
4. Memperbaiki dan meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, profesional dan berwibawa.
5. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Mengembangkan pembangunan daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan.
7. Mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat dan menguntungkan daerah



5.4 SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran pembangunan jangka menengah merujuk kepada sepuluh tujuan diatas. Semua tujuan hanya memiliki satu sasaran, kecuali tujuan 'Mengembangkan pembangunan daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan' mempunyai dua sasaran. Rinciannya sebagai berikut.

1. Mensinergikan keberagaman etnis dengan berbagai latar belakang sehingga merasa bangga dengan satu identitas bersama sebagai 'warga Dharmasraya'.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang murah dan mudah terjangkau
3. Membangun sumberdaya manusia yang handal dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan.
4. Peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum serta pematapan peranserta ormas dan partai politik.
5. Terbangunnya sinergitas antara pelaku pembangunan
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar secara merata.
7. Menempatkan aparaturnya sesuai dengan kemampuan dan keahliannya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
8. Tegaknya hukum terkait dengan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup
9. Terwujudnya kelembagaan dan kegiatan koperasi dan UMKM yang lebih profesional.
10. Terbina dan berkembangnya balai alih teknologi pertanian (agro technopark) dan kawasan sentra produksi
11. Menjaga keamanan penanaman modal dan kepastian berusaha diwilayah Dharmasraya.

5.5 AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH

Upaya mencapai sasaran dan tujuan pembangunan jangka menengah Dharmasraya 2010-2015, diselenggarakan dengan enam agenda, yaitu;

1. Agenda Meningkatkan penerapan ajaran agama dan budaya daerah

Melalui agenda pembangunan daerah ini diharapkan dapat diwujudkan keselarasan antara ajaran agama dan budaya daerah dengan tingkah laku dan kebiasaan hidup masyarakat. Sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera dan agamais menuju masyarakat madani. Termasuk ke dalam agenda pembangunan ini adalah perbaikan moral dan akhlak, peningkatan kepedulian sosial, pengembangan pendidikan bernuansa agama, peningkatan toleransi beragama, penerapan dan pengembangan kreatifitas budaya Minangkabau serta peningkatan kepastian hukum tanah ulayat.



2. Agenda Membangun sumberdaya manusia berkualitas dan menguasai IPTEK

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan landasan utama bagi terwujudnya proses pembangunan yang baik, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Termasuk dalam agenda pembangunan ini adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan ini memajukan pula prestasi seni dan olahraga. Kemudian peningkatan derajat kesehatan, pelayanan kesehatan yang merata dan perbaikan gizi. Selanjutnya pengembangan IPTEKS tepat guna dan perbaikan etos kerja masyarakat.

3. Agenda Penegakan Hukum yang Berkeadilan serta peranserta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban

Penegakan hukum yang berkeadilan adalah elemen penting untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban bagi masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menciptakan ketentraman bagi masyarakatnya. Fokus utama dari agenda ini adalah penindakan hukum yang adil bagi siapapun tanpa membeda-bedakan etnis maupun agama. Pada gilirannya hal ini membuka ruang bagi peranserta masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban bersama serta mencegah potensi konflik. Suasana keamanan dan ketertiban yang kondusif ini, dapat mencegah terjadinya penyakit masyarakat dan penyebaran obat terlarang. Sebaliknya ia akan memberi jaminan dan kepastian berusaha.

4. Agenda Perbaikan dan perluasan kapasitas serta jangkauan infrastruktur pendukung pembangunan

Pembangunan infrastruktur, disamping mengatasi masalah pemerataan, juga akan menunjang dinamika usaha ekonomi. Sehingga diharapkan terjadi peningkatan akses, jumlah, dan efisiensi distribusi produksi masyarakat. Selanjutnya terjadi penataan ruang terpadu untuk usaha dan industri, sarana prasarana pertanian dan perumahan rakyat. Dengan agenda ini diharapkan: 1) Meningkatnya akses transportasi penunjang ekonomi, 2) Lancarnya akses antar nagari dan jorong, antar nagari dengan pusat kota, dan daerah tetangga, 3) Tersedianya sarana prasarana irigasi pertanian, 4) Tersedianya sarana prasarana perekonomian masyarakat, 5) Meningkatnya sarana prasarana perumahan dan pemukiman. Kemudian menyelesaikan *Rencana Tata-Ruang Wilayah* (RTRW) yang memerlukan legalitas formal. Proses ini mewujudkan disiplin aparaturnya dan masyarakat dalam melaksanakan rencana tata-ruang dan meningkatnya kesadaran masyarakat pada kualitas lingkungan hidup di daerah.

5. Agenda Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik dengan dukungan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) pemerintahan memiliki peranan penting mempercepat proses pembangunan. Kelembagaan pemerintahan harus efisien dan efektif dan mampu merespon berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Tekanan utama dalam agenda pembangunan ini adalah sinkronisasi dan



sinergisitas antar pelaku pembangunan daerah, perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan sistem pemerintahan yang partisipatif dan transparan, perbaikan sistem rekrutmen dan promosi aparatur, dan peningkatan pelayanan publik. Agenda ini juga mencakup upaya pelembagaan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dan stakeholders pembangunan.

6. Agenda Mengembangkan Kegiatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.

Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat menjadi sasaran utama dan agenda pembangunan daerah. Termasuk dalam agenda pembangunan ini adalah peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah disemua sektor. Kemudian peningkatan ketahanan pangan masyarakat, penambahan pembukaan lapangan kerja, perbaikan kesempatan berusaha dan penanggulangan kemiskinan. Lantas, mendorong pemberdayaan Nagari serta pengembangan prasarana dan sarana pembangunan.

Selanjutnya mendorong kewirausahaan dan kemitraan diantara pelaku pembangunan yang mampu memberdayakan dan memperluas akses modal, informasi, teknologi, distribusi dan pasar bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Melakukan proses inkubasi, bimbingan teknis dan penyuluhan untuk majukan industri pengolahan berbasis pertanian dan jasa melalui pemanfaatan teknologi agar nilai tambah dan daya saing daerah membaik. Menata pengelolaan sumberdaya dan mineral yang bisa menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

5.6 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah adalah program strategis yang bersifat lintas sektoral sebagai penjabaran operasional dari agenda pembangunan daerah yang didasarkan pada visi, misi dan strategi pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan pada Bab 2.4. Agenda pembangunan Dharmasraya tahun 2010-2015 dijabarkan ke dalam sebelas prioritas pembangunan, yaitu: 1). Peningkatan pembangunan agama dan budaya serta pemberdayaan nagari., 2). Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, 3). Peningkatan kualitas dan Pemerataan Pendidikan serta menguasai IPTEK, 4). Penyelenggaraan Penegakan Hukum yang Berkeadilan serta peranserta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, 5). Pemerataan pembangunan infrastruktur guna menunjang perekonomian masyarakat, 6). penyelenggaraan pemerintahan yang baik, 7). Pengelolaan terpadu sumberdaya alam dan ramah lingkungann sesuai dengan Pengelolaan tataruang dan wilayah, 8). Perluasan akses dan pemberdayaan masyarakat dan koperasi, 9). Peningkatan ketahanan pangan dan penurunan jumlah masyarakat miskin, 10). Pengembangan usaha berbasis pertanian yang maju dan agroindustri, dan 11). Pengembangan industri pengolahan dan jasa serta peningkatan daya saing daerah. Sebelas Prioritas tersebut sebagai berikut:



Prioritas 1. Peningkatan Pendidikan Dan Penerapan Ajaran Agama Serta Budaya Daerah Dalam Kehidupan Bernagari

Bertolak dari pengamalan ABS-SBK (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah), prioritas dari program ini hendak mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan cinta damai. Terbina pribadi masyarakat yang beriman dan berakhlak mulia, tercerminnya nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan sosial ekonomi dan bernagari. Kemudian menurunkan tingkat konflik dan kekerasan dalam masyarakat melalui optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga keagamaan. Ujungnya masyarakat merasa tentram dan respek sebagai penduduk Dharmasraya dalam dinamika negara kesatuan Republik Indonesia.

Prioritas 2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkecukupan gizi. Status kesehatan dan gizi masyarakat meningkat dengan adanya kecukupan zat gizi, pengendalian penyakit infeksi, memperkuat kerjasama lintas sektor, meningkatkan keberdayaan masyarakat dengan fokus pada ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun. Dengan prioritas ini diharapkan akan terwujud: 1) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, 2) Meningkatnya angka harapan hidup, 3) Menurunnya tingkat kematian ibu melahirkan, 4) Menurunnya tingkat kematian bayi, 5) Menurunnya persentase masyarakat gizi kurang, dan 6) Meningkatnya pola hidup bersih dan sehat.

Prioritas 3. Peningkatan Kualitas Dan Pemerataan Pendidikan Serta Menguasai IPTEK.

Prioritas peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan berbagai potensi dan peluang yang ada. Prioritas ini diharapkan akan terwujud: 1) Penuntasan wajib belajar 9 tahun, 2) Perintisan wajib belajar 12 tahun, 3) Meningkatnya angka partisipasi pendidikan, 4) Terwujudnya pola pendidikan berkarakter dan berkualitas, 5) Lahirnya sentra pendidikan unggul, 6) Terwujudnya pendidikan spesifik sesuai dengan bakat SDM, 7) Terwujudnya lembaga pendidikan penghasil SDM profesional, 8) Berkembangnya penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK, 9) Peningkatan partisipasi perempuan dan kesejahteraan keluarga, 10) Peningkatan kualitas pemuda dan pembangunan seni serta olah raga.

Prioritas 4. Pelaksanaan Penegakan Hukum yang Berkeadilan serta Peranserta Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban

Prioritas ini secara umum bermaksud penyelesaian persoalan tapal batas dan pencegahan ancaman konflik antar kelompok masyarakat.



Penyelesaian persoalan tapal batas wilayah dan upaya penegakan hukum yang berkeadilan amat penting bagi masyarakat multikultural Dharmasraya. Dengan prioritas ini diharapkan terwujud: 1) Keamanan, kenyamanan, dan ketertiban sosial. 2) Terhindarnya konflik antar etnis maupun agama dan 3) tetap terpeliharanya solidaritas sosial di tengah keberagaman yang tinggi.

Prioritas 5. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Perekonomian Masyarakat.

Produksi masyarakat, penataan ruang terpadu untuk usaha dan industri, sarana prasarana pertanian, dan perumahan rakyat. Dengan prioritas ini diharapkan: 1) Meningkatnya akses transportasi penunjang ekonomi, 2) Lancarnya akses antar nagari dan nagari, nagari dan pusat ibukota, dan dengan daerah tetangga., 3) Tersedianya sarana prasarana irigasi pertanian, 4) Tersedianya sarana prasarana perekonomian masyarakat, 5) Meningkatnya sarana prasarana perumahan dan pemukiman. Semua ini didukung oleh *Rencana Tata-Ruang Wilayah* (RTRW) yang memiliki legalitas formal.

Prioritas 6. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik

Prioritas Reformasi Birokrasi Pemerintahan diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dapat dicapai. Dengan reformasi birokrasi akan terwujud: 1) Tata pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, 2) Terciptanya pemerintahan yang bersih dan profesional, 3) Terlaksananya pemerintahan yang transparan dan akuntabel, 4) Terwujudnya tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif, 5) Terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional dan bebas KKN, 6) Terhimpunnya data statistik yang handal dan berdayaguna tinggi, 7) Terwujudnya kemitraan dan sinergi positif antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Prioritas 7. Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Dan Wilayah

Prioritas ini sesuai dengan potensi Dharmasraya yang memiliki potensi sumber daya alam, terutama pertambangan dan sumberdaya mineral. Eksploitasi potensi tambang erat hubungannya dengan kerusakan lingkungan. Potensi hutan Dharmasraya yang besar adalah aset yang perlu dijaga demi keseimbangan dan kelestarian lingkungan sekitarnya. Dengan prioritas ini diharapkan: 1) Terkelolanya sumber daya alam secara terpadu dan optimal. 2) Konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan, dan 3) Penurunan pencemaran lingkungan. Pengembangan pengelolaan sumberdaya alam hendaknya mengacu pada Pembangunan Tata Ruang dan Wilayah.



Prioritas 8. Perluasan Akses Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM.

Prioritas perluasan akses dan pemberdayaan koperasi dan UMKM diharapkan agar Dharmasraya memiliki pertumbuhan dan perkembangan UMKM dan ekonomi kerakyatan yang tinggi. Prioritas diarahkan untuk mengembangkan koperasi dan usaha skala kecil dan menengah dan jasa berbasis bahan baku dan potensi daerah. Dengan prioritas ini diharapkan berkembangnya koperasi, industri, perdagangan dan jasa berdasarkan potensi lokal.

Prioritas 9. Peningkatan Ketahanan Pangan Dan Penurunan Jumlah Masyarakat Miskin.

Prioritas ketahanan pangan dan penurunan tingkat kemiskinan diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin secara intensif sehingga laju penurunan tingkat kemiskinan lebih tinggi dari sebelumnya. Prioritas ini diharapkan akan mewujudkan: 1) Penurunan jumlah penduduk miskin secara lebih tajam dari 11.14 % tahun 2009 sampai 7.2 % tahun 2015 (sesuai MDGs), 2) Meningkatnya ketersediaan lembaga dan upaya penanggulangan kemiskinan, 3) Meningkatnya akses dan produktivitas usaha mikro. 4) Terhindar dari kekurangan pangan dan gizi buruk pada semua kawasan.

Prioritas 10. Pengembangan Pertanian Yang Maju Dan Agroindustri.

Prioritas pengembangan usaha pertanian yang maju dan agroindustri serta mempunyai nilai tambah tinggi diarahkan untuk mengembangkan pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan). Sehingga masyarakat dapat menikmati tingkat keuntungan yang tinggi dari hasil usahanya. Dengan prioritas tersebut diharapkan: 1) Usaha pertanian memberikan keuntungan tambahan yang tinggi, 2) Berkembang agroindustri dan agribisnis sesuai potensi wilayah, 3) Dharmasraya sebagai kabupaten agraris yang lebih sejahtera, 4) Mewujudkan pola pembangunan *kawasan sentra produksi dan balai alih teknologi (technopark)*.

Prioritas 11. Pengembangan Industri Pengolahan Dan Jasa Dengan Dorongan Iptek Meningkatkan Daya Saing Daerah.

Prioritas pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan dorongan IPTEK mencakup penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi. Ujungnya adalah meningkatnya daya saing produk industri dan jasa serta meningkatkan kesempatan kerja. Rangkuman semua narasi diatas terlihat pada matrik berikut.



Tabel 5.1
Hubungan Hirarkis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Agenda dan Prioritas Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Dharmasraya 2010-2015

VISI TERWUJUDNYA MASYARAKAT DHARMASRAYA YANG BERIMAN, SEHAT, CERDAS, AMAN, BERBUDAYA, ADIL DAN SEJAHTERA PADA TAHUN 2015				
MISI	TUJUAN	SASARAN	AGENDA	PRIORITAS
MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan satu Identitas bersama sebagai "warga Dharmasraya"	Meletakkan pondasi pembangunan Dharmasraya berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.	Mensinergikan keberagaman etnis dengan berbagai latar belakang sehingga merasa bangga dengan satu identitas bersama sebagai 'warga Dharmasraya' dalam bingkai NKRI	Meningkatkan penerapan ajaran agama dan budaya daerah dalam kehidupan bernagari.	1. Peningkatan pendidikan dan penerapan ajaran agama serta budaya daerah
MISI 2 : Mewujudkan Masyarakat Dharmasraya yang sehat, berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi	1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan memperbaiki mutu pelayanan kesehatan.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang murah dan mudah terjangkau.	Membangun sumberdaya manusia berkualitas dan menguasai IPTEK	2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
	3. Meletakkan landasan awal untuk mewujudkan Kabupaten Dharmasraya sebagai barometer pendidikan regional.	Membangun sumberdaya manusia yang handal dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan.		3. Peningkatan kualitas dan Pemerataan Pendidikan serta menguasai IPTEK
MISI 3 : Mewujudkan rasa aman, keadilan dan kesejahteraan masyarakat Dharmasraya dengan hukum sebagai panglima dalam tatanan kehidupan masyarakat.	1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum melalui penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan.	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum serta pemantapan peranserta ormas dan partai politik.	Penegakan Hukum yang Berkeadilan serta peranserta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	4. Pelaksanaan Penegakan Hukum yang Berkeadilan serta peranserta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban
	2. Memperkuat kapasitas lembaga politik, ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan di masyarakat.	Terbangunnya sinergitas antara pelaku pembangunan		
	3. Memeratakan Pembangunan di	Terlaksananya pemerataan	Perbaikan dan perluasan	5. Pemerataan pembangunan



VISI TERWUJUDNYA MASYARAKAT DHARMASRAYA YANG BERIMAN, SEHAT, CERDAS, AMAN, BERBUDAYA, ADIL DAN SEJAHTERA PADA TAHUN 2015				
MISI	TUJUAN	SASARAN	AGENDA	PRIORITAS
	Seluruh Wilayah Dharmasraya	pembangunan infrastruktur dasar secara merata.	kapasitas serta jangkauan infrastruktur pendukung pembangunan	infrastruktur guna menunjang perekonomian masyarakat
	4. Memperbaiki dan meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, profesional dan berwibawa.	Menempatkan aparatur sesuai dengan kemampuan dan keahliannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik dengan dukungan pengelolaan asset dan keuangan daerah.	6. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik,
	5. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.	Tegaknya hukum terkait dengan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup		7. Pengelolaan terpadu sumberdaya alam dan lingkungan sesuai dengan rencana tataruang dan wilayah
	6. Mengembangkan pembangunan daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan.	Terwujudnya kelembagaan dan kegiatan koperasi dan UMKM yang lebih profesional. Terbina dan berkembangnya balai alih teknologi pertanian (agro technopark) dan kawasan sentra produksi	Mengembangkan Kegiatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.	8. Perluasan akses dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. 9. Peningkatan ketahanan pangan dan penurunan jumlah masyarakat miskin. 10. Pengembangan pertanian yang maju dan agroindustri.
	7. Mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat dan menguntungkan daerah.	Terjaminnya keamanan penanaman modal dan kepastian berusaha diwilayah Dharmasraya		11. Pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan dorongan IPTEK meningkatkan daya saing daerah

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2010



Tabel 5.2 Sinkronisasi Prioritas Dharmasraya dengan Nasional dan Propinsi Untuk periode tahun 2010-2015

NO	PRIORITAS NASIONAL (2010-2014)	PRIORITAS SUMATERA BARAT (2011-2015)*	Prioritas Dharmasraya (2010-2015)	Hubungan dengan Nasional	Hubungan Prioritas Propinsi
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.	Pengamalan Prinsip ABS-SBK	Peningkatan kualitas pendidikan dan Pengamalan ajaran agama serta budaya daerah dalam kehidupan nagari.	1 dan 11	1
2	Pendidikan	Reformasi Birokrasi	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	3	4
3	Kesehatan	Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Peningkatan kualitas dan Pemerataan Pendidikan serta penguasaan teknologi	2	3
4	Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Masyarakat	Pelaksanaan Penegakan Hukum yang Berkeadilan serta peranserta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	1	2
5	Ketahanan Pangan	Pengembangan Pertanian Berbasis kawasan dan komoditi unggulan	Pemerataan pembangunan infrastruktur guna menunjang perekonomian masyarakat	6 dan 10	9
6	Infrastruktur	Industri Pengolahan dan Jasa	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik.	1	2
7	Iklm Investasi dan Iklm Usaha	Wisata Alam dan Budaya	Pengelolaan terpadu sumberdaya alam dan lingkungan sesuai dengan rencana tataruang dan wilayah	8 dan 9	11
8	Energi	Penurunan Tingkat Kemiskinan	Pemberdayaan koperasi dan UMKM.	4	8
9	Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat	Peningkatan ketahanan pangan dan penurunan jumlah masyarakat miskin.	4 dan 5	5 dan 8

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**

NO	PRIORITAS NASIONAL (2010-2014)	PRIORITAS SUMATERA BARAT (2011-2015)*	Prioritas Dharmasraya (2010-2015)	Hubungan dengan Nasional	Hubungan Prioritas Propinsi
10	Daerah Tertinggal, Terdepan, Pulau Terluar dan Pasca Konflik	Penanggulangan Bencana Alam	Pengembangan pertanian yang maju dan agroindustri.	5	5
11	Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi	Pelestarian Lingkungan Hidup	Pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan dorongan IPTEK untuk meningkatkan serta daya saing daerah	7	6

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJM Daerah dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dilengkapi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

6.1. STRATEGI PEMBANGUNAN KABUPATEN DHARMASRAYA

Berdasarkan kondisi umum aktual Kabupaten Dharmasraya dan pencapaian pembangunan daerah selama periode waktu 2006 – 2010, selanjutnya diformulasikan strategi pembangunan daerah. Perumusan strategi pembangunan Kabupaten Dharmasraya, dilakukan berdasarkan : (a) Identifikasi kekuatan dan kelemahan pembangunan daerah, (b) Identifikasi peluang dan tantangan pembangunan daerah, serta (c) Analisis faktor strategis. Adapun untuk perumusan strategi meliputi 4 (empat) bidang, yakni : (a) Sumberdaya Alam dan Lingkungan, (b) Sosial dan Budaya, (c) Ekonomi, serta (d) Hukum dan Pemerintahan. Lebih jauh dapat diuraikan pada bagian berikut.

Berdasarkan hasil perumusan strategi pembangunan Kabupaten Dharmasraya melalui penggunaan matriks SWOT, diformulasikan strategi pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan (2010 – 2015). Strategi pembangunan dirumuskan ke dalam 4 (empat) bidang pembangunan, yakni : (a) Sumberdaya Alam dan Lingkungan, (b) Sosial dan Budaya, (c) Ekonomi, serta (d) Hukum, Politik, dan Keperintahan. Adapun formulasi strategi secara terperinci adalah sebagai berikut :

6.1.1. Strategi Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan

1. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan mineral oleh investor dan masyarakat serta di dukung letak geografis yang strategis secara ekonomis untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, regional, dan nasional
2. Penegakan aturan yang konsisten terkait pemanfaatan potensi sumberdaya alam/lingkungan untuk mengantisipasi inkonsistensi kebijakan dan ancaman *global warming*
3. Pengembangan infrastruktur dasar masyarakat (air bersih, sanitasi permukiman, sarana perhubungan, listrik, pendidikan dan kesehatan) dan kelembagaan lokal untuk pemerataan pengembangan potensi daerah dan antisipasi konflik horizontal dalam masyarakat dengan dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR), lembaga pembiayaan pemerintah/swasta serta perantau perantau



4. Penetapan dan implementasi secara konsisten Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten untuk mengantisipasi inkonsistensi implementasi peraturan pemerintah tentang pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan oleh investor serta *global warming*

6.1.2. Strategi Bidang Sosial dan Budaya

1. Optimalisasi peran pemuka agama dan adat dalam peningkatan pemahaman dan penghayatan masyarakat, khususnya generasi muda terhadap filosofi ada dan agama untuk mengantisipasi budaya global
2. Pengembangan paket-paket pariwisata untuk mengoptimalkan pengembangan pariwisata berbasis sejarah dan budaya dengan memperhatikan karakteristik masyarakat yang agamis, multi-etnis, terbuka dan dinamis
3. Optimalisasi pengimplementasian kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dalam kerangka perwujudan tujuan pembangunan millenium (Millenium Development Goals) dan penanggulangan kemiskinan.
4. Optimalisasi kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dukungan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan serta ketrampilan untuk penanggulangan kemiskinan
5. Optimalisasi potensi karakteristik masyarakat yang agamis, multi-etnis, terbuka dan dinamis untuk mengantisipasi ancaman konflik dan disharmonisasi serta infiltrasi budaya asing
6. Pengembangan kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan filosofi adat dan agama untuk meningkatkan daya saing daerah dan mengantisipasi infiltrasi budaya asing

6.1.3. Strategi Bidang Ekonomi

1. Pengembangan sub sektor perkebunan, peternakan, tanaman pangan dan industri pengolahan serta koperasi berbasis Kawasan Sentra Produksi untuk menangkap peluang pasar di bidang agroindustri dan agribisnis karena dukungan pertumbuhan ekonomi regional dan nasional serta perkembangan daerah tetangga
2. Perkuat kelembagaan ekonomi yang tumbuh di masyarakat dan kemampuan wirausaha masyarakat yang relatif tinggi dan ulet, baik di bidang pertanian, perkebunan, dll dengan dukungan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), lembaga pembiayaan pemerintah/swasta serta dukungan perantau
3. Pengembangan kemampuan wirausaha masyarakat dan kelembagaan ekonomi lokal berbasis Kawasan Sentra Produksi untuk mengantisipasi iklim usaha yang kurang kondusif dan kompetisi produk Dharmasraya dengan daerah tetangga di tingkat lokal maupun regional dan mengatasi dan kemiskinan.

6.1.4. Strategi Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan

1. Perwujudan *good governance* pada birokrasi pemerintahan, penegakan hukum, serta pemberantasan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang



merugikan daerah melalui dukungan sarana dan prasarana, tata organisasi dan kelembagaan serta teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten

2. Penegakan hukum yang konsisten, khususnya menyangkut pemanfaatan tanah ulayat serta penataan ruang (RTRW) untuk pengembangan komoditi dan investasi di bidang pertambangan, perkebunan, agribisnis dan agroindustri
3. Optimalisasi peran kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan *good governance* dan *clean government* melalui dukungan teknologi dan kebijakan pemerintah terkait pemberantasan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
4. Optimalisasi tata organisasi dan kelembagaan dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang cukup baik untuk mengantisipasi inkonsistensi peraturan nasional dan penerapannya untuk upaya penegakan hukum dan politik
5. Wujudkan sinkronisasi dan koordinasi antar sektoral agar terwujud pemerataan pembangunan ekonomi antar kecamatan untuk mengantisipasi iklim usaha yang kurang kondusif

6.2. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN DHARMASRAYA

6.2.1 Bidang Ekonomi

Kebijakan dan program bidang ekonomi akan dikelompokkan ke dalam 10 (sepuluh) urusan, yakni : (1) Koperasi dan UKM; (2) Penanaman Modal; (3) Ketahanan Pangan, (4) Pertanian; (5) Kehutanan; (6) Pertambangan dan Energi; (7) Parawisata (8) Perikanan (9) Perdagangan; dan (10) Industri;

6.2.1.1. Koperasi dan UKM

Sasaran pokok yang hendak diwujudkan dalam pembangunan koperasi dan UKM yaitu :

1. Terwujudnya sumberdaya manusia pengelola koperasi dan usaha kecil yang memiliki jiwa kewirausahaan, keterampilan teknis dan kemampuan manajemen yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya dengan baik.
2. Tersedianya dana murah yang dapat diakses oleh usaha mikro dan kecil.
3. Terwujudnya pengusaha menengah yang tangguh yang berasal dari peningkatan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah, yang berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan nilai tambah.
4. Terwujudnya kemitraan usaha antara pengusaha besar, menengah dan kecil serta koperasi yang saling mendukung dan saling menguntungkan.
5. Terwujudnya lembaga perbantuan untuk usaha kecil dan mikro seperti lembaga pemasaran, lembaga riset dan konsultasi, lembaga inkubasi bisnis dan koperasi produksi serta asosiasi pengusaha sejenis.



6. Terkelolanya produksi bersama (*common service facilities*) di sentra-sentra produksi kerajinan rakyat yang dilaksanakan dalam skala mikro dan rumah tangga.
7. Terwujudnya pemberdayaan lembaga keuangan mikro non bank sebagai wujud pengembangan ekonomi kerakyatan.

Dalam periode lima tahun mendatang, strategi pemberdayaan koperasi dan UKM seharusnya diarahkan kepada pembangunan kompetensi pelaku usaha, inovasi dan teknologi sehingga dapat lebih berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta dapat meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha secara lebih terstruktur. Untuk itu, arah kebijakan pembangunan Koperasi dan UKM , yaitu :

1. Meningkatkan pembinaan SDM pengusaha melalui pendidikan dan pelatihan agar kelompok usaha mikro dan kecil ini dapat meningkatkan daya saing di pasar lokal, nasional maupun internasional.
2. Meningkatkan akses terhadap dana murah oleh usaha mikro dan kecil, menengah dan koperasi.
3. Meningkatkan jumlah dan kualitas pengusaha menengah yang tangguh yang berasal dari peningkatan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah, yang berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan nilai tambah.
4. Fasilitasi kemitraan usaha antara pengusaha besar, menengah dan kecil serta koperasi yang saling mendukung dan saling menguntungkan.
5. Menyediakan bantuan asuransi kredit bagi Koperasi dan UKM yang sudah mendapatkan akses ke perbankan
6. Membangundan meningkatkan peran lembaga pemasaran (*trading house*) untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan mikro.
7. Mengembangkan produksi bersama (*common service facilities*) di sentra-sentra produksi kerajinan rakyat yang dilaksanakan dalam skala mikro dan rumah tangga.
8. Pemberdayaan lembaga keuangan mikro non bank sebagai wujud pengembangan ekonomi kerakyatan.

6.2.1.2 Penanaman Modal

Sasaran yang hendak dicapai dalam pengembangan penanaman modal adalah :

- (a) Harmonisasi, sinkronisasi, dan simplifikasi berbagai kebijakan;
- (b) Penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur
- (c) Penyederhanaan proses perizinan investasi sehingga dapat memperlancar proses penanaman modal
- (d) Tercukupinya pasokan energi yang dibutuhkan untuk kegiatan investasi
- (e) Mendorong pelaksanaan alih teknologi dalam setiap kegiatan investasi.

Berdasarkan permasalahan dan sasaran di atas maka fokus peningkatan investasi dalam RPJMD 2010-2015 diarahkan pada :

- a. Harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan perizinan investasi
- b. Peningkatan fasilitasi investasi
- c. Peningkatan Program Promosi Investasi



6.2.1.3 Ketahanan Pangan

Secara umum bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sehingga terbebas dari kemungkinan kondisi kekurangan energi dan protein, ditingkat nagari dan daerah. Sasaran ketahanan pangan adalah ketersediaan bahan pangan untuk kebutuhan pangan Dharmasraya. Secara spesifik sasaran pembangunan bidang ketahanan pangan adalah:

- a. Meningkatnya ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan
- b. Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan, yang dipresentasikan oleh konsumsi energi Penduduk Dharmasraya dengan kontribusi untuk masing-masing bahan kelompok pangan.
- c. Terwujudnya stabilitas harga pangan antar wilayah dan antar waktu.
- d. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan
- e. Mengeleminir kondisi rawan pangan

Berdasarkan sasaran ketersediaan bahan pangan untuk kebutuhan pangan Dharmasraya maka arah kebijakan adalah :

1. Peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan
2. Pencukupan kebutuhan konsumsi pangan
3. Stabilitas harga pangan antar wilayah dan antar waktu.
4. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan
5. Mengeleminir kondisi rawan pangan

6.2.1.4 Pertanian

Berdasarkan kondisi umum serta permasalahan dalam pembangunan pertanian maka sasaran umum pembangunan pertanian adalah

1. Meningkatnya kesejahteraan petani, melalui: meningkatnya optimalisasi usaha pertanian, perkebunan dan peternakan; dan Meningkatnya produktifitas dan kualitas produk pertanian secara umum untuk menunjang berkembangnya industri berbasis bahan baku pertanian
2. Berkembangnya kelembagaan dan dukungan bagi pengembangan pembinaan pertanian modern berbasis IPTEK, berkembangnya agribisnis dan agroindustri yang berdaya saing tinggi
3. Telaksananya Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan kawasan terpadu

Secara spesifik sasaran pembangunan pertanian yang ingin dicapai pada 2010-2015 pada masing-masing sub sektor adalah :

A. Pembangunan Pertanian Pangan dan Hortikultura

1. Meningkatnya pengembangan komoditi melalui revitalisasi perbenihan komoditi pangan.
2. Peningkatan produksi berbagai komoditi utama dibanding periode sebelumnya dengan memperhatikan kenaikan pertahunnya.



B. Pembangunan Perkebunan

1. Peningkatan jumlah areal perkebunan dari masing-masing komoditi, terutama komoditi terbesar yaitu kelapa sawit dan karet
2. Peningkatan jumlah produksi dan produktivitas komoditas perkebunan
3. Peningkatan pendapatan petani perkebunan

C. Pembangunan Peternakan

Sasaran pembangunan peternakan adalah peningkatan produktivitas peternakan yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah populasi dan produksi komoditas peternakan.

Berdasarkan permasalahan pada pembangunan pertanian maka arah kebijakan pembangunan pertanian pada periode ini diarahkan untuk :

1. Merevitalisasi sistem kelembagaan dan pendekatan penyuluhan pertanian dan pendampingan terhadap petani tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan sehingga relevan dengan kebutuhan perbaikan kapasitas petani dan daya saing produk pertanian memasuki pasar;
2. Mengembangkan sistem dan kelembagaan pasar pertanian yang difokuskan kepada peningkatan kemampuan akses lokal yang dapat mendukung perkembangan ekonomi lokal dan kesejahteraan petani;
3. Mengembangkan kelembagaan agribisnis dan agroindustri pedesaan yang mampu meningkatkan akses petani, pekebun, dan peternak terhadap sumberdaya produktif;
4. Mengembangkan sistem dukungan dan pelayanan pemerintah dan swasta untuk sektor pertanian guna meningkatkan skala usaha dan nilai tukar usaha pertanian;
5. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerah dan untuk memenuhi permintaan pasar di daerah lain atau luar negeri;
6. Meningkatkan kemampuan/kualitas SDM pelaku usaha pertanian sehingga handal dalam pelaksanaan usaha dan memiliki daya saing
7. Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan dan peningkatan nilai tambah dengan mengembangkan cluster agroindustri dalam konsep pengembangan agribisnis;
8. Memperkuat sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengelola resiko usaha pertanian dan mendukung pengembangan agroindustri pedesaan;
9. Membangun sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah produksi dan cluster agroindustri pedesaan.
10. Memberdayakan petani untuk penerapan teknologi dan informasi pertanian/perkebunan/ peternakan

6.2.1.5. Kehutanan

Mengacu pada hasil telaah pada *existing condition* pada bidang sumberdaya alam, maka arah kebijakan pembangunan bidang sumberdaya alam tahun 2010 - 2015 di kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :



1. Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan
2. Pengelolaan terpadu sumberdaya hutan untuk kelangsungan daya dukung DAS
3. Peningkatan *capacity building* pemerintah dalam pengawasan dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dan
4. Pengelolaan hutan berbasis kemasyarakatan (*community based forest management*)

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan bidang sumber daya alam, maka sasaran pelaksanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan pengelolaan kawasan hutan dan pencegahan alih fungsi hutan menjadi kawasan non kehutanan
2. Peningkatan pengelolaan terpadu sumberdaya hutan untuk kelangsungan daya dukung DAS.
3. Peningkatan kebijakan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya hutan
4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan

6.2.1.6. Energi dan Sumberdaya Mineral

Berdasarkan permasalahan pembangunan bidang sumber daya alam tambang dan energi, maka sasaran pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Tertata dan terlaksananya kebijakan pengelolaan tambang yang berwawasan lingkungan
2. Meningkatnya pengawasan kegiatan pengelolaan penambangan mineral illegal di kawasan hutan lindung
3. Terlaksananya kebijakan pembangunan jaringan listrik di berbagai pedesaan yang terisolir

Mengacu pada hasil telaah pada *existing condition* pada bidang sumber daya alam tambang dan energy serta sasaran, maka arah kebijakan pembangunan bidang sumberdaya alam tambang dan energi tahun 2010 - 2015 di kabupaten Dharmasraya adalah:

1. Penataan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan tambang yang berwawasan lingkungan
2. Pengawasan kegiatan pengelolaan penambangan mineral di kawasan hutan lindung
3. Pembangunan jaringan listrik di jorong/nagari yang tidak terjangkau

6.2.1.7 Pariwisata

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang Kepariwisataaan Kabupaten Dharmasraya dalam periode 2010-2015 antara lain adalah :

1. Terciptanya keunikan produk dan tujuan wisata
2. Terciptanya produk wisata berbasis budaya
3. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung aktifitas wisata.
4. Terwujudnya masyarakat sadar wisata terutama di sekitar objek wisata yang banyak dikunjungi masyarakat.



6.2.1.8 Perikanan

Dengan memperhatikan ketiga pedoman diatas, maka sasaran pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan, diarahkan kepada aspek-aspek sebagai berikut :

1. Pengembangan produksi perikanan.
2. Pengembangan perikanan budidaya untuk terpenuhinya kebutuhan produksi ikan,
3. Peningkatan daya saing produksi perikanan,
4. Pengembangan sumberdaya perikanan.

Agar tercapainya sasaran pembangunan Perikanan ini sesuai penjelasan diatas, maka arah kebijakan pembangunan Perikanan diarahkan kepada pelaksanaan pembangunan, sebagai berikut :

1. Pengembangan perikanan budidaya, yaitu; produksi budidaya, untuk memenuhi kebutuhan daerah.
2. Peningkatan daya saing produksi perikanan. Dengan mengembangkan pengolahan, perbaikan mutu hasil perikanan, penguatan pasar, serta membuka peluang investasi
3. Pengembangan sumberdaya manusia perikanan. Kebijakan ini diarahkan kepada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang terlibat dalam pengelolaan perikanan, mulai petani ikan, penyuluh, dan aparat perikanan lainnya.

6.2.1.9 Perdagangan

Berdasarkan kepada permasalahan yang ada dalam pembangunan sektor perdagangan hotel dan restoran ini, maka dapat dikemukakan sasaran pembangunan sektor perdagangan, hotel dan restoran ini ke depan yakni:

1. Meningkatkan peran sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam pembentukan nilai PDRB melalui peningkatan volume dan nilai perdagangan itu sendiri, yang pada gilirannya sektor perdagangan, hotel dan restoran ini mampu menjadi sektor andalan dalam mengiring perubahan struktur perekonomian kabupaten Dharmasraya dari dominan sektor pertanian bergerak ke dominan sektor industri dan jasa, yang tentu saja dimulai dengan semakin tingginya intensitas dan volume perdagangan itu sendiri, dan perdagangan selalu memperoleh surplus.
2. Meningkatkan serapan tenaga kerja pada sektor perdagangan, hotel dan restoran ini melalui penumbuhan dan pembinaan profesi perdagangan baik pada tingkat pedagang kecil, sampai pada tingkat pedagang besar, saudagar, bahkan eksportir, terutama pada komoditi-komoditi yang berbasis dan berorientasi ekspor.
3. Mendorong kepada persaingan pasar dalam keadaan sempurna, guna distribusi keuntungan perdagangan lebih merata, sehingga monopoli kelompok-kelompok pedagang sebagai bentuk dari kegagalan pasar dapat diatasi.
4. Menciptakan saling keterkaitan yang kuat antara sub sektor perdagangan besar dan eceran, dengan sub sektor hotel dan restoran, serta keterkaitan sektor perdagangan dengan sektor pertanian



5. Menciptakan permintaan pasar dalam negeri sendiri untuk komoditi perdagangan yang memberikan nilai tambah tinggi bagi pelaku usaha perdagangan, sehingga ketergantungan ekspor kepada Negara luar dapat di tekan.

Sedangkan arah kebijakan pembangunan sektor perdagangan, hotel dan restoran sesuai dengan arahan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi Sumatera Barat adalah mewujudkan kegiatan perdagangan dan jasa yang mampu bersaing, baik pada tingkat local wilayah maupun pada tingkat eksternal wilayah. Pengembangan kewirausahaan yang mampu bersaing, dan pengembangan UMKM dan koperasi yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

1. Pengembangan daya saing perdagangan dengan meningkatkan efisiensi perdagangan, terutama upaya untuk menekan *profit seeking* dan *direct unproductive profit seeking* (DUP) yang membuat biaya-biaya transaksi (*transaction cost*) menjadi tinggi.
2. Menghasilkan komoditi perdagangan yang lebih bersifat *knowledge based product* dengan mengembangkan lembaga R&D pada setiap usaha perdagangan, sehingga setiap komoditi perdagangan yang ada memiliki keunggulan komparatif di bandingkan dengan wilayah lain.
3. Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana penunjang perdagangan inter wilayah dan antar wilayah, agar nilai tambah dan margin perdagangan lebih mampu ditangkap oleh penduduk sendiri.
4. Merancang dan menciptakan kewirausahaan yang handal dalam menghadapi persaingan perdagangan secara global, dengan pemberian fasilitas kepada pelaku perdagangan dan eksportir guna melahirkan kelompok-kelompok enterprenuer yang kuat dan tangguh.
5. Membangun jejaring bisnis antara UMKM dengan saudagar dan eksportir di dalam wilayah maupun di luar wilayah yang sudah *establish* guna memperkuat persaingan perdagangan dengan daerah lain.

6.2.1.10 Industri

Berdasarkan kepada kondisi yang ada dan persoalan yang tengah dihadapi, maka sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan industri pengolahan ke depan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan nilai tambah produk industri pengolahan melalui penerapan teknologi tepat guna yang bersifat *massive* diusahakan oleh ekonomi rumahtangga.
- 2) Mengembangkan permintaan internal wilayah (*derived demand*) bagi produk industri pengolahan rumahtangga oleh pelaku usaha industri besar, dengan saling keterkaitan input dan output.
- 3) Mengembangkan produk barang industri unggulan atau barang setengah jadi atau barang jadi dengan basis keterkaitan input-ouput dan keterkaitan pasar di dalam wilayah yang tinggi terutama barang-barang kebutuhan rumahtangga.
- 4) Mengembangkan kelembagaan riset dan pengembangan produk industri unggulan yang berdaya saing tinggi.



Sedangkan arah kebijakan pembangunan sektor industri pengolahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan industri pengolahan lebih memfokuskan kepada industri kecil dan menengah (IKM) yang pelaku utamanya adalah ekonomi rumah tangga atau koperasi usaha industri.
- 2) Pengembangan kemitraan dengan pelaku usaha industri besar dalam bentuk keterkaitan input-output, guna menciptakan pasar di dalam wilayah sendiri. Sehingga pada gilirannya produksi industri olahan lebih diarahkan oleh permintaan terhadap produknya di dalam wilayah sendiri atau eksternal wilayah.
- 3) Mendorong terjadinya penyusunan kontrak bisnis yang permanen antara pelaku usaha industri dalam satu unit manajemen yang sama dengan menghasilkan satu produk unggulan untuk komoditi ekspor.
- 4) Menciptakan dan merekayasa terbentuknya kelompok-kelompok enterprenuer pada skala usaha industri kecil dan menengah untuk menghantarkan kepada penumbuhan kelompok enterprenuer yang berskala besar dan mampu bersaing dalam menghadapi persaingan global.

6.2 .2. Pembangunan Sosial dan Sumberdaya

Kebijakan dan program bidang Sosial dan Sumberdaya dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) urusan, yakni: (1) Kesehatan; (2) Pendidikan; (3) Kependudukan dan Cakil; (4) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (5) Keluarga Berencana; (6) Sosial; (7) Ketenagakerjaan; (8) Kepemudaan dan Olah Raga; (9) Pemberdayaan Desa.

6.2.2.1 Kesehatan

Berdasarkan kondisi umum dan permasalahan itu, dan sasaran pembangunan bidang kesehatan, maka arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin.
2. Meningkatkan ketersediaan tenaga medis dan paramedis di seluruh kecamatan yang ada di Dharmasraya.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat serta mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat.
4. Meningkatkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat melalui pengembangan kesehatan wilayah.
5. Meningkatkan jumlah, pemerataan dan kualitas pelayanan di rumah sakit, puskesmas, dan jaringannya, akreditasi RSUD.
6. Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular.
7. Meningkatkan kesadaran diri keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi, balita serta usia produktif.
8. Mengembangkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, informasi kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan guna mendukung pembangunan kesehatan.



9. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin.
10. Meningkatkan peran serta masyarakat dan tokoh agama dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

6.2.2.2 Pendidikan

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka sasaran pembangunan bidang pendidikan adalah:

- 1) Tercapainya struktur jumlah sekolah SD, SLTP, dan SLTA yang ideal
- 2) Tercapainya rasio siswa antar tingkat pendidikan yang ideal
- 3) Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan
- 4) Meningkatnya kualitas pendidikan
- 5) Meningkatkan relevansi pendidikan dengan dunia kerja
- 6) Meningkatnya pengawasan dan manajemen sekolah

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan pendidikan kabupaten Dharmasraya, maka kebijakan dalam pendidikan yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Dharmasraya tahun 2010-2015 adalah :

- 1) Pencapaian struktur jumlah sekolah dan jumlah siswa yang ideal
- 2) Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan
- 3) Peningkatan Kualitas Pendidikan
- 4) Peningkatan Relevansi Pendidikan
- 5) Peningkatan Pengawasan dan Manajemen

6.2.2.3 Kependudukan dan Catatan Sipil

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- 1) menurunnya jumlah penduduk yang melangsungkan perkawinan pada usia remaja, dan menurunnya kehamilan remaja,
- 2) menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR),
- 3) meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan reproduksi remaja
- 4) meningkatnya jumlah peserta KB, dan persentase pasangan usia subur yang terlayani oleh program KB, serta yang ber KB secara mandiri,
- 5) meningkatnya cakupan, mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang diselenggarakan oleh masyarakat/ lembaga kesehatan.

6.2.2.4 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) kabupaten Dharmasraya adalah :

- a. Meningkatnya kualitas anak dan perempuan
- b. Terbentuknya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender
- c. Tersedianya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
- d. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan
- e. Terlaksananya program Keluarga Berencana secara efisien dan efektif
- f. Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan produksi



Berdasarkan sasaran pembangunan tersebut diatas maka arah kebijakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

- a. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- b. Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
- c. Peningkatan kualitas anak dan perlindungan perempuan
- d. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender
- e. Penyediaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
- f. Peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi

6.2.2.5 Keluarga Berencana

Kebijakan Pembangunan bidang Keluarga Berencana diarahkan terhadap hal hal sebagai berikut :

1. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil.
2. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang
3. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga pra sejahtera dan sejahtera I dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.

6.2.2.6 Sosial

Untuk menjawab berbagai permasalahan di atas, maka disusunlah berbagai sasaran dan arah kebijakan yang terkait dengan masalah sosial, yaitu:

- a. Menekan kemungkinan berbagai konflik horizontal yang melibatkan multi etnik
- b. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif warga masyarakat tentang rasa kesetiakawanan

6.2.2.7 Ketenagakerjaan

Penduduk dari sisi ekonomi dapat dilihat dari ketenagakerjaan. Data tentang situasi ketenagakerjaan merupakan salah satu data pokok yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dan dalam suatu/kurun waktu tertentu. Dengan demikian, ketersediaan data ketenagakerjaan yang berkualitas merupakan suatu keharusan. Salah satu isu penting dalam ketenagakerjaan, di samping keadaan angkatan kerja (*economically active population*) dan struktur ketenagakerjaan, adalah isu pengangguran seperti dijelaskan di atas. Dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi,



melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. Oleh karena itu, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan secara serius pada point-point berikut ini yaitu :

- 1) Pengembangan Kesempatan Kerja
Sasaran yang ingin dicapai adalah: (a) tersedianya informasi ketenagakerjaan bagi masyarakat, dan (b) menurunnya tingkat pengangguran.
- 2) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
Sasaran yang ingin dicapai adalah: (a) meningkatnya upah dan produktivitas kerja, dan (b) meningkatnya pelatihan tenaga kerja.

Arah dan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan dan transmigrasi adalah sebagai berikut: mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh melalui peningkatan lapangan usaha produktif dan terpadu untuk mengurangi tingkat pengangguran, serta diarahkan pada kompetensi, kemandirian, peningkatan produktivitas, peningkatan upah, penjaminan kesejahteraan, perlindungan pekerja dan kebebasan berserikat.

6.2.2.8 Kepemudaan dan Olah Raga

Sasaran dan arah kebijakan :

1. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan.
2. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga.

6.2.2.9 Pemberdayaan Nagari

Sasaran kebijakan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan nagari adalah :

1. Meningkatnya Kemampuan Pemerintah Nagari
2. Tertatanya Administrasi, Keuangan dan Aset Nagari
3. Penguatnya Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
4. Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya

Berdasarkan sasaran tersebut, maka arah kebijakan pemberdayaan masyarakat desa/nagari adalah :

1. Peningkatan Kemampuan Pemerintah Nagari
2. Penataan Administrasi, Keuangan dan Aset Nagari
3. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
4. Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya

6.2.3 Pembangunan Hukum Dan Tata Pemerintahan

Kebijakan dan program bidang Hukum dan Tata Pemerintahan dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) urusan, yakni : (1) Percepatan Pembangunan (2) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (3) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian (4) Statistik (5)



Kearsipan (6) Komunikasi dan Informatika (7) Perpustakaan (8) Perizinan Pengadaan Barang dan Jasa.

6.2.3.1 Percepatan Pembangunan

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka sasaran pembangunan Percepatan Pembangunan adalah :

- a. Terealisasinya pembangunan jalan dan jembatan antara daerah produksi dan pasar pada semua wilayah Dharmasraya.
- b. Adanya konservasi aliran sungai dan sumberdaya air lainnya.
- c. Berkembangnya fasilitas lalu lintas
- d. Terlaksananya percepatan pembangunan pembangkit listrik

Berdasarkan permasalahan dan sasaran percepatan pembangunan, maka arah kebijakan adalah :

- a. Pembangunan jalan dan jembatan yang mencakup semua sentra produksi menuju pasar dalam wilayah kabupaten.
- b. Pengembangan pengelolaan konservasi aliran sungai dan sumberdaya air lainnya
- c. Pembangunan dan pengembangan fasilitas lalu lintas kabupaten.
- d. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
- e. Percepatan pengesahan legalitas formal RPJPD dan RTRW Kabupaten Dharmasraya.

6.2.3.2. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Peningkatan pendidikan dan kesadaran politik masyarakat
2. Pelembagaan mekanisme “turun kebawah” sebagai mekanisme untuk mengenal, memahami dan menyerap aspirasi rakyat.
3. Penyaringan aspirasi masyarakat tentang semua kebijakan.
4. Pelembagaan dialog dengan publik melalui konfrensi pers, pembuatan buletin, dan optimalisasi website pemerintah Kabupaten.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pemerintahan kecamatan dan nagari.
6. Penamaan jalan dan gedung terkait dengan identitas lokal.
7. Bekerjasama dengan semua pihak dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif serta menanggulangi penyakit masyarakat.
8. Meningkatkan kualitas penegakan hukum dan ketertiban dalam masyarakat melalui peningkatan pembinaan hukum, penetapan kebijakan untuk mengantisipasi timbulnya konflik secara horizontal maupun vertikal.
9. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) serta peningkatan koordinasi dengan pihak kepolisian dan aparat keamanan lainnya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.



6.2.3.3 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi dan Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

1. Pembinaan kompetensi PNS berdasarkan mekanisme merit system, yaitu menerapkan azas profesionalitas, transparan, tanpa mekanisme KKN, dan tidak diskriminatif.
2. Penerapan prinsip *good governance*
3. Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung aparatur pemerintahan Kabupaten Dharmasraya.
5. Pengembangan situasi yang kondusif wilayah (penyelesaian tapal batas)
6. Menyediakan jasa tenaga pengelola administrasi keuangan pada masing-masing SKPD
7. Penyusunan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
8. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati.
9. Penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan aset.
10. Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
11. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah.
12. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
13. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

6.2.3.4 Statistik

Berdasarkan permasalahan itu, maka sasaran dan arah kebijakan, yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berperan untuk mengembangkan informasi statistik daerah Kabupaten Dharmasraya.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama institusi pemerintah dan swasta dalam mendukung penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan.

6.2.3.5 Kearsipan

Sasaran dan arah kebijakan urusan perpustakaan adalah:

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai sebagai media penyelamatan dan pelestarian arsip daerah Kabupaten Dharmasraya.
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan system informasi kearsipan dilingkungan pemerintah maupun swasta/masyarakat.
- 3) Meningkatkan koordinasi antar instansi/dinas terkait dalam pengelolaan dan penyelamatan arsip daerah.
- 4) Peningkatan Minat baca pada daerah Kabupaten Dharmasraya.

6.2.3.6. Komunikasi dan Informatika

Kebijakan pembangunan bidang Komunikasi dan Informasi diarahkan bagi peningkatan mutu pelayanan timbal balik dan arus informasi kepada dan dari

masyarakat. Tujuannya untuk mendukung sosialisasi dan partisipasi rakyat dalam pembangunan. Kebijakan untuk mencapai sasaran adalah:

1. Menciptakan sistem penyediaan menyeluruh, terpadu dan kompetitif serta menyahuti keinginan masyarakat terhadap telekomunikasi dan informasi.
2. Menyiapkan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informasi.
3. Mengendalikan sistem telekomunikasi dan informasi terhadap masyarakat.
4. Memprioritaskan pembebasan lahan dan memudahkan perizinan dalam pembangunan dan pengembangan prasarana telekomunikasi dan informasi.
5. Menyusun kesepakatan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan prasarana telekomunikasi dan informasi.

6.2.3.7 Kepustakaan

Bertolak dari masalah diatas, maka sasaran dan arah kebijakan kepustakaan ialah;

- a. Meningkatkan minat baca generasi muda dan anak sekolah.
- b. Bertambahnya fasilitas penunjang kepustakaan
- c. Membaiknya fungsi koordinasi antar lembaga mendorong kemajuan melalui pustaka.

6.2.3.8. Perizinan Pengadaan Barang Dan Jasa

Berangkat dari kondisi, masalah diatas, maka sasaran dan arah kebijakan perizinan dan pengadaan barang dan jasa adalah;

- a. Menyusun benchmarking pelayanan perizinan dan pengadaan barang dan jasa.
- b. Melengkapi dan menerapkan aturan sistematis untuk pelayanan satu pintu dalam perizinan
- c. Merespon kepuasan pelayanan melalui analisa kepuasan pelanggan
- d. Menyusun dan menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa on-line.

6.2.4 Pembangunan Agama dan Budaya

6.2.4.1 Agama

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas maka perlu dirancang arah kebijakan yang terkait dengan permasalahan, yang meliputi: (a) Peningkatan pemahaman beragama; (b) Pemberantasan maksiat dan penyakit masyarakat.

6.2.4.2 Kebudayaan

Sasaran dan arah kebijakan pembangunan kebudayaan kabupaten Dharmasraya adalah :

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kebudayaan penguatan jati diri bangsa dan karakter bangsa serta pelestarian budaya
2. Penyesuaian Kebijakan & Program Pembangunan Kebudayaan
3. Peningkatan pengembangan seni dan budaya
4. Pemeliharaan koleksi sejarah yang ada



6.2.5 Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pembangunan Sarana dan Prasarana meliputi 2 (dua) urusan, yakni : (1) Perhubungan; dan (2) Lingkungan Hidup.

6.2.5.1 Perhubungan

Kebijakan sektor perhubungan diarahkan agar tercipta transportasi yang handal, aman, nyaman, manusiawi dan ramah lingkungan adalah dengan mengarahkan kebijakan dan program pembangunan bidang perhubungan pada hal berikut :

1. Penciptaan pelayanan transportasi yang sesuai dengan standar nasional; serta meningkatnya pelayanan transportasi yang berkelanjutan termasuk pemerataan pelayanan kepada wilayah;
2. Peningkatan kesadaran pengguna (masyarakat) tentang keamanan dan keselamatan berlalu lintas serta penggunaan moda transportasi, dengan terjadinya penurunan jumlah pelanggaran, kecelakaan dan muatan lebih;
3. Mewujudkan partisipasi pemerintah, swasta, dan BUMN dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana transportasi melalui reformasi dan restrukturisasi di bidang kelembagaan maupun regulasi;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan dan keterpaduan antar moda dan efisiensi dalam mendukung aksesibilitas dan mobilitas;
5. Penyediaan ruang/lahan terbuka pada setiap pusat kegiatan lokal (kecamatan/kelurahan) yang disediakan untuk parkir kendaraan (yang ukuran luas dan lokasi lahan tersebut akan ditetapkan berdasarkan lokasi dan luas fasum yang ada). Pemberlakuan parkir terbatas (waktu, lokasi) pada kawasan pusat kegiatan (seperti di raya, perdagangan, dll);
6. Meningkatkan SDM yang profesional dalam pengelolaan perhubungan.

6.2.5.2 Lingkungan Hidup

Mengacu pada hasil telaah pada *existing condition* pada bidang lingkungan hidup, maka arah kebijakan pembangunan bidang Lingkungan Hidup tahun 2010 - 2015 di Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air, lahan dan keanekaragaman hayati
2. Penataan lingkungan berdasarkan dayadukung dan daya tampung lingkungan
3. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (aparatur pemerintah dan masyarakat) dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Sasaran pembangunan bidang Lingkungan Hidup diarahkan kepada pelaksanaan pembangunan, sebagai berikut :

1. Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air, lahan dan keanekaragaman hayati
2. Pengelolaan terpadu sumberdaya air (*integrated water resources management*)
3. Peningkatan penataan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan



4. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (aparatur pemerintah dan masyarakat) dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

6.2.6 Kebijakan dan Program Pembangunan dan Tata Ruang

Berdasarkan kepada permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan kabupaten Dharmasraya dalam pembangunan ekonominya, maka sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan ekonomi masyarakat, sehingga mampu membangun interaksi spasial antara wilayah pusat pertumbuhan kabupaten Dharmasraya dengan pusat pertumbuhan utama dalam wilayah provinsi Sumatera Barat.
2. Meningkatkan interaksi spasial kabupaten Dharmasraya dengan wilayah eksternal atas dasar saling memberikan dampak (*spill over*) yang saling menguntungkan.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kelengkapan fungsi pelayanan perkotaan pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dan pusat pertumbuhan lokal.

Sedangkan arah kebijakan pembangunan wilayah di Kabupaten Dharmasraya adalah:

1. Terlengkapinya infrastruktur penunjang ekonomi wilayah seperti sistem transportasi (darat, sungai, perkereta apian,), sistem energi (listrik), sistem telekomunikasi (telepon), sistem pengelolaan sumberdaya air (waduk, irigasi, air bersih), sistem pemukiman (perumahan, TPSA).
2. Terbangunnya konfigurasi spasial dan interaksi spasial antara pusat pertumbuhan lokal, dengan pusat pertumbuhan wilayah, interaksi spasial antara pusat pertumbuhan kabupaten Dharmasraya dengan pusat pertumbuhan provinsi seperti perkotaan PKW dan kota Padang sebagai PKL.
3. Meningkatnya keterkaitan fisik, ekonomi, sosial budaya, pusat pertumbuhan lokal dengan pusat pertumbuhan wilayah di kabupaten Dharmasraya.



Tabel 6.1
Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 1

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT DHARMASRAYA YANG BERIMAN, SEHAT, CERDAS, AMAN, BERBUDAYA, ADIL DAN SEJAHTERA PADA TAHUN 2015			
MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan satu Identitas bersama sebagai "warga Dharmasraya"			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meletakkan pondasi pembangunan Dharmasraya berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.	Mensinergikan keberagaman etnis dengan berbagai latar belakang sehingga merasa bangga dengan satu identitas bersama sebagai 'warga Dharmasrayat dalam bingkai NKRI		1.

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2010

Tabel 6.1
Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 2

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT DHARMASRAYA YANG BERIMAN, SEHAT, CERDAS, AMAN, BERBUDAYA, ADIL DAN SEJAHTERA PADA TAHUN 2015			
MISI 2 : Mewujudkan Masyarakat Dharmasraya yang sehat, berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan memperbaiki mutu pelayanan kesehatan.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang murah dan mudah terjangkau.		
2. Meletakkan landasan awal untuk mewujudkan Kabupaten Dharmasraya sebagai barometer pendidikan regional.	Membangun sumberdaya manusia yang handal dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan.		

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2010



Tabel 6.1
Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 3

VISI	: TERWUJUDNYA MASYARAKAT DHARMASRAYA YANG BERIMAN, SEHAT, CERDAS, AMAN, BERBUDAYA, ADIL DAN SEJAHTERA PADA TAHUN 2015		
MISI 3	: Mewujudkan rasa aman, keadilan dan kesejahteraan masyarakat Dharmasraya dengan hukum sebagai panglima dalam tatanan kehidupan masyarakat.		
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum melalui penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan.	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum serta pemantapan peranserta ormas dan partai politik.	
	2. Memperkuat kapasitas lembaga politik, ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan di masyarakat.	Terbangunnya sinergitas antara pelaku pembangunan	
	3. Memeratakan Pembangunan di Seluruh Wilayah Dharmasraya	Terlaksananya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar secara merata.	
	4. Memperbaiki dan meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, profesional dan berwibawa.	Menempatkan aparatur sesuai dengan kemampuan dan keahliannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku	
	5. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.	Tegaknya hukum terkait dengan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup	
	6. Mengembangkan pembangunan daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan.	Terwujudnya kelembagaan dan kegiatan koperasi dan UMKM yang lebih profesional. Terbina dan berkembangnya balai alih teknologi pertanian (agro technopark) dan kawasan sentra produksi	
	7. Mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat dan menguntungkan daerah.	Terjaminnya keamanan penanaman modal dan kepastian berusaha diwilayah Dharmasraya	

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2010

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1 BIDANG EKONOMI

7.1.1. Koperasi dan UKM

Kebijakan pembangunan Koperasi dan UKM , yaitu :

1. Meningkatkan pembinaan SDM pengusaha melalui pendidikan dan pelatihan agar kelompok usaha mikro dan kecil ini dapat meningkatkan daya saing di pasar lokal, nasional maupun internasional.
2. Meningkatkan akses terhadap dana murah oleh usaha mikro dan kecil, menengah dan koperasi.
3. Meningkatkan jumlah dan kualitas pengusaha menengah yang tangguh yang berasal dari peningkatan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah, yang berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan nilai tambah.
4. Fasilitasi kemitraan usaha antara pengusaha besar, menengah dan kecil serta koperasi yang saling mendukung dan saling menguntungkan.
5. Menyediakan bantuan asuransi kredit bagi Koperasi dan UKM yang sudah mendapatkan akses ke perbankan
6. Membangundan meningkatkan peran lembaga pemasaran (*trading house*) untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan mikro.
7. Mengembangkan produksi bersama (*common service facilities*) di sentra-sentra produksi kerajinan rakyat yang dilaksanakan dalam skala mikro dan rumah tangga.
8. Pemberdayaan lembaga keuangan mikro non bank sebagai wujud pengembangan ekonomi kerakyatan.

Program dan kegiatan prioritas dalam pengembangan Koperasi dan UMKM dalam periode lima tahun mendatang adalah:

1. Program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM

Fokus prioritas peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM diarahkan untuk mewujudkan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang lebih koordinatif dan partisipatif, yang didukung peningkatan peran lembaga-lembaga swasta dan masyarakat; menyediakan regulasi/kebijakan nasional dan daerah yang mendukung pemberdayaan koperasi dan UMKM; serta menurunkan segala macam pungutan yang menghambat perkembangan usaha koperasi dan UMKM.

2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM

Fokus prioritas pengembangan UMKM diarahkan untuk mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif.



3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Koperasi dan UMKM

Fokus prioritas pengembangan sistem pendukung adalah agar terwujudnya usaha koperasi dan UMKM yang mampu mengakses permodalan dan system informasi dan manajemen.

4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Fokus prioritas penguatan kelembagaan koperasi diarahkan untuk mengembangkan praktik berbisnis yang sesuai prinsip dan asas koperasi; serta meningkatkan peran koperasi dalam memfasilitasi perkembangan usaha anggota dan peningkatan kesejahteraan anggota.

7.1.2. Penanaman Modal

Kebijakan dalam peningkatan investasi dalam RPJMD 2010-2015 diarahkan pada :

- a. Harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan perizinan investasi
- b. Peningkatan fasilitasi investasi
- c. Peningkatan Program Promosi Investasi

Program bidang Penanaman Modal

1. Program peningkatan besarnya aliran investasi
2. Program harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan perizinan investasi
3. Program peningkatan fasilitasi investasi
4. Program Peningkatan Promosi Investasi

7.1.3 Ketahanan Pangan

Berdasarkan sasaran ketersediaan bahan pangan untuk kebutuhan pangan Dharmasraya maka arah kebijakan adalah :

1. Peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan
2. Pencukupan kebutuhan konsumsi pangan
3. Stabilitas harga pangan antar wilayah dan antar waktu.
4. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan
5. Mengeleminir kondisi rawan pangan

Program peningkatan ketahanan pangan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketahanan pangan
2. Program pengembangan kelembagaan ketahanan pangan
3. Program diversifikasi pangan

7.1.4 Pertanian

Kebijakan pembangunan pertanian pada periode ini diarahkan untuk :

1. Merevitalisasi sistem kelembagaan dan pendekatan penyuluhan pertanian dan pendampingan terhadap petani tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan sehingga relevan dengan kebutuhan perbaikan kapasitas petani dan daya saing produk pertanian memasuki pasar;



2. Mengembangkan sistem dan kelembagaan pasar pertanian yang difokuskan kepada peningkatan kemampuan akses lokal yang dapat mendukung perkembangan ekonomi lokal dan kesejahteraan petani;
3. Mengembangkan kelembagaan agribisnis dan agroindustri pedesaan yang mampu meningkatkan akses petani, pekebun, dan peternak terhadap sumberdaya produktif;
4. Mengembangkan sistem dukungan dan pelayanan pemerintah dan swasta untuk sektor pertanian guna meningkatkan skala usaha dan nilai tukar usaha pertanian;
5. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerah dan untuk memenuhi permintaan pasar di daerah lain atau luar negeri;
6. Meningkatkan kemampuan/kualitas SDM pelaku usaha pertanian sehingga handal dalam pelaksanaan usaha dan memiliki daya saing
7. Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan dan peningkatan nilai tambah dengan mengembangkan cluster agroindustri dalam konsep pengembangan agribisnis;
8. Memperkuat sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengelola resiko usaha pertanian dan mendukung pengembangan agroindustri pedesaan;
9. Membangun sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah produksi dan cluster agroindustri pedesaan.
10. Memberdayakan petani untuk penerapan teknologi dan informasi pertanian/perkebunan/ peternakan

Arah kebijakan diatas dijabarkan dalam program pembangunan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2. Program penyediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan pertanian/ peternakan/ perkebunan
Program ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan sehingga terwujudnya kesejahteraan petani.
3. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan/ peternakan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan aplikasi praktek penerapan teknologi pertanian/perkebunan/peternakan untuk meningkatkan produktivitas komoditi serta memberikan nilai tambah (*value added*) bagi petani.
4. Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Pertanian/ Perkebunan/Peternakan secara Berkelanjutan
Program ini bertujuan untuk meningkatnya kemampuan petani dalam mengadopsi teknologi dan informasi pertanian dalam meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu produk.
5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan/ Peternakan
6. Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hasil Pertanian
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian sejalan dengan usaha pengembangan pemasaran hasil pertanian



7. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian

Program ini bertujuan untuk meningkatnya kemampuan petani dalam mengadopsi teknologi dan informasi pertanian.

8. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM pelaku ekonomi pertanian yang tangguh.

9. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pelaku Usaha Pertanian

10. Program Peningkatan Pemanfaatan Potensi Pembangunan Pertanian dan Pengembangan Kemitraan Investasi

Program ini bertujuan untuk mengintensifkan pemanfaatan potensi pertanian pada subsektor perikanan, perkebunan dan peternakan yang ada untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian. Program ini juga bertujuan untuk mewujudkan pertanian sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.

11. Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian

Program ini bertujuan untuk berkembangnya kawasan pengembangan komoditi unggulan pertanian sehingga diperoleh nilai yang dapat meningkatkan pendapatan petani melalui pembukaan pasar dan peningkatan nilai tambah produk pertanian. Dalam lima tahun kedepan Kabupaten Dharmasraya dapat menetapkan komoditi unggulan yang akan dikembangkan sesuai dengan kondisi daerah.

12. Program Pengamanan Sumberdaya Hewani dan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman

13. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

7.1.5. Kehutanan

Kebijakan pembangunan bidang sumberdaya alam tahun 2010 - 2015 di kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan
2. Pengelolaan terpadu sumberdaya hutan untuk kelangsungan daya dukung DAS
3. Peningkatan capacity building pemerintah dalam pengawasan dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dan
4. Pengelolaan hutan berbasis kemasyarakatan (*community based forest management*)

Program pokok bidang kehutanan sebagai berikut :

1. Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan
2. Program rehabilitasi hutan dan lahan
3. Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
4. Program perencanaan dan pengembangan hutan rakyat
5. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)

7.1.6. Energi dan Sumberdaya Mineral

Kebijakan pembangunan bidang sumberdaya alam tambang dan energi tahun 2010 - 2015 di kabupaten Dharmasraya adalah:



1. Penataan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan tambang yang berwawasan lingkungan
2. Pengawasan kegiatan pengelolaan penambangan mineral di kawasan hutan lindung
3. Pembangunan jaringan listrik di jorong/nagari yang tidak terjangkau

Program pokok sebagai berikut :

1. Program pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan
2. Program Pengelolaan bidang geologi dan SDM
3. Program pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
4. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
5. Program Pemetaan wilayah pertambangan
6. Program inventarisasi air bawah tanah
7. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
8. Program pemanfaatan dan pengembangan migas

7.1.7. Pariwisata

Kebijakan pembangunan bidang Kepariwisata Kabupaten Dharmasraya dalam periode 2010-2015 antara lain adalah :

1. Terciptanya keunikan produk dan tujuan wisata
2. Terciptanya produk wisata berbasis budaya
3. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung aktifitas wisata.
4. Terwujudnya masyarakat sadar wisata terutama di sekitar objek wisata yang banyak dikunjungi masyarakat.

Program yang dilaksanakan untuk pembangunan pariwisata di Dharmasraya adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2. Program Pengembangan Promosi Wisata

Program ini bertujuan untuk memperluas pengenalan objek-objek pariwisata kepada para calon wisatawan baik dari dalam maupun dari luar negeri,

3. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Program ini bertujuan untuk menghasilkan sistem kerjasama multi pihak dalam pengelolaan pariwisata.

7.1.8. Perikanan

Kebijakan pembangunan Perikanan diarahkan kepada pelaksanaan pembangunan, sebagai berikut :

1. Pengembangan perikanan budidaya, yaitu; produksi budidaya, untuk memenuhi kebutuhan daerah.
2. Peningkatan daya saing produksi perikanan. Dengan mengembangkan pengolahan, perbaikan mutu hasil perikanan, penguatan pasar, serta membuka peluang investasi



3. Pengembangan sumberdaya manusia perikanan. Kebijakan ini diarahkan kepada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang terlibat dalam pengelolaan perikanan, mulai petani ikan, penyuluh, dan aparat perikanan lainnya.

Agar tercapainya sasaran dan arah kebijakan pembangunan Perikanan seperti diuraikan diatas, maka dibutuhkan beberapa program dan kegiatan pokok, seperti berikut :

1. Program pengembangan budidaya air tawar
2. Program pengembangan budidaya perikanan
3. Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan
4. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan.

7.1.9. Perdagangan

Kebijakan pembangunan sektor perdagangan, hotel dan restoran sesuai dengan arahan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi Sumatera Barat adalah mewujudkan kegiatan perdagangan dan jasa yang mampu bersaing, baik pada tingkat local wilayah maupun pada tingkat eksternal wilayah. Pengembangan kewirausahaan yang mampu bersaing, dan pengembangan UMKM dan koperasi yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

1. Pengembangan daya saing perdagangan dengan meningkatkan efisiensi perdagangan, terutama upaya untuk menekan *profit seeking* dan *direct unproductive profit seeking* (DUP) yang membuat biaya-biaya transaksi (*transaction cost*) menjadi tinggi.
2. Menghasilkan komoditi perdagangan yang lebih bersifat *knowledge based product* dengan mengembangkan lembaga R&D pada setiap usaha perdagangan, sehingga setiap komoditi perdagangan yang ada memiliki keunggulan komparatif di dibandingkan dengan wilayah lain.
3. Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana penunjang perdagangan inter wilayah dan antar wilayah, agar nilai tambah dan margin perdagangan lebih mampu ditangkap oleh penduduk sendiri.
4. Merancang dan menciptakan kewirausahaan yang handal dalam menghadapi persaingan perdagangan secara global, dengan pemberian fasilitas kepada pelaku perdagangan dan eksportir guna melahirkan kelompok-kelompok enterprenuer yang kuat dan tangguh.
5. Membangun jejaring bisnis antara UMKM dengan saudagar dan eksportir di dalam wilayah maupun di luar wilayah yang sudah *establish* guna memperkuat persaingan perdagangan dengan daerah lain.

Program pokok guna mengembangkan perdagangan yang bersaya saing tinggi baik di tingkat internal wilayah maupun di tingkat eksternal wilayah adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan efisiensi dan daya saing perdagangan pada internal wilayah maupun pada eksternal wilayah.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan margin yang diterima oleh produsen komoditi perdagangan dan pelaku perdagangan itu sendiri.



2. Program Pengembangan komoditi perdagangan yang berbasis *knowledge based product*
Program ini ditujukan kepada peningkatan nilai tambah komoditi perdagangan pada tingkat petani produsen dan pada tingkat perdagangan pengumpul, sehingga margin perdagangan yang diperoleh lebih besar ditangkap oleh pelaku usaha dalam wilayah sendiri.
3. Program Peningkatan sarana dan prasarana pasar
Program ini ditujukan untuk membangun saling keterkaitan pasar, antara pasar induk, pasar satelit, dan pasar nagari yang mendukung kepada penyediaan fasilitas transaksi perdagangan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) pelaku usaha perdagangan dan aparatur pemerintah
Program ini ditujukan untuk mempertinggi kemampuan teknis dan *lobbying* pelaku perdagangan.
5. Program Peningkatan dan pengembangan ekspor daerah
Program ini ditujukan untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor komoditi utama, sehingga mampu mendorong kepada pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
Program ini ditujukan untuk peningkatan mutu dan kualitas kelembagaan koperasi yang bergerak di bidang perdagangan komoditi utama.
7. Program peningkatan kompetensi SDM UMKM dan aparatur Pembina UMKM
Program ini ditujukan untuk peningkatan sumberdaya usaha mikro kecil dan menengah untuk mampu menghasilkan komoditi perdagangan yang mampu bersaing, baik untuk harga maupun untuk kualitas komoditas.
8. Program peningkatan Peranan Koperasi dalam perekonomian daerah
Program ini ditujukan untuk peranan koperasi dalam pengelolaan komoditas perdagangan sehingga mampu mengatasi monopoli alami oleh kelompok-kelompok pedagang dan eksportir.
9. Program peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil menengah
Program ini ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil menengah, sehingga mampu memperoleh surplus usaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan permodalannya kepada perluasan skala usahanya.

7.1.10. Industri

Kebijakan pembangunan sektor industri pengolahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan industri pengolahan lebih memfokuskan kepada industri kecil dan menengah (IKM) yang pelaku utamanya adalah ekonomi rumah tangga atau koperasi usaha industri.
- 2) Pengembangan kemitraan dengan pelaku usaha industri besar dalam bentuk keterkaitan input-output, guna menciptakan pasar di dalam wilayah sendiri. Sehingga pada gilirannya produksi industri olahan lebih diarahkan oleh permintaan terhadap produknya di dalam wilayah sendiri atau eksternal wilayah.



- 3) Mendorong terjadinya penyusunan kontrak bisnis yang permanen antara pelaku usaha industri dalam satu unit manajemen yang sama dengan menghasilkan satu produk unggulan untuk komoditi ekspor.
- 4) Menciptakan dan merencanakan terbentuknya kelompok-kelompok enterprenuer pada skala usaha industri kecil dan menengah untuk menghantarkan kepada penumbuhan kelompok enterprenuer yang berskala besar dan mampu bersaing dalam menghadapi persaingan global.

Program pokok pembangunan industri pengolahan yang dapat dilakukan untuk sasaran dan arah kebijakan di atas adalah sebagai berikut:

1. Program revitalisasi dan penumbuhan industri unggulan berbasis agro dan manufaktur
Program ini ditujukan untuk menumbuhkan basis industri olahan untuk komoditi ekspor yang memberikan peningkatan nilai tambah bagi pelaku usaha rumah tangga atau kelompok usaha koperasi.
2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Program ini ditujukan untuk pengembangan industri kecil dan menengah yang telah ada dan menjadi usaha kerajinan rumah tangga selama ini, namun karena terkendala oleh masih rendah kemampuan adopsi teknologi dan rendahnya akses ke permodalan usaha ini belum berkembang dengan baik.
3. Program Pengembangan Teknologi tepat guna
Program ini ditujukan untuk pengembangan teknologi tepat guna kepada pelaku IKM terutama untuk industri agro yang mengolah produk komoditi unggulan.
4. Program Pengembangan kluster industri unggulan
Program ini ditujukan pada pembentukan kluster industri unggulan dalam satu skala usaha ekonomi yang lebih luas.
2. Program Pengembangan sentra industri potensial
Program ini ditujukan untuk pengembangan kawasan industri potensial terutama untuk kabupaten Dharmasraya adalah kawasan industri karet, sawit dan industri potensial lainnya.
3. Program Peningkatan Iklim Usaha Industri
Program ini ditujukan untuk membangun daya tarik terhadap calon investor guna pengembangan industri olahan karet dan sawit pada skala usaha yang lebih besar (*economic of scale*) guna mempertinggi daya saing industri.

7.2 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN SUMBERDAYA

7.2.1 Kesehatan

Kebijakan pembangunan bidang kesehatan adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin.
2. Meningkatkan ketersediaan tenaga medis dan paramedis di seluruh kecamatan yang ada di Dharmasraya.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat serta mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat.



4. Meningkatkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat melalui pengembangan kesehatan wilayah.
5. Meningkatkan jumlah, pemerataan dan kualitas pelayanan di rumah sakit, puskesmas, dan jaringannya, akreditasi RSUD.
6. Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular.
7. Meningkatkan kesadaran diri keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi, balita serta usia produktif.
8. Mengembangkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, informasi kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan guna mendukung pembangunan kesehatan.
9. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin.
10. Meningkatkan peran serta masyarakat dan tokoh agama dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dijabarkan dalam program pembangunan sebagai berikut :

1. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan perorangan
4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
5. Program Pengawasan Obat dan Makanan
6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
7. Program Sumber Daya Kesehatan
8. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
10. Program Pelayanan kesehatan Ibu dan anak
11. Program Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin

7.2.2 Pendidikan

Kebijakan pembangunan pendidikan kabupaten Dharmasraya, maka kebijakan dalam pendidikan yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Dharmasraya tahun 2010-2015 adalah :

- 1) Pencapaian struktur jumlah sekolah dan jumlah siswa yang ideal
- 2) Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan
- 3) Peningkatan Kualitas Pendidikan
- 4) Peningkatan Relevansi Pendidikan
- 5) Peningkatan Pengawasan dan Manajemen

Program pembangunan bidang pendidikan selama RJPMD 2010 - 2015 adalah sebagai berikut:

1. Program Pemerataan, sarana prasarana dan Mutu Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Pemerataan dan Mutu Pelayanan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun



3. Peningkatan Akses dan Mutu pendidikan menengah
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan formal dan informal
5. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan luar biasa
6. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pendidik dan tenaga kependidikan
7. Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pendidikan
8. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat membangun pendidikan
9. Program penguasaan IT (Informasi dan Teknologi) bagi siswa SLTP dan SLTA

7.2.3 Kependudukan dan Catatan Sipil

Kebijakan bidang kependudukan dan catatan sipil untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah :

- 1) menurunnya jumlah penduduk yang melangsungkan perkawinan pada usia remaja, dan menurunnya kehamilan remaja,
- 2) menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR),
- 3) meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan reproduksi remaja
- 4) meningkatnya jumlah peserta KB, dan persentase pasangan usia subur yang terlayani oleh program KB, serta yang ber KB secara mandiri,
- 5) meningkatnya cakupan, mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang diselenggarakan oleh masyarakat/ lembaga kesehatan.

Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program pokok yaitu :

1. Program Pengendalian Kependudukan
2. Program Penataan Administrasi Kependudukan

7.2.4 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kebijakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

- a. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- b. Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
- c. Peningkatan kualitas anak dan perlindungan perempuan
- d. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender
- e. Penyediaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
- f. Peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan produksi

Program Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
2. Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender dalam Pembangunan
5. Program Peningkatan Peran Perempuan disetiap Nagari/Jorong
6. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan perempuan
7. Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
8. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan



7.2.5 Keluarga Berencana

Kebijakan Pembangunan bidang Keluarga Berencana diarahkan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil.
2. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang
3. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga pra sejahtera dan sejahtera I dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.

Program pembangunan bidang Keluarga Berencana adalah Program Pembangunan KB dengan indikasi kegiatan antara lain :

1. Program Kesehatan Reproduksi
2. Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
3. Program Pembinaan KB
4. Program Advokasi KIE dan Pelayanan KB

7.2.6 Sosial

Kebijakan yang terkait dengan masalah sosial, yaitu:

- a. Menekan kemungkinan berbagai konflik horizontal yang melibatkan multi etnik
- b. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif warga masyarakat tentang rasa kesetiakawanan

Program Bidang Sosial

1. Program peningkatan pemahaman rasa solidaritas sosial
2. Program penguatan kelembagaan masyarakat
3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya
4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
8. Optimalisasi pengelolaan dana-dana untuk penanggulangan kemiskinan

7.2.7 Ketenagakerjaan

Kebijakan pembangunan ketenagakerjaan dan transmigrasi adalah sebagai berikut: mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh melalui peningkatan lapangan usaha produktif dan terpadu untuk mengurangi tingkat pengangguran, serta diarahkan pada kompetensi, kemandirian, peningkatan produktivitas, peningkatan upah, penjaminan kesejahteraan, perlindungan pekerja dan kebebasan berserikat.



Program Bidang Tenaga Kerja

1. Program Pengembangan Kesempatan Kerja
2. Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
4. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
5. Program Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
6. Program Pengembangan Wilayah Tertinggal
7. Program Peningkatan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi keluarga miskin

7.2.8. Kepemudaan dan Olah Raga

Arah Kebijakan yaitu :

1. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan.
2. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga.

Program Bidang Pemuda dan Olah Raga yaitu :

1. Program pembangunan kepemudaaan
2. Program pembangunan olahraga dan kesehatan
3. Program Pengembangan & Keserasian kebijakan Pemuda
4. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
5. Program Pengembangan kebijakan dan manajemen Olahraga
6. Program : Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

7.2.9 Pemberdayaan Nagari

Kebijakan pemberdayaan masyarakat desa/nagari adalah :

1. Peningkatan Kemampuan Pemerintah Nagari
2. Penataan Administrasi, Keuangan dan Aset Nagari
3. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
4. Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya

Program Bidang Pemberdayaan Nagari :

1. Program peningkatan Kemampuan Pemerintah Nagari
2. Program Penataan Administrasi, Keuangan dan Aset Nagari
3. Program penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya
5. Program Penyempurnaan database dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan
6. Program pemberdayaan keluarga miskin
7. Program Revitalisasi Peran Nagari
8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya
9. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa



10. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Penanggulangan Kemiskinan
11. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

7.3 PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA PEMERINTAHAN

7.3.1 Percepatan Pembangunan

Berdasarkan permasalahan dan sasaran percepatan pembangunan, maka arah kebijakan adalah :

- a. Pembangunan jalan dan jembatan yang mencakup semua sentra produksi menuju pasar dalam wilayah kabupaten.
- b. Pengembangan pengelolaan konservasi aliran sungai dan sumberdaya air lainnya
- c. Pembangunan dan pengembangan fasilitas lalu lintas kabupaten.
- d. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
- e. Percepatan pengesahan legalitas formal RPJPD dan RTRW Kabupaten Dharmasraya.

Bertolak dari permasalahan, sasaran, dan arah kebijakan, maka program dan kegiatan pokok percepatan pembangunan adalah:

1. Program pembangunan jalan dan jembatan yang proporsional dalam Kabupaten Dharmasraya
2. Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai dan sumberdaya air lainnya
3. Program pembangunan dan pengembangan fasilitas lalu lintas di Kabupaten Dharmasraya
4. Peningkatan kinerja pengelolaan air limbah dan air minum
5. Program percepatan penyelesaian RTRW Kabupaten Dharmasraya
6. Program penataan Ruang Terbuka Hijau yang elok dan indah untuk kenyamanan di Dharmasraya.

7.3.2. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kebijakan urusan ini yaitu :

1. Peningkatan pendidikan dan kesadaran politik masyarakat
2. Pelembagaan mekanisme “turun kebawah” sebagai mekanisme untuk mengenal, memahami dan menyerap aspirasi rakyat.
3. Penyaringan aspirasi masyarakat tentang semua kebijakan.
4. Pelembagaan dialog dengan publik melalui konferensi pers, pembuatan buletin, dan optimalisasi website pemerintah Kabupaten.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pemerintahan kecamatan dan nagari.
6. Penamaan jalan dan gedung terkait dengan identitas lokal.
7. Bekerjasama dengan semua pihak dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif serta menanggulangi penyakit masyarakat.



8. Meningkatkan kualitas penegakan hukum dan ketertiban dalam masyarakat melalui peningkatan pembinaan hukum, penetapan kebijakan untuk mengantisipasi timbulnya konflik secara horizontal maupun vertikal.
9. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) serta peningkatan koordinasi dengan pihak kepolisian dan aparat keamanan lainnya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yaitu :

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat.
2. Program Pengembangan wawasan kebangsaan
3. Program pendidikan politik masyarakat
4. Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
5. Program Pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam

7.3.3. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi dan Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Kebijakan yang ditetapkan yaitu :

1. Pembinaan kompetensi PNS berdasarkan mekanisme merit system, yaitu menerapkan azas profesionalitas, transparan, tanpa mekanisme KKN, dan tidak diskriminatif.
2. Penerapan prinsip *good governance*
3. Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung aparatur pemerintahan Kabupaten Dharmasraya.
5. Pengembangan situasi yang kondusif wilayah (penyelesaian tapal batas)
6. Menyediakan jasa tenaga pengelola administrasi keuangan pada masing-masing SKPD
7. Penyusunan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
8. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati.
9. Penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan aset.
10. Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
11. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah.
12. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
13. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Penerapan prinsip *good governance* dilaksanakan melalui program dan kegiatan pokok sebagai berikut:

1. Program penerapan prinsip *good governance* (perbaikan kualitas pelayanan publik)
2. Program peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya
3. Program pelayanan administrasi perkantoran
4. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya.



5. Program peningkatan disiplin aparatur
6. Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur
7. Program pengembangan dan penyelesaian tapal batas wilayah
8. Program Penyediaan jasa tenaga pengelola administrasi keuangan pada masing-masing SKPD.
9. Program peningkatan kompetensi PNS berdasarkan mekanisme merit system.
10. Program Pencerdasan dan perluasan wawasan masyarakat serta penyebaran informasi melalui TI.
11. Program Transparansi anggaran
12. Program desentralisasi kewenangan
13. Program perencanaan Partisipatif
14. Program Kewirausahaan birokrasi
15. Program Optimalisasi Alokasi Dana Desa (ADD)

7.3.4. Statistik

Berdasarkan sasaran, maka kebijakan yang ditetapkan, yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berperan untuk mengembangkan informasi statistik daerah Kabupaten Dharmasraya.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama institusi pemerintah dan swasta dalam mendukung penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan.

Berdasarkan sasaran dan kebijakan, maka program dan kegiatan pembangunan urusan statistik adalah:

1. Program Penyediaan informasi statistik lengkap, akurat dan komprehensif
2. Program Pengembangan data dan informasi statistik daerah.
3. Program Penyediaan data Ekonomi makro daerah terkait investasi dan keuangan untuk menunjang pembangunan daerah.

7.3.5. Kearsipan

Kebijakan urusan perpustakaan adalah:

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai sebagai media penyelamatan dan pelestarian arsip daerah Kabupaten Dharmasraya.
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan system informasi kearsipan dilingkungan pemerintah maupun swasta/masyarakat.
- 3) Meningkatkan koordinasi antar instansi/dinas terkait dalam pengelolaan dan penyelamatan arsip daerah.
- 4) Peningkatan Minat baca pada daerah Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan kebijakan urusan perpustakaan dan kearsipan, maka programnya, ialah:

1. Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan
2. Program peningkatan mutu pelayanan sistem kearsipan

7.3.6. Komunikasi dan Informatika

Kebijakan untuk mencapai sasaran adalah:



1. Menciptakan sistem penyediaan menyeluruh, terpadu dan kompetitif serta menyahuti keinginan masyarakat terhadap telekomunikasi dan informasi.
2. Menyiapkan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informasi.
3. Mengendalikan sistem telekomunikasi dan informasi terhadap masyarakat.
4. Memprioritaskan pembebasan lahan dan memudahkan perizinan dalam pembangunan dan pengembangan prasarana telekomunikasi dan informasi.
5. Menyusun kesepakatan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan prasarana telekomunikasi dan informasi.

Program Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informasi Publik
2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi Dan Informasi
3. Program Peningkatan Partisipasi Dan Investasi Swasta Dalam Pembangunan Komunikasi Dan Informasi Melalui Program *Public Private Partnership*
4. Program fasilitasi peningkatan sumberdaya manusia di bidang komunikasi dan informasi.
5. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

7.3.7. Kepustakaan

Kebijakan kepastakaan ialah;

- a. Meningkatkan minat baca generasi muda dan anak sekolah.
- b. Bertambahnya fasilitas penunjang kepastakaan
- c. Membaiknya fungsi koordinasi antar lembaga mendorong kemajuan melalui pustaka.

Program Bidang Kepustakaan

1. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
2. Program Pembangunan ruang/gedung perpustakaan beserta isinya

7.3.8. Perizinan Pengadaan Barang Dan Jasa

Kebijakan perizinan dan pengadaan barang dan jasa adalah;

- a. Menyusun benchmarking pelayanan perizinan dan pengadaan barang dan jasa.
- b. Melengkapi dan menerapkan aturan sistematis untuk pelayanan satu pintu dalam perizinan
- c. Merespon kepuasan pelayanan melalui analisa kepuasan pelanggan
- d. Menyusun dan menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa on-line.

Program Bidang Perizinan pengadaan barang dan jasa

1. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
2. Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi
3. Program Optimisasi lelang terpadu



7.4 PEMBANGUNAN AGAMA DAN BUDAYA

7.4.1 Agama

kebijakan yang terkait dengan agama, yang meliputi: (a) Peningkatan pemahaman beragama; (b) Pemberantasan maksiat dan penyakit masyarakat.

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan urusan agama maka program dan kegiatan pokok pembangunan adalah :

1. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama.
2. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai ajaran agama bagi setiap individu, keluarga, masyarakat dan penyelenggara negara.
3. Program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat dan Penyakit Masyarakat.

7.4.2 Kebudayaan

Kebijakan pembangunan kebudayaan kabupaten Dharmasraya adalah :

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kebudayaan penguatan jati diri bangsa dan karakter bangsa serta pelestarian budaya
2. Penyesuaian Kebijakan & Program Pembangunan Kebudayaan
3. Peningkatan pengembangan seni dan budaya
4. Pemeliharaan koleksi sejarah yang ada

Program dan kegiatan pokok pembangunan bidang kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kebudayaan penguatan jati diri bangsa dan karakter bangsa serta pelestarian budaya
2. Program Pembangunan Kebudayaan
3. Program meningkatkan aktualisasi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam masyarakat multikultural Dharmasraya
4. Program pelestarian peninggalan sejarah Dharmasraya
5. Program pengelolaan kekayaan budaya
6. Program pengembangan nilai budaya
7. Program pengelolaan keragaman budaya



7.5 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

7.5.1 Perhubungan

Kebijakan sektor perhubungan diarahkan agar tercipta transportasi yang handal, aman, nyaman, manusiawi dan ramah lingkungan adalah dengan mengarahkan kebijakan dan program pembangunan bidang perhubungan pada hal berikut :

1. Penciptaan pelayanan transportasi yang sesuai dengan standar nasional; serta meningkatnya pelayanan transportasi yang berkelanjutan termasuk pemerataan pelayanan kepada wilayah;
2. Peningkatan kesadaran pengguna (masyarakat) tentang keamanan dan keselamatan berlalu lintas serta penggunaan moda transportasi, dengan terjadinya penurunan jumlah pelanggaran, kecelakaan dan muatan lebih;
3. Mewujudkan partisipasi pemerintah, swasta, dan BUMN dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana transportasi melalui reformasi dan restrukturisasi di bidang kelembagaan maupun regulasi;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan dan keterpaduan antar moda dan efisiensi dalam mendukung aksesibilitas dan mobilitas;
5. Penyediaan ruang/lahan terbuka pada setiap pusat kegiatan lokal (kecamatan/kelurahan) yang disediakan untuk parkir kendaraan (yang ukuran luas dan lokasi lahan tersebut akan ditetapkan berdasarkan lokasi dan luas fasum yang ada). Pemberlakuan parkir terbatas (waktu, lokasi) pada kawasan pusat kegiatan (seperti di raya, perdagangan, dll);
6. Meningkatkan SDM yang profesional dalam pengelolaan perhubungan.

Program Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana

1. Program Rehabilitasi, Pemeliharaan, Dan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
2. Program Pengembangan Pelayanan, Kemampuan Pencarian Dan Penyelamatan
3. Program Peningkatan Sumberdaya Manusia di Bidang Perhubungan
4. Program pembangunan prasarana dan Fasilitas perhubungan
5. Program peningkatan pelayanan angkutan
6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan Prasarana dan fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor
7. Program membangun trayek transportasi LLASDP
8. Program Pembukaan Jaringan Line trayek transportasi darat ke daerah Pedesaan/terpencil
9. Program Peningkatan pengetahuan masyarakat dibidang transportasi
10. Program perencanaan fasilitas perhubungan
11. Program Pengembangan komunikasi dan informatika

7.5.2 Lingkungan Hidup

Kebijakan pembangunan bidang Lingkungan Hidup tahun 2010 - 2015 di kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :



1. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air, lahan dan keanekaragaman hayati
2. Penataan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
3. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (aparatur pemerintah dan masyarakat) dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Untuk mencapai kebijakan pembangunan dalam bidang Lingkungan Hidup yang dirumuskan diatas, maka dibutuhkan beberapa program pokok sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2. Program peningkatan pengendalian polusi
3. Program pengembangan pengelolaan, dan konservasi sungai dan sumberdaya air lainnya
4. Program pengelolaan terpadu sumberdaya air
5. Program penataan lingkungan
6. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
7. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

7.6 KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG

Kebijakan pembangunan wilayah di kabupaten Dharmasraya adalah:

1. Terlengkapinya infrastruktur penunjang ekonomi wilayah seperti system transportasi (darat, sungai, perkereta apian,), system energy (listrik), system telekomunikasi (telepon), system pengelolaan sumberdaya air (waduk, irigasi, air bersih), system pemukiman (perumahan, TPSA).
2. Terbangunnya konfigurasi spatial dan interaksi spatial antara pusat pertumbuhan local, dengan pusat pertumbuhan wilayah, interaksi spatial antara pusat pertumbuhan kabupaten Dharmasraya dengan pusat pertumbuhan provinsi seperti perkotaan PKW dan kota Padang sebagai PKL.
3. Meningkatnya keterkaitan fisik, ekonomi, social budaya, pusat pertumbuhan local dengan pusat pertumbuhan wilayah di kabupaten Dharmasraya.

Program-program pokok untuk mewujudkan tujuan pembangunan wilayah tersebut di atas adalah:

1. Program Peningkatan partisipasi investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur ekonomi *public private partnership* (PPP)
Program ini ditujukan membuka keterlibatan pihak swasta untuk dapat melakukan investasi dalam penyediaan infrastruktur system transportasi darat, seperti jalan raya, kereta api, dll. Serta penyediaan system energy dan telekomunikasi.
2. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya
Program ini bertujuan untuk pengembangan system pengelolaan sumberdaya air untuk irigasi pada berbagai potensi sumberdaya air.
3. Program Pembangunan dan Peningkatan jalan dan jembatan



Program pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pusat kecamatan dengan pusat kabupaten, dan peningkatan aksesibilitas dengan pusat pertumbuhan wilayah tetangga.

2. Program Penumbuhan dan Pengembangan Perkereta apian
Program penumbuhan dan pengembangan kereta api ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas untuk angkutan barang dan jasa dari Dharmasraya ke daerah lain.
3. Program Perencanaan dan Penataan Tata ruang
Program perencanaan dan penataan tata ruang ditujukan untuk penataan dan pemwilayahan pembangunan di kabupaten Dharmasraya.
4. Program Pemanfaatan Ruang
5. Program Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan pemukiman
Program ini bertujuan untuk pengembangan perumahan dan pemukiman yang sesuai dengan arahan penataan ruang perkotaan sesuai dengan peruntukannya.
6. Program Pengembangan kelistrikan dan sumber energy lainnya
Program ini bertujuan untuk meningkatkan jaringan listrik sampai ke pedesaan di kabuapten Dharmasraya.
7. Program percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada kawasan industri
Program ini ditujukan untuk membangun kawasan industri karet dan sawit di kabupaten Dharmasraya.
8. Program peningkatan mitigasi bencana dan pengelolaan pasca bencana
Program ini ditujukan untuk membagnun dan menyiapkan pengelolaan bencana dan pasca bencana yang akhir-akhir ini sering melanda wilayah Sumatera Barat umumnya.



BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam rangka terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang dilaksanakan melalui misi-misi yang telah ditetapkan, diperlukan adanya fokus yang menjadi arah dan orientasi semua kontribusi yang harus diberikan oleh segenap stakeholders untuk mencapai percepatan pembangunan. Fokus juga dibutuhkan karena banyaknya sasaran yang ingin dicapai, sementara sumberdaya yang dimiliki terutama kemampuan pendanaan sangat terbatas.

Berdasarkan arsitektur perencanaan yang secara tegas membatasi antara aspek strategis dan operasional dalam perencanaan, maka program prioritas di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 (sebelas) program prioritas.

dibatasi pula menjadi dua (2) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Perencanaan strategis dirumuskan tergantung dari tujuan dan sasaran pembangunan serta bagaimana strategi untuk mencapainya. Perencanaan ini sudah dilakukan pada bab sebelumnya dengan menghasilkan program-program (program prioritas untuk perencanaan strategis). Sedangkan suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah (berdasarkan permasalahan pembangunan daerah seperti pada Bab IV) pada dasarnya adalah program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu urusan pemerintah daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya dapat menjadi operasional di periode berikutnya.

Tabel 8.1 : Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Dharmasraya

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)		Target			Rp (000)
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
					(6)	(07)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(17)
1	URUSAN WAJIB																	
1.01	PENDIDIKAN																	
1.01.01.15	Program Pemerataan, Sarana prasarana dan Mutu Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (Program Pendidikan Anak Usia Dini)	Tingkat ketercapaian pemerataan pelayanan		Persentase	27%	3,845,000	21%	2,895,000	22%	3,085,000	15%	2,135,000	15%	2,040,000	100%	14,000,000	DisDik	
	APK PAUD		31	Prosentase	35	425,000	40	425,000	55	425,000	65	425,000	75	425,000	85	2,125,000		
	APM PAUD		23	Prosentase	27	250,000	35	250,000	45	250,000	55	250,000	70	250,000	80	1,250,000		
	Jumlah Lembaga PAUD		95	lembaga PAUD/ Tahun	30	2,850,000	20	1,900,000	20	1,900,000	10	950,000	10	950,000	185	8,550,000		
	jumlah tenaga pendidik PAUD yang berkualifikasi		11	orang/tahun	25	225,000	35	225,000	50	225,000	75	225,000	90	225,000	120	1,125,000		
	Jumlah PAUD Percontohan		1	lembaga PAUD/ Tahun	1	95,000	1	95,000	3	285,000	3	285,000	2	190,000	11	950,000		
1.01.01.16	Program Pemerataan dan Mutu pelayanan pendidikan wajib belajar sembilan tahun (Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun)	Tingkat keterlaksanaan pemerataan dan pelayanan pendidikan		Prosentase	18%	4,296,000	24%	5,696,000	27%	6,447,000	26%	6,197,000	26%	6,346,000	100%	24,180,000	DisDik	
	APK SD/MI		100.52	prosentase	101.02	260,000	101.21	260,000	101.82	260,000	102.54	260,000	107.2	260,000	108	1,300,000		
	APM SD/MI		88.72	prosentase	89.45	185,000	92.42	185,000	96.32	185,000	98.5	185,000	99.1	185,000	100	925,000		
	Jumlah ruang kelas baru (RKB) SD/MI		1040	jumlah ruang kelas/	20	2,200,000	30	3,300,000	30	3,300,000	25	2,750,000	25	2,750,000	1170	14,300,000		
	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SD/MI		151	jumlah SD/MI per tahun	1	451,000	1	451,000	2	902,000	2	902,000	1	451,000	156	2,255,000		
	jumlah pustaka		92	jumlah pustaka/ tahun	8	1,200,000	10	1,500,000	12	1,800,000	14	2,100,000	18	2,700,000	154	5,400,000		
1.01.01.17	Program Peningkatan Akses dan Mutu pendidikan menengah (Program Pendidikan Menengah)				19	4,850,000	22	5,450,000	26	6,540,000	16	4,080,000	16	4,050,000	100	24,970,000	DisDik	
	APK SMP/MTs		68.58	prosentase	69.66	320,000	71.0532	320,000	72.4743	320,000	73.9237	320,000	75.4022	320,000	76.9103	1,600,000		
	APM SMP/MTs		55.54	prosentase	52.48	320,000	61.79	320,000	65.4	320,000	70.25	320,000	78.4	320,000	85	1,600,000		
	APK SMA/MA/SMK		85.85	prosentase	88.72	210,000	71.43	210,000	82.5	210,000	88.75	210,000	92	210,000	97	1,050,000		
	APM SMA/MA/SMK		59.32	prosentase	62.11	210,000	47.78	210,000	55.15	210,000	65.5	210,000	70	210,000	75	1,050,000		
	Jumlah ruang kelas baru (RKB) SMP/MTs		415	jumlah ruang kelas/	24	2,640,000	20	2,200,000	10	1,100,000	8	880,000	6	660,000	483	7,480,000		
	Jumlah unit sekolah SMP/MTs		34	jumlah pustaka/ tahun	2	320,000	2	320,000	4	640,000	3	480,000	2	320,000	47	2,080,000		
	Jumlah unit sekolah SMA/MA/SMK		26	jumlah labor/ tahun	3	480,000	2	320,000	4	640,000	6	960,000	6	960,000	47	3,360,000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			Target
		Jumlah sekolah unggulan	1	jumlah sekolah unggul/	1	350,000	1	1,550,000	2	3,100,000	2	700,000	3	1,050,000	3	6,750,000	
1.01.01. 18	Program Peningkatan akses dan kualitas pendidikan formal dan informal (Program Pendidikan Non Formal/ Informal)	Tingkat akses dan kualitas PNFI		Prosentase	18	2,098,600	19	2,202,600	19	2,173,000	20	2,242,000	24	2,697,000	100	11,413,200	DisDik
		Angka buta aksara	2450	orang/tahun	2019	185,000	1986	185,000	1934	185,000	1892	185,000	1865	185,000	1780	925,000	
		Jumlah sarana PKBM	6	jumlah sarana	3	270,000	3	270,000	2	180,000	2	180,000	2	180,000	18	1,080,000	
		Jumlah kelompok belajar paket A, B dan C	16	kelompok belajar/ tahun	22	242,000	26	286,000	28	308,000	31	341,000	32	352,000	155	1,529,000	
		jumlah tenaga pendidik dan pengelola PNFI	421	jumlah guru dan pengelola	584	1,401,600	609	1,461,600	625	1,500,000	640	1,536,000	660	1,980,000	660	7,879,200	
1.01.01. 19	Program Peningkatan akses dan kualitas pendidikan luar biasa			Prosentase	3	81,000	11	322,000	16	484,000	27	808,000	43	1,296,000	100	2,991,000	DisDik
		Jumlah sekolah SLB	1	jumlah SDLB/ tahun	1	81,000	2	162,000	2	324,000	2	648,000	2	1,296,000	2	2,511,000	
		Jumlah kekhususan layanan	4	Jumlah kekhususan/ tahun	0		1	160,000	1	160,000	1	160,000	0		7	480,000	
		jumlah tenaga pendidik SLB	10	Jumlah tenaga pendidik/ tahun	1		1		2		2		2		18	0	
1.01.01. 20	Program Peningkatan Mutu tenaga pendidik dan kependidikan			Prosentase	20	4,804,200	21	4,970,600	19	4,656,200	20	4,803,800	20	4,894,900	100	24,129,700	DisDik
		jumlah Kelompok guru	64	Jumlah kelompok guru/ tahun	72	792,000	72	792,000	72	792,000	72	792,000	72	792,000	72	3,960,000	
	- Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Jumlah tenaga pendidik (guru) yang telah bersertifikat pendidik	586	jumlah kegiatan/ orang /th	1 keg./200	31,400	1 keg./ 210	31,400	1 keg./ 320	61,400	1 keg./ 360	75,600	1 keg./ 430	96,300	1 keg./ 2106	296,100	
	- Peningkatan kualifikasi pendidikan guru ke jenjang S1	Jumlah tenaga pendidik (guru) yang telah berkualifikasi pendidikan S1	2004	org/kegiatan/th	300	900,000	300	900,000	150	450,000	150	450,000	126	378,000	3030	3,078,000	
	- Pemberdayaan Guru Komite Sekolah****	Jumlah guru komite	950	org/kegiatan/th	1200	2,880,000	1240	2,976,000	1240	2,976,000	1260	3,024,000	1280	3,072,000	1280	14,928,000	
		Jumlah Kepala sekolah yang berkualifikasi S1 dan bersertifikat pendidik	145		4	70,400	6	105,600	10	176,000	12	211,200	17	299,200	194	862,400	
		Jumlah sekolah yang terakreditasi	76		12	60,000	16	60,000	20	60,000	30	75,000	40	81,400	194	336,400	
		Jumlah pengawas yang berkualifikasi S2 dan bersertifikAT Pendidik	4		4	70,400	6	105,600	8	140,800	10	176,000	10	176,000	42	668,800	
1.01.01. 22	Program Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pendidikan (Program manajemen pelayanan pendidikan)	jumlah lembaga penyelenggara pendidikan		Prosentase												DisDik	
		jumlah lembaga penyelenggara pendidikan	4 UPT, 151 SD/MI, 31 SMP, 12	paket/ tahun	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	5	25,000,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			Target
1.20.01. 23	Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat membangun pendidikan - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pendidikan (Pelaksanaan Pesantren Ramadhan)			Presentase												0	Kesra
		jumlah sekolah yang melaksanakan pesantren Ramadhan	151 SD/MI, 31 SMP, 12 SMA dan 4 SMK	jumlah sekolah/ tahun	193	193,000	195	195,000	195	292,500	195	292,500	198	297,000	198	1,270,000	
1.01.01. 24	Peningkatan Kepastian/keterjaminan memperoleh layanan Pendidikan Menengah - Pemberian beasiswa kepada keluarga miskin untuk jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA			Presentase													DisDik
		jumlah siswa penerima bantuan beasiswa	2800	Orang/th	2600	1,248,000	2400	1,152,000	2243	1,076,640	2000	960,000	1800	864,000		5,300,640	
1 02	KESEHATAN																
1.02.01. 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	75	Persentase (%)	80	1,200,000	85	1,320,000	90	1,452,000	100	1,597,200	100	1,756,920	100	7,326,120	DinKes
'1.02.01. 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	100% penduduk miskin mendapatkan pelayanan kesehatan	50%	Persentase (%)	60	26,106,812	70	26,890,016	80	27,696,716	90	28,527,618	100%	29,383,446	0	138,604,608	DinKes
		Jumlah unit kerja mendapat sertifikat ISO 9001:2008	0	unit	2		3		3		3		3		3		DinKes
		Persentase puskesmas rawatan yang mampu PONED 100%		Persentase (%)	10		10		10		10		10		10		DinKes
'1.02.01. 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	menurunnya resiko / efek samping penggunaan bahan kimia berbahaya	0	kasus/ sampel	50	45,000	40	49,500	30	54,450	20	59,895	20	65,885	20	274,730	DinKes
'1.02.01. 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	64	Persentase (%)	70	839,000	75	922,900	80	1,015,190	85	1,116,709	85	1,228,380	85	5,122,179	DinKes
'1.02.01. 21	Program Penyehatan Lingkungan (Program Pengembangan Lingkungan Sehat)	Peningkatan sanitasi dasar masyarakat	25.04%	Persentase (%)	75	155,489	79	42,659	81	53,323	83	66,654	85	83,318	85	401,442	DinKes
1.02.01. 33	Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak					605,402		623,564		642,271		661,539		681,385		3,214,161	DinKes
		menurunnya angka kematian ibu (AKI) / 100.000 KH	174		111		193,8		102		102		102		102		DinKes
		menurunnya angka kematian Balita (AKABA) / 1000 KH	19		25		21		32		32		32		32		DinKes
'1.02.01. 34	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	% angka keberhasilan pengobatan TB (succes Rate)	35%	Persentase (%)	85	1,649,909	85	1,699,406	85	1,750,388	85	1,802,900	85	1,856,987	85	8,759,591	DinKes
		% angka kesembuhan TB	95%		45		50		60		70		80		80		DinKes
		Jumlah kasus TB per 100.000 Pddk	80	Persentase (%)	30		35		40		45		50		50		DinKes
		Prevelensi HIV/AIDS pada populasi dewasa		Persentase (%)	0.2		0.2		0.2		0.2		<0.5		<0.5		DinKes
		% angka kesakitan diare	53.60%	Persentase (%)	90		90		95		100		100		100		DinKes
		% angka kesakitan pneumonia pada balita	30.60%	Persentase (%)	50		60		70		80		90		90		DinKes

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
					(2011)		(2012)		(2013)		(2014)		(2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
		Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 Pddk	90.9	Persentase (%)	85		90		90		93		93		93		DinKes
		angka kesakitan malaria per 1.000 pddk	181.7	Persentase (%)	182		183		183		184		186		186		DinKes
		Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	80	Persentase (%)	85		90		95		95		95		95		DinKes
		Persentase Jorong terkena kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani <24 jam	100	Persentase (%)	100		100		100		100		100		100		DinKes
		Persentase puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan PTM (SE, deteksi dini, KIE dan tata laksana)	25	Persentase (%)	33		50		62		71		79		79		DinKes
		Persentase terlaksananya penanggulangan faktor resiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra	75	Persentase (%)	80		85		90		95		100		100		DinKes
'1.02.01.	35	Program Pengelolaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	52%	Persentase (%)	55	484,334	60	1,267,915	65	1,548,972	70	1,720,543	72	1,772,879	72	6,794,642	DinKes
		Persentase rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)															
		Persentase posyandu mandiri	40%	Persentase (%)	40		45		50		55		60		60		
'1.02.01.	36	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	100	Persentase (%)	100	7,459,000	100	7,831,950	100	8,223,548	100	8,634,725	100	9,066,461	100	41,215,683	DinKes
		Persentase ketersediaan data profil kesehatan															
		Pengembangan, peningkatan pemantapan pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan	4	unit	12		12		12		14		15		15		DinKes
		Pembinaan Administrasi Kepegawaian		Persentase (%)	70		75		80		85		90		90		DinKes
		Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan		Persentase (%)	70		80		90		100		100		100		DinKes
		Tersusunnya keuangan sesuai dengan prosedur Sistem Akuntansi Keuangan (SAI)		Persentase (%)	80		85		90		100		100		100		DinKes
		Persentase pengelolaan barang milik daerah (BMD) setiap tahun anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku		Persentase (%)	80		85		90		100		100		100		DinKes
		Persentase pengelolaan pembayaran gaji PNS tepat waktu, jumlah dan sasaran	100	Persentase (%)	100		100		100		100		100		100		DinKes
1.02.01.	37	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan				400,000		420,000		441,000		463,050		486,203		2,210,253	DinKes
		Persentase tenaga kesehatan yang profesional dan memenuhi standar kompetensi		Persentase (%)	60		65		70		75		80		80		DinKes
		Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM kesehatan sesuai standar	40%	Persentase (%)	60		65		70		75		80		80		DinKes

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	RSUD																
1.02.02. 19	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Promosi kesehatan melalui penyuluhan															RSUD
		Jumlah Leaflet	1000	Lembar	200	7,500	200	7,500	200	7,500	200	7,500	200	7,500	200	7,500	RSUD
		Sosialisasi	24	kali	2	250	2	250	2	250	2	250	2	250	2	250	RSUD
1.02.02. 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Usulan perencanaan kebutuhan alat-alat medis dan penunjang medis		%	10%	1,000,000	10%	1,000,000	10%	1,000,000	10%	1,000,000	10%	1,000,000	10%	1,000,000	RSUD
		Usulan kebutuhan bahan habis pakai, obat dan reagen		%	10%	1,000,000	10%	1,000,000	10%	1,000,000	10%	1,000,000	10%	1,000,000	10%	1,000,000	RSUD
		Penambahan kelengkapan RS		%	10%	150,000	10%	150,000	10%	150,000	10%	150,000	10%	0	10%	0	RSUD
		Penambahan kelengkapan fisik RS		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Pengembangan ruang PONEK		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Pengembangan ruang rawat inap(VVIP, VIP.		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Pengembangan ruang poliklinik		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Pengembangan ruang isolasi		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Pengembangan ruang radiologi dan laboratorium		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Pengembangan ruang penunjang medik		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Pengembangan ruang administrasi rekam medik		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Rehabilitasi bangunan RS		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Pengembangan instalasi limbah		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Pengadaan ambulance & mobil jenazah		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Pengembangan ruang ICU,OK & UGD		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Pengembangan dan pengelolaan UTDRS		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Pengembangan type RS/akreditasi RS		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Pengembangan SIM RS		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Pengembangan instalasi gizi RS		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Pembangunan kamar mayat		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Pengembangan ruang farmasi		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
1.02.02. 27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Pemeliharaan rutin/berkala RS		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap RS		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Pemeliharaan rutin/berkala ruang IGD		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU,ICCU,NICU		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Pemeliharaan rutin/berkala ruang OK		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Pemeliharaan rutin/berkala ruang isolasi	0%	%	0%		0%		0%		0%		0%		0%		RSUD
		Pemeliharaan rutin/berkala ruang terapi		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Pemeliharaan rutin/berkala ruang inkubator		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Pemeliharaan rutin/berkala ruang bayi		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Pemeliharaan rutin/berkala ruang roentgen		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
		Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium RS		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Pemeliharaan rutin/berkala ruang kamar jenazah	0%	%	0%		0%		0%		0%		0%		0%		RSUD
		Pemeliharaan rutin/berkala ruang instalasi pengolahan limbah RS	0%	%	0%		0%		0%		0%		0%		0%		RSUD
		Pemeliharaan rutin/berkala ruang alkes RS		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Pemeliharaan rutin/berkala ruang ambulance dan mobil jenazah		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Pemeliharaan rutin/berkala ruang mobiler RS		%	100%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Pemeliharaan rutin/berkala ruang perlengkapan RS		%	100%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
1.02.02.	28	Prgram kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Tingkatan layanan Rujukan RSUD	120 orang	100%		100%		100%		100%		100%		100%		RSUD
			Jumlah rujukan	100 orang	100%		100%		100%		100%		100%		100%		RSUD
			Ambulan	2 unit													RSUD
1.02.02.	38	Program Peningkatan Mutu pelayanan	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
'1.02.02.	39	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.	Merevisi Standar Operasional Prosedur(SOP)	%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
			Merevisi Standar Asuhan Keperawatan(SAK) masing- masing ruangan berdasarkan 10 penyakit terbanyak	%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
			Bimbingan persiapan dan penilaian survey Akreditasi	%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
			Pengembangan, peningkatan, pemantapan pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan	%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
			Perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan	%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
			Pembinaan Administrasi Kepegawaian	%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
			Pembinaan Pengelolaan Administrasi keuangan dan perlengkapan	%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
1.02.02.	40	Program Pengendalian dan Pengawasan	Rapat koordinasi Struktural	%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
			Rapat koordinasi berkala	%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
			Rapat Komite medik	%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
			Rapat Komite Keperawatan	%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1.02.02. U	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Pemenuhan SDM Rumah sakit		%	10%		15%		25%		45%		75%		100%		RSUD
		Pengusulan peningkatan pendidikan		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Kerjasama dengan fakultas kedokteran melalui rumah sakit jejaring		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Pendidikan teknis tenaga kesehatan		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD
		Diklat admistrasi dan manajemen perkantoran		%	10%		10%		10%		10%		10%		10%		RSUD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1 03	PEKERJAAN UMUM																
1.03.02 24	Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian	54.86	%	60.37	8,960,000	64.5	7,650,000	71.92	9,200,000	78.25	9,450,000	84.06	10,550,000	84.06	45,810,000	Dinas PU
		Luas Sawah Irigasi	5782	Ha	700	7,000,000	650	6,500,000	800	8,000,000	850	8,500,000	950	9,500,000	9732	39,500,000	
		Penanganan Sedimentasi	0	DI	5	250,000	6	300,000	10	500,000	5	250,000	4	200,000	30	1,500,000	
		Master Plan Daerah Irigasi	0	Dokumen	1	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	500,000	
		DED Embung	5	Dokumen	2	200,000	1	100,000	2	200,000	2	200,000	1	100,000	13	800,000	
		DED Daerah Irigasi	0	Dokumen	15	750,000	15	750,000	10	500,000	10	500,000	15	750,000	65	3,250,000	
		Inventarisasi Daerah Irigasi	0	Dokumen	1	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	250,000	
		Perda Jaringan Irigasi	0	Dokumen	1	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10,000	
1.03.02 26	Program pengembangan pengelolaan, dan konservasi sungai dan sumberdaya air lainnya.	Terpeliharanya Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya	52.76	%	55.2	5,260,000	60.44	4,000,000	66.36	4,500,000	70.77	4,600,000	73.92	4,500,000	73.92	22,860,000	Dinas PU
		Penanganan Abrasi Sungai	6	Lokasi	10	3,000,000	5	1,500,000	5	1,500,000	7	2,100,000	5	1,500,000	38	9,600,000	
		Luas Wilayah Banjir	39	Km ²	2	1,000,000	4	2,000,000	5	2,500,000	4	2,000,000	5	2,500,000	59	10,000,000	
		Master Plan Sungai	0	Dokumen	1	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	500,000	
		DED Sungai	0	Dokumen	5	500,000	5	500,000	5	500,000	5	500,000	5	500,000	25	2,500,000	
		Inventarisasi Sungai	0	Dokumen	1	250,000									1	250,000	
		Perda Sungai	0	Dokumen	1	10,000									1	10,000	
1.20.01 26		Meningkatnya konservasi SDA			5%	120,000	5%	120,000	5%	120,000	5%	120,000	5%	120,000	25%	600,000	Setda - Bag. Adm Ekbang
		Rapat Koordinasi SDA	10	Kali	10	50,000	10	50,000	10	50,000	10	50,000	10	50,000	50	250,000	
		Pengendalian SDA	12	Kali	12	70,000	12	70,000	12	70,000	12	70,000	12	70,000	60	350,000	
1.06.01 27	Program Peningkatan kinerja air minum, air limbah	Cakupan pelayanan air minum dan air limbah	20	%	0	0	30	150,000	50	250,000	80	200,000	80	0	80	600,000	Bappeda
1.03.02	Air Minum	- Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	38	persen	4	11,290,000	10	28,230,000	5	14,116,000	13	36,701,000	6	16,900,000	76	107,237,000	Dinas PU
	Air Limbah	- Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai. - Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/kota	47	persen	5	2,275,000	6	2,275,000	5	2,325,000	4	4,025,000	5	4,025,000	72	14,925,000	
	Persampahan	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah	1.08	%	0.45	300,000	0.05	Hibah	2.09	129,000	8.45	2,050,000	4.5	1,410,000		3,889,000	
		Tersedianya sistem Penanganan sampah	0.65	%	0.5		0	0	1	75,000	1	300,000	0	0		375,000	
1.06.01 32	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	cakupan pelayanan persampahan	20	%	25	50,000	30	50,000	40	75,000	50	110,000	60	125,000	60	410,000	Bappeda
1.03.02 33	Program Penataan Ruang Terbuka Hijau Dharmasraya sebagai daerah yang elok dan indah	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	0	Kegiatan/th	1	200,000	1	230,000	1	195,000	1	1,000,000	2	2,000,000		3,625,000	Dinas PU
	Pembangunan RTH di pusat ibukota kabupaten Dharmasraya		0	aktivitas/thn									5	1,000,000		1,000,000	
	Penataan bangunan (IMB)		0	aktivitas/t												0	
	Penataan kawasan perbatasan dengan rest area		0	aktivitas/thn												0	
1.06.01 33	Program Pengelolaan terpadu sumber daya air	Ketersediaan Air Baku untuk Kebutuhan Pokok Sehari-hari	30	%	45	50,000	50	150,000	52	150,000	60	200,000	75	200,000	75	750,000	Bappeda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1 04	PERUMAHAN RAKYAT																
1.03.02 22	Program Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan pemukiman	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	10	Persen	7	10,500,000	8	13,600,000	15	28,500,000	10	19,000,000	10	21,000,000	50	92,600,000	Dinas PU
1.06.01		Cakupan Rumah Layak Huni	15	%	20	50,000	45	200,000	55	300,000	65	400,000	75	500,000	75	1,450,000	Bappeda
		Kawasan Permukiman Kumuh yang terfasilitasi untuk diperbaiki per tahun	0	Ha	2	100,000	3	150,000	5	200,000	5	200,000	5	300,000	20	950,000	
1 05	PENATAAN RUANG																
1.06.01 15	Program Perencanaan Tata Ruang	Tingkat Kelengkapan Perencanaan Tata Ruang Daerah	10	Persentase	30%	1,000,000	40%	1,150,000	50%	1,050,000	70%	1,050,000	90%	1,100,000	90	5,350,000	Bappeda
		Tersedianya Dokumen dan Perda RTRW Melalui Peta Digital dan Peta Analog	0	Perda RTRW	1 Dokumen Materi Teknis	800,000	1 Perda RTRW	200,000	-	-	-	-	-	-	1 Perda RTRW dan Lampiran	1,000,000	
		Tersedianya Informasi Mengenai Detail dan Rencana Rinci Kabupaten Melalui Peta Analog dan Peta Digital	0	%	-	0	6.67	750,000	13.33	800,000	13.33	800,000	13.33	800,000	46.67	3,150,000	
		Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.	0	Kali	2	200,000	2	200,000	3	250,000	3	250,000	3	300,000	13	1,200,000	
1.06.01 16	Program Pemanfaatan Ruang	Tingkat Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Sebagai Acuan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Antar Sektor dan Antar Pusat-pusat Pelayanan Kawasan	0	%					20	100,000	20	200,000	20	200,000	60	500,000	Bappeda
		Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	0	%					20	100,000	20	200,000	20	200,000	60	500,000	
1.06.01 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tingkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sebagai Acuan Menimalisir Alih Fungsi Lahan Yang Tidak Sesuai Dengan Peruntukan	0	%					100.00	100,000	100	100,000	100	100,000	100	300,000	Bappeda
		Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja.	0	%					100.00	100,000	100	100,000	100	100,000	100	300,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1 06	PERENCANAAN PEMBANGUNAN																
1.06.01 15	Program Pengembangan Data/ Informasi	Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan dan data profil daerah															Bappeda
		tersedianya data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan	50	%	10%	0	10%	0	10%	0	10%	0	10%	0		0	
		tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana	20	%	10%	0	10%	0	20%	0	20%	0	20%	0		0	
		tersedianya data/ informasi perencanaan pembangunan ekonomi	50	%	10%	0	10%	0	10%	0	10%	0	10%	0		0	
		tersedianya data profil daerah	0	dokumen	10%	0	10%	0	10%	0	10%	0	10%	0		0	
1.06.01 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen perencanaan daerah yang handal	50.00	%	60	0	75	0	100	0	100	0	100	0		0	Bappeda
		RPJPD yang ditetapkan dengan Perda	1	dok	0	0	1	250,000		0		0		0		0	
		RPJMD yang ditetapkan dengan Perda	1	dok	1	250,000	1	0	1	0	1	0	1	0		0	
		RKPD yang ditetapkan dengan Perbup	1	dok	1	250,000	1	250,000	1	250,000	1	250,000	1	250,000		0	
		Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1	dok	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000		0	
1.06.01 22	Program Pembangunan Pembangunan Ekonomi	Kebijakan Pembangunan bidang ekonomi	-		1	50,000	1	75,000	1	90,000	3	100,000	1	140,000	8	455,000	Bappeda
		Penyusunan Database Potensi Ekonomi	1	paket		0		0		0		0		0		0	
		Penyusunan Komoditi Unggulan	1	paket		0		0		0		0		0		0	
		Penyusunan Indikator pembangunan ekonomi	3	paket		0		0		0		0		0		0	
		Masterplan Pengembangan Ekonomi	1	paket		0		0		0		0		0		0	
1.06.01 23	Program Pembangunan Sosial Budaya	Penurunan Tingkat Kemiskinan	10.56	Persentase (%)	10.51%	9,182,008	10.23%	15,000,000	9.95%	25,000,000	9.69%	35,000,000	9.44%	65,000,000	9.44%	65,000,000	Bappeda
		Penurunan Jumlah Wilayah/Nagari Tertinggal	32	Nagari	32	27,412,986	32	45,000,000	25	45,000,000	15	45,000,000	7	45,000,000	7	45,000,000	
		Percepatan Pencapaian 48 Indikator Milenium Development Goals (MDGs)	12 indikator tercapai	Indikator tercapai	16	9,182,008	25	25,000,000	30	25,000,000	35	25,000,000	48	25,000,000	48	25,000,000	
		Peningkatan Indeks Pembangunan Masnusi (IPM)	69.13		71	9,182,008	72	25,000,000	73	25,000,000	75	25,000,000	75	25,000,000	75	25,000,000	
1.20.01 26	Program Perencanaan Partisipatif	Terlaksananya kegiatan pola partisipatif ke kelompok masyarakat			250	450,000	250	400,000	300	250,000	300	300,000	300	300,000	1,400	1,700,000	Setda - Bag. Adm Ekbang
		Stimulan	125	Kelompok	250	450,000	250	400,000	300	250,000	300	300,000	300	300,000	1,400	1,700,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			Target
1 07	PERHUBUNGAN																
1.07.02 15	Program Pembangunan prasarana dan Fasilitas perhubungan	- Sosialisasi kebijakan dibidang perhubungan -Terminal Angkutan Darat - Pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyebrangan - kendaraan angkutan daerah tertinggal - terminal angkutan barang -Parkir terpadu		kecamatan Lokasi Lokasi Unit/Th Unit/Th Unit/Th	5 1 0 0 2	100,000 1,200,000 1,200,000 0 200,000	5 1 5 1 3	100,000 100,000 1,200,000 1,200,000 300,000	5 1 1 2	100,000 100,000 100,000 200,000	5 1 1 2	100,000 100,000 100,000 200,000	5 1 1 2	100,000 100,000 100,000 200,000			DISHUB
1.07.02 16	Program Rehabilitasi, Pemeliharaan, Dan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	optimalisasi pelayanan lalu lintas - Rambu-rambu di Jalan Kabupaten - POS TPR - terminal Barang		unit 2 unit 2 Unit	50 2 2	200,000 2 2	50 2 2	200,000 2 2	50 2 2	200,000 2 2	50 2 2	200,000 2 2	50 2 2	200,000 2 2			DISHUB
1.07.02 17	Peningkatan pelayanan angkutan	-penyuluhan sopir angkutan -Pengendalian disiplin Pengoperasian angkutan umum di jalan raya -Sosialisasi Penyuluhan Ketertiban lalu lintas dan angkutan di jalan raya -Pemilihan sopir/juru mudi awak angkutan umum teladan		0 Orang 2 kecamatan 0 Orang 0 Orang	0 5 40 0	30 150,000 150,000	30 5 60 0	150,000 150,000 150,000	30 5 100 0	150,000 150,000 150,000	20 10 100 3	150,000 150,000 150,000	20 10 100 3	150,000 150,000 150,000			DISHUB
1.07.02 18	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	- Dermaga DED SISI darat DED SISI udara AMDAL bandar udara		Unit Jenis Dokumen Jenis Dokumen Jenis Dokumen							1 1 1						DISHUB
1.07.02 19	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Terkendalinya keamanan Lalu Lintas -rambu-rambu - marka - pagar pengaman jalan - APILL(Traffic light) - terpelihara rambu-rambu lalu lintas dan traffic light - alat pengujian bermotor/PKB -inspeksi dan audit keselamatan transportasi lalu lintas dan angkutan		Unit KM KM Unit Paket Paket Ruas/Rute	50 0 5 1 2 10	500,000 5 5 5 2 10	50 5 5 5 2 10	500,000 5 5 5 2 10	50 5 5 1 2 10	50 5 5 1 2 10	0 5 5 1 2 10	1,200,000 5 5 1 2 10	1,200,000 5 5 1 2 10			DISHUB	
1.07.02 20	Peningkatan kelaikan pengoperasian Kendaraan bermotor	-Kantor PKB -Sistem informasi manajemen PKB		unit paket					1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1			DISHUB
1.07.02 U	Program Peningkatan Sumberdaya Manusia di Bidang Perhubungan	pelatihan Pegawai Dishubkominfo		Orang	0	100,000	40	100,000	40	100,000	40	100,000	40	100,000			DISHUB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			Target
1 08	LINGKUNGAN HIDUP																
1.08.01 15	Program Pengembangan Kinerja Persampahan	Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli Sampah	0	Kelompok	0	0	0	0	1	8,947	4	35,788	6	53,682	11	98,417	BLH
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Persampahan	0	Kecamatan	1	50,500	1	655,000	2	849,089	3	849,089	1	100,000	8	2,503,679	
		Cakupan Operasional Pengolahan Persampahan	0	Kecamatan							1	300,000	1	300,000	2	600,000	
		Cakupan Pelayanan Persampahan				0		0		0		0		0		0	PU
1.08.01 26	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup		5		1,070,586	0		0		0		0		5	1,070,586	BLH	
		Cakupan Perusahaan yang telah memiliki sistem pengolahan limbah	4	Perusahaan	4	31,655	6	38,815	6	33,533	7	70,000	8	90,000	31	264,003	
		Cakupan Perusahaan yang melakukan pengelolaan pengendalian pencemaran udara	4	Perusahaan	4		6	0	6		7		8		31		
		Cakupan kegiatan dan/atau usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3	0	Kecamatan					2	11,558	2	25,000	3	30,000	7	66,558	
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Laboratorium untuk peningkatan kualitas lingkungan	3	unit	1	905,500	1	300,000	2	177,000	1	100,000	1	100,000	6	1,582,500	
		Cakupan kegiatan/usaha yang memiliki izin lingkungan	0	Usaha	11	18,725	18	12,725	25	5,845	30	20,000	35	30,000	119	87,295	
		Cakupan regulasi daerah bidang lingkungan hidup	0	PERDA, PERBUP					1	7,680	2	50,000	2	60,000	5	117,680	
		Cakupan pemahaman stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup	0	persentase					30%	25,185	30%	50,000	40%	80,000	100%	155,185	
		Penetapan kelas air sungai	0	sungai							1	50,000	2	80,000	3	130,000	
		Cakupan sarana pengolahan limbah B3 rumah sakit	0	unit							1	1,000,000			1	1,000,000	
1.08.01 27	Program Perlindungan dan Konservasi SDA	cakupan pemulihan daerah tangkapan	0	kecamatan							1	200,000	1	200,000	2	400,000	BLH
		Cakupan pemulihan daerah berfungsi lindung (waduk, situ, rawa)	0	kecamatan							1	150,000	1	150,000	2	300,000	
1.08.01 28	Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Cakupan data dan informasi kualitas lingkungan dan sumber daya alam	1	dokumen	1	0	2	13,100	4	101,935	4	200,000	4	250,000	15	565,035	BLH
1.08.01 29	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Cakupan kualitas emisi sumber tidak bergerak kegiatan dan atau usaha	0	perusahaan							7	49,000	9	63,000	16	112,000	BLH
1.08.01 30	Program Penataan Lingkungan Hidup																BLH
		Cakupan sekolah yang berwawasan lingkungan	0	Sekolah	3	16,263	3	23,368	3	26,700	3	40,000	3	60,000	15	166,330	
		Cakupan penataan kota untuk pencapaian adipura	0	kecamatan			1	6,368	1	34,640	1	50,000	1	70,000	1	161,008	
		Sinkronisasi pengelolaan DAS Batang Hari	0	kecamatan			0	0	1	16,887	1	60,000	1	90,000	1	166,887	
		Cakupan sosialisasi program dan kegiatan lingkungan hidup	0	kecamatan			0	0	1	13,371	1	70,000	1	90,000	3	173,371	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1 09	PERTANAHAN																
1.20.1 17	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Terfasilitasinya penyelesaian konflik-konflik pertanahan		kasus/tahun	5	19,774	5	14,211	5	9,826	5	10,000	1	10,000	21	63,810	Setda - Tapem
1 10	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL																
1.10.1 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	40.31		61.2	590,000	67.56	648,000	77.17	737,000	83.81	845,000	90	1,639,400	90	4,459,400	Dukcapil
		Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	38 %		72	71,000	79	79,000	88	89,000	96	97,000	100	810,000	100%	1,146,000	
		Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	80 %		87.5	256,000	90	264,000	93	274,000	96	284,000	100	296,000	100%	1,374,000	
		Penerbitan Akte Kelahiran	37 %		66.6	218,000	70	230,000	77.7	254,000	87	284,000	90	293,400	90%	1,279,400	
		Akte Kematian	6.25 %		18.7	45,000	31.25	75,000	50	120,000	56.25	180,000	70	240,000	70%	660,000	
1 11	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
1.22.02 16	Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan	Terbentuknya Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan	1	organisasi	1	20,000		0		0		0		0		0	BPML2NPPKB
1.22.02 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan	Pendampingan korban KDRT		Kasus	5	50,000	5	50,000	10	80,000	15	100,000	20	125,000		0	BPML2NPPKB
1.22.02 18	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase keikutsertaan gender dalam pembangunan			80%	150,000	80%	150,000	80%	650,000	80%	650,000	80%	650,000		0	BPML2NPPKB
		Kelompok organisasi Perempuan	8	Organisasi	8		8		8		8		8			0	
		Kelompok organisasi Perempuan terbina		Organisasi	5		5		8		8		8			0	
		Perempuan berwirausaha yang terampil/dibina		Orang	5		5		25		30		40			0	
		Kelompok usaha perempuan terbina		Kelompok Usaha	5		5		25		30		40			0	
1.22.02 20	Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	persentase kebijakan pembangunan berbasis gender	0	persen	100	100,000	100	100,000	100	100,000	100	100,000	100	100,000		0	BPML2NPPKB
		Nota kesepahaman perlindungan perempuan dan anak	1	dokumen	1	40,000	1	40,000	1	40,000	1	40,000	1	40,000		0	
		Penyusunan buku profil gender dan anak	1	buku	1	60,000	1	60,000	1	60,000	1	60,000	1	60,000		0	
						0		0		0		0		0		0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)						
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)					
1 12	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA																		
1.22.02	Program Keluarga Berencana	Pengelola program KB, Kader KB poktan dan IMP lainnya	451	Kader (Orang)	451	520,000	451	625,057	312	735,000	312	850,000	312	850,000			0	BPML2NPPKB	
1.22.02	Program Advokasi KIE dan Pelayanan KB	Persentase penyuluh KB lapangan	10	persen	22	263,318	61	246,177	71	340,000	81	434,800	100	534,000			0	BPML2NPPKB	
		Pasangan Usia Subur		Pasanga	36702	263,318	32408	246,177	37741	340,000	45000	434,800	#####	534,000			0	BPML2NPPKB	
		Peserta KB Aktif		Orang	31968		32588		340000		40678		450000						BPML2NPPKB
		Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB		Orang	140		140		165		225		250						BPML2NPPKB
		PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	100	Orang	234		654		765		867		1075						BPML2NPPKB
		PLKB/PKB 1 orang petugas di setiap 2 (dua) nagari	1	Orang	6		10		15		20		26		26				BPML2NPPKB
		Pembantu pembina Keluarga Berencana desa/Nagari (PPKBD) 1 petugas di setiap Nagari/desa	2	Orang					312		312		312						BPML2NPPKB
1.22.02	Program Pengadaan Alat Kontrasepsi	Persentase jumlah peserta KB	100	persen	100	17,000	100	25,000	100	50,000	100	65,000		0				BPML2NPPKB	
		Peserta KB baru	20	Akseptor	30	17,000	45	25,000	50	50,000	65	65,000	75	70,000				BPML2NPPKB	
		Peserta KB Aktif	20	Akseptor	30	0	30	0	50	0	65	0	75	0					
1.22.02	Program Temu Kreatif Remaja Saka Kencana	Kelompok Remaja Saka Kencana Terbina	8	Kelompok	8	48,000	8	38,000	15	64,000	20	80,000	25	120,000				BPML2NPPKB	
1.22.02	Program Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Remaja paham kesehatan reproduksi remaja	80	orang	80	30,000	110	34,700	150	56,000	200	80,000	25	150,000				BPML2NPPKB	
1.22.02	Program Orientasi Kader BKB	Kader BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), BLK (Bina Lingkungan Keluarga) terbina	28	Kelompok	28	30,000	28	35,000	28	41,000	32	53,000	40	80,000				BPML2NPPKB	
1.22.02	Program Pembentukan dan pembinaan kelompok UPPKS	Kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), kesejahteraan kelompok UPPKS Pra dan KS1	4	Kelompok	4	15,000	4	25,000	11	42,000	22	65,000	52	120,000				BPML2NPPKB	
1.22.02	Program Pengadaan buku / modul KIE KIT	Buku / Modul untuk pengetahuan kader dan keluarga tentang program BKB, BKR, BKL dan BLK	0	Modul/Alat Peraga	0	0	5	20,000	33	300,000	40	320,000	60	350,000				BPML2NPPKB	
1.22.02	Program Penyediaan Informasi Data Mikro	Sosialisasi/penyuluhan luar ruang	0	Penyuluhan	22	0	25	4,000	40	8,000	45	12,000	52	20,000				BPML2NPPKB	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
					(2011)		(2012)		(2013)		(2014)		(2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1 13	SOSIAL																
1.13.02. 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Tertangani	8 %		16	320,000	26	521,000	31	428,000	41	456,550	46	489,285			Sosnakertrans
		Jumlah Fakir Miskin	550 KK		800	55,000	1050	225,000	1300	110,000	1550	115,000	1750	120,000			
		Jumlah Anak Keluarga Miskin	40 Org		40	15,000	40	21,000	40	22,500	40	25,000	40	27,500			
		Jumlah Tenaga PSM dan TKSK	52 Org		56	125,000	63	140,000	63	150,000	63	160,000	63	173,580			
		Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang Dilatih	50 KK		50	50,000	50	55,000	50	60,500	50	66,550	50	73,205			
		Jumlah Fakir Miskin yang Menerima Sarana dan Prasarana	10 KK		10	75,000	10	80,000	10	85,000	10	90,000	10	95,000			
1.13.02. 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	75		78	365,000	80.00	365,000	83	477,500	85	575,000	90	542,500			Sosnakertrans
		Jumlah Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	30 Org		30	20,000	30	25,000	30	35,000	30	40,000	30	45,000			
		Jumlah Fakir Miskin	11 KK		11	250,000	22	250,000	22	250,000	22	250,000	22	250,000			
		Jumlah Data PMKS dan PSKS	1 Paket		1	50,000		0		0	1	70,000		0			
		Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	36 Org/Kej		40	45,000	45	70,000	50	85,000	55	90,000	60	100,000			
		Jumlah KIE Konseling	5 Kasus		10	0	12	20,000	14	22,500	16	25,000	20	27,500			
		Jumlah Lansia Terlantar/Miskin	20 Org			0		0	20	85,000	25	100,000	30	120,000			
1.13.02. 18	Program Pembinaan para Penyandang cacat dan trauma	Terbina dan terbantunya para penyandang cacat dan trauma	0 %			0		0	100	85,000	100	100,000	100	120,000			Sosnakertrans
		Jumlah orang dengan kecacatan berat	20 Org			0		0	20	85,000	25	100,000	30	120,000			
1.13.02. 19	Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo	Terlaksananya pembinaan panti				65,000		77,500		80,000		102,500		85,000			Sosnakertrans
		Jumlah Panti Asuhan	4 panti		4	50,000	4	50,000	3	50,000	3	50,000	3	50,000			
		Jumlah pengurus panti	20 org		20	15,000		0	20	30,000		0	20	35,000			
		Jumlah anak panti	40 org			0	40	27,500		0	40	52,500		0			
1.13.02. 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Berdayanya Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan	100 %		100	90,000	100	130,000	100	160,000	100	195,000	100	230,000			Sosnakertrans
		Jumlah Penilaian SDM Kessos	3 paket		4	45,000	4	0	4	0	4	0	4	0			
		Jumlah Orsos	4 orsos		4	50,000	4	55,000	3	60,000	3	70,000	3	80,000			
		Jumlah pengurus orsos	30 Org		33	15,000	35	20,000	37	25,000	40	30,000	45	35,000			
		Jumlah org yang disuluh	100 Org		120	25,000	140	30,000	160	35,000	180	40,000	200	45,000			
		Jumlah Jejaring Kerjasama Orsos	3 Lembaga		4	0	4	25,000	5	40,000	5	55,000	6	70,000			
		Jumlah CVCD Perusahaan	25 perusahaan		25	0	27	0	30	0	32	0	35	0			
						0		0		0		0		0			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			Target
1 14	KETENAGA KERJAAN																
1.13.02. 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Terlaksananya Pengawasan Ketenaga Kerjaan di Perusahaan	25	prsh	35 prsh	775,000	35 prsh	797,500	35 prsh	820,000	35 prsh	842,500	35 prsh	865,000			Sosnakertrans
		Jumlah Perusahaan Terdaftar	35	prsh													
		Jumlah Perusahaan belum Terdaftar (data potensi)	550	prsh													
		Jumlah Tenaga Kerja Terlapor	10.593	org													
		Jumlah Tenaga Kerja belum dilaporkan (data potensi)	45.000	org													
		Jumlah Norma Kerja yg telah dijalankan		kompetensi													
		Jumlah Norma K3		kompetensi													
		Jumlah Objek pengawasan (potensi)	2.500	unit													
		Jumlah pengujian lingk kerja	1	persh													
		Jumlah kasus KK	5	kasus													
1.13.02. 18	Program Pengembangan Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja			--/th	325,000		340,000		355,000		370,000		385,000			Sosnakertrans
		Jumlah Angkatan Kerja	83.339	org													
		Jumlah Pengangguran	5.51	org													
		Jumlah Tenaga Yang Mendapat AK 1	127	org													
		Jumlah Lowongan Kerja terdaftar	14	lowongan													
1.13.02. 19	Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Terciptanya Tenaga Kerja Yang Terdidik dan Terlatih			6 Paket	270,000	8 Paket	360,000	8 Paket	360,000	8 Paket	360,000	8 Paket	360,000			Sosnakertrans
		Angka Kesempatan Kerja															
		Jumlah Lembaga Latihan Swasta	2	org'													
		Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	127	org'													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1 15	KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH																
1.15.01. 01	Program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM	Tingkat Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM														Kopperindag	
		Jumlah Perda / Perbup tentang pembedayaan koperasi dan UMKM	3	dokumen/thn						1	200,000	1	200,000	2	400,000		
		Jumlah pengawas, pengurus dan pengelola koperasi terlatih	0	koperasi UMKM	54,325	30	18,134	60	20,000	60	20,000	60	22,000	210	134,459		
		Jumlah masyarakat dan pelaku UMKM memahami tentang perkoperasian dan kewirausahaan	110	anggota koperasi UMKM						100	45,000	100	45,000	200	90,000		
		Jumlah usaha koperasi dan UMKM yang meningkat	14	koperasi UMKM	20	60	41,424	15	75,000	15	75,000	30	75,000	110	300,000		
		Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berbadan hukum	6	LKM	60	100	70,626	100	87,779	120	45,000	120	65,000	500	309,829		
		Jumlah Pengurus koperasi dan UMKM yang berdaya saing	5	LKM		2	60,000	5	300,000	5	300,000	5	300,000	17	960,000		
1.15.01. 02	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM	Pengurus koperasi dan UMKM yang berdaya saing														Kopperindag	
		Cakupan kualitas manajemen pengelolaan kelembagaan dan usaha koperasi	100	koperasi		36	53,745	40	70,000	50	70,000	80	70,000	206	263,745		
		Jumlah UMKM yang memiliki semangat wirausaha, legalitas usaha dan tertib pembukuan UMKM	80	UMKM	15	22,610	15	75,000	15	41,574	15	50,000	15	60,000	75	249,184	
1.15.01. 03	Program Pengembangan sistem pendukung usaha koperasi dan UMKM	UMKM yang mempunyai jaringan kerjasama														Kopperindag	
		Jumlah UMKM yang mendapatkan perkuatan modal dari BUMN/Swasta/Perbankan	150	UMKM	0	0	120	61,526	60	40,000	50	40,000	50	40,000	280	181,526	
1.15.01. 04	Program peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi dan kelembagaan UMKM lainnya	Tingkat kualitas, kinerja manajemen koperasi dan pengembalian dana bergulir														Kopperindag	
		Jumlah koperasi tidak bisa aktif yang dapat dibubarkan	0	koperasi		0	0	0	15	35,000	15	35,000	15	35,000	45	105,000	
		Jumlah koperasi berkualitas/	30	koperasi	12	59,775	15	52,193	25	90,000	15	100,000	15	100,000	82	401,968	
		Jumlah koperasi yang sehat	30	koperasi	15	50,000	15	50,000	15	50,000	15	50,000	15	50,000	75	250,000	
		Jumlah koperasi yang aktif	12	koperasi	24	16,907	45	23,044	0	0	15	20,000	15	20,000	99	79,951	
		Jumlah anggota koperasi yang memahami perkoperasian	0	koperasi		36	0	40	20,000	50	20,000	80	20,000	206	60,000		
		Cakupan peranan Dekopinda terhadap koperasi	0	koperasi						15	25,000	15	25,000	30	50,000		
		Jumlah koperasi berbasis komoditi, jasa dan usaha warung serba ada (waserda)	0	koperasi						3	15,000	3	15,000	6	30,000		
		Persentase pengembalian pinjaman	0	%		100	44,526	100	45,000	100	45,000	100	65,000	400	199,526		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			Target
1 16	PENANAMAN MODAL																
1.20.12 15	2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi - Penyelenggaraan Promosi dan Investasi - Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Terwujudnya Kemitraan dan sinergi positif antara pemerintahan, Masyarakat dan Dunia Usaha		%	100	50,000	100	60,000	100	70,000	100	80,000	100	100,000		0	BP2MPBJ
			%	100	50,000	100	60,000	100	75,000	100	75,000	100	100,000		0		
1.20.12 16	1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi - Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di daerah - Monitoring, Evaluasi dan					0		0		0		0		0		0	BP2MPBJ
		Paket	1	50,000	1	70,000	1	80,000	1	90,000	1	100,000		0			
		%	100	35,000	100	40,000	100	40,000	100	50,000	100	50,000		0			
1 17	KEBUDAYAAN																
	Program Pengembangan Nilai Budaya																Dishub
	-Aktualisasi adat budaya daerah		kecamatan	11		11		11		11		11					
	- Buku sejarah Dharmasraya		Jenis	0		0		1		1		0					
	-kurikulum muatan lokal sejarah dharmasraya dan aktualisasi ABS-SBK		Unit/Th	0		0		0		1		0					
	-Revitalisasi peran LKAAM, Ninik mamak dan lembaga adat		kecamatan	11		11		11		11		11					
	-Pendataan revitalisasi dan fungsi		kecamatan	11		11		11		11		11					
	-Pembinaan pusat kesenian lokal		Kelompok	5		5		5		5		5					
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya																Dishub
	- Berkembang nya kesenian dan budaya Lokal		Kecamatan	11		11		11		11		11					
	-tersedia pusat kesenian lokal		lokasi	1		1		1		1		1					
	- Sanggar dan kelompok pemerhati seni budaya		Kecamatan	0		1		1		1		1					
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya																Dishub
	-Terpeliharanya kebudayaan daerah		kecamatan	11		11		11		11		11					
	-keikut sertaan masyarakat dalam festival budaya daerah		Kecamatan	11		11		11		11		11					
			Lokasi	0		1		0		1		0					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			Target
1 18	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																
1.01.01. 15	Program Pengembangan & Keserasian kebijakan Pemuda			Prosentase	9	15,000	18	30,000	18	30,000	27	45,000	27	45,000		0	DisDik
	Jumlah kelompok usaha produktif	2	jml. Kelompok usaha	1		2		2		3		3		11	165,000		
			Prosentase	19	915,000	20	915,000	20	965,000	20	965,000	20	965,000		0		
	jumlah pengurus OSIS	1 keg.	jumlah kegiatan/orang /th	1	125,000	1	125,000	1	125,000	1	125,000	1	125,000	1	625,000		
	Jumlah siswa peserta paskibraka	1	jumlah kegiatan/orang /th	1	790,000	1	790,000	1	840,000	1	840,000	1	840,000	1	4,100,000		
1.01.01. 19	Program Pengembangan kebijakan dan manajemen Olahraga			Prosentase													DisDik
	Jumlah cabang olahraga yang dibina	8	cabor/tahun	20	160,000	20	160,000	22	176,000	22	176,000	24	192,000		864,000		
1.01.01. 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			Prosentase		4,950,000		5,170,000		4,840,000		5,060,000		5,940,000			DisDik
	Jumlah lapangan olahraga sekolah	60	Unit/Th	15	1,650,000	15	1,650,000	10	1,100,000	10	1,100,000	12	1,320,000	122	6,820,000		
	Jumlah lapangan olahraga masyarakat	8	Unit/Th	4	440,000	6	660,000	8	880,000	10	1,100,000	12	1,320,000	48	4,400,000		
	Jumlah peralatan olahraga sekolah	80	paket/Th	22	2,420,000	22	2,420,000	22	2,420,000	22	2,420,000	26	2,860,000	194	12,540,000		
	Jumlah peralatan olahraga	8	paket/Th	4	440,000	4	440,000	4	440,000	4	440,000	4	440,000	28	2,200,000		
1.01.01. 22	Program Pembangunan Kepemudaan			Prosentase													DisDik
	jumlah pemuda produktif	4	orang/Th	4	900,000	4	900,000	4	900,000	4	900,000	4	900,000	4	4,500,000		
1.01.01. 23	Program pembangunan olahraga dan kesehatan			Prosentase	#REF!	480,000	15	480,000	23	640,000	23	640,000	23	800,000			DisDik
	jumlah kegiatan olahraga siswa	4	jumlah keg/tahun	4	320,000	4	320,000	6	480,000	6	480,000	6	480,000	6	2,080,000		
	jumlah kegiatan olahraga masyarakat	2	jumlah keg/tahun	2	160,000	2	160,000	2	160,000	2	160,000	4	320,000	4	960,000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1 19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI																
1.19.01. 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Penanganan Masalah Kerukunan Umat Beragama	2	kejadian	4	50,000	8	50,000	12	50,000	16	50,000	20	50,000	1	50,000	Kesbangpol
		Jumlah orang paham tentang Penanganan Masalah Kerukunan	20	orang	40	50,000	80	50,000	120	50,000	160	50,000	200	50,000	240	50,000	
1.19.02.		Persentase Wilayah yang ditangani	0%	%	13%	120,000	29%	240,000	58%	240,000	87%	240,000	100%	240,000	100%	1,080,000	Satpol PP
		Pelatihan personil Linmas	0	Personil	70		150		150		150		520		520		
		Jumlah Personil THL	150	Personil	150		150		200		200		200		200		
		Jumlah Patroli rutin	12	Operasi	24		48		48		48		48		228		
1.19.02. 16	Program Pemeliharaan Kantramtibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah Kasus yang tertangani	6	Kasus	12	45,000	18	45,000	24	45,000	35	45,000	40	45,000	40	225,000	Satpol PP
		Pelatihan Kesamaptaan Personil	0	Personil	50		50		50		50		50		250		
		Jumlah THL	150	Personil	150		150		200		200		200		200		
		Jumlah Personil PNS	27		30		35		40		45		50		60		
		Jumlah Kasus	0	Kasus	15		20		25		35		50		50		
1.19.01. 17	Pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah orang paham tentang wawasan kebangsaan	200	orang	400	60,000	600	60,000	800	60,000	1000	60,000	1200	60,000	1400	60,000	Kesbangpol
		Jumlah kasus Terdeteksinya potensi konflik atau pencegahan dini (KOMINDA)	2	kejadian	4	150,000	6	150,000	8	150,000	10	150,000	12	150,000	14	150,000	
		Jumlah orang paham tentang rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	100	orang	150	60,000	200	60,000	250	60,000	300	60,000	350	60,000	400	60,000	
1.19.01. 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Jumlah kasus pekat yang tertangani	10	orang/tahun	14	60,000	18	60,000	22	60,000	26	150,000	30	60,000	34	60,000	Kesbangpol
		Jumlah orang paham tentang pencegahan penggunaan miras dan narkoba	100	orang	150	60,000	200	60,000	250	60,000	300	60,000	350	60,000	400	60,000	
		Operasional BNK	1	kegiatan	1	80,000	1	80,000	1	80,000	1	80,000	1	80,000	1	80,000	
		Jumlah kasus yang dimediasi dan fasilitasi penanganan masalah aspek politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, ketertiban dan hak azazi manusia	4	kasus	8	60,000	12	60,000	16	60,000	20	60,000	24	60,000	28	60,000	
1.19.02.		Persentase Penyelesaian Kasus Pekat	80%	%	100	160,000	100	160,000	100	170,000	100	180,000	100	200,000		870,000	Satpol PP
		Jumlah Perda yang ditegakkan	7	Perda	10		12		15		18		20				
		Jumlah Operasi Pemberantasan	40	Operasi	48		48		48		48		48		280		
		Jumlah Operasi Penertiban Pegawai	4	Operasi	12		12		12		12		12		64		
		Jumlah Kasus Pekat	9	kasus	12		18		24		30		35		40		
		Jumlah Kasus PSK	6	kasus	8		10		12		14		16		66		
		Jumlah Kasus Pelanggaran Perda	17	kasus	25		30		35		40		50		197		
1.19.01. 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah orang paham berpolitik	100	orang	150	60,000	200	60,000	250	60,000	300	60,000	350	60,000	400	60,000	Kesbangpol
		Jumlah Fasilitasi hubungan penyelenggaraan Pemilu	5	kegiatan	7	60,000	9	60,000	11	60,000	13	150,000	15	60,000	17	60,000	
		Jumlah kasus tertangani dalam mediasi dan fasilitasi hubungan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat	10	kegiatan	14	50,000	18	50,000	22	50,000	26	50,000	30	50,000	34	50,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
		Tingkat akurasi organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat	50%	jumlah organisasi terdata/jumlah organisasi	60%	50,000	70%	50,000	80%	50,000	90%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	
1.19.03. 22	Program Pencegahan dini dan Penanggulangan bencana alam	Persentase Bencana Alam Yang Tertangani	0%		100	11,327,746	100	2,484,746	100	11,478,121	100	17,474,246	100	21,128,121	100	63,892,978	BPBD
		- Jumlah Tenaga SAR	0	Orang	10	146,000	10	803,000	15	246,375	15	1,642,500	15	246,375	65	246,375	
		- Jumlah Tenaga Damkar	27	Orang	0		15		15		15		15		87		
		- Jumlah Damkar	1	Unit	1		1		1		1		1		6		
		- Sosialisasi Kebencanaan	0	Kegiatan	2	100,000	2	100,000	3	150,000	5	250,000	6	300,000	6	0	
		- Fasilitas dan Stimulasi Rehabilitasi Infrastruktur Akibat Bencana Alam	0	Unit	2	10,500,000	2	1,000,000	1	10,500,000	2	15,000,000	3	20,000,000		0	
1.19.03. 23	Program peningkatan mitigasi bencana dan pengelolaan pasca bencana	Cakupan Tersedianya perlengkapan Penanggulangan Bencana	%		100	1,404,000	100	1,935,000	100	2,325,500	100	3,979,500	100	4,357,000	100	14,001,000	BPBD
		Jumlah Posko Siaga Bencana	0	Unit	0	0	0	4	300,000	4	500,000	3	375,000	11			
		Jumlah Damkar	1	Unit	1	750,000	1	1,100,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	2,000,000	6		
		Water Treatmen	0	Unit	0	0	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	4		
		Peralatan Selam	0	set	0	0	0	3	36,000	3	80,000	3	100,000	9			
		Perlengkapan Evakuasi				0			0		0		0	0			
		- Perahu Karet	2	Unit	1	80,000	1	80,000	1	90,000	1	100,000	1	100,000	7		
		- Tenda Pleton	2	Unit	2	60,000	2	60,000	2	70,000	2	70,000	2	70,000	12		
		- Mobil Rescuer	0	Unit	1	400,000	1	400,000	0	0	1	450,000	1	450,000	4		
		- Motor Trail	0	Unit	2	48,000	2	48,000	2	50,000	1	25,000	1	25,000	8		
		- Tandu	1	Unit	1	1,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	10		
		- Tenda Posko	0	Unit			1	50,000	1	50,000	1	55,000	1	60,000	4		
		- Tenda Keluarga	0	Unit			5	50,000	5	50,000	5	50,000	5	50,000	20		
		- Tenda Regu	0	Unit			3	30,000	3	30,000	5	50,000	5	50,000	16		
		- Ambulance lapangan	0	Unit			0	0			1	450,000	1	450,000	2		
		- Mobil Perlengkapan	0	Unit			0	0			1	500,000	1	500,000	2		
		Perlengkapan Komunikasi							0								
		- Radio HT	0	Unit	10	25,000	10	25,000	15	37,500	15	37,500	10	25,000	60		
		- Radio Mobile Station	0	Unit	2	20,000	2	20,000	3	30,000	3	30,000	2	20,000	12		
		- Radio Home Base Station	0	Unit	2	20,000	2	20,000	3	30,000	3	30,000	3	30,000	13		
1.19.02. U	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Kemampuan, Fisik dan Mental Personil Satpol PP	21%	%	36%	90,000	48%	127,800	61%	130,000	77%	161,000	100%	245,000	100%	753,800	Satpol PP
		Jumlah Personil Diksar	10	Personil	4	35,000	2	52,000	4	55,000	5	62,000	5	65,000	30	269,000	
		Jumlah Personil Diklan	5	Personil	5	30,000	4	24,000	4	24,000	4	24,000	8	90,000	30	0	
		Jumlah Personil PPNS	1	Personil	2	25,000	3	51,800	2	51,000	3	75,000	4	90,000	15	292,800	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			Target
1 20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN																
1.20.01 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Tingkat Kapasitas Anggota DPRD		%	100%		100%		100%		100%		100%			DPRD	
		Diklat Yang Diikuti	3	Kali	5.00	848,428	5.00	848,428	6.00	848,428	6.00	0	6.00	1,201,000	1,201,000		
		Perda yang Dibahas	8	Buah	10	1,223,960	10	1,323,960	13	1,423,960	15	1,425,960	16	1,425,960	1,425,960		
		Reses	3	Kali	3	751,545	3	751,545	3.00	751,545	3	815,000	3	815,000	815,000		
		Kunjungan Kerja	12	Kali	24	326,520	24	326,520	36.00	326,520	36	326,520	36	326,520	326,520		
		Staf Ahli Fraksi	0	Orang	7	265,870	7	265,870	7	265,870	7	265,870	5	265,870	265,870		
		Publikasi Pimpinan dan Anggota	1	Paket	1	281,860	1	281,860	1	281,860	1	281,860	1	281,860	281,860		
1.20.01 U	Program Peningkatan SDM Aparatur	Rasio pegawai dengan kompetensi teknis dan mental yang handal (produktif, profesional, dan proporsional serta efektif dan efisien dalam pelayanan publik (Prosentase kompetensi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya)														DPRD	
		Jumlah Pegawai	18	orang	2 kali	40,000	2	40,000	2	40,000	2	50,000	2	50,000			
1.06.01 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan daerah	1	dok		600,000		600,000		600,000		600,000		600,000		Bappeda	
		Tersusunnya rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah															
1.20.03.		Terlaksananya penatausahaan aset daerah	20%	Paket	20%	350,000	20%	350,000	20%	350,000	20%	350,000	20%	350,000	20%	1,750,000	SETDA-Bag Aset
		Sertifikat tanah milik Pemda	10	Persil	10	100,000	10	100,000	10	100,000	10	100,000	10	100,000	50	500,000	
		Inventaris Tanah Pemda	15	Unit	25	20,000	25	20,000	25	20,000	25	20,000	25	20,000	115	100,000	
		Penghapusan Barang SKPD	8	SKPD	8	50,000	8	50,000	8	50,000	7	50,000	7	50,000	38	250,000	
		Data rumah dinas pendidikan , eks trans	30	unit	20	100,000	20	100,000	20	100,000	20	100,000	20	100,000	110	500,000	
		Monitoring Data Barang Inventaris SKPD	20%	SKPD	20%	80,000	20%	80,000	20%	80,000	20%	80,000	20%	80,000	20%	400,000	
1.20.03.		Tersedianya standar belanja bagi aparatur sesuai harga dan kondisi Standar Belanja Aparatur			4	85,000	4	85,000	4	85,000	4	85,000	4	85,000	20	425,000	Setda - Bag. Adm Ekbang
		Standar Harga Barang	2	Dokumen	2	30,000	2	30,000	2	30,000	2	30,000	2	30,000	10	150,000	
		Standar Harga Barang	2	Dokumen	2	55,000	2	55,000	2	55,000	2	55,000	2	55,000	10	275,000	
1.20.05.	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya Perbup	Belum adanya Perbup	Dokumen	1	49,272	1							1		DPPKD	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang pajak Daerah dan Retribusi	tersusunnya Perda tentang Pajak dan Retribusi berdasarkan UU 28 Thn 2009	Belum adanya Perda	Dokumen	10	44,952	6	45,122	3	43,043	2	47,347	2	53,502	24		
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	tersusunnya Perda APBD Tepat waktu	Penetapan Perda APBD Terlambat	Dokumen	2	427,425	2	345,835	2	329,127	2	362,040	2	409,105	2		
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2012	Tersusunnya Perda APBD Perubahan Tepat waktu	Penetapan Perda APBD Perubahan Terlambat	Dokumen	2	437,596	2	382,796	2	386,671	2	425,338	2	480,632	2		
	Penyusunan Informasi Pengelolaan keuangan Daerah	Terlaksananya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	SIPKD baru sampai tahap Penganggaran	Paket	1	397,229	1	279,637	1	713,409	1	784,750	1	886,767	1		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah	tercapainya Target Retribusi 100%	pencapaian Retribusi 65% dari target	persen	78%	121,248	84%	155,926	87%	77,037	90%	84,740	93%	95,757	100%		
	Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Keuangan				133,720		408,762		523,588		575,947		650,820			
	Sosialisasi Perpajakan, Retribusi dan PBB	terlaksananya Sosialisasi pada 11 Kecamatan	pelaksanaan Sosialisasi baru di 4 kecamatan	kecamatan	4	161,177	6	63,569	9	80,080	11	88,088	11	99,540	11		
	Uji Petik Pos Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.					62,851		299,540		0		0		0			
	Penataan Ulang Objek Pajak PBB	terlaksananya Penataan Ulang Objek Pajak PBB	Penataan Ulang baru terlaksanan 35%	persen	40%	0	46%	50,582	52	8,598	58	9,458	65	10,687	75		
	Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD dan PBB	terlaksananya Rapat Koordinasi bulanan	rapat kooedinasi baru terlaksanan 4	kali rapat	4	55,237	6	50,582	6	47,186	8	51,905	8	58,652	10		
	Monitoring Pelaksanaan Belanja PPKD	terlaksananya Pelayanan Belanja PPKD				96,793		134,208		61,968		68,164		77,026			
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	tercapainya Target Pajak 100%	pencapaian Retribusi 52% dari target	persen	60	190,684	65	171,962	68	92,043	72	101,247	76	114,409	80		
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	Terealisasinya capaian PBB di atas 100%	capaian PBB 100%	persen	100	0	103	620,427	103	211,689	100	232,858	100	263,129	100		
	Pengelolaan Administrasi Keuangan Gaji PNS					0		99,286		69,907		76,898		86,894			
	Persiapan Pengalihan PBB Menjadi Pajak Daerah	terlaksananya Pengalihan PBB jadi Pajak Daerah Tahun 2014	PBB Masih menjadi Pajak Pemerintah Pusat	persen	25	0	60	471,411	90	391,217	100	430,339	0	486,283	100		
1.20.05. 31	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja Dan Keuangan					0		0		0		0		0			DPPKD
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran					18,473		16,301		16,075		17,683		19,981			
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.	Tersusunnya Lap. Keuangan Secara Cepat dan Tepat denngan SIPKD	Lap. Keuangan masih manual dan terlambat	laporan	1	18,468	1	14,358	1	17,120	1	18,832	1	21,280	1		
	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Penetapan Perbup Pertanggungjawaban APBD Tepat waktu	Penetapan Perbup Terlambat	Dokumen	1	280,687	1	301,887	1	230,668		253,734		286,720			
1.20.11	Program penerapan prinsip good governance (Program perbaikan kualitas pelayanan publik)																inspektorat
	- Penaganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah / Pemeriksaan Kasus	Jumlah Laporan (LHP)		6 Laporan	6	38,554	12	83,383	12	80,760	12	91,721	12	95,890	12	95,890	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
	- Pemeriksaan Khusus Dilingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan (LHP)	12	Laporan	12	72,813	12	97,072	12	93,420	12	106,779	12	111,633	12	111,633	
1.20.11 32	Program peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya																inspektorat
	- Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala / Pemeriksaan Rutin	Jumlah Laporan (LHP)	60	Laporan	60	467,157	92	510,098	92	472,998	92	561,108	92	586,613	92	586,613	
	- Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan	Prosentase peningkatan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan	70	Persentase	70	20,283	70	36,663	70	21,188	70	40,329	70	42,162	70	42,162	
	- Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Gelar Pengawasan	3	Kali	3	79,996	3	93,475	3	89,920	3	102,823	3	107,496	3	107,496	
	- Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan	Jumlah Laporan (Triwulan dan Tahunan)	4	Laporan	4	6,265	5	4,980	5	4,905	5	5,478	5	5,727	5	5,727	
	- Review Laporan Keuangan dan Kinerja	Laporan Hasil Reviu	1	Laporan	1	36,600	1	43,780	1	44,040	1	48,158	1	50,347	1	50,347	
	- Monitoring Program dan Kegiatan SKPD	Laporan Hasil Monitoring	23	Laporan	23	67,720	10	65,700	10	46,875	10	72,270	10	75,555	10	75,555	
	- Penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT)	Dokumen PKPT	1	Dokumen	1	9,200	1	9,184	1	9,184	1	10,102	1	10,561	1	10,561	
1.20.11 21	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan					0		0		0		0		0		0	inspektorat
	- Pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti diklat dan pelatihan	23	Orang	23	183,065	23	240,590	24	252,940	25	264,649	28	276,679	28	276,679	
	- Peningkatan Kinerja Tenaga Pemeriksa Pengawasan dan	Jumlah PNS yang mengikuti sharing informasi	23	Orang	-	0	23	167,975	-	0	25	184,773	28	193,171	28	193,171	
1.20.03. 33	Program Peningkatan Kehidupan Beragama	Meningkatnya aktifitas kehidupan beragama			2%	1,700,000	2%	1,941,000	2%	2,689,000	2%	2,024,000	2%	2,857,000	10%	11,211,000	SETDA-Bag Kesra
		Cory / Coriah terkirim	45	Orang/Th	45	450,000	55	500,000	60	1,200,000	80	500,000	100	1,300,000	340	3,950,000	
		fassilitasi Jamaah Haji	230	Orang/Th	230	50,000	180	85,000	250	115,000	300	120,000	350	135,000	1310	505,000	
		Bantuan Imam, Gharin, Khatib, Bilal dan Guru TPQ dan Guru Pondok Pesantren	1000	Orang/Th	1000	1,200,000	1130	1,356,000	1145	1,374,000	1170	1,404,000	1185	1,422,000	5630	6,756,000	
1.20.03. 34	Program Peningkatan Pemahaman dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan	Meningkatnya prasarana beragama			2%	1,425,000	2%	1,630,000	2%	1,792,000	2%	2,008,000	2%	2,195,000	10%	9,050,000	SETDA-Bag Kesra
		Kunjungan Tim Safari Ramadhan	52	Masjid/Th	52	600,000	52	650,000	52	650,000	52	750,000	52	850,000	260	3,500,000	
		Lembaga Didikan Subuh Yang Berprestasi	0	Dokumen /Th	1	45,000	1	50,000	1	60,000	1	70,000	1	75,000	5	300,000	
1.20.03. 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Perda yang ditetapkan	14	Perda	10	200,000	10	200,000	10	220,000	10	230,000	10	250,000	64	1,100,000	Setda - Bag. Hukum dan Organisasi
		Perbub yang ditetapkan	25	Perbub	15	40,000	15	40,000	15	42,000	15	43,000	15	45,000	100	210,000	
		Keputusan Bupati yang ditetapkan	328	SK	350	60,000	375	70,000	400	85,000	400	90,000	420	100,000	2273	405,000	
		Perda yang disosialisasikan	10	Perda	10	200,000	10	250,000	10	300,000	10	325,000	10	350,000	60	1,425,000	
		Bantuan Hukum yang diberikan kepada Pemerintah	3	Kasus	3	200,000	3	250,000	5	300,000	5	350,000	5	360,000	24	1,460,000	
		Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan bahan penyuluhan	5	Peraturan Per UU	5	50,000	4	80,000	4	90,000	4	100,000	4	110,000	26	430,000	
		Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum nagari	20	Produk Hukum Nagari	52	30,000	52	40,000	52	45,000	52	50,000	52	55,000	280	220,000	
1.20.03. 19	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				6	45,452	59	67,109	60	75,000	60	75,000	60	75,000	245	337,561	Setda - Tapem
		fasilitasi penyusunan peraturan tentang APB-Nagari	52	nagari			52	30,991	52	35,000	52	35,000	52	35,000	208	135,991	
		draft peraturan daerah tentang pengelolaan Pemerintahan Nagari	17	perda	2	33,008	3	23,674	4	25,000	4	25,000	4	25,000	17	131,682	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
		Rapat teknis antar pemerintahan nagari serta Integrasi dan Sinkronisasi Kegiatan Pembangunan SKPD	4	kali/tahun	4	12,444	4	12,444	4	15,000	4	15,000	4	15,000	20	69,888	
1.20.03. 35	Program peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	4	kali/tahun	4	12,463	4	6,630	4	11,910	4	15,000	4	15,000	20	61,004	Setda - Tapem
		Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	12	kali/tahun	12	283,303	12	327	12	350,000	12	350,000	12	350,000	60	1,333,630	
		tersedianya buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	1	buku	1	45,738	1	40,579	1	45,000	1	45,000	1	45,000	5	221,316	
		tersedianya buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	1	buku	1	19,444	1	16,613	1	20,000	1	20,000	1	20,000	5	96,057	
1.20.03. 29	Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur	terlatihnya wali nagari dalam bidang managemen Pemerintahan Nagari	52	orang			262	105,917	263	145,000	263	170,000	263	185,000	1,051	605,917	Setda - Tapem
		terpilihnya wali nagari yang berkompeten dan terampil	1	orang			1	27,040	1	30,000	1	35,000	1	40,000	4	132,040	
		Terpilihnya Sekretaris Nagari Terbaik	1	orang			-	0	1	30,000	1	40,000	1	40,000	3	110,000	
		Terpilihnya Camat Teladan/Berprestasi	1	orang			1	24,169	1	25,000	1	30,000	1	35,000	4	114,169	
		Terpantaunya penggunaan Alokasi Dana Nagari dan Pembinaan Administrasi	208	kali/tahun			208	15,443	208	20,000	208	20,000	208	20,000	832	75,443	
1.20.03. 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Cakupan pemasangan patok batas	84.75	patok	10	235,558	19	99,753	10	85,000	10	85,000	20	170,000	73	1,051,226	Setda - Tapem
		tercapainya kesepakatan tapal batas wilayah dengan provinsi tetangga	4	kab	1	96,462	1	89,454	1	95,000	1	95,000	-	0	4	375,916	
1.20.03. U	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan perkantoran															Setda - Bag. Umum
		Surat terproses dan terkirim	1000	surat	1500	31,000	1000	30,000	1700	32,000	1900	34,000	1000	29,000	7,100	156,000	
		Listrik, air dan telepon terfasilitasi	12	bulan	12	700,000	12	680,000	12	720,000	12	750,000	12	730,000	60	3,580,000	
		Asuransi kesehatan	1	tahun	1	140,000	1	100,000	1	160,000	1	200,000	1	150,000	5	750,000	
		Asuransi kendaraan dinas	1	tahun	1	100,000	1	80,000	1	130,000	1	170,000	1	120,000	5	600,000	
		Pembayaran STNK	1	tahun	1	50,000	1	45,000	1	55,000	1	65,000	1	45,000	5	260,000	
		SPJ kegiatan	12	bulan	12	140,000	12	120,000	12	160,000	12	200,000	12	150,000	60	770,000	
		Jasa Cleaning Service	12	bulan	12	700,000	12	500,000	12	900,000	12	1,300,000	12	800,000	60	4,200,000	
		Rehab peralatan kerja	12	bulan	12	30,000	12	36,000	12	36,000	12	40,000	12	35,000	60	177,000	
		Alat tulis kantor	12	bulan	12	140,000	12	25,000	12	160,000	12	200,000	12	150,000	60	675,000	
		Barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	12	80,000	12	50,000	12	100,000	12	150,000	12	100,000	60	480,000	
		Komponen instalasi listrik	12	bulan	12	100,000	12	80,000	12	135,000	12	170,000	12	120,000	60	605,000	
		Alat dan perlengkapan kantor	12	bulan	12	900,000	12	850,000	12	950,000	12	1,200,000	12	900,000	60	4,800,000	
		Alat rumah tangga	12	bulan	12	70,000	12	50,000	12	72,000	12	80,000	12	70,000	60	342,000	
		Makanan dan minuman	12	bulan	12	1,500,000	12	1,300,000	12	1,700,000	12	2,100,000	12	1,500,000	60	8,100,000	
		Rapat keluar daerah	12	bulan	12	2,000,000	12	1,800,000	12	2,300,000	12	2,500,000	12	2,200,000	60	10,800,000	
		Honor Daerah dan Insentif Ajudan	12	bulan	12	800,000	12	800,000	12	800,000	12	800,000	12	800,000	60	4,000,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1.20.03. U	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan Kab. Dharmasraya	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur															Setda - Bag. Umum
		Jumlah gedung kantor	1	Unit	1	100,000	2	200,000	1	250,000	1	300,000	1	350,000	6	1,200,000	
		Jumlah kendaraan jabatan	2	Unit	2	600,000	2	600,000	2	600,000	2	600,000	2	600,000	10	3,000,000	
		Jumlah kendaraan Operasional	17	Unit	2	620,000	3	500,000	3	600,000	2	700,000	1	550,000	11	2,970,000	
		Jumlah perlengkapan gedung kantor	12	bulan	12	210,000	12	150,000	12	190,000	12	300,000	12	170,000	60	1,020,000	
		Jumlah peralatan rumah dinas	23	Unit	23	200,000	25	120,000	25	180,000	23	250,000	23	150,000	119	900,000	
		Jumlah peralatan gedung kantor	87	Unit	15	170,000	20	100,000	25	150,000	30	250,000	25	130,000	115	800,000	
		Jumlah mebeleur	336	Unit	20	170,000	25	120,000	30	150,000	35	210,000	30	130,000	140	780,000	
		Umur rumah dinas	5	tahun	1	120,000	1	100,000	1	140,000	1	180,000	1	110,000	5	650,000	
		Umur gedung kantor	5	tahun	1	30,000	1	40,000	1	50,000	1	100,000	1	30,000	5	250,000	
		Umur mobil jabatan	5	tahun	1	180,000	1	150,000	1	200,000	1	270,000	1	180,000	5	980,000	
Umur kendaraan dinas	5	tahun	1	1,300,000	1	1,300,000	1	1,500,000	1	1,700,000	1	1,100,000	5	6,900,000			
Umur mebeleur	5	tahun	1	15,000	1	10,000	1	15,000	1	50,000	1	15,000	5	105,000			
Rehab gedung kantor	5	tahun	1	630,000	1	600,000	1	650,000	1	700,000	1	680,000	5	3,260,000			
1.20.12. 36	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan		1,350		2,263	300,000	2,140	350,000	2,367	350,000		380,000		400,000	6770	1,780,000	BP2MPBJ
		Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	500	bh	600	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600	60,000	
		Penerbitan Izin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO)	300	bh	700	50,000	800	120,000	800	120,000	900	150,000	1,000	150,000	3200	590,000	
		Penerbitan Izin Lokasi	5	bh	10	10,000	15	30,000	15	30,000	20	30,000	20	30,000	60	130,000	
		Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	50	bh	150	40,000	200	60,000	250	60,000	300	60,000	350	70,000	900	290,000	
		Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	50	bh	75	20,000	100	20,000	125	20,000	150	20,000	150	20,000	450	100,000	
		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	400	bh	500	60,000	600	60,000	650	60,000	650	60,000	650	70,000	2400	310,000	
		Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	20	bh	200	40,000	400	40,000	500	40,000	500	40,000	500	40,000	1600	200,000	
		Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI)	20	bh	20	10,000	15	10,000	15	10,000	20	10,000	20	10,000	70	50,000	
		Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG)	5	bh	8	10,000	10	10,000	12	10,000	15	10,000	15	10,000	45	50,000	
Izin Pemasangan Reklame	0	bh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.20.12. 37	Program Optimalisasi Lelang Terpadu		100	%	100	500,000	100	800,000	100	800,000	100	800,000	100	1,000,000	100	3,900,000	BP2MPBJ
		Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	20	%	40	300,000	60	600,000	80	700,000	100	800,000	100	1,000,000	100%	3,400,000	
		Penyelenggaraan Barang/Jasa Secara Konvensional/Manual	80	%	60	200,000	40	200,000	20	100,000	0	0	0	0	0%	500,000	
1.20.24. 28	Program Pendidikan Kedinasan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur	10.38	%	11.86	1,650,000	13.8	1,960,000	13.1	1,770,000	12.8	1,950,000	10.6	1,770,000	64.7	9,100,000	BKD
		Jumlah PNS yang mengikuti diklat PIM II, III dan IV	70	orang	80	1,500,000	120	1,800,000	80	1,600,000	120	1,800,000	80	1,600,000	480	8,300,000	
		Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	350	orang	400	150,000	440	160,000	450	170,000	400	150,000	450	170,000	2140	800,000	
1.20.24. 29	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengelolaan Peningkatan kompetensi aparatur	10.01	%	12.8	1,201,000	13.5	1,207,000	13	1,167,000	12.9	1,205,000	12.8	1,257,000	65.1	6,037,000	BKD
		Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	150	orang	200	1,020,000	236	1,050,000	190	1,010,000	220	1,050,000	200	1,100,000	1046	5,230,000	
		Jumlah CPNS umum yang mengikuti orientasi Pra Tugas	145	orang	200	36,000	200	37,000	236	47,000	190	35,000	220	45,000	1046	200,000	
		Terkirimnya jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis/ Fungsional untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan	110	orang	120	145,000	110	120,000	100	110,000	115	120,000	100	112,000	545	607,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
					(2011)		(2012)		(2013)		(2014)		(2015)		Target	Rp (000)	
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1.20.24. 30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	43.4	%	47.8	1,179,000	51.5	1,271,500	49.4	1,205,000	50.1	1,223,380	42.4	1,169,000	241	6,047,880	BKD
		Jumlah PNS yang lulus seleksi rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan	190	orang	200	450,000	220	460,000	240	465,000	200	450,000	150	400,000	1010	2,225,000	
		Jumlah formasi sesuai kebutuhan	140	orang	150	36,000	200	42,000	120	34,000	130	35,000	100	30,000	700	177,000	
		Jumlah Entry Data dan Update database pegawai dalam jaringan SAPK online dan kenaikan pangkat	180	data	200	70,000	210	72,000	220	75,000	230	77,000	150	65,000	1010	359,000	
		Jumlah PNS yang terdapat dapat dalam pengembangan dan pembangunan SAPK Online	190	data	200	65,000	210	66,000	220	70,000	230	72,000	150	57,000	1010	330,000	
		Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan kepegawaian dan hasil penyusunan dokumen analisis jabatan	190	orang	200	45,000	210	50,000	200	50,000	210	50,000	200	60,000	1020	255,000	
		Jumlah PNS yang lulus mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian jenazah	45	orang	50	25,000	74	30,000	50	17,000	80	30,000	50	25,000	304	127,000	
		Jumlah PNS yang mengurus administrasi ASKES, Karis/ Karsu, taperum dan pemberian bantuan pensiun	100	orang	150	38,000	100	35,000	100	36,000	110	37,000	120	35,000	580	181,000	
		Jumlah PNS berprestasi yang memperoleh hak dan penghargaan kenaikan pangkat dan gaji berkala	180	orang	200	29,000	250	33,000	200	30,000	210	30,500	200	31,000	1060	153,500	
		Jumlah PNS yang mendapatkan piagam penghargaan	190	orang	200	30,000	150	27,000	200	32,000	210	34,000	200	32,000	960	155,000	
		Jumlah PNS yang diberi sanksi pelanggaran disiplin	30	orang	38	20,000	37	19,500	30	19,000	25	18,880	20	19,000	150	96,380	
		Jumlah pejabat struktural/ fungsional yang dilantik dan pengambilan sumpah jabatan	45	orang	50	55,000	60	60,000	70	65,000	50	55,000	45	50,000	275	285,000	
		Jumlah pegawai yang menerima bantuan tugas belajar ikatan dinas program SI, S2, S3	10	orang	10	200,000	15	250,000	8	180,000	10	200,000	10	230,000	53	1,060,000	
		Jumlah pegawai yang mengurus SKPP Pengabdian dan SK Pensiun	45	orang	50	65,000	73	70,000	60	67,000	70	70,000	50	65,000	303	337,000	
		Penyusunan rencana pembinaan karier PNSD melalui pengangkatan jabatan	10	orang	10	7,000	10	7,000	10	8,000	10	7,000	10	7,000	50	36,000	
		Jumlah PNS yang dilantik dan diambil sumpah	190	orang	200	22,000	236	25,000	220	24,000	200	22,000	200	23,000	1056	116,000	
Jumlah Pelamar calon praja IPDN yang mengikuti seleksi untuk direkrut menjadi praja IPDN	20	orang	25	22,000	30	25,000	50	33,000	50	35,000	60	40,000	215	155,000			
1.20.24. 38	Program Pemberian Uang Bantuan Sosial bagi Pegawai	Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur	3.7	%	4.9	800,000	4.9	810,000	3.7	789,000	3.4	750,000	3.7	790,000	20.7	3,939,000	BKD
		Jumlah PNS/ Pegawai Honor Daerah dan PTT yang mendapatkan bantuan sosial	150	orang	200	800,000	199	810,000	150	789,000	140	750,000	150	790,000	839	3,939,000	
					0		0		0		0		0		0		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1 21	KETAHANAN PANGAN					0		0		0		0		0			
1.21.01. 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan SDM Petani		Orang	135	33,750	140	35,000	150	37,500	150	37,500	160	40,000	5.02	183,750	BKP3
		GPP		ok	120	30,000	120	30,000	120	30,000	120	30,000	120	30,000	600	150,000	
		Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis		ok	15	3,750	20	5,000	30	7,500	30	7,500	40	10,000	135	33,750	
1.21.01. 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketersediaan Cadangan Pangan dan Akses Pangan Pokok		13 paket/th	14	2,154,705	18	3,001,200	22	4,398,500	27	5,203,900	40	8,370,000	121	23,128,305	BKP3
		Kegiatan Pendukung		unit/th													
		P-LDPM		2 unit/th	1	225,000	1	225,000	1	225,000	1	225,000	1	225,000	5	1,125,000	
		DKP		0 Unit/th	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	
		NBM dan AKP		1 Buku/th	1	59,705	1	61,200	1	63,500	1	58,900	1	65,000	5	308,305	
		Lumbung Pangan		3 Desa/Unit	4	1,400,000	6	2,100,000	10	3,500,000	12	4,200,000	20	7,000,000	52	18,200,000	
		Akses Pangan Pokok		1 Pasar/Mgd	1	25,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	1	30,000	5	145,000	
		DMP		3 Unit/th	4	320,000	6	450,000	6	450,000	10	600,000	15	975,000	41	2,795,000	
		SKPG		1 paket/th	1	25,000	1	35,000	1	30,000	1	40,000	1	25,000	5	155,000	
		PDRP		2 Kec/th	2	100,000	2	100,000	2	100,000	1	50,000	1	50,000	8	400,000	
		PPH		0 unit/th	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	
1.21.01. 17	Program Diversifikasi Pangan	Pemanfaatan Pekarangan dan Hasil Pekarangan		0 Nagari	5	87,000	6	77,000	7	88,000	8	152,000	8	657,000	34	1,213,000	BKP3
		Pembinaan Pemanfaatan Pekarangan		paket/th	1	87,000	1	77,000	1	88,000	1	97,000	1	97,000	5	446,000	
		Lomba Cipta Menu AB3		paket/th	1	87,000	1	86,000	1	88,000	1	97,000	1	97,000	5	455,000	
		Lomba KWT		paket/th	1	45,000	1	52,000	1	55,000	1	55,000	1	560,000	5	767,000	
		P2KP		KWT	2	140,000	3	210,000	4	280,000	5	350,000	5	350,000	19	1,330,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1 22	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
1.22.02. 15	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase keberdayaan masyarakat perdesaan	100	persen	100	1,578,112	100	1,825,000	100	2,160,000	100	2,680,000	100	3,450,000			BPML2NPPKB
		Ketersediaan buku profil nagari	0	Dokumen /Data nagari	1	90,000	6	131,000	16	300,000	25	700,000	52	1,300,000			
		Terpilihnya nagari berprestasi	1	nagari	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000			
		Terlaksananya kegiatan gotong royong masyarakat	1	nagari	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000			
		LPM terlatih	52	Nagari	52	150,000	52	150,000	52	150,000	52	150,000	52	150,000			
		Kader PKK	2247	orang	2247	0	2247	0	2247	0	2247	0	2247	0			
		Kader PKK Aktif	300	orang	400	300,000	700	450,000	800	550,000	1000	660,000	1500	770,000			
		Jambore PKK		Peserta Jambore	50	138,112	50	94,000	50	110,000	50	120,000	2	130,000			
		Kader posyandu berprestasi	999	orang	1099	700,000	1184	800,000	1200	850,000	1200	850,000	1200	900,000			
1.22.02. 17	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	90	persen	100	1,625,000	100	1,950,000	100	2,150,000	100	2,260,000	100	2,460,000			BPML2NPPKB
		Kecamatan penerima PNPMP-terbina administrasi	11	Kecamatan	11	900,000	11	1,000,000		1,200,000	11	1,200,000	11	1,400,000	11		
		Pokja nagari terlatih (Penerima Kredit Mikro Nagari)	17	nagari/pokja	17	150,000	17	175,000	17	175,000	17	185,000	17	185,000			
		pengelola raskin	172	orang	172	500,000	323	700,000	323	700,000	323	800,000	323	800,000			
		kelompok penemu TTG terbina	0	kelompok	1	75,000	1	75,000	1	75,000	1	75,000	1	75,000			
1.22.02. 20	Program penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi	Partisipasi nyata perantau terhadap pembangunan	0	orang	10	25,000	15	30,000	20	35,000	25	40,000	30	45,000			BPML2NPPKB
1.22.02. 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan	Unsur KAN terlatih	0	Orang		0		0	312	90,000	312	90,000	312	90,000			BPML2NPPKB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)					
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1 23	STATISTIK																	
1.06.01 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Penyusunan Kabupaten Dalam Angka	1 buku	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000				Bappeda	
		Penyusunan PDRB	1 buku	1	45,000	1	45,000	1	45,000	1	45,000	1	45,000					
		Penyusunan ICOR dan GINI Rasio	0 buku			2	65,000			2	75,000			0				
		Penyusunan Nilai Tukar Petani	0 buku					1	50,000									
1 24	KEARSIPAN																	
1.24.01 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Sistem Administrasi Kearsipan	2 SKPD SKPD	-	33,000	20 SKPD	33,000	20 SKPD	33,000	20 SKPD	33,000	20 SKPD	33,000	80 SKPD	165,000		KPAD	
		Data base informasi kearsipan	- SKPD	-	15,000	10 SKPD	15,000	10 SKPD	15,000	10 SKPD	15,000	10 SKPD	15,000	40 SKPD	75,000			
		Pengelolaan arsip SKPD	2 SKPD SKPD	-	18,000	10 SKPD	18,000	10 SKPD	18,000	10 SKPD	18,000	10 SKPD	18,000	40 SKPD	90,000			
1.24.01 19	Program peningkatan mutu pelayanan sistem kearsipan	Mutu layanan sistem kearsipan	0.013 %	0.22	70,000	0.17	803,000	0.17	803,000	0.16	53,000	0.27	60,000	1	1,789,000		KPAD	
		pengelola kearsipan SKPD	- Orang	47 Orang	45,000	52 Orang	45,000	52 Orang	45,000	52 Orang	45,000	-	0	203 Orang	180,000			
		depo arsip dan perpustakaan	- Unit	-	0	1 Unit	750,000	1 Unit	750,000	-	0	-	0	2 Unit	1,500,000			
		dokumen / arsip penting	40 Dok Dokumen	35 Dok.	25,000	10 Dok.	8,000	10 Dok.	8,000	10 Dok.	8,000	100 Dok.	60,000	165 Dokume	109,000			
1 25	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
1.07.02. 15	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Website berbasis database	Paket	1		1		1		1		1					500,000	DISHUB
		Pembinaan dan pengembangan nagari informasi/cyber	nagari	52		52		52		52		52						
		-fasilitas penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KIMP	Orang	80		100		120		120		120						
		-memudahkan masyarakat dalam mengakses komunikasi dan	kecamatan	11		11		11		11		11						
1.07.02. 17	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	-Pelatihan SDM bidang infrastruktur, komunikasi dan informasi	SKPD	42		42		42		42		42						DISHUB
		-Pelatihan SDM infrastruktur, komunikasi dan informasi bagi anak sekolah	Sekolah	19		21		20		20		20						
		-Sosialisasi dan penerapan Open source software	SKPD	42		42		42		42		42						
1.07.02. 18	Program Kerja sama Informasi dan Media Massa	Sosialisasi layanan pengaduan masyarakat	Orang	680		720		700		700		700					500,000	DISHUB
		penyebarluasan informasi bersifat pendidikan dan pemberdayaan bagi masyarakat	kecamatan	6		8		9		10		11						
1.07.02. 19	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informasi Publik	-Database sistem informasi	Paket	1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000					DISHUB
		-pelayanan dan sistem informasi bagi masyarakat	kecamatan	5		5		5		5		5						
		-Penyediaan informasi pengolahan data dan publikasi informasi publik	Bulan	12		12		12		12		12						

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			Target
		-jaringan teknologi informasi dan komunikasi		Bulan	12		12		12		12		12				
1.07.02. 20	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi dan Informasi	- perluasan pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi publik untuk daerah terpencil		kecamatan	5		5		5		5		5				DISHUB
		-tim koordinasi pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi		Tim	0		1		1		1		1				
1.07.02. 21	Program Peningkatan Partisipasi dan Investasi swasta Dalam Pembangunan Komunikasi dan Informasi melalui Program Public Private Partnership	-partisipasi dan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur komunikasi dan informasi		Investor	0		1		1		1		1				DISHUB
1.20.03. 15	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Meningkatnya Pengembangan komunikasi informasi dan media massa	1%	Persen	1%		1%		1%		1%		1%		5%		Setda - Bag. Humas & Protokol
		informasi melalui media harian dan mingguan		1 paket/Thn	1	750,000	1	750,000	1	1,405,000	1	1,500,000	1	1,600	1	4,406,600	
		- Media Harian	43200	eks/Thn	43200	0	43200	0	239,760	0	239,760	0	239,760	0	239,760		
		- Media Mingguan	660	eks/Thn	660	0	660	0	9,360	0	9,360	0	9,360	0	9,360		
1.20.03. 18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Meningkatnya kerjasama informasi dan media massa	1%	Persen	1%	0	1%	0	1%	0	1%	0	1%	0	5%		Setda - Bag. Humas & Protokol
		informasi dan promosi daerah melalui media elektronik		1 Paket/Thn	1	150,000	1	200,000	1	200,000	1	250,000	1	300,000	1	1,100,000	
1.20.03. 22	Program Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1%	Persen	1%		1%		1%		1%		1%		5%		Setda - Bag. Humas & Protokol
		Kunjungan Pejabat Negara /Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri		12 Kali/Tahun	12	30,000	12	56,000	12	70,000	12	75,000	12	80,000	12	311,000	
		kunker KDH/WKDH ke daerah-daerah di Kab. Dharmasraya baik masyarakat maupun dinas instansi		12 Kali/Thn	12	15,000	12	17,000	12	20,000	12	23,000	12	25,000	12	100,000	
		Etos kerja pelayanan keprotokolan		1 Paket/Thn	1	55,000	1	60,000	1	160,000	1	165,000	1	200,000	1	640,000	
1.20.03. 23	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Komunikasi Dan Informasi Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informasi publik	1%	Persen	1%	0	1%	0	1%	0	1%	0	1%	0	5%	0	Setda - Bag. Humas & Protokol
		Dialog/Audiensi dengan Masyarakat Publik		1 Kegiatan/Thn	1	17,000	1	25,000	1	40,000	1	43,000	1	45,000	1	170,000	
		Baliho dan spanduk		50 Bh/Tahun	50	75,000	70	120,000	80	155,000	80	170,000	80	200,000	410	720,000	
		media dharmasraya, kalender, buku kerja, serta Buku Photo Kegiatan		1 Paket/Thn	1	120,000	1	126,000	1	130,000	1	137,000	1	150,000	1	663,000	
		- Media Dharmasraya		4 Edisi/Thn	4	0	4	0	4	0	6	0	8	0	10	0	
		- Kalender Tahunan		400 eks/Thn	400	0	600	0	800	0	1000	0	1000	0	1000	5	
		- Buku Kerja		150 eks/Thn	150	0	150	0	150	0	200	0	200	0	200	1	
		- Buku Dharmasraya Dalam Lensa (Buku Photo)		1 Edisi/Thn	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
1.20.03. 24	Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi	1%	Persen	1%	0	1%	0	1%	0	1%	0	1%	0	5%	0	Setda - Bag. Humas & Protokol
		Publikasi keliling		12 Kali/Thn	12	15,000	12	17,000	12	20,000	12	23,000	12	25,000	12	100,000	
		Jumpa Pers		12 Kali/Thn	12	40,000	12	45,000	12	45,000	14	49,000	16	55,000		234,000	
		Dokumentasi KDH/WKDH		1 Paket/Thn	1	115,000	1	120,000	1	130,000	1	150,000	1	160,000	1	675,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1.20.03. U	Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1%	Persen	1%	0	1%	0	1%	0	1%	0	1%	0	5%	0	Setda - Bag. Humas & Protokol
		Bimtek Protokol	1	Kegiatan/Thn	1	28,000	1	30,000	1	40,000	1	50,000	1	55,000	1	203,000	
		Pelatihan Jurnalistik	1	Kegiatan/Thn	1	28,000	1	72,000	1	72,000	1	75,000	1	80,000	1	327,000	
		Pembinaan Bakohumas	1	Kegiatan/Thn	1	17,000	1	25,000	1	40,000	1	43,000	1	45,000	1	170,000	
1 26	PERPUSTAKAAN																
1.24.01 15	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Budaya baca dan pembinaan perpustakaan	9%	%	13%	475,000	19%	710,000	22%	810,000	24%	910,000	23%	860,000	100%	3,765,000	KPAD
		Layanan perpustakaan keliling	90 Pos	Pos Layanan	98 Pos	65,000	52 Pos	65,000	52 Pos	65,000	52 Pos	65,000	52 Pos	65,000	306 Pos	325,000	
		Minat dan budaya baca	45 Org	Org / Sekolah	80 org	60,000	146 org	60,000	146 org	60,000	146 org	60,000	146 org	60,000	664 Org	300,000	
		Pengelola perpustakaan	30 Sekolah	Nagari / Sekolah /	30 Sekolah	50,000	30 Nagari	50,000	30 Sekolah	50,000	22 Nagari	50,000	30 Sekolah /	50,000	142 Sekolah /	250,000	
		Database informasi kepastakaan	1 Dokumen	Dokumen	-	0	10 Dokumen	10,000	10 Dokumen	10,000	10 Dokumen	10,000	10 Dokumen	10,000	10 Dokumen	40,000	
		Forum komunikasi lembaga / organisasi kepastakaan	60 Orang	Orang	-	0	150 Org	25,000	175 Org	25,000	225 Org	25,000	225 Org	25,000	775 Orang	100,000	
		Data base bahan bacaan	12.000 Eks	Eksampler	10.000 Eks	250,000	14.000 Eks	350,000	18.000 Eks	450,000	22.000 Eks	550,000	26.000 Eks	650,000	90.000 Eks	2,250,000	
		Master Plan Gedung Kantor dan Depo	-	Unit	1 Unit	50,000	1 Unit	50,000	1 Unit	50,000	1 Unit	50,000	-	0	4 Unit	200,000	
		Bahan bacaan	9.500 Eks	Eksampler	-	0	4.000 Eks	100,000	4.000 Eks	100,000	4.000 Eks	100,000	-	0	12.000 Eks	300,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
2	URUSAN PILIHAN																
2 01	PERTANIAN																
	<i>-Pertanian</i>																
2.01.01. 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Tingkat produktivitas tanaman pangan	4,20	ton/ha	4,29	679,200	4,43	2,022,500	4,60	3,290,400	4,8	3,282,725	5,02	3,282,725	5,02	12,557,550	Dinas Pertanian
	1 Pelatihan dan pendampingan bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan																
	- SL Padi Non Hibrida		136	Paket/th	3,000	359,400	300	1,110,000	270	1,244,700	300	1,555,875	300	1,555,875	4,170	5,825,850	
	- SL Padi Lahan kering		0	Paket/th	40	119,800	40	148,000	40	785,700	20	392,850	20	392,850	160	1,839,200	
	- SL Kedelai		0	Paket/th	-	-	10	37,000	-	-	10	37,000	10	37,000	30	111,000	
	- SL Jagung		0	Paket/th	-	-	15	55,500	-	-	10	37,000	10	37,000	35	129,500	
	2 Optimalisasi pemanfaatan lahan terlantar		0	ha/th	50	200,000	300	672,000	600	1,260,000	600	1,260,000	600	1,260,000	2,150	4,652,000	
	9 Pemberian penghargaan bagi kelompok tani dan gapoktan berprestasi			unit/th													
	10 monitoring dan evaluasi program			dokumen/th													
2.01.01. 25	Program penyediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan pertanian/ peternakan/ perkebunan	Meningkatnya Produksi tanaman pangan melalui peningkatan kualitas pelayanan jaringan irigasi . Pengadaan dan rehabilitasi	50	%	55	1,126,000	58	1,681,000	70	6,360,000	75	4,800,000	80	5,500,000	338	19,467,000	Dinas Pertanian
				unit/th		0		0		0		0		0		0	
		JITUT/JIDES	740	Ha/th	640	640,000	800	800,000	3,500	3,500,000	3,000	3,000,000	3,000	3,000,000	10,940	10,940,000	
		Kincir Air	4	Unit/th	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	
		JUT	6	Km/th	3	150,000	7	490,000	30	2,100,000	20	1,400,000	20	2,100,000	80	6,240,000	
		Pompa Air	3	Unit/th	11	187,000	3	51,000	0	0	0	0	0	0	14	238,000	
		Embung	0	Unit/th	2	100,000	4	240,000	11	660,000	5	300,000	5	300,000	27	1,600,000	
		Penyediaan data SID	1	Unit/th	1	49,000	2	100,000	2	100,000	2	100,000	2	100,000	9	449,000	
		Monitoring dan evaluasi program				0		0		0		0		0		0	
2.01.01. 18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan	Meningkatnya produksi melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP)	168	%	170	45,000	171	1,691,000	173	480,000	178	548,000	179	548,000	185	3,312,000	Dinas Pertanian
		Identifikasi dan inventarisasi	3	Unit/th	3	45,000	89	1,691,000	24	480,000	24	480,000	24	480,000	164	3,176,000	
		Fasilitasi penciptaan teknologi tepat guna dan varietas unggul lokal yang berdaya saing tinggi	0	Unit/th	0	0	0	0	0	0	1	68,000	1	68,000	2	136,000	
		Monitoring dan evaluasi program		Dokumen/	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0	
2.01.01. 19	Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Pertanian/ Perkebunan/Peternakan secara Berkelanjutan	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan secara Berkelanjutan	50,545	Ton GKG	56,310	1,018,750	58,369	16,430,750	68,254	7,429,450	75,087	11,538,000	82,595	2,109,600	340,615	38,526,550	Dinas Pertanian
		Peningkatan mutu intensifikasi	-	paket/th	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	5	250,000	
		Lanjutan pencetakan sawah	250	ha/th	0		1100	11,000,000	500	5,000,000	0	0	0	0	1600	16,000,000	
		Pengembangan bibit dan varietas		unit/th		0		0		0		0		0		0	
		Padi Non Hibrida	3,400	ha/th	3,000	637,500	7,500	1,593,750	7,500	1,593,750	7,500	1,593,750	7,500	1,593,750	33,000	7,012,500	
		Padi lahan kering	1,000	ha/th	500	106,250	1,000	3,700,000	500	785,700	500	9,821,250	500	392,850	3,000	14,806,050	
		Kedelai	50	ha/th	750	225,000	150	45,000	-	0	150	45,000	150	45,000	1,200	360,000	
		Jagung	50	ha/th	-		150	42,000	-	0	100	28,000	100	28,000	350	98,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5						
					(2011)		(2012)		(2013)		(2014)		(2015)						
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				Target	Rp (000)
	-Perkebunan																		
2.02.01	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	540	Org	180	24,522	180	31,855	180	62,197	180	65,000	180	65,000	1,440	248,574		Dishutbun	
		Kelompok tani yg terkawal	3	Klp	3	26,031	3	20,327	3	27,147	3	30,000	3	32,000	15	135,505			
2.02.01	18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	1	Unit	1	290,716	1	362,080	1	283,284	1	300,000	1	350,000	1	1,586,080		Dishutbun	
		Luas demplot kakao yang terpelihara	0	Ha	1	8,840	1	10,100	1	10,000	1	10,000		10,000	1	48,940			
		Fasilitasi harga komoditi perkebunan	0	Kali		0		0	12	61,464	12	61,464	12	65,000	36	187,928			
2.02.01	19	Program Peningkatan Produksi, Pertanian/ Perkebunan	250	ha	150	600,000	50	350,000	50	350,000	50	350,000	50	350,000	350	2,000,000		Dishutbun	
		Teremajakannya kebun masyarakat	100	ha	75	300,000	250	1,497,735	100	495,000	100	500,000	100	600,000	625	1,175,000			
		Terpeliharannya demplot karet	5	ha		0	5	8,810		0		0		0	5	8,810			
		Terpeliharannya kebun benih	13	ha	10	89,394	18	115,471	18	115,230	18	120,000	18	120,000	18	560,095			
		Terbangunnya jalan produksi	15	Km	16	1,615,345	25.84	2,448,921	16	1,684,484	15	1,700,000	15	1,700,000	87.84	9,148,750			
		Terbangunnya sumber		ha	10	0		0	10	17,134	10	100,000	10	100,000	26	217,134			
		Tersalukannya bibit berkualitas	20	batang	22500	337,500	55200	828,000	35000	700,000	35000	875,000	35000	875,000	182700	3,615,500			
		Terpeliharannya bibit	280.000	batang	280	355,610									280.000	355,610			
2.02.01	17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	1	Unit	1	137,143	1	224,982	1	500,000	1	200,000	1	200,000	1	1,286,137		Dishutbun	
2.01.03.	21	Program Pencegahan Penyakit Menular Ternak				500,000		800,000		1,000,000		1,250,000		1,500,000		1,500,000		Disnakkan	
		- Kasus rabies	27	kasus	60/6750	0	50/7000	0	30/7500		15/7750		0/8000		0/8000	0	0		
		- Pencegahan penyakit zoonosis	0	kasus	0	0	0	0	0		0		0		0	0	0		
		- Gangguan reproduksi	200	kasus	1500	0	1300	0	1000		800		500		500	0	0		
		- Peningkatan Pelayanan melalui Puskesmas	2	unit	2	0	3	0	5		7		11		11	0	0		
2.01.03.	22	Program Peningkatan Produksi Peternakan				1,500,000		1,750,000		2,000,000		2,250,000		2,500,000		2,500,000		Disnakkan	
		- populasi sapi	36,293	ekor	37,750		40,000		45,000		50,000		60,000		60,000				
		- populasi kerbau	7,143	ekor	7,250		7,500		7,750		8,000		8,500		8,500				
		- populasi kambing/domba	11,804	ekor	12,683		14,779		17,500		25,000		35,000		35,000				
		- Angka Kelahiran	7,995	ekor	8,250		9,000		10,000		11,000		12,500		12,500				
		- produksi daging	1,053	ton	1,250		1,520		1,750		2,000		2,500		2,500				
2.01.03.	27	Program Pengembangan Kawasan Unggas di Pedesaan				100,000		125,000		150,000		200,000		250,000		250,000		Disnakkan	
		- Ayam kampung	67,637	ekor	97,325	0	#####	0	110,000	0	#####	0	#####	0	#####	0	#####	0	
		- itik	16,763	ekor	32,033	0	35,000	0	37,000	0	40,000	0	45,000	0	45,000	0	45,000	0	
2.01.03.	28	Program Penyediaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Peternakan	5	%	7	250,000	10	275,000	15	300,000	20	400,000	25	500,000	25	500,000		Disnakkan	
2.01.03.	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	2	%	2.5		3		3.5	250,000	4	500,000	5	1,000,000	5	1,000,000		Disnakkan	
1.21.01.	29	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	45	%	58	1,295,000	64	1,295,000	68	1,688,800	75	2,265,000	80	2,315,000	90	8,858,800		BKP3	
		Peningkatan Fungsi Kelembagaan Tani, dan BPP Kecamatan																	
		Revitalisasi Kelembagaan Tani		Kelp/th	20	1,000,000	20	1,000,000	20	1,000,000	30	1,500,000	30	1,500,000	120	6,000,000			
		Studi Banding Penyuluh		paket/th	0	0	0	0	1	143,800	1	150,000	1	160,000	3	453,800			
		SI-Agribisnis		paket/th	2	50,000	2	50,000	2	50,000	3	75,000	2	50,000	11	275,000			
		Denplot Organik Farming		Desa/Na	-	0	-	0	1	45,000	1	45,000	2	90,000	4	180,000			
		Denfarm Varietas Unggul Baru		Nagari	0	0	-	0	-	0	2	30,000	3	45,000	5	75,000			
		Temu Teknis Penyuluh		ha/th	0	0	-	0	-	0	1	15,000	1	20,000	2	35,000			
		Monitoring Evaluasi dan Suverpisi PP		BPP	1	35,000	1	35,000	1	35,000	1	35,000	1	35,000	1	175,000			
		Workshop KTNA		KTNA	0	0	-	0	1	45,000	1	45,000	1	45,000	1	135,000			
		Penyusunan Programa PP		BPP	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	5	250,000			
		Operasional BPP Kecamatan		BPP	4	160,000	4	160,000	8	320,000	8	320,000	8	320,000	32	1,280,000			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1.21.01. 30	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur Pembangunan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Peningkatan Sarana Prasarana	45 %	48	592,000	50	795,692	68	5,894,226	80	644,000	85	50,000	90	7,975,918	BKP3	
		Gedung BPP	BPP	2	464,000	2	432,192	1	411,000	0	0	0	0	5	1,307,192		
		Mobiler	paket/th	1	78,000	1	80,000	1	168,000	1	185,000	0	0	4	511,000		
		Kendaraan Roda 2	paket/th	2	50,000	2	50,000	2	50,000	3	75,000	2	50,000	11	275,000		
		Pagar BPP	BPP	-	0	-	-	2	166,266	3	330,000	-	-	5	496,266		
		Trali BPP	paket/th	-	-	-	-	1	82,960	1	15,000	-	-	2	97,960		
		Tempat Parkir	ha/th	-	-	-	-	-	0	1	25,000	-	-	1	25,000		
		GPS	BPP	-	-	-	-	8	56,000	2	14,000	-	-	9	70,000		
		Gudang dan Lantai Jemur	paket/th	-	-	-	-	2	4,960,000	-	-	-	-	1	4,960,000		
		Alat Studio	paket/th	-	-	1	89,500	-	-	-	-	-	-	1	89,500		
		Komputer	paket/th	-	-	9	144,000	-	-	-	-	-	-	9	144,000		
1.15.01. 17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan	Koperasi yang melakukan pemasaran						0					0	0	Kopperindag		
		Jumlah koperasi yang melaksanakan pemasaran	0 koperasi									2	30,000	2		30,000	
1.20.03. 26	Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Perkebunan/Perikanan/Pertanian secara Berkelanjutan	Meningkatnya ketepatan penyaluran Pupuk bersubsidi		15%	57,500	15%	57,500	20%	57,500	20%	57,500	25%	57,500	95%	287,500	Setda - Bag. Adm Ekbang	
		Rapat Pupuk Bersubsidi	10 Kali	10	7,500	10	7,500	10	7,500	10	7,500	10	7,500	50	37,500		
		Pengawasan Pupuk Bersubsidi	12 Bulan	12	50,000	12	50,000	12	50,000	12	50,000	12	50,000	60	250,000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
					(2011)		(2012)		(2013)		(2014)		(2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
2 02	KEHUTANAN																
2.02.01 15	Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan	Terpantainya peredaran hasil hutan Terkelolanya hasil hutan bukan kayu Terkendalinya usaha industri kehutanan Terinventarisasinya penggunaan kawasan hutan	11 1 0 0	Kec. Jenis Prsh Kec	11 1 24 7	94,088 31,825 37,408 67,261	11 2 24 7	68,389 23,355 38,350 81,945	11 2 24 7	99,785 12,277 48,107 26,648	11 2 24 7	100,000 15,000 50,000 30,000	11 2 24 7	100,000 15,000 173,864 30,000	11 2 7 7	462,262 97,457 90,000 235,854	Dishutbun
2.02.01 16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Tertanamnya kawasan hutan Tertanamnya luar kawasan hutan Tersusunnya dokumen RHL Tersedianya sarana dan prasarana Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air	805 150 0 0 0	ha ha Dokumen paket unit	 11 0	0 33,823 0 0 0	 2046 1 1 1 1	0 203,584 97,640 311,025 28,365	 157 1 3 1	0 1,034,619 0 305,245 41,101	50 100 1 1	200,000 1,000,000 0 200,000 35,000	50 50 1 0	200,000 500,000 0 200,000 0	50 2364 1 4 5	400,000 2,772,026 97,640 1,116,270 104,466	Dishutbun
2.02.01 17	Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan	Terpantainya titik hot spot Tersuluhnya masyarakat sekitar hutan Terlaksananya operasi/patrol pengamanan hutan Terpeliharanya batas kawasan hutan	11 3 11 20	Kec. Kali Kec. Km	11 3 11 20	49,197 58,789 82,900 0	11 3 11 0	34,247 45,385 76,075 0	11 3 11 0	55,000 70,000 121,335 0	11 3 11 0	35,000 70,000 90,000 100,000	11 3 11 0	90,000 70,000 90,000 100,000	11 15 11 40	263,444 314,174 460,311 100,000	Dishutbun
2 03	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																
2.03.01. 16	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Cakupan penertiban PETI di Kab.Dharmasraya Cakupan penertiban PETI di Kab.Dharmasraya	45 4	% Kec	55 2	0 55,680	65 2	0 26,653	70 1	 50,900	75 1	 60,000	80 1	 70,000	 7	 263,233	ESDM
2.03.01. 17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan	Cakupan Pelayanan Kelistrikan Cakupan jaringan Listrik a. Jaringan Listrik Tegangan menengah (JTM) b. Gardu/Trafo Distribusi c. Jaringan Listrik Tegangan Rendah(JTR) Peningkatan jumlah Pembangkit Listrik Alternatif a. Solar Home System b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Penyediaan Data Potensi Energi Daerah a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro c. Pembangkit Biogas 10 titik) Pelaksanaan Study Kelayakan Potensi Energi Daerah a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro c. Pembangkit Biogas Cakupan pemeliharaan dan Perawatan Penerangan Jalan Umum a. PJU Stang b. PJU Tiang c. Lampu Towert	60 0 24548 13 26546 595 2 0 2 16 10 0 2 0 0 168 0 0	% Ms Unit Ms Unit Unit Unit Titik Titik Titik Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	65 0 34,392 4 8,362 595 2 0 0 3 1 0 2 0 0 100 20 1	9,314,571 0 5,846,640 248,000 627,150 575,000 0 6,679,424 0 15,000 0 15,000 0 0 0 0 280,000 320,000 520,000	72 0 42,130 8 10414 0 2 3 0 2 3 0 120 25 0	10,745,240 0 7,162,100 496,000 781,050 0 0 0 0 280,000 400,000 0	74 0 3385 2 2942 0 0 0 0 100 20 2 2 0 1 0 1	4,758,408 0 575,450 124,000 220,650 575,000 0 6,679,424 0 15,000 0 0 420,000 320,000 520,000	80 0 0 2 4497 100 1 2 2 0 1 2 2 1 1 0 150	10,482,217 0 0 124,000 337,275 575,000 0 1,866,400 0 15,000 0 0 45,000 0 420,000 400,000 520,000	85 0 0 0 2062 100 1 2 2 0 1 2 2 1 1 0 100	6,842,568 0 0 0 154,650 575,000 0 1,866,400 0 15,000 0 0 90,000 0 280,000 320,000 520,000	85 0 79,907 16 28,277 200 2 10 10 1 3 - 570 110 3	42,143,003 0 13,584,190 992,000 2,120,775 1,150,000 8,545,824 0 75,000 0 0 135,000 - 1,596,000 1,760,000 1,560,000	ESDM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
					(2011)		(2012)		(2013)		(2014)		(2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
		Cakupan operasional PLTS	579	Unit	180	12,000	185	12,000	180	12,000	190	12,000	180	12,000	915	60,000	
		Pelaksanaan Perijinan Usaha Ketenagalistrikan	0	Izin					2	12,000	2	12,000	2	12,000	6	36,000	
2.03.01. 18	Program Pemetaan Wilayah Pertambangan	cakupan wilayah pertambangan yang terpetakan	35	%	45	365,000	55	365,000	65	380,000	70	275,000	75	275,000	75	1,660,000	ESDM
		Jumlah Bahan Galian	7	Bahan Galian	2	100,000	2	100,000	2	100,000	1	75,000	1	75,000	15	450,000	
		Jumlah Potensi Tambang	2	Potensi Tambang	2	250,000	2	250,000	2	250,000	1	150,000	1	150,000	10	1,050,000	
		Jumlah IUP Eksplorasi	7	IUP	1	15,000	1	15,000	2	30,000	3	50,000	3	50,000	17	160,000	
2.03.01. 19	Program pemetaan dan inventarisasi Geologi dan SDM	Penyediaan data dan peta geologi dan SDM	45	%	50	215,000	55	295,000	60	295,000	65	495,000	70	595,000	75	1,895,000	ESDM
		Penyediaan data dan peta potensi geologi dan SDM	1	Kec	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	2	200,000	7	600,000	
		Penyediaan data pemakai air tanah secara komersial	25	Wjb pjk	50	65,000	50	65,000	50	65,000	50	65,000	50	65,000	250	325,000	
		Peningkatan PAD sektor pajak air tanah	0	%	50	50,000	60	50,000	80	50,000	20	50,000	100	50,000	310	250,000	
		Penyediaan data dan peta daerah potensi air tanah dan zonasi air tanah 11 Kecamatan	0	Kec			1	80,000	1	80,000	1	80,000	1	80,000	4	320,000	
		Penyediaan data dan peta potensi rawan bencana	0	Kec							1	200,000	1	200,000	2	400,000	
2.03.01. 20	Program pengelolaan dan pengendalian usaha pertambangan	Cakupan Pengelolaan dan pengendalian Usaha Pertambangan	50	%	55	136,891	60	105,545	65	644,395	70	141,000	75	225,000	25	1,252,831	ESDM
		Jumlah pengawasan produksi dan iuran tetap serta royalti tetap pemilik IUP operasi produksi Batubara	12	IUP	5	119,686	6	74,745	17	68,830	20	70,000	20	80,000	68	413,261	
		Jumlah pengawasan teknis pertambangan dan K3 nya terhadap pemilik IUP ekplorasi, Operasi produksi	20	IUP	12	17,205	16	18,350	17	21,150	20	25,000	22	30,000	87	111,705	
		Jumlah pengawasan kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh pemilik IUP Operasi Produksi Batubara dan Biji Besi	0	IUP							4	20,000	4	30,000	8	50,000	
		Jumlah Monitoring IUP	0	IUP					4	38,340	5	5,000	6	60,000	15	103,340	
		Jumlah Izin Baru Yang di Terbitkan	0	Izin			10	12,450	10	516,075	15	21,000	15	25,000	50.00	574,525	
2.03.01. 21	Program Pemanfaatan dan Pengembangan Migas	Cakupan Sosialisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pendistribusian Minyak dan Gas Bumi	0	%	16	12,000	32	12,000	32	40,518	44	40,518	60	40,518	60	145,553	ESDM
		Cakupan Pemantauan Pelaksanaan Pendistribusian Minyak dan Gas Bumi															
		a. SPBU	5	Unit	1	12,000	1	12,000	1	12,000	1	12,000	1	12,000	5	60,000	
		b. Pangkalan Minyak Tanah	37	Unit	5	0	5	0	5	0	10	0	10	0	35	0	
		c. Depot Gas	1	Unit	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0	
		Cakupan Sosialisasi dengan pelaku usaha BBM, LPG dan bahan pelumas dan masyarakat	0	Kecamatan	0	0	2	0	2	28,518	2	28,518	3	28,518	9	85,553	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)			
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
2 04	PARIWISATA															
1.07.02. 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	event pariwisata nasional/nusantara	1	Event/Th	1		2	193,603	3	145,200	3	159,720	3	175,692		DisHub
		pariwisata Internasional	0	Event/Th	0				1		1		1			
		jumlah media Promosi pariwisata yang dimanfaatkan	0	Jenis	9	78,523			2	10,000	2	11,000	2	12,100		
		Pemilihan Uni Uda Duta Wisata Tingkat Kab. Dharmasraya	0	kegiatan	1	96,915	1	143,945	1	114,988	1	126,486	1	139,135		
		Dukungan Event Kab. Dalam kegiatan promosi daerah	0	event	0		0		7	163,888	7	180,277	7	198,304		
		event <i>Buru babi</i>							1	12,165		0		0		
		event <i>offroad</i>							1	40,804		0		0		
		event <i>reog & kuda kepang</i>							1	42,278		0		0		
		event <i>adventure motor</i>							1	40,704		0		0		
		event <i>pacu jalur</i>							1	23,965		0		0		
		event <i>festival randai</i>							1	3,819		0		0		
		event <i>tour d singkarak</i>							1	154		0		0		
1.07.02. 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	dokumen RIPPDA/ RIPPARDA Dharmasraya yang disusun	0	Dokumen	1	382,670	1		3	0	0	0	0	0		DisHub
		dokumen perencanaan teknis pengembangan objek wisata yang	0	Dokumen	0				3	142,910	3	157,201	3	172,921		
		Objek Wisata unggulan/rintisn nagari wisata yang dikembangkan	0	objek	3	0	3		1	83,850	3	276,705	3	304,376		
		sarana dan prasarana penunjang		Paket	0	0	5		5		5		5			
		jumlah jenis dan paket wisata unggulan yang	0	Jenis/Paket	5	0	5		5		5		5			
1.07.02. 17	Program Pengembangan Kemitraan	jumlah SDM (pramusaji dan pemandu wisata) yang dilatih	0	orang	0	0	100	42,162			40		0			DisHub
		jumlah kegiatan pembangunan pariwisata yang dimitarakan/dikoordinasikan	0	Paket	0	0	1		1		1		1			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)			
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
2 05	KELAUTAN DAN PERIKANAN															
2.05.03.	Program Pengembangan Budidaya Air Tawar	Peningkatan Produksi ikan Konsumsi	1,524	Ton	5,355		11,348									
		Peningkatan luas kolam	98	Ha	16	672,000	24	995,400	26	1,073,520	36	1,491,000	23	981,540	187	5,213,460
		Budidaya lele kolam Terpal	2	Unit	2	40,000	15	300,000	50	1,000,000	10	200,000	20	400,000	99	1,940,000
		Budidaya ikan Jaring apung	6	Unit	1	200,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	2	200,000	12	1,000,000
2.05.03.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Peningkatan Produksi Benih Ikan	100,000	Ekor	500rb		650,000		1,5juta		1,7juta		2 juta		2juta	
		Peningkatan sarana balai benih ikan Tarantang	1	Paket	1	800,000	2	750,000	3	600,000	4	580,000	5	700,000	5	3,430,000
		Peningkatan Sarana Produksi UPR	11	Paket	0	0	0	0	4	176,000	2	88,000	2	88,000	19	352,000
		Pembangunan Unit Pelayanan Perikanan	0	Paket	0	0	0	0	1	230,000	0	0	0	0	1	230,000
2.05.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian Sumberdaya Perikanan	Pelestarian sumberdaya perairan														
		Peningkatan teknologi penangkapan ikan	0	Paket	1	45,000	1	45,000	1	45,000	1	45,000	1	45,000	5	0
		- Berkurangnya penangkapan secara ilegal	50	Kasus	40		30		20		10		0		0	
		Terpeliharanya kelestarian perairan umum	44	Paket	9	90,000	5	50,000	4	40,000	5	50,000	5	50,000	72	280,000
		Pembangunan KKP Adat	1	Paket	1	1,300,000	2	260,000	2	260,000	2	260,000	2	260,000	10	2,340,000
		Budidaya ikan saluran Irigasi	1	Paket	4	105,000	0	0	0	0	0	0	0		5	105,000
2.05.03.	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Pengadaan peralatan pengolahan hasil produk perikanan	0	Pkt	1	165,000	2	220,000	2	220,000	3	305,000	3	305,000	11	1,215,000
		Pembangunan etalase hasil produk perikanan	0	Unit	0		1	232,000	2	464,000	1	240,000	1	245,000	5	1,181,000
		Pembangunan bangsal pengolahan hasil perikanan	0	Unit	0		1	198,000	2	396,000	2	396,000	1	200,000	6	1,190,000
		Pembangunan dan rehabilitasi pasar ikan higienis	0	Unit	2	655,000	2	655,000	2	120,000	1	201,000	3	294,000	10	1,925,000
		Pengadaan sarana pemasaran produk perikanan berjalan	0	Unit	1	300,000	3	70,000	3	340,000	3	70,000	5	120,000	15	900,000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			Target
2 06	PERDAGANGAN																
1.15.01. 18	Program Peningkatan efisiensi dan daya saing perdagangan pada internal wilayah maupun pada eksternal wilayah	Tingkat efisiensi barang beredar dan daya saing perdagangan															Kopperindag
		Cakupan barang yang mempunyai nilai terjamin	4	kec	4		4		23,882	11	50,000	11	55,000	11			
		Cakupan distributor pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK	11	kec	11		11		0	11	25,000	11	30,000	11			
		Cakupan pasar yang harga sembako dan barang strategis lainnya yang terkendali	4	kec	4		11		14,092	11	27,000	11	30,000	11			
		CAkupan penerimaan dari retribusi pasar	32 pasar nagari dan serikat	%	0		100		87,000	100	87,000	100	90,000	100			
		Cakupan promosi produk daerah	4 kegiatan diluar propinsi dan 2 dalam propinsi	keg	2		2		147,469	6	450,000	6	500,000	18			
		Cakupan informasi sarana distribusi perdagangan	32 pasar nagari dan serikat	kec	0	0	0	4	56,000	7	70,000	11	80,000	11	206,000		
		Cakupan masyarakat tidak mampu yang kebutuhan sembakonya dapat terpenuhi	11	kec	0	0	0	5	62,787	2	220,000	3	450,000	10	732,787		
1.20.03.		Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat			5%	260,000	5%	260,000	5%	260,000	5%	260,000	5%	260,000	25%	1,300,000	Setda - Bag. Adm Ekbang
		Pameran	2	Kali	2	250,000	2	250,000	2	250,000	2	250,000	2	250,000	10	1,250,000	
		Rapat Ekonomi	10	Kali	10	10,000	10	10,000	10	10,000	10	10,000	10	10,000	50	50,000	
1.15.01. 26	Program Pengembangan komoditi perdagangan yang berbasis knowledge based product	Jumlah petani dan pedagang komoditi coklat	0	org	0	0	0	0	0	0	0	20	25,000	20	25,000		Kopperindag
1.15.01. 27	Program Peningkatan sarana dan prasarana pasar	Jumlah kios dan los pasar yang permanen	6	psr	6	1,001,906	7	1,261,126	7	2,159,312	7	2,550,000	7	3,500,000	34	10,472,343	Kopperindag
1.15.01. 28	Program Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) pelaku usaha perdagangan dan aparat pemerintah	PKL yang tertib				0		0	0		0		0		0		Kopperindag
29	Program Peningkatan dan pengembangan ekspor daerah	Cakupan PKL yang tertib	1	kec	4		0	0	4	18,997	4	22,000	4	30,000	4		Kopperindag
1.15.01. 30	Program Peningkatan dan pengembangan ekspor daerah															0	Kopperindag
1.15.01. 31	Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi															0	Kopperindag
1.15.01. 32	Program peningkatan kompetensi SDM UMKM dan aparat Pembina UMKM	Pelaku UMKM terlatih	0	UMKM								30	75,000	40	75,000		Kopperindag
1.15.01. 33	Program peningkatan Peranan Koperasi dalam perekonomian daerah	Koperasi berbasis komoditi	0	koperasi								1	30,000	1	30,000		Kopperindag
1.15.01. 34	Program peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro	UMKM tertib manajemen	0	UMKM								30	75,000	40	75,000		Kopperindag

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
					(2011)		(2012)		(2013)		(2014)		(2015)				
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		Target	Rp (000)
2 07	PERINDUSTRIAN																
1.15.01. 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Pelaku Usaha Kerajinan						15	30,000			0	15	40,000	30	70,000	Kopperindag
		Jumlah pelaku usaha kerajinan													15	101,190	
		Jumlah pengrajin batik tanah liat															
1.15.01. 19	Program Pengembangan sentra industri potensial	Jumlah sentra industri potensial														0	Kopperindag
		Jumlah IKM cenderamata	0	IKM	15	20,000				15	50,000			15	50,000		
		Cakupan kawasan sentra industri	0	unit/thn	0				2	85,000			1	60,000	3	145,000	
1.15.01. 20	Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Agro dan Manufaktur																Kopperindag
1.15.01. 21	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Pelaku IKM yang menggunakan teknologi tepat guna															Kopperindag
		Cakupan Nilai tambah produk industri		IKM	20	25,000	15	45,000	15	30,000	15	50,000	0	0	65	150,000	
		Jumlah bantuan mesin peralatan		bh					20	30,000	0	0	25	40,000	45	70,000	
		Jumlah IKM berbasis teknologi		IKM	25	85,000				25	90,000	30	80,000	55	170,000		
		Jumlah IKM yang menggunakan teknologi tepat guna		IKM			25	90,000				20	40,000	45	130,000		
1.15.01. 22	Program Pengembangan klaster industri unggulan	Pelaku IKM industri Unggulan				0		0									Kopperindag
		Jumlah IKM yang mendapatkan	0	IKM	50	70,000	0	0						50	70,000		
		Cakupan Perluasan pasar produk IKM	0	IKM	15	20,000	25	60,000	25	60,000	15	30,000	20	50,000	85	200,000	
1.15.01. 23	Program Peningkatan Iklim Usaha Industri	Tingkat usaha produk IKM															Kopperindag
		Jumlah Data base industri IKM dan besar	10	bh	1	22,000	1	25,000	1	25,000	1	50,000	1	55,000	5	177,000	
		cakupan promosi produk daerah	0	keg					2	200,000	5	225,000	6	250,000	13	675,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun-1 (2011)		Tahun-2 (2012)		Tahun-3 (2013)		Tahun-4 (2014)		Tahun-5 (2015)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		Target	Rp (000)
2 08	KETRANSMIGRASIAN																
1.13.02. 15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Terlaksananya Penempatan 1.318 KK Transmigran dan Terbangunnya 1 Kawasan KTM.	1 UPT/265 KK/ 1 KTM	UPT/KK/ KTM	1	175,805	2	740,567	3	1,162,500	3	1,280,000	3	1,580,500	3	4,939,372	Sosnakertrans
		Kawasan Pengembangan Transmigrasi	1 Kawasan	Kawasan	1		1		1		1		1		2		
		Jumlah Penempatan Transmigran	265 KK	KK/Th	265 KK		409 KK		817 KK		1.017 KK		1.118 KK		1.383 KK		
		Jumlah UPT Binaan	1 UPT	UPT/Th	1 UPT		2 UPT		2 UPT		3 UPT		4 UPT		4 UPT		
		Jumlah KK Transmigrasi yang dibina	265 KK	KK/Th	265 KK		409 KK		817 KK		1.017 KK		1.118 KK		1.383 KK		



BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu indikator capaian kinerja program atau lebih dari satu indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah yang bersangkutan.

Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Dharmasraya dijabarkan berdasarkan aspek dan fokus (seperti dalam Bab II). Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 9.1.

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya

Indikator	PROYEKSI				
	2011	2012	2013	2014	2015
A. PERTUMBUHAN EKONOMI	6,93	7,06	7,19	7,23	7,45
1. Pertanian	6,43	6,50	6,82	7,04	7,21
2. Industri Pengolahan	7,49	7,59	7,92	7,97	8,27
B. STRUKTUR EKONOMI (%)					
1. Pertanian	33.67	33.49	33.37	33.31	33.24
2. Industri Pengolahan	6.99	7.06	7.42	8.17	8.86
3. PDRB (Rp milyar)	1,233,765.67	1,320,919.16	1,415,926.17	1,518,357.29	1,631,497.15
4. PDRB/Kapita (Rpjuta)	6.31	6.60	6.90	7.23	7.58
C. SOSIAL					
1. Penduduk (jiwa)	195.492	200.233	205.078	210.041	215.124
2. Penduduk Miskin (%)	10.51	10.23	9.95	9.69	9.44

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2010



BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAJDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya 2010-2015 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program aksi pembangunan daerah dari Bupati hasil Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung pada 30 Juni tahun 2010. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

10.1. KAJDAH PELAKSANAAN

10.1.1 Konsistensi RPJMD dengan RKPD dan Renstra SKPD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 – 2015 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya (RKPD) setiap tahunnya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyusun rencana strategis (Renstra SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Renstra SKPD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2015.

10.1.2 Penguatan Peran para stakeholders / pelaku dalam pelaksanaan RPJM Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dharmasraya Tahun 2010 – 2015 secara terpadu dengan sebaik-baiknya.

10.1.3 Dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 – 2015, Badan Perencanaan Pembangunan



Daerah dan seluruh SKPD terkait berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 – 2015.

10.2 PERENCANAAN PROGRAM TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2010 (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 serta dengan mengingat waktu yang sempit bagi Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Tahun 2010 untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010 berpedoman kepada RPJMD 2006-2010 dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2010 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam 2010.

Selanjutnya Bupati Terpilih tetap mempunyai ruang gerak untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2010 yang sudah disusun untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik sesuai dengan RPJMD Dharmasraya 2010-2015.

BUPATI DHARMASRAYA,

Ir. H. ADI GUNAWAN, MM